DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL i
DAFTAR GAMBAR i
DAFTAR GRAFIK i
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
A. DASAR HUKUM 2
B. VISI DAN MISI 4
1. VISI 4
2. MISI 5
C. TUJUAN DAN SASARAN 6
1. Tujuan 6
2. Sasaran 7
D. DATA UMUM 11
1. Kondisi Geografis 11
2. Kondisi Topografi 14
3. Kondisi Geologi 14
4. Kondisi Klimatologi 15
5. Kondisi Demografi 16
6. Potensi Ekonomi Daerah 20
7. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Daerah 26
BAB II 31
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 31
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 35
1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah 35
2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 36
3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 40
4. Permasalahan dan Solusi 46
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 47
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah 47

2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah 49
3. Permasalahan dan Solusi 54
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 56
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 56
2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 56
3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 57
BAB III 59
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 59
A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60
1. PENDIDIKAN 60
2. KESEHATAN 86
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 120
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 135
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 140
a. Program dan Kegiatan 140
6. SOSIAL 145
B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 168
1. TENAGA KERJA 168
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 197
3. PANGAN 203
4. PERTANAHAN 209
5. LINGKUNGAN HIDUP 214
6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 228
7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 235
8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 251
9. PERHUBUNGAN 292
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 304
11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 332
12. PENANAMAN MODAL 359
13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 385
14. STATISTIK 408
15. PERSANDIAN 409
16. KEBUDAYAAN 418

17. PERPUSTAKAAN 425
18. KEARSIPAN 434
19. KELAUTAN DAN PERIKANAN 440
20. PARIWISATA 444
21. PERTANIAN 452
22. KEHUTANAN 472
23. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 473
24. PERDAGANGAN 474
Sumber: Diperpautkan, 2019 483
25. PERINDUSTRIAN 484
26. TRANSMIGRASI 492
C. FUNGSI PENUNJANG 496
27. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 496
28. KEUANGAN 508
29. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 535
30. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 543
31. PENGAWASAN (SAMPAI SINI) 547
32. PEMERINTAHAN UMUM 552
D. TINDAK LANJUT CATATAN STRATEGIS DPRD TAHUN 2018 598
E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 637
BAB IV 644
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 644
A. TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA YANG DITERIMA 644
1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat 644
2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan 644
3. Permasalahan dan Solusi 648
B. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 648
1. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota 648
2. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten (BKK) 648
3. Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Fakir Miskin (Dinas Sosial P3A)649
4. Jambanisasi (Dinas Kesehatan) 649

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul 8
Tabel 1.2 Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah..... 10
Tabel 1.3 Penggunaan Lahan Tahun 2019 (Ha)..... 13
Tabel 1.4 Keberadaan Stasiun Pencatat Hujan Tahun 2019..... 15
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019..... 16
Tabel 1. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2019..... 18
Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2019..... 19
Tabel 1.8 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, PadiLadang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai 20
Tabel 1.9 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)..... 22
Tabel 1.10 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan 22
Tabel 1.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Produksi Perikanan Budidaya 23
Tabel 1.12 Data Event Tahun 2019 23
Tabel 1.13 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2019..... 24
Tabel 1.14 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2019..... 25
Tabel 1.15 Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 & 2019 25
Tabel 1.16 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan 26
Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019..... 26
Tabel 1.18 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2019 27
Tabel 1.19 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 28
Tabel 1.20 Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2019..... 29

Tabel 2.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 42
Tabel 2.2 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Pendapatan Daerah 46
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019 50
Tabel 2.4 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah 54
Tabel 2.5 Target dan Realisasi Pembiayaan DaerahTahun 2019 58

Tabel 3.1 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2019 73
Tabel 3.2 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2019 76
Tabel 3.3 Data Program Kesetaraan Tahun 2019 77
Tabel 3.4 Hasil Ujian Nasional Program Kesehatan Tahun 2019 77

Tabel 3.5 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan 85
Tabel 3.6 Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm) Tahun 2019 91
Tabel 3.7 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2019 97
Tabel 3.8 Permasalahan dan Solusi Dalam Urusan Kesehatan 117
Tabel 3.9 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016 – 2019 123
Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Jasa Konstruksi 133
Tabel 3.11 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Perumahan 139
Tabel 3.12 Organisasi Sosial Berprestasi 162
Tabel 3.13 Hasil Evaluasi TKSK tahun 2019 162
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi PSM 2019 Tk. Kab. Bantul 163
Tabel 3.15 Rincian Pengembalian Anggaran 164
Tabel 3.16 Hasil evaluasi Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2019 165
Tabel 3.17 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial 167
Tabel 3.18 Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan 171
Tabel 3.19 Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja 173
Tabel 3.20 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit 174
Tabel 3.21 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Mekanik 174
Tabel 3.22 Pelaksanaan Pelatihan Teknisi 175
Tabel 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meubelair 176
Tabel 3.24 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Juru Las 176
Tabel 3.25 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Softwere 177
Tabel 3.26 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga 177
Tabel 3.27 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Batik Tulis 178
Tabel 3.28 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris 179
Tabel 3.29 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan 180
Tabel 3.30 Tabel Sosialisasi dan Workshop Pencegahan perselisihan Dalam Kegiatan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 181
Tabel 3.31 Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 183
Tabel 3.32 Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan 184
Tabel 3.33 Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 186
Tabel 3.34 Pemberdayaan Bipartit di Perusahaan 187
Tabel 3.35 Realisasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan Penyelesaian 188
Tabel 3.36 Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 189
Tabel 3.37 Pendampingan SP/SB 190
Tabel 3.38 Realisasi Penempatan Melalui AKL, AKAD, dan AKAN 192

Tabel 3.39 Kegiatan TerapanTeknologi Tepat Guna 193
Tabel 3.40 Pemanduan Dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik Dan Mandiri 195
Tabel 3.41 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Tenaga Kerja 196
Tabel 3. 42 Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Bantul 199
Tabel 3. 43 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 202
Tabel 3. 44 KWT yang diberikan kegiatan Pengembangan SDM KWT 204
Tabel 3. 45 Materi Pelatihan Olahan Pangan Lokal 205
Tabel 3. 46 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 206
Tabel 3. 47 Ketersediaan Energi, Protein & Lemak Berdasarkan Jenis Bahan Makanan 207
Tabel 3. 48 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pangan 208
Tabel 3. 49 Tabel Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan 213
Tabel 3. 50 Tabel Permasalahan Dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup 227
Tabel 3. 51 Permasalahan Dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 234
Tabel 3. 52 Kegiatan orientasi bagi keluarga miskin dan PMKS 246
Tabel 3. 53 Tabel Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 249
Tabel 3. 54 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Keterampilan 278
Tabel 3. 55 Pelaksanaan Pembinaan P2W-KSS 279
Tabel 3. 56 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 280
Tabel 3. 57 Bimtek Pengelola PMT-AS TK 282
Tabel 3. 58 Evaluasi Pelaksana Terbaik PMT-AS TK 283
Tabel 3. 59 Sasaran Program PMT Kabupaten Bantul 287
Tabel 3. 60 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS TK 288
Tabel 3. 61 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS PAUD 289
Tabel 3. 62 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS POSYANDU 289
Tabel 3. 63 Tabel Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 290
Tabel 3. 64 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 301
Tabel 3. 65 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perhubungan 303
Tabel 3. 66 Hasil Evaluasi Tahap II Tahun 2019 Kabupaten Bantul 304
Tabel 3. 67 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Komunikasi dan Informatika 330
Tabel 3. 68 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah dan Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Tahun Tutup Buku 2019 334
Tabel 3. 69 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2019 348
Tabel 3. 70 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2019 349
Tabel 3. 71 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2019 349

Tabel 3. 72 Data Penerbitan IUMKTahun 2015-2019 350
Tabel 3. 73 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2019 350
Tabel 3. 74 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2019 358
Tabel 3. 75 Data Pengaduan tahun 2019 377
Tabel 3. 76 Data Capaian Target Tahun 2015 – 2019 382
Tabel 3. 77 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 384
Tabel 3. 78 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal 384
Tabel 3. 79 Prestasi POPDA DIY 403
Tabel 3. 80 Prestasi POSPEDA DIY Cabang Olahraga 403
Tabel 3. 81 Prestasi POSPEDA DIY Cabang Seni : 404
Tabel 3. 82 Prestasi PEPARPEDA 404
Tabel 3. 83 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 406
Tabel 3. 84 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Persandian 417
Tabel 3. 85 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019 423
Tabel 3. 86 Jumlah Perpustakaan 425
Tabel 3. 87 Jumlah Pojok Baca 425
Tabel 3. 88 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan 426
Tabel 3. 89 Jumlah Pengunjung Menurut Usia 426
Tabel 3. 90 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi 428
Tabel 3. 91 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perpustakaan 432
Tabel 3. 92 Data Hasil Pengawasan Kearsipan 436
Tabel 3. 93 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kearsipan 439
Tabel 3.94 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan 443
Tabel 3.95 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2019 445
Tabel 3.96 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pariwisata 451
Tabel 3.97 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi 454
Tabel 3.98 Produksi Benih Padi Tahun 2019 455
Tabel 3.99 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Bawang Merah,Cabai Merah,dan PisangTahun 2018-2019 459
Tabel 3.100 Laporan PAD Penetasan Ayam Buras 466
Tabel 3.101 Pembangunan Jaringan Irigasi (PIK) 470
Tabel 3.102 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK) 470
Tabel 3.103 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (SILPA DAK) 471
Tabel 3.104 Pembangunan DAM Parit (SILPA DAK) 471
Tabel 3.105 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanian 472
Tabel 3.106 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 473
Tabel 3.107 Permasalahan dan Solusi 482
Tabel 3.108 Realisasi Anggaran Pada Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 488

Tabel 3.109 Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perindustrian 491
Tabel 3.110 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Transmigrasi 495
Tabel 3.111 Permasalahan Dan Solusi Urusan Perencanaan 507
Tabel 3.112 Pelayanan Pajak DaerahTahun 2019 522
Tabel 3.113 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Keuangan 532
Tabel 3.114 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Kepegawaian 542
Tabel 3.115 Permasalahan Dan Solusi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 546
Tabel 3.116 Permasalahan dan solusi 551
Tabel 3. 117 Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum 563
Tabel 3. 118 Permasalahan dan Solusi 566
Tabel 3. 119 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Fungsi Penunjang 593
Tabel 3.120 Tindak Lanjut Catatan Strategis DPRD Tahun 2018 598
Tabel 3.121 Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan 648

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Deklarasi Penangulangan Stunting di Kabupaten Bantul tahun 2019 99
Gambar 3. 2 Penghargaan Kabupaten Sehat 2019 101
Gambar 3. 3 Penghargaan Gold Award untuk kategori SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) 111
Gambar 3. 4 Pick Up Operasional Sampah 216
Gambar 3.5 Gerobak Sampah 216
Gambar 3. 6 Rumah Pilah Sampah Tipe C 217
Gambar 3. 7 Sosialisasi Lapor Bantul 315
Gambar 3. 8 Workshop Quickwin Bantul Smart City 316
Gambar 3. 9 Sosialisasi Satu Data Indonesia 318
Gambar 3. 10 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 321
Gambar 3. 11 Gambar. Penyerahan penghargaan PPID Award 321
Gambar 3. 12 Kunjungan KIM Kabupaten Bantul ke Diskominfo kab. Banyumas 324
Gambar 3. 13 Rekaman Taman Paseban di Studio TVRI Stasiun Yogyakarta . 326
Gambar 3. 14 Siaran Langsung Wedang Ronde 326
Gambar 3. 15 Dialog Generasi Muda 328
Gambar 3. 16 Liputan dinamika pembangunan desa 329
Gambar 3. 17 Penyerahan hadiah Koperasi Berprestasi 334
Gambar 3. 18 Praktek Lapangan Peserta Pelatihan Bai Pengawas ke KSPPS BMT UGT Sidogiri 337
Gambar 3. 19 Diklat Kompetensi Juru Buku DAK, 15 – 17 Oktober 2019 338
Gambar 3. 20 Diklat Pengawasan Koperasi DAK, 1 – 5 Mei 2019 338
Gambar 3. 21 Pelatihan Design Fashion, 17-21 Juni 2019 339
Gambar 3. 22 Pelatihan Make-Up Artis dan Hair Do, 17 – 21 Juni 2019 339
Gambar 3. 23 Pameran Harkopnas Expo 2019, GOR Satria Purwokerto, 11 – 14 Juli 2019 340
Gambar 3. 24 Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi, 20 s/d 21 Agustus 2019 341
Gambar 3. 25 Workshop Pengembangan Koperasi, 26 Februari 2019 341
Gambar 3. 26 Bimtek Pengurus Koperasi terkait Pengentasan Kemiskinan, 11 s/d 12 Maret 2019 (KPRI ADIL dan Aula Dekopinda) 342
Gambar 3. 27 Monev Pengentasan Kemiskinan, 20 Nov 2019 343
Gambar 3. 28 Coffe Morning Temu Mitra Koperasi, 14 November 2019 344
Gambar 3. 29 Tangkas Terampil Perkoperasian, 11 s/d 12 April 2019 345
Gambar 3. 30 Sarasehan dalam rangka Hari Koperasi ke 72, 17 Juni 2019 345
Gambar 3. 31 Pelatihan bagi Anggota Dekopinda, 1 - 3 Juli 2019 346
Gambar 3. 32 Upacara Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Bantul ke 72 Tahun 2019 346

Gambar 3. 33 Pelatihan menjahit 352
Gambar 3. 34 Pelatihan Merajut 353
Gambar 3. 35 Pameran Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL JEC Yogyakarta 354
Gambar 3. 36 Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL Expo 2019 354
Gambar 3. 37 Workshop Kemitraan 2019 356
Gambar 3. 38 Pasar Rakyat 2019 356
Gambar 3. 39 Launching Panggilan Darurat 112 413
Gambar 3. 40 Obyek Wisata Watu Mabur 444
Gambar 3. 41 Gerakan Panen Padi di Kecamatan Sedayu 458
Gambar 3. 42 Pameran Inacraft, Jakarta Convention Center 487
Gambar 3. 43 Pameran Intradex Expo, Mal Panakukkang Makassar Sulawesi Selatan 488
Gambar 3. 44 audit manajemen mutu atau ISO 9001 2015 506
Gambar 3. 45 Juara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 507
Gambar 3. 46 Penandatangan PKS 515
Gambar 3. 47 Aplikasi DTH 517
Gambar 3. 48 Sosialisasi Pajak Daerah 519
Gambar 3. 49 Sosialisasi PPh OP (PPh Pasal 21) 521
Gambar 3. 50 Pajak Bantul Award 2019 524
Gambar 3. 51 Penyerahan SPPT PBB P2 2019 526
Gambar 3. 52 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 527
Gambar 3. 53 Launching SIDAT KEUDA 530
Gambar 3. 54 Penerimaan penghargaan Satya Lancana 539
Gambar 3. 55 Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) 541
Gambar 3. 56 Penghargaan TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 578
Gambar 3. 57 Penyerahan Piagam TOP 45 KIPP Nasional Tahun 2019 579

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Susunan Struktur Geologi 15
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin..... 17
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan..... 17
Grafik 1.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018 28

Grafik 3. 1 Capaian DB4MK di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019..... 98
Grafik 3. 2 Angka IR DBD dan CFR DBD Tahun 2016-2019..... 104
Grafik 3. 3 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB 105
Grafik 3. 4 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul 107
Grafik 3. 5 Prevalensi HIV di Kabupaten Bantul..... 108
Grafik 3. 6 Cakupan Pelayanan PSC 119 110
Grafik 3. 7 Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bantul dan DIY..... 114
Grafik 3. 8 Capaian Angka Kematian Ibu dan Target Renstra..... 116
Grafik 3. 9 Tanah Desa Berdasar Jenis Tanah 210
Grafik 3. 10 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Penggunaannya..... 211
Grafik 3. 11 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Tanah 211
Grafik 3. 12 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Dan Kepemilikan 212
Grafik 3. 13 Tren Kualitas Air Sungai..... 222
Grafik 3. 14 Tren Kualitas Udara 222
Grafik 3. 15 Tren Tutupan Lahan Di Kabupaten Bantul..... 224
Grafik 3. 16 Perkembangan Nilai SKM 577

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/028/DPA/PPKD/2020 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2. MISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;

c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana;

e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;

b. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;

c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

d. Memenuhi kriteria SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time-based).*

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran:

a. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;

b. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;

c. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;

d. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator

kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

e. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, dan RPJMD Propinsi.

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi
					Gini Ratio
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif
				Terpenuhinya kebutuhan	Pertumbuhan produksi

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
				pangan masyarakat	tanaman pangan
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
					Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda , unggas)
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sumber: RPJMD Tahun 2016-2021

Sementara itu, enam indikator target dari dampak pencapaian sasaran secara agregat dari semua misi dalam mencapai visi jangka menengah atau sering disebut dengan sasaran utama disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.2 Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifi kasi	7,45 (Baik)	75 (Baik)	70 (Baik)	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,47	73,3	73,60	73,65	73,70
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	14,73	15,4	15,23	15,38	15,54
4	Angka Kemiskinan	Persen	14,55	14,07	12,13	10,86	9,59	8,32
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06	5,1	5,4	5,45	5,5	5,6
6	Gini Ratio	Angka	0,3967	0,41	0,3093	0,39	0,38	0,37
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	12,03	21,59	7	22	23	24
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	39	41,11	35	45	47	50
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	9,94	0,1133	0,1015	0,1020	0,1025	0,1030
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	14,09	7,94	1,05	1,08	1,10	1,125
11	Pertumbuhan produksi	Persen	7,8	0,17	0,20	0,25	0,30	0,35

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	tanaman perkebunan							
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	4,24	20,52	0,70	0,80	0,90	1,00
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0,35	5,92	1,35	1,40	1,45	1,50
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	N/A	71,57	74	76	78	80
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	31,35	45,1	50	56	63	72
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	15	29,33	25,34	38,66	45,33	52
17	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70	70,24	70,35	72,5	75	80
18	Angka Kriminalitas	Persen	0,061	0,074	0,035	0,070	0,065	0,06
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,8	57,01	60	75	80	85

Sumber: RPJMD Tahun 2016-2021

D. DATA UMUM

1. Kondisi Geografis

Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14º04'50" 27º50'50" Lintang Selatan dan 110º10'41"-110º34'40" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bantul :

sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul sebelah Timur,

sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat

sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43 pedukuhan.

Tabel 1.3 Penggunaan Lahan Tahun 2019 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)										
		Kampung	Sawah	Tegal	Kebun	Hutan		Tanah	Wadduk	Tambak	Lainnya	Total
					Campur	Rakyat		Tandus				
1	Bambanglipuro	186.74	115,176		81,900						11250	227,000
2	Banguntapan	461.49	128621	6.53	65,303						44075	284800
3	Bantul	192.38	119402	2.00	68,484						12176	219500
4	Dlingo	114.69	25,831	170,543	168,125		97,673				85059	558700
5	Imogiri	240.40	91323	212,798	134,780		2,490	2,300			77169	544900
6	Jetis	422.83	136719	10452	51,300						39474	244700
7	Kasihan	585.04	81799	10,558	156,345						16594	323800
8	Kretek	41.97	94356	20,934	46,942			30,200			71071	267700
9	Pajangan	129.96	27228	42,413	228,594						21268	332500
10	Pandak	99.01	97322	4,400	106,146						25231	243000
11	Piyungan	358.93	129618	53,564	71,614		1,540				33171	325400
12	Pleret	240.17	70701	57,205	35,599		6,273				35905	229700
13	Pundong	89.53	86634	45,598	73,350						22265	236800
14	Sanden	57.23	82,839	9,269	89,600		3,031	11,900			29,238	231600
15	Sedayu	304.87	95950	6,871	182,498						27,794	343600
16	Sewon	513.28	137067	195	64,196						18,814	271600
17	Srandakan	77.12	47,816	2,689	69,400	-	2,612	9,900		3,000	40071	183200
		4,115.64	1,568,402	648342	1,694,176		113,619	54,300		3,000	575098	5068500
	Persentase (%)											100

2. Kondisi Topografi

Topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah).
b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %).
c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%).
d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan struktur Geologi, luas tanah di Kabupaten Bantul sebagian besar adalah Jenis Regosol. Jenis tanah di Kabupaten Bantul berdasarkan Struktur Geologi, terdapat beberapa susunan struktur geologi sebagai berikut:

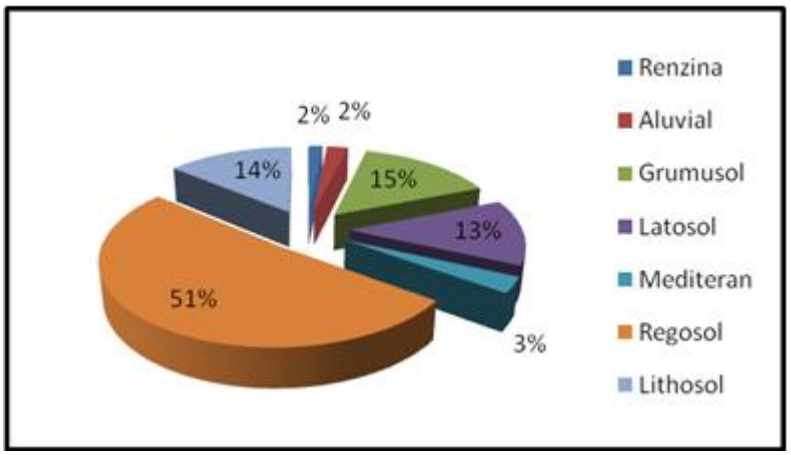

Sumber : DPUPKP, 2019

Grafik 1.1 Susunan Struktur Geologi

4. Kondisi Klimatologi

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim hujan di Bantul dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Bantul adalah 90,76 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius.

Tabel 1.4 Keberadaan Stasiun Pencatat Hujan Tahun 2019

No.	Stasiun	Lokasi
1	Ringinharjo	Ringinharjo, Kasihan (Dinas PUPKP)
2	Nyemengan	Dusun Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan
3	Gandok	Dusun Gandok Jl. Imogiri Barat Km 5
4	Kotagede	Jalan Wonosari Km 3
5	Pundong	Depan Kantor UPT Pengamatan Opak Hilir
6	Barongan	Dusun Barongan, Sumberagung, Jetis
7	Ngetal	Dusun Ngetal, Karangtalun, Imogiri
8	Gedongan	Dusun Gedongan, Caturharjo, Pandak
9	Piyungan	Piyungan
10	Sedayu	Desa Argodadi, Sedayu
11	Ngestiharjo	Desa Ngestiharjo, Kasihan
12	Dlingo	Dlingo

Sumber: DPUPKP, 2019

5. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2019 sebanyak 949.325 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 472.916 jiwa dan Perempuan 476.409 jiwa.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SRANDAKAN	15.505	15.713	31.218
2	SANDEN	15.763	16.209	31.972
3	KRETEK	15.101	15.762	30.863
4	PUNDONG	17.658	18.250	35.908
5	BAMBANGLIPURO	20.673	21.207	41.880
6	PANDAK	26.112	25.901	52.013
7	PAJANGAN	18.000	18.040	36.040
8	BANTUL	31.988	32.377	64.365
9	JETIS	29.111	29.438	58.549
10	IMOGIRI	31.583	31.959	63.542
11	DLINGO	19.649	19.888	39.537
12	BANGUNTAPAN	55.800	56.155	111.955
13	PLERET	24.246	23.924	48.170
14	PIYUNGAN	26.041	26.292	52.333
15	SEWON	50.183	49.624	99.807
16	KASIHAN	51.749	51.778	103.527
17	SEDAYU	23.754	23.892	47.646
	JUMLAH	472.916	476.409	949.325

Sumber : Disdukcapil, 2019

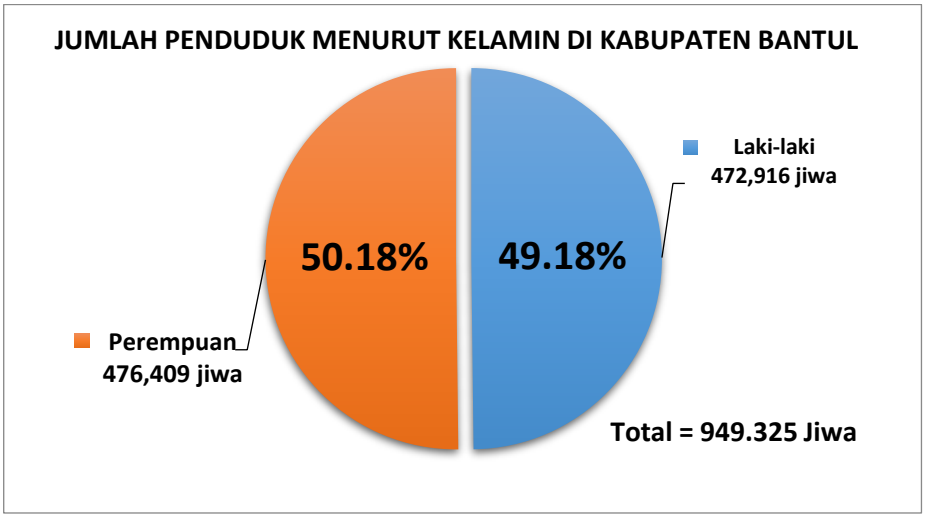

Sumber : Disdukcapil, 2019

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

1) Jumlah penduduk menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 265.264 jiwa atau 28%, sedangkan yang paling sedikit adalah Srata II yaitu sebesar 417 atau 1% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

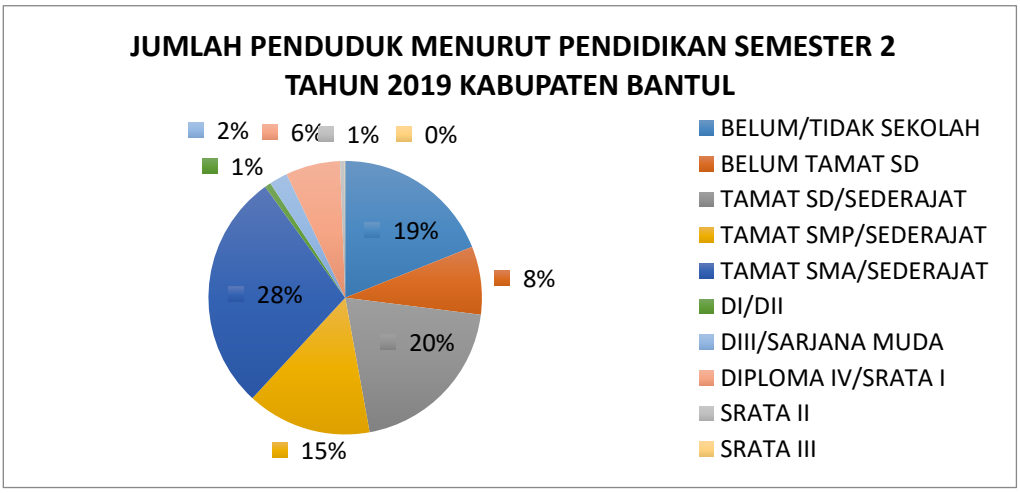

Sumber : Disdukcapil, 2019

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

b. Pendidikan

Tabel 1. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.02	0,004	180.00
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.02	0,01	150.00
3	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100.00
4	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100.00
5	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	2	3	75.00
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	1	3	60
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	6	4	66.67
8	APK SD/MI	96.30	95.26	98.92
9	APK SMP/MTs	95.25	101,38	106.44
10	APM SD/MI	84.55	85.86	101.55
11	APM SMP/MTs	68.00	76,8	112.94
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	108,56	108.56
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	111,18	111,18
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.94	9,35	104.59
15	APK PAUD	98.85	106,24	107.48
16	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	28	32,18	114.93
17	Jumlah Pemuda Pelopor	4	5	125.00

Sumber : Disdikpora, 2019

Misi ke 2 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2019 mentargetkan sebesar 0,02% terealisir sebesar 0,004 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 180 % dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi sebesar 0.004 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 3 siswa, sedangkan jumlah siswa SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 80.711 siswa sehingga terealisir sebesar 0.004. Jika dibanding dengan tahun 2018

bahwa angka putus sekolah terealisir 0.01 angka putus sekolah ditahun 2019 menurun dibanding dengan tahun 2018.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2019 mentargetkan sebesar 0,02 % terealisir sebesar 0,01 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 150% dengan kategori sangat baik. Realisasi sebesar 0.01 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4 siswa, sedangkan jumlah siswa di jenjang SMP/MTs sebanyak 38.610 siswa sehingga terealisir sebesar 0.02. Jika dibanding dengan tahun 2018 bahwa angka putus sekolah terealisir 0.02 angka putus sekolah ditahun 2019 mengalamin penurunan dibanding dengan tahun 2018.

c. Kesehatan

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2019 didasarkan pada sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur, dimana indikatornya antara lain:

Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Kematian Ibu	85 Per 100.000 KH	99.49 Per 100.000 KH	82.11
2	Angka Kematian Bayi	8,2 Per 1.000 KH	8.4 Per 1.000 KH	98.41
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,39%	0.41%	94.87
4	Prevalensi HIV AIDS	<0,5%	0.12%	176
5	Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD	120 Per 100.000 penduduk	140 Per 100.000 penduduk	83.33

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh pengembangan layanan kesehatan di sektor publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Salah satu faktor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah mutu pelayanan kesehatan. Penilaian mutu pelayanan Puskesmas yang terstandar oleh Kementrian Kesehatan adalah Akreditasi Puskesmas.Sampai dengan tahun 2019 seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul telah terakreditasi.

Kecukupan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas layanan. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2019, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah SAT378 orang. Rasio dokter spesialis adalah 6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 57 dokter spesialis.

6. Potensi Ekonomi Daerah

a. Pertanian dan Peternakan

Tabel 1.8 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, PadiLadang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2018	2019**	
1	Padi Sawah	Luas Panen	31.182,3	29.524	Ha
		Produktivitas (GKG)	60,06	63,56	ku/ha
		Produksi (GKG)	187.285	187.655	Ton
		Produksi beras	-	120.099	ton
2	Padi Ladang	Luas Panen	197	23	Ha
		Produktivitas (GKG)	45,56	50,10	ku/ha

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2018	2019**	
		Produksi (GKG)	898	115	Ton
		Produksi beras	575	73.6	Ton
3	Padi	Luas Panen	31.379,3	29.597	Ha
		Produktivitas (GKG)	59,97	63.55	ku/ha
		Produksi (GKG)	188.183	188.089	Ton
		Produksi beras	120.474,757	120.377	Ton
4	Jagung	Luas Panen	3.565,1	4934	Ha
		Produksi (pipilan)	26.086	34.903	Ton
		Produktivitas	73,17	70,74	ku/ha
5	Kacang tanah	Luas Panen	2.586,4	2.704,8	Ha
		Produksi (wose kering)	4.068	4.065	Ton
		Produktivitas	15,73	15.03	ku/ha
6	Kedelai	Luas Panen	1.213,6	909	Ha
		Produksi (wose kering)	1.883	1445	Ton
		Produktivitas	15,52	15.90	ku/ha

Sumber: DPPKP, 2019 **Angka Sementara

Produksi kedelai, pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Penurunanan produksi kedelai mencapai 23,26 % atau 438 ton. Penurunan ini di sebabkan karena faktor panjangnya musim kemarau selama tahun 2019, sehingga mengalami kemunduran tanam , dimana petani sudah menyiapkan benih siap tanam, tetapi hujan tidak kunjung turun.Faktor air yang menjadi sumber kehidupan tanaman kedelai dimana dibutuhkan pada saat masa pengisian polong tetapi tanaman kekurangan air , jadi pengisian polong tudak penuh sehingga menyebabkan produktivitas kedelai menurun.

Tabel 1.9 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/ Kapita	%	%AKE)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.172,1	56	53,3	0,5	28,1	26,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	57,2	3	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	280,3	13	12,7	2,0	26,9	25,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	80,0	4	3,6	0,5	1,9	1,8	5,0	1,8
5	Buah/Biji Berminyak	57,3	3	2,6	0,5	1,4	1,3	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	198,3	10	9,0	2,0	19,0	18,0	10,0	10,0
7	Gula	27,7	1	1,3	0,5	0,7	0,6	2,5	0,6
8	Sayur dan Buah	190,4	9	8,7	5,0	45,7	43,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	20,8	1	0,9	-	-	-	-	-
	Total	2.084,2	100	94,7	11,5	125,1	118,5	100,0	93,7

Sumber : DPPKP, 2019

Hasil perhitungan analisis perhitungan PPH sebesar 93,7. Skor tersebut naik dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 91,7. Peningkatan tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul semakin meningkat, dengan kata lain semakin beragam dan berimbang, Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah beragam diantara 9 kelompok utama.

b. Perikanan

Tabel 1.10 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan

No.	Uraian	Jumlah	
		2018	2019**
1	Nila	2.164.370	2.618.329
2	Lele	2.567.437	7.425.503
3	Gurami	7.028.122	1.723.948
4	Mas	179.914	36.828
5	Bawal	21.421	218.661
6	Patin	37.444	42.888
7	Udang Vaname	292.292	374.440
8	Lain-lain		-
Jumlah		12.291.000	12.440.597**

Sumber : DPPKP,2019 Ket : ** Angka Sementara

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 kg dari 12.291.000 kg pada tahun 2018 menjadi 12.440.597 kg pada tahun 2019. Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Selain itu factor lain adalah adanya fasilitasi bantuan sarpras budidaya baik dari APBN Pusat maupun APBD I DI Yogyakarta berupa kolam bulat, terpal, benih dan pakan kepada 65 kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul yang meningkatkan luas panen perikanan budidaya dan meningkatkan produksi perikanan.

Tabel 1.11 Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Produksi Perikanan Budidaya

No.	Uraian	Jumlah	
		2018	2019
1	Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya	5.176	5.216
2	Produksi perikanan budidaya (kg)	12.291.000	12.440.597**

Sumber : DPPKP, 2019 Ket : ** Angka Sementara

c. Pariwisata

Tabel 1.12 Data Event Tahun 2019

No.	Jenis Event	Keterangan
1	Festival Makanan Tradisional	Kegiatan PPDLN
2	Festival Ingkung	Kegiatan PPDLN
3	Festival Mie	Kegiatan PPDLN
4	Festival Lampion	Kegiatan PPDLN
5	Festival Fashion Street	Kegiatan PPDLN

No.	Jenis Event	Keterangan
6	Festival Dayung	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
7	Festival Jogja Air Show (JAS)	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
8	Festival Malam 1 Syuro	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
9	Festival Malam 15 Syuro	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
10	Pentas Jathilan	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
11	Pentas Campursari	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
12	Pentas Koes Plus	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
13	Pentas Akhir Tahun	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
14	Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
15	The Harmony Nature & Culture Orchestra	Kegiatan PPDLN
16	Syimphoni Orkestra	Kegiatan PPDLN
17	Surving Kompetisi	Kegiatan PPDLN

Sumber : Dinas Pariwisata, 2019

Tabel 1.13 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2019

No.	Daya Tarik Wisata	2018	2019	Satuan	Keterangan
1	Alam	25	32	Unit	
2	Buatan	59	84	Unit	
No.	**Usaha Pariwisata**			**Satuan**	
1	Hotel bintang	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	142	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mencapai 5.166.615 orang. Capaian tersebut sudah melebihi target RPJMD sebanyak 4.445.781 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, pada 2019 mencapai Rp31.756.578.250,00 atau meningkat sebesar 9,25% dari perolehan tahun 2018 yang berjumlah Rp29.066.376.750.000,00.

d. Potensi Investasi

Tabel 1.14 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2019

No	Triwulan	PMDN			PMA		
		Proyek	Investasi (Rp)	Tki	Proyek	Investasi (Rp)	Tki
1	I	11	663.400.000,00	56	20	6.000.000,00	0
2	II	20	6.618.000.000,00	29	33	895.500.000,00	68
3	III	12	23.493.100.000,00	0	12	2.173.500.000,00	0
4	IV	60	80.019.800.000,00	139	41	17.010.000.000,00	1.767

Sumber : LKPM *Online*, DPMPT 2019

Dari dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk PMDN penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi sebesar Rp.23.493.100.000,00. Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi sebesar Rp.2.173.500.000,00.

Tabel 1.15 Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 & 2019

Bulan	Jumlah Eksportir		Volume Ekspor		Nilai	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Januari	53	50	1155056.23	1442151.76	6455771.99	14347340.13
2. Februari	42	59	844405.11	1264395.45	7184745.2	14531118.74
3. Maret	60	54	1414344.8	1158769.42	10833172.5	11037306.5
4. April	65	61	1540693.4	1575753.09	9749026.69	12897820.82
5. Mei	63	64	1485849.49	1874843.2	10808099.3	13425203.67
6. Juni	52	50	1047518.09	934124.96	8153195.4	8681213.88
7. Juli	55	69	1133120.59	1662881.35	11017224.8	14258660.54
8. Agustus	58	66	1077531.22	1359516.52	9664964.97	12832277.46
9. September	54	64	1158203.65	1467132.77	9957473.33	13137510.02
10. Oktober	53	58	1229322.87	1389822.37	9396432.47	10890817.73
11. November	55	63	1170117.51	1279786.25	10072592.1	13091699.15
12. Desember	47	64	1266924.48	1236547.45	10978411.5	11909913.74
Jumlah	657	722	14523087.4	16645724.6	114271110	151040882.4

Sumber : Dinas Perdagangan, 2019

7. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukan nilaI sebesar Rp.25.86 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukan nilai sebesar Rp.18.80 triliun.

Tabel 1.16 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Rp)	Pertumbuhan
1	2015	19.891.904	7,93	16.045.645	3,66
2	2016	21.263.357	6,89	16.649.785	3,77
3	2017	22.719.305	6,85	17.291.765	3,86
4	2018	24.280.787	6,87	18.030.219	4,27
5	2019	25.869.428	6,54	18.808.652	4,32

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul
Tahun 2014-2019

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,62	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	1,54	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27
C	Industri Pengolahan	4,02	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,34	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,49	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25
F	Konstruksi	5,80	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,55	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	7,04	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,53	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97
L	Real Estate	8,78	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43
M,N	Jasa Perusahaan	6,59	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,31	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,66	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,04	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

b. Inflasi

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 menunjukan angka sebesar 2,71 . Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan angka nasional. Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat keberhasilan Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya penegendalian inflasi daerah.

Tabel 1.18 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Prov. Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017	3,96	4,20	3,61
3	2018	2,61	2,66	3,13
4	2019	2,71	2,77	2,72

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata *(growthoriented)*, namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat *(people need oriented)*. Salah satu indikator keberhasilan

pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebesar 80,01 dan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi IPM Kabupaten Bantul mulai tahun 2014-2019 memperlihatkan tren yang meningkat, artinya kinerja pembangunan daerah semakin dirasakan dan memiliki manfaat bagi masyarakat di dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Tabel 1.19 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Tahun	NILAI IPM Kab. Bantul	NILAI IPM DIY
1	2014	77,11	76,81
2	2015	77,99	77,59
3	2016	78,42	78,38
4	2017	78,67	78,89
5	2018	79,45	79,53
6	2019	80,01	79,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

d. Gini Rasio

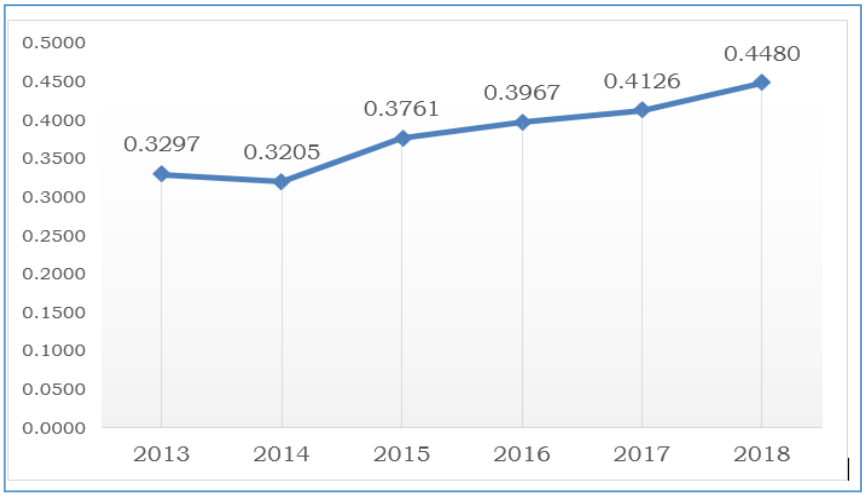

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 1.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun 2017 Gini Ratio Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4 atau meningkat 0,0161 poin (ketimpangan semakin melebar). Pada tahun 2018, meningkat sebesar 0,035 poin. Berdasarkan kriteria Oshima kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4).

e. Kemiskinan

Tabel 1.20 Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2019

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2014	15,89	2,19	0,48	301.986
2015	16,33	3,16	0,89	312.514
2016	14,55	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	1,87	0,43	381.538

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan didaerah.

Pada tahun 2019 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten selain melaksanakan Program-program penanggulangan kemiskinan juga memfokuskan pada perbaikan data DTPPFM atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) , yaitu memaksimalkan entry data ke dalam aplikasi SIKS NG yang merupakan hasil dari Musyawarah tingkat Desa untuk cleaning data *inklusi dan*

eklusi error. Selain itu dalam program penanggulangan kemiskinan lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutahan dasar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, tambahan pemenuhan asupan gizi, program tersebut sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul di tahun 2019 focusing pada perbaikan data penerima manfaat (sasaran penerima). Melalui Sistem Informasi Manajemen Monitoring Penanggulangan Kemiskinan (SI MISKIN), telah dilakukan pemetaan sasaran program penanggulangan kemiskinan
2. Rehab rumah tidak layak huni yang ditangani oleh Dinas PUPKP, DInas Sosial, Pemerintah Desa serta sumber pendanaan lain yaitu optimalisasi peran CSR dan pengelolaan Zakat Daerah.
3. Program Boga Sehat, yaitu Program pemberian tambahan asupan makanan bergizi bagi lansia miskin absolut dan penyandang disabilitas untuk menambah pemenuhan 2100 kalori. Program ini dilaksanakan mulai bulan 1 Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk program tambahan bagi warga miskin dan lanjut usia terlantar juga mendapatkan tambahan anggaran dari CSR.

BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daaerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Dalam perkembangan informasi dan teknologi pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban agar mempermudah akses data yang dibutuhkan oleh setiap unsur yang memiliki kepentingan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir

kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan

Struktur APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 meliputi komponen Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Secara terperinci jenis Pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak/SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, dana penyesuaian, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan, belanja modal aset

tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya dan (3) belanja tak terduga, yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: (1) penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali investasi non permanen; dan (2) pengeluaran daerah, yang terdiri dari, penyertaan modal /investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan percepatan penerapan dan pemahaman aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mengadakan asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi sistem masing-masing;

3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP Pemda DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau coaching clinic penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan workshop mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpatda;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

12. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan dan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi pendapatan asli daerah terutama bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah yang baik oleh pemerintah daerah, yang memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil adalah pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum, memperhatikan aspek keadilan, memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak menghambat investasi daerah.

Terkait implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 seperti tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang Perdesaan dan Perkotaan.

Berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah maka dalam pengelolaan pendapatan setiap transaksi harus dilakukan dengan dokumen yang jelas untuk mengetahui keakuratan realisasi dari transaksi pendapatan.

2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari

dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Adanya otonomi daerah akan memacu daerah meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal:

a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi:

1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:

a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;

b) Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;

c) Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;

d) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan;

f) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;

g) Pelayanan pajak terpadu;

h) “Si-Sari” (Sistem Selasa Sehari), pelayanan validasi Selasa sehari untuk BPHTB;

i) Web pembayaran PBB yang bisa diakses di desa dan kecamatan.

2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah. Proses ini meliputi:

a) Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang

ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.

b) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan mengoptimalisasikan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui:

   (1) Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/subyek PBB P2;

   (2) Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB P2;

   (3) Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang;

   (4) Restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;

   (5) Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan sistem on line bekerjasama denganempat bank yang ditunjuk di wilayah Pemda DIY.

Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD.

Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan. Pada tahun 2019 kontribusi yang disumbangkan dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 20,77%. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan asli daerah secara umum juga menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan dalam APBD sebesar Rp2.258.180.662.975,05 terealisasi sebesarRp2.269.539.168.277,63 terdapat selisih lebih dari

target sebesar Rp11.358.505.302,58 atau tercapai 100,50% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi dari target yang direncanakan, sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah kurang dari rencana anggaran. Perihal tidak tercapainya target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara. Adapun target dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian		Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	**Pendapatan Asli Daerah**		467.159.577.195,00	505.929.472.001,63	38.769.894.806,22	108,30
	1	Pajak Daerah	198.715.500.000,00	213.628.741.844,18	14.913.241.844,18	107,50
	2	Retribusi Daerah	42.959.909.608,00	48.278.231.843,00	5.318.322.235,00	112,38
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.883.863.426,19	21.945.038.058,10	61.174.631,91	100,28
	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	203.600.304.161,22	222.077.460.256,35	18.477.156.095,13	109,08
II	**Pendapatan Transfer**		1.634.139.587.432,60	1.625.756.237.566,22	8.383.349.866,38	99,49
	1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	1.388.065.951.692,00	1.351.157.100.831,00	(36.908.850.861,00)	97,34
		A Dana Bagi Hasil Pajak	29.734.628.100,00	19.354.934.749,00	(10.379.693.351,00)	65,09
		B Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	986.778.000,00	592.066.800,00	(394.711.200,00)	60,00
		C Dana Alokasi Umum	1.015.302.849.000,00	1.015.302.849.000,00	0,00	100,00
		D Dana Alokasi Khusus	96.588.942.592,00	92.853.634.690,00	(3.735.307.902,00)	96,13
		E Dana Alokasi Khusus (non fisik)	245.452.754.000,00	223.053.615.592,00	(22.399.138.408,00)	90,87
	2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	165.849.585.000,00	165.849.585.000,00	0,00	100,00
		A Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
		B Dana Penyesuaian	165.849.585.000,00	165.849.585.000,00	0,00	100,00
	3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah**	154.194.885.782,60	164.965.839.463,00	10.770.953.680,40	106,99
		A Pendapatan bagi hasil pajak	154.194.885.782,60	164.965.839.463,00	10.770.953.680,40	106,99
		B Pendapatan bagi hasil lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Bantuan keuangan**	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	(242.000.000,00)	94,74

No	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	(242.000.000,00)	94,74
III	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	78.312.663.305,04	77.281.170.982,00	(1.031.492.323,04)	98,68
	1 Pendapatan Hibah	78.199.300.771,00	77.281.170.982,00	(918.129.789,00)	98,83
	2 Pendapatan dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pendapatan lainnya	113.362.534,04	0,00	(113.362.537,04)	0,00
Pendapatan Daerah		2.258.180.662.975,05	2.269.537.703.277,63	11.357.040.302,58	100,50

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 22,29%, pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar sebesar 74,30%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,41%. Rincian sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp467.159.577.195,41 terealisasi sebesar Rp505.928.007.001,63, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp38.768.429.806,22 atau tercapai 108,30%. Perincian realisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp198.715.500.000,00 terealisir sebesar Rp213.628.741.844,18, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp14.913.241.844,18 atau tercapai 107,50%;

2) Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp42.959.909.608,00 terealisir sebesar Rp48.276.766.843,00, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp5.316.857.235,00 atau tercapai 112,38%;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp21.883.863.426,19 terealisir sebesar Rp21.945.038.058,10.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp203.600.304.161,22, terealisir sebesar Rp222.077.460.256,35, terdapat lebih dari target sebesar Rp18.477.156.095,13 atau tercapai 109,08%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 43,89% dan pajak daerah sebesar 42,23%. Kontribusi lainnya berasal dari retribusi daerah sebesar 9,54% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,34%.

b. Pendapatan Transfer

Pada tahun 2019 pendapatan daerah dari pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.712.708.422.474,60 terealisasi sebesar Rp1.686.328.525.294,00, terdapat selisih kurang sebesar Rp26.379.897.180,60 atau mencapai 98,46% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Selisih kurang tersebut bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp36.908.850.861,00 dari target sebesar Rp1.388.065.951.692,00 terealisir sebesar Rp1.351.157.100.831,00, dan bantuan keuangan sebesar Rp242.000.000,00 dari target sebesar Rp4.598.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.356.000.000,00 atau 94,74%. Selisih lebih pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp10.770.953.680,40 dari target Rp154.194.885.782,60 terrealisasi sebesar Rp164.965.839.463,00 atau 106,99%,

sementara pendapatan dari pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dalam bentuk dana penyesuaian terrealisir sesuai rencana sebesar Rp165.849.585.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp78.312.663.305,04 terealisir sebesar Rp77.281.170.982,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp1.031.492.323,04 atau tercapai 98,68%.

4. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2019 dalam aspek pendapatan daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Pendapatan Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Informasi mengenai pelayanan perpajakan didaerah belum maksimal	1. Melakukan sosialisasi mengenai pelayanan perpajakan di daerah 2. Modernisasi sistem dan sarana prasarana pelayanan pajak di daerah
2.	Kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak masih belum optimal	1. Memperbanyak sosialisasi pajak kepada masyarakat 2. Mengintensifkan pelayanan mobil keliling dan pelayanan jemput bola bagi masyarakat pembayar pajak.

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari:

a. Belanja operasional, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;

b. Belanja modal, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan bangunan; dan belanja aset tetap lainnya;

c. Belanja tak terduga, yaitu belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Transfer, yaitu pengeluaran belanja kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah desa.

e. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang

berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

b. Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis *gender*.

c. Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat.Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Pada tahun 2019 pengelolaan BOSNAS di sekolah negeri dimasukan dalam struktur APBD, sehingga anggaran dan

realisasinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, walaupun dana transfernya tidak melalui mekanisme kas daerah.

2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Pada tahun 2019 belanja daerah Kabupaten Bantul dianggarkan sebesar Rp2.224.957.235.740,05 terealisasi sebesar Rp2.010.601.520.469,63 atau 90,37%, dengan perincian anggaran belanja operasional sebesar Rp1.766.131.605.016,54, terealisasi sebesar Rp1.672.492.538.938,88 atau 94,70%; anggaran belanja modal sebesar Rp442.145.713.703,00 terealisasi sebesar Rp336.796.564.780,75 atau 76,17%; dan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp16.679.917.020,51, terealisasi sebesar Rp1.312.416.750,00. Sementara itu, transfer dianggarkan sebesar Rp279.105.426.251,40 terealisasi sebesar Rp273.461.486.014,00 atau 97,98%, yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp22.290.550.000,40 terealisasi 100% dan transfer bantuan keuangan dianggarakan Rp256.814.876.251,00 terealisasi Rp251.170.936.014,00 atau 97,80%.

Realisasi belanja pada tahun 2019 mencapai 90,37% disebabkan antara lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan yang gagal lelang, dan beberapa belanja yang tidak maksimal yang disebabkan mundurnya penetapan perubahan APBD TA 2019. Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian		Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
A	**Belanja**		**2.224.957.235.740,05**	**2.010.601.520.469,63**	**(214.355.715.270,42)**	**90,37**
I	**Belanja Operasional**		**1.766.131.605.016,54**	**1.672.492.538.938,88**	**(93.639.066.077,66)**	**94,70**
	1	Belanja Pegawai	1.001.580.263.191,54	952.516.905.031,00	(49.063.358.160,54)	95,10
	2	Belanja Barang dan Jasa	686.139.282.825,00	653.369.794.350,88	(32.769.488.474,12)	95,22
	3	Belanja Bunga	400.000.000,00	39.333.3340,00	(360.666.666,00)	9,83
	4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Belanja Hibah	68.964.539.000,00	59.646.486.223,00	(9.318.052.777,00)	86,49
	6	Belanja Bantuan Sosial	9.047.520.000,00	6.920.020.000,00	(2.127.500.000,00)	76,49
II	**Belanja Modal**		**442.145.713.703,00**	**336.796.564.780,75**	**(105.349.148.922,25)**	**76,17**
	1	Belanja Tanah	5.886.775.500,00	1.283.152.400,00	(4.603.623.100,00)	21,80
	2	Belanja Peralatan dan Mesin	123.802.276.909,00	104.872.405.656,96	(18.929.871.252,04)	84,71
	3	Belanja Gedung dan Bangunan	67.407.048.015,00	63.607.527.362,51	(3.799.520.652,49)	94,36
	4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	240.576.752.878,00	162.934.796.897,30	(77.641.955.980,70)	67,73
	5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.046.339.401,00	3.716.261.963,98	(330.077.437,02)	91,84
	6	Belanja Aset Lainnya	426.521.000,00	382.420.500,00	(44.100.500,00)	89,66
III	**Belanja Tak Terduga**		**16.679.917.020,51**	**1.312.416.750,00**	**(15.367.500.270,51)**	**7,87**
	1	Belanja Tak Terduga	16.679.917.020,51	1.312.416.750,00	(15.367.500.270,51)	7,87
B	**Transfer**		**279.105.426.251,40**	**273.461.486.014,00**	**(5.643.940.237,40)**	**97,98**
I	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**		22.290.550.000,40	22.290.550.000,00	(0,40)	100,00
II	**Transfer Bantuan Keuangan**		256.814.876.251,00	251.170.936.014,00	(5.643.940.237,00)	97,80
Belanja dan Transfer Daerah			2.504.062.661.991,45	2.284.063.006.483,63	(219.999.655.507,82)	91,21

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

a. Belanja Daerah

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019, realisasi belanja operasional memiliki proporsi sebesar 73,22%, belanja modal memiliki proporsi sebesar 14,74%, belanja tak terduga memiliki proporsi sebesar 0,07%, dan belanja transfer memiliki proporsi sebesar 11,97%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

3) Belanja Operasional

Belanja operasional dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2019 belanja operasional dianggarkan sebesar Rp1.766.131.605.016,54 telah direalisasikan sebesar Rp1.672.492.538.938,88 atau 94,70%. Realisasi belanja operasional didominasi oleh belanja pegawai dengan proporsi terbesar dari pengeluaran belanja operasional yaitu sebesar 56,95%. Rincian dan realisasi belanja operasional adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.001.580.263.191,54 terealisasi sebesar Rp952.516.905.031,00 atau 95,10%.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp686.139.282.825,00 terealisasi sebesar Rp653.369.794.350,88 atau 95,22%.

Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.333.334,00 atau 9,83%.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp0 terealisasi Rp0 atau 0%.

Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp68.964.539.000,00 terealisasi sebesar Rp59.646.486.223,00 atau 86,49%.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp9.047.520.000,00 terealisasi sebesar Rp6.920.020.000,00 atau 76,49%.

4) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan; belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp442.145.713.703,00 dengan realisasi sebesar Rp336.796.564.780,75 atau 76,17%, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp5.886.775.500,00 terealisasi sebesar Rp1.283.152.400,00 atau 21,80%.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp123.802.276.909,00 dan terealisasi sebesar Rp104.872.405.656,96 atau 84,71%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp67.407.048.015,00 dan terealisasi sebesar Rp63.607.527.362,51 atau 94,36%.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Bangunan

Belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan dianggarkan sebesar Rp240.576.752.878,00 dan terealisasi sebesar Rp162.934.796.897,30 atau 67,73%.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp4.046.339.401,00 dan terealisasi sebesar Rp3.716.261.963,98 atau 91,84%.

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp426.521.000,00 dan terealisasi sebesar Rp382.420.500,00 atau 89,66%.

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp16.679.917.020,51 terealisasi sebesar Rp1.312.416.750,00 atau 7,87%.

Transfer Daerah

Transfer daerah diberi alokasi anggaran sebesar Rp279.105.426.251,40 dan terealisasi sebesar Rp273.461.486.014,00 atau 97,98%. Transfer daerah terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

6) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp22.290.550.000,40 dan terealisasi sebesar 100%.

7) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp256.814.876.251,00 dan terealisasi sebesar Rp251.170.936.014,00 atau 97,80%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2019 dalam aspek belanja daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih kurang optimalnya perencanaan pengganggaran sehingga masih terjadi revisi dokumen	Peningkatan pemahaman terhadap alur perencanaan yang jelas terstruktur serta sesuai dengan regulasi.
2	Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum tepat waktu sesuai rencana sehingga banyak menumpuk di akhir tahun	1. Meningkatkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. 2. Menerapkan reward and punishment yang lebih optimal.

No.	Permasalahan	Solusi
3.	Penerapan transaksi non tunai yang belum optimal	1. Peningkatan sarana dan prasarana serta sistem yang lebih baik 2. Perbaikan dan peningkatan sosialisasi terkait kebijakan dan teknis transaksi non tunai
4	Masih terdapat kekurang tepatan dalam melakukan entry data kedalam sistem sehingga menghasilkan kekeliruan dalam Laporan Keuangan	1. Meningkatkan pelatihan kepada seluruh OPD terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. 2. Mengoptimalkan rekonsiliasi data

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2019 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya penerimaan daerah dalam pembiayaan sebelum audit oleh BPK RI, dianggarkan sebesar Rp307.841.999.016,40 dan dapat direalisasikan sebesar Rp297.094.616.747,40 atau 96,51%. Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, dan penerimaan kembali

investasi non permanen. Dengan demikian dalam APBD tahun 2019, dapat terlihat bahwa besaran Silpa yang dianggarkan sebesar Rp279.158.249.016,40 telah direalisasikan 100%; Pinjaman dalam negeri dari rencana anggaran Rp15.000.000.000,00 terrealisir sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 46,67%, sementara penerimaan kembali investasi non permanen dianggarkan sebesar Rp10.710.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp7.853.006.902,00 atau 73,32%.

3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya pengeluaran pembiayaan daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp61.960.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.891.500.000,00 atau tercapai 78,91%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini merupakan pos dari penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp34.825.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp34.300.000.000,00 atau 98,49%, pembayaran pokok pinjaman dari rencana anggaran Rp15.000.000.000,00 terralisir Rp7.000.000.000,00 dan pengeluaran investasi non permanen lainnya, dianggarkan sebesar Rp12.135.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp7.591.500.000,00 atau 62,56%. Target dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Pembiayaan DaerahTahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	**Penerimaan Daerah**	307,841,999,016.40	297,094,616,747.40	(10,747,382,269.00)	96.51
1	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	279,158,249,016.40	279,267,859,845.40	109,610,829.00	100.04
2	Pencairan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.973.750.000.00	2.973.750.000.00	0.00	100.00
4	Penerimaan pinjaman dalam negeri	15.000.000.000.00	7.000.000.000.00	(8.000.000.000.00)	46.67
5	Penerimaan kembali piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan kembali investasi nonpermanen	10,710,000,000.00	7,853,006,902.00	(2,856,993,098.00)	73.32
II	**Pengeluaran Daerah**	**61,960,000,000.00**	**48,891,500,000.00**	**(13,068,500,000.00)**	78.91
1	Pembentukan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah	34,825,000,000.00	34,300,000,000.00	(525.000.000.00)	98.49
3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	15.000.000.000.00	7.000.000.000.00	(8.000.000.000.00)	46.67
4	Pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pengeluaran investasi non permanen lainnya	12,135,000,000.00	7,591,500,000.00	(4,543,500,000.00)	62.56
Pembiayaan Netto		**245,881,999,016.40**	**248,203,116,747.40**	**2,321,117,731.00**	**100.94**

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2019

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumberdaya mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana yang diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (4) penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (5) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (6) pengawasan; dan (7) pemerintahan umum.

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2019 beserta hasil-hasilnya diuraikan dalam bab ini. Khusus untuk prestasi dan penghargaan yang diraih disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator kinerja disajikan pada Lampiran B.

1. PENDIDIKAN

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

a) Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD,

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

3) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP

b) Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar

c) Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru

d) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar SMP

e) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar

f) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar

g) Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

h) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD

i) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal

j) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD

k) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD

l) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD

m) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD

n) Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI

o) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Siswa

p) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP

q) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

r) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS.

4) Program Pendidikan non formal;

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non Formal

c) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C setara SMU

e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

f) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

g) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:

h) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

i) Rumah Pintar

j) Homeschooling

5) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

a) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

b) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6) Manajemen pelayanan pendidikan;

a) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

b) Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru
c) Pembinaan dan Operasional Dewan Pendidikan
d) Penanaman iman taqwa dan akhlak mulia
e) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

7) Program Peningkatan Nilai Akademik.

a) Penambahan Pelajaran
b) Peningkatan Metode Pengajaran
c) Peningkatan Peran Orang tua
d) Pendampingan orang tua;
e) Tambahan jam belajar dan try out;
f) Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai akademiknya di bawah rata-rata sekolah.

Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mendukung pelayanan Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur dengan anggaran sebesar Rp851.122.500,00 dan realisasi sebesar Rp714.399.300,00 atau 83,94%. Hasil yang dicapai adalah:

a) Melaksanakan penilaian angka kredit sebanyak 4.000 guru;
b) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan kompetensi pengawas TK sebanyak 20 orang;

c) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan kompetensi guru sebanyak 100 orang;

d) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah sebanyak 100 orang;

e) Melaksanakan diklat bagi pengawas sekolah sebanyak 75 orang;

f) Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dinas sebanyak 150 orang;

g) Melaksanakan sosialisasi tunjangan profesi guru kepada 4500 guru TK, SD, SMP.

2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Maksud dan tujuan program ini adalah mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa ”pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Penyelenggaraan PAUD didukung dana APBD melalui program pendidikan anak usia dini sebesar Rp2.742.417.500,00 dengan realisasi Rp2.605.731.994,00 atau 95,02 %. Pada program Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 4 kegiatan, adapun kegiatan tersebut :

a) Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD merupakan kegiatan untuk mendukung pembelajaran PAUD, baik ditingkat kabupaten, korwil dan gugus. Menyasar pada peningkatan model pembelajaran di lembaga PAUD.

Kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.78.541.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.78.541.000,00 atau 100%.

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangakan lembaga PAUD dan Guru PAUD melalui peningkatan kompetensi untuk peningkatan peserta didik PAUD.

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.565.437.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.529.693.400,00 atau 93,68%.

c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD

Merupakan kegiatan pendukung untuk pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di lembaga PAUD, baik lembaga negeri maupun swasta. Dengan sumberda dari Dana Alokasi Khusus dan APBD.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.1.772.239.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.718.794.594.,00 atau 96,98%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah kegiatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia dini, program ini menyalurkan biaya operasional pendidikan PAUD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus untuk lembaga PAUD Negeri.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.326.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.278.703.000,00 atau 85,44%.

3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Merupakan program utama dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, program ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dan dituntaskan melalui jalur pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Untuk

penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp141.931.817.572,00 dengan realisasi sebesar Rp132.966.097.040,00 atau 93,68%. Pada program wajib belajar sembilan tahun terdapat 20 kegiatan, adapun kegiatan tersebut :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP

Kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.17.121.030.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.933.075.000,00 atau 98,90%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa untuk Operasional Sekolah (BOP SMP Negeri Rp.600.000,00/siswa,subsidi; Sekolah Rujukan Rp.15.000.000/sekolah;subsidi Sekolah Model Rp.10.000.000,00;subsidi Sekolah penyelenggara Inklusi Rp.600.000/siswa;subsidi UNBK 4.350.000/sekolah;Kartu cerdas Rp.750.000,00/siswa;Beasiswa Prestasi Rp. 1.000.000,00 ;Beasiswa Bakat Rp. 1.000.000,00/siswa, subsidi Sekolah Imbas Rp.10.000.000,00/sekolah;subsidi Sekolah Kemaritiman Rp.10.000.000,00/sekolah.

b) Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar

Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.963.927.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.910.606.180,00 atau

94,47%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan sosialisasi ke sekolah tentang juknis UN, melakukan pendataan peserta UN SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan swasta. Pemberian susidi Penyelenggaraan UN bagi peserta didik untuk SD/MI Rp.17.000,00/siswa, Rp 30.000,00/siswa untuk SMP, sedangkan untuk pokja Rp. 10.000,00/siswa untuk SD/MI, Rp.13.000,00/siswa untuk SMP/MTs.

c) Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru

Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.15.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.050.000,00 atau 67,00%. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar SMP

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar SMP ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.43.585.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.35.335.000,00 atau 81,07%.

d) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar

Kegiataan untuk pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan SPM pendidikan , Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar ini didukung dengan dana dari APBD sebesar

Rp.6.298.900.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.109.747.900,42 atau 97,00%.

e) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar

Pengembangan kompetensi siswa untuk penguatan pembelajaran, dengan maksud untuk mempertajam life skill siswa secara akademik dan non akademik.

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp695.346.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.467.540.000,00 atau 67,24%.

f) Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yaitu pelaksanaan Bantul Expo Tahun 2019. Kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan, yang bertujuan sebagai sarana untuk sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan kepada masyarakat umum. Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.53.250.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.48.225.000,00 atau 90,56%.

g) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan

Dasar SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.338.525.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.267.050.000,00 atau 78,89%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan kegiatan penguatan Mata pelajaran bagi sekolah SD Negeri dan swasta. Disamping itu juga penguatan kurikulum baru untuk semua guru SD.

h) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal

Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.147.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.141.585.000,00 atau 96,32%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : lomba sesorah dan macapat siswa dan guru, lomba karawitan siswa dan guru, lomba memanah tradisonal siswa.

i) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD

Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.1.205.570.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.915.300.000,00 atau 75,92%.

j) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD

Kegiataan untuk pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan SPM pendidikan,

Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.5.742.873.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.638.227.266.,24 atau 98,18%.

k) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD

Merupakan kegiatan yang khusus untuk melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus Fisik bidang SD. Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.3.327.344.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.206.771.900,00 atau 96,38%.

l) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.2.168.567.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.531.150.190,00 atau 70,61%.

m) Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.27.217.689.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.26.216.364.000,00 atau 96,32%.

n) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Siswa

Kegiatan ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.4.850.000,00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp.1.575.000,00 atau 32,47%.

o) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.145.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.133.820.000,00 atau 91,97%.

p) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

Merupakan kegiatan yang khusus untuk melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus Fisik bidang SMP. Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.2.638.860.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.519.535.000,00 atau 95,48%.

q) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan ialah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dan peleporan dana BOS tahun 2019. Disamping itu juga pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ke sekolah tentang penggunaaan dana BOS agar sesuai dengan juknis yang berlaku.Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar

Rp.104.700.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.93.200.000,00 atau 89,02%.

Tabel 3.1 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2019

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	49,37
2	MI	3	29	6.195	450	136	42,63
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,59
4	MTs	9	15	8.026	693	436	56,26

Sumber: Disdikpora, 2019

Untuk peningkatan prasarana Pendidikan SMP baik Negeri maupun Swasta telah dilaksanakan Pembangunan / Rehabilitasi ruang kelas yang anggarannya bersumber dari Dana APBN (Bantuan Pemerintah/Blockgrand, Dana Alokasi Khusus/DAK) dan APBD Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembangunan ruang kelas sebanyak 9 ruang termasuk ruang perpustakaan dan ruang kelas inklusi untuk 8 SMP (6 Sekolah Swasta dan 2 Sekolah Negeri).
b) Rehabilitasi/perbaikan ruang kelas sebanyak 44 ruang untuk 15 SMP (14 SMP Negeri dan 1 Sekolah Swasta), yang dilaksanakan secara kontraktual sebanyak 4 Sekolah (8 ruang) dan yang dilaksanakan secara swakelola sebanyak 11 Sekolah (36 ruang).

Untuk peningkatan Sarana Pendidikan SMP telah dilaksanakan pengadaan Sarana Pendukung untuk meningkatkan mutu standar layanan UNBK dan pembelajaran dengan :

a) Pengadaan media pendidikan sebanyak 28 paket untuk 18 SMP Negeri terdiri 2 laptop dan 2 LCD.
b) Pengadaan komputer untuk mendukung UNBK sebanyak 24 paket untuk 24 SMP Negeri (22 komputer dan 1 server)

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia sekolah (usia 7-12 tahun), sedangkan APM adalah perbandingan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Realisasi APK SD/MI tahun 2019 sebesar 98,45%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 0,25% dari capaian tahun 2019 sebesar 98.20%. APK SMP/MTs tahun 2019 sebesar 97.83%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2019 adalah 89.55%, adapun APM SMP/MTs tahun 2019 adalah 77.33%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dam SMP/MTs tahun 2019 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2019. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah

dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2019 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,004% dan jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 0,02%.

4) Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal didukung dana APBD sebesar Rp1.481.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.378.745.800,00 atau 93,07% dilaksanakan melalui empat kegiatan. Dari anggaran tersebut tidak maksimal diserap karena pada triwulan ketiga Tahun 2019 Pemerintah Pusat memberikan BOP bagi Satuan Pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang ada di APBD tidak dapat direalisasikan karena akan terjadi penganggaran ganda ketika belanja di pendidikan non formal dibiayai dari APBD dan APBN.

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal meruapakan kegiatan peyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada lemabaga non formal seperti PKBM untuk menyelenggarakaan pendidikan kejar Paket A, B dan C, kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.1.009.915.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.961.570.800,00 atau 95,21%.

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non Formal

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non Formal ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.282.520.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.252.335.000,00 atau 89,32%.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.122.655.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.99.280.000,00 atau 80,94%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C setara SMU

Merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan kejar Paket C setara SMU, untuk mendudukung fasilitas dalam penyelenggaraan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C setara SMU ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.66.380.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.65.560.000,00 atau 98,76%.

Adapun data pendidikan non formal dapat dilihat pada Tabel berikut:.

Tabel 3.2 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2019

No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Warga Belajar	Jumlah Tutor
1	SKB	1	170	7
2	PKBM	33	2.570	518
3	LKP	62	2.272	182
4	TBM	35	1.768	35
5	Rumpin	2	12	6
6	*Homechooling*	2	25	10

Sumber: Disdikpora, 2019

e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Tabel 3.3 Data Program Kesetaraan Tahun 2019

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	178	377	555
2	Paket B	203	372	575
3	Paket C	679	761	1.440

Sumber: Disdikpora, 2019

Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) tahun 2018 baik paket B dan C serta ujian sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing. Pada Tahun Ajaran 2018/2019, untuk Kejar Paket B dan Kejar Paket C dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Adapun hasil UNBK disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Hasil Ujian Nasional Program Kesehatan Tahun 2019

Program	Jumlah Peserta	Lulus	Belum lulus	% Kelulusan
Paket A	293	267	26	91,12
Paket B	754	648	106	90,71
Paket C	680	557	123	81,91

Sumber: Disdikpora, 2019

f) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, LKP dapat menyelenggarakan program:

(1) Pendidikan kecakapan hidup;
(2) Pendidikan kepemudaan;
(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan;
(4) Pendidikan ketrampilan kerja;
(5) Bimbingan belajar.
(6) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

g) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:

(1) pendidikan keaksaraan;
(2) pendidikan kecakapan hidup;
(3) pendidikan pemberdayaan perempuan;
(4) pengembangan budaya baca; dan/atau
(5) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

h) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

TBM sebagai medium pengembangan budaya baca merupakan tempat mengakses berbagai bahan bacaan seperti buku pelajaran, buku keterampilan praktis, buku pengetahuan, buku keagamaan, buku hiburan, karya-karya sastra serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat sekitar dan minat baca yang baik aksaran baru, peserta didik jalur pendidikan formal dan non-formal (warga belajar), dan masyarakat umum tanpa batas usia.

i) Rumah Pintar

Di Bantul terdapat dua rumah pintar yaitu rumah pintar "*Luru Ilmu*" di Kecamatan Bambanglipuro dan rumah pintar "*Pijoengan*" di Kecamatan Piyungan. Rumpin "*Pijoengan*" pernah mendapat penghargaan sebagai Rumpin terbaik di Indonesia dalam kategori pengembangan sentra. Sentra unggulan Rumpin adalah pertanian dan ketrampilan produktif dengan ikon "Sejengkal Lahan Seluas Harapan", rumah pintar menumbuhkan kembali minat warga dalam bidang pertanian sayuran organik dimulai dari pekarangan warga.

j) Homeschooling

Sekolah rumah *(homeschooling)* diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah. Sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Hasil pendidikan Sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini berisi kegiatan-kegiatan yang mencakup peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan GTT/PPT, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, sekaligus mencakup kelembagaan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan anggaran Rp48.374.377.700,00 dengan realisasi sebesar Rp46.270.711.500,00 atau 95,65% dilaksanakan melalui tiga kegiatan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Evaluasi standar pelayanan minimal

b) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

c) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Maksud dan tujaun Program manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi secara lengkap tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul. Program manajemen pelayanan pendidikan didukung dana APBD sebesar Rp739.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp646.718.747,85 atau 87,43%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Kegiatan dalam rangka mendukung penerapan teknologi informasi dalam bindang

pendidikan, baik berupa pengadaan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dengan dana APBD sebesar Rp169.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp131.500.000,00 atau 77,63%.

b) Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru

Kegiatan PPDB berpedoman pada peraturan gubernur dan peraturan bupati tentang PPDB. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online* (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru dengan dana APBD sebesar Rp438.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp406.893.747,85 atau 92,90%.

c) Pembinaan dan Operasional Dewan Pendidikan

Kegiatan Operasional Dewan Pendidikan Kabupaten bantul, merupakan koordinasi dewan pendidikan di tingkat kabupaten, untuk mewadahi dewan sekolah pada tingkat sekolah,

sebagai wujud amanah permendikbud sebagai salah satu pilar pendidikan.

Kegiatan ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.76.650.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.53.975.000,00 atau 70,42%.

d) Penanaman iman taqwa dan akhlak mulia

Kegiatan Penanaman iman taqwa dan akhlak mulia dengan dana APBD sebesar Rp43.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.475.000,00 atau 97,09%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : penyusunan 5 (lima) judul buku pegangan bagi guru PAUD oleh 10 (sepuluh) orang pengawas dengan masing-masing judul buku dicetak sejumlah 200 eksemplar. Buku tersebut akan didistribusikan kepada lembaga PAUD yang yang ada di 17 Kecamatan.

e) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

Kegiatan Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi dengan dana APBD sebesar Rp11.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.875.000,00 atau 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *workshop* bagi 70 (tujuh puluh) pengelola lembaga PAUD se Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019.

7) Program Peningkatan Nilai Akademik

Program Peningkatan Nilai Akademik merupakan program inovasi bidang pendidikan, dengan adanya program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil Nilai akademik peserta didik di lingkungan sekolah Kabupaten Bantul.. Program ini didukung dana APBD sebesar Rp3.512.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.388.056.400,00 atau 96.46%.

Program ini didukung dengan 3 kegiatan yang meliputi :

a) Penambahan Pelajaran

Kegiatan Penambahan Pelajaran dengan dana APBD sebesar Rp2.775.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.722.045.000,00 atau 98.08%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

(1) Pemberian insentif pada guru yang memberi tambahan jam pelajaran.

(2) Operasional Tambahan jam Mengajar.

b) Peningkatan Metode Pengajaran

Kegiatan Peningkatan Metode Pengajaran dengan dana APBD sebesar Rp711.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp644.061.400,00.

c) Peningkatan Peran Orang tua

Kegiatan ini dilaksanakan meliputi sosialisasi kepada komite sekolah dan perwakilan orang tua wali siswa, dengan tujuan orangtua/wali mengetahui tentang kegiatan siswa baik jadwal pelajaran, materi belajar dan

waktu-waktu ujian kompetensi agar orangtua/wali juga mengawasi siswa diluar jam sekolah. Kegiatan Peningkatan Peran Orang tua dengan dana APBD sebesar Rp25.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.950.000,00 atau 87,10%.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai akademik hasil UN SMP dengan cara melaksanakan tiga pilar yaitu :

d) Pendampingan orang tua;

Dilakukan dengan memberikan pemahaman atau sosialisasi ke pada perwakilan wali siswa, untuk mendampingi proses belajar anaknya di rumah masing-masing.

e) Tambahan jam belajar dan try out;

Penambahan jam belajar dilakukan disekolah masing-masing yang dilakukan guru-guru pengampu di luar jam belajar sekolah. Disamping itu dilaksanakan try out untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal yang di ujikan.

f) Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai akademiknya di bawah rata-rata sekolah.

Pendampingan khusus dilaksanakan bagi siswa yang nilainya di bawah rata-rata atau nilai 50 ke bawah. Kegiatan ini dilaksakan oleh guru di sekolah masing-masing di luar jam belajar sekolah.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan dan solusinya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.5 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyak SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi SPM	Dilaksanakan pembangunan ruang/gedung perpustakan secara bertahap.
2	Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM
3	Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
4	Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing

Sumber: Disdikpora, 2019

2. KESEHATAN

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dalam urusan kesehatan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

1) *Program Obat dan perbekalan kesehatan**;***

a) Kegiatan Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

a) Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
b) Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Kegiatan Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan
e) Kegiatan Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
f) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
g) Kegiatan Operasional Rumah Sakit

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

a) Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

a) Kegiatan Promosi Kesehatan
b) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sehat

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

a) Kegiatan Peningkatan status gizi

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan

7) **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**;
   a) Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
   b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   c) Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
8) **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**;
   a) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
   b) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
   c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
9) **Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**
   a) Kegiatan Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
10) **Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya**;
   a) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
   b) Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
   c) Kegiatan Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
11) **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;**
   a) Kegiatan Pendampingan Jamkesda
   b) Kegiatan Kemitraan pelayanan kesehatan
12) **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**;
   a) Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita

13) **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;**
    a) Kegiatan Pelayanan kesehatan Lansia
14) **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;**
    a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15) **Program Peningkatan Pencegahan Penyakit tidak Menular;**
    a) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan urusan Kesehatan pada Dinas Kesehtaan Kabupaten bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan didukung dengan kegiatan:**

a) Pengadaan Obat dan Peningkatan Layanan Farmasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan layanan kefarmasian. Kegiatan ini didukung dana dari APBD dan DAK sebesar Rp. 6.159.511.021,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Realisasi keuangan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.145.191.659 atau sebesar 99.77 %. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar obat program reagensia DAK sebanyak 75 item, pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar obat program reagensia DAU sebanyak 8 item, pengadaan obat emergency

sebanyak 10 item, pengadaan obat yankes DBHCHT sebanyak 64 item, pengadaan palet obat sebanyak 224 unit, pengadaan BMHP DAK sebanyak 22 item, pengadaan rak obat sebanyak 224 palet position, distribusi obat ke 27 Puskesmas. Ketersediaan obat semakin meningkat, ditandai dengan kualitas, kuantitas, dan jenis obat yang semakin beragam. Indikator penggunaan obat yang tepat bagi pasien adalah Penggunaan Obat Rasional (POR).

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dilaksanakan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp84.870.200.237,-.dengan realisasi Rp81.202.262.892,- atau (95,67%). Program ini di laksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

a) Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan mempunyai maksud dan tujuan untuk Peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp726.538.375,- yang bersumber dari DAK dan APBD. Dari anggaran tersebut realisasi yang dapat di capai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.723.920.090,- atau sekitar 99,65 %.

(1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran Rp.1.463.690.000,- Capaian realisasi di tahun 2019 sebesar Rp. 1.283.476.913 atau sekitar 87.69 %.

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Pekan ASI Sedunia (PAS). Untuk tahun 2019, pelaksanaan Pekan ASI Sedunia yang di peringati pada pekan pertama setiap bulan Agustus mengambil tema “Ayah dan Ibu kunci Keberhasilan Menyusui”, dimana dengan peringatan PAS diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

(2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya target pengelolaan keuangan dan kepegawaian serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan. Anggaran kegiatan ini berasal dari anggaran APBD sebesar Rp. 106.500.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 94.240.679,- atau sekitar 88.48%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah: pembayaran sewa lahan PMI dan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat

(3) Kegiatan Perijinan dan pengawasan Praktek Tenaga dan Sarana Kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan. Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp116.391.300,- dengan realisasi sebesar Rp.116.266.300 atau sekitar 99,89%.

(4) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskemas

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 27 Puskesmas yang tersebar di kabupaten Bantul. Adapun total pagu anggaran sebesar Rp.19.386.892.416 dan terealisasi sebesar Rp.19.057.623.688 atau sebesar 98,30%.

Tabel 3.6 Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm) Tahun 2019

No.	Puskesmas	Nama Inovasi
1	Pandak I	Senam Mobile Srikandi, Klinik MESRA (Menuju Keluarga Sehat Sejahtera), Mas Gundul Nyekungkung (Masyarakat Gunting Peduli dan Nyengkuyung Kasus Bebas Pasung), Gunting Sate (Dusun Gunting Sadar Tensi)
2	Sanden	Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur (PASMANTAP), Pendampingan Difabel Pada Sekolah Luar Biasa (EMPING DESA), Skrining Fleksibilitas, Keseimbangan, Kekuatan Otot, Hambatan Aktifitas Sehari-hari Dan Kebugaran (SIMBAH BUGAR), Bumil Risti Sanden (BUTISTA), Pemasangan Stiker ANC Terpadu Bumil Pada Buku KIA (MASTRI ANTER BUMIL), Juru Pemantau Batuk (JUMANTUK)
3	Banguntapan I	GERDU BATUK : Gerakan Terpadu Bantu Penderita Tuberculosa
4	Imogiri I	GEBRAK PTM (Gerakan Bersama Rangkul Penyakit tidak menular), SAPA PTM (Screening Awal Pada Penyakit Tidak Menular), TUMAN TENSI (Kartu Pemantauan Hipertensi) dan Tuman Gendis (Kartu Pemantauan DM), IMAS PAKE MAS (Integrated Management Schedule UpayaKesehatanMasyarakat) PILKUAT (Penyuluhan Imunisasi dasar Lengkap dan booster KUdu AkuraT), SIDIYAN CERDAS (Sweeping Imunisasi dasar lengkap dan booster DI posYANdu agar

		anak sehat dan CERDAS), AKU DI DESA SAJA (AYO KUATKAN UPAYA DENGAN INOVASI DESA SIAGA SEHAT JIWA), ELING JIWA (Injeksi Keliling Pasien Jiwa), WAMIL SEKSI (grup WhatsApp ibu haMIL SEKalurahan di puskesmas imogiri Siji), SOMAT GEMBIL (ANC SOre di hari juMAT kaGEM iBu haMIL), PESTA BUTIK (PEnempelan Stiker TAnda iBU hamil risTI di buku Kia), DEDI TUPERWARE (DEteksi DIni TUmbuh kembang anak di Posyandu agar balita gEneRasi WARga imogiRi sEhat dan tumbuh kembang maksimal, PEKA SIGIMAS (Pembentukan Kader Orang Tua Siswa Dalam Kegiatan Sikat Gigi Mandiri Di Rumah Dan Sekolah)
5	Pleret	MAS DULIMUN TUKU GENSET (Forum masyarakat Peduli Imunisasi untuk Generasi Sehat)
6	Sedayu I	Gerakan Terpadu Tangkis TB, GAMET MISTERI-Penggalangan Komitmen Suami Istri dalam Perencanaan KB Paska Salin, TANTE SOSIALITA *(*Pemanfaatan Taman Obat Keluarga, Solusi Sehat Alami untuk Kita)
7	Srandakan	GERMAS LEWAT PANTAI, Kentong Lemut, Posyandu Remaja, Rekan DuliT, Caten Terpadu, Gasbinsun (Gerakaan Binaan Dusun)
8	Pundong	Emping Desa, Simbah Bugar, Tabur Gizi
9	Bambanglipuro	Teman TB, Tresno Rogo, Sate Kuda Plus, Geliat Jiwa, Pengelolaan Terpadu Hipertensi, Penanggulangan Bumil KEK Terpadu
10	Banguntapan II	Sana Sini (sehatkan anak sehak Dini), Sapha Lansia (satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia)
11	Banguntapan III	SI-KEPO "BANGGA" (Sistem Informasi - Keterangan Presensi Online "Banguntapan III")
12	Bantul I	DUSAJI (Dusun Sehat Jiwa), TENDA TENSI
13	Bantul II	Kiper Tensi (Kelompok Kendali Hipertensi), Nona Nolly (No-Narkoba, No-Bullying), Desaku Resik (Desa Siaga Aktif Kurangi Resiko AKI/Angka Kematian Ibu) Gemar (Generasi Muda Anti Rokok), Peran Ibu Aktif Jaman Now
14	Dlingo I	Keladi, Kedapi, Wasemar (What app Mesem Marem)
15	Dlingo II	Tiwul Gatot (tingkatkan kualitas dan gaya hidup sehat secara total), Emping Jamil (pendampingan Remaja pada Ibu Hamil)
16	Imogiri II	Jalan Bemo
17	Jetis I	Geliat Barongan (Gerakan Peduli Sehat), Sindu Asih (Sindet Peduli Kesehatan dan Kebersihan), Kalapeka (Kelas Lansia Peduli Kesehatan), Paguhati (Paguyuban Kuliner Sehat dan Peduli), Kepak Paud (Kelompok Peduli Kesehatan Anak Paud), Rehat Manis (Remaja Sehat SMA Jetis), Gropyok TB (gerakan jaring dan Obat TB), si JUJU (siswa Jumantik Junior)

18	Jetis II	Garpu salad, Redakssi, Duta Bagiku, Kuda Jingkrak,, Tebar Kasebar, Layanan Gemas Bersama Punggawa
19	Kasihan I	Kekep Ibu Diskogalaksi
20	Kasihan II	Gelimas Jiwo, Budiman Dasi Merah, Pepes Batuk
21	Kretek	Sapu Lidi (Pasukan Anak Peduli Kepada Penanggulanan Dbd Mandiri), Pantai Pasetan (Pantau Tensi Pada Setiap Kegiatan), Makan Ikan Seceting (Makan Ikan Segar Cegah Stunting), Sunda Kelapa (Dusun Sadar Kepada Pengendalian Hiv Aids)
22	Pajangan	Bunga Kertas (Bantu Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga), Butik Bela (Bunda Sehat Cantik Besarkan Bayi Balita), Catin Cetar (Calon Pengantin Cerdas Dan Pintar Dikhususkan Pada Kelas Pengantin), Ingkung Seniman (Ingat Dukung Sekolah Sehat Kini Dan Selamanya), Jawara Gaul (Jaga Jiwa Raga Warga Binaan Rutan Bantul), Kleting Kuning (Kelola Dan Tingkatkan Gizi Untuk Kurangi Stunting), Pelangi Batik (Pelayanan Gigi Balita Untuk Senyum Cantik), Raja Ampuh (Rawat Gangguan Jiwa Sampai Sembuh), Sajam Gurantik (Satu Jam Dalam Seminggu Berantas Jentik Nyamuk), Sambung Rasa (Sarana Hubungan Dengan Masyarakat)
23	Pandak II	Si Pasta Gold (system pemantauan status gigi dan mulut oleh Kader), Pandu Pesat Mobile, Peka Tensi
24	Piyungan	Gertak Chinta (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita)
25	Sedayu II	Akrabi Tensi, Germas Pak Camat
26	Sewon I	Pojok Sate (Pojok Sadar PTM), Lapet Madu (Kelola Penyakit Tidak Menular dengan Posbindu), CETOT TB (cegah temukan obati dan tuntaskan TB), Intip Gula Jawa (Intervensi PIS PK Guna Kelola Jasmani dan Jiwa), Gerdu Kuning (Gerakan Terpadu Kegiatan Penanggulan Stunting)
27	Sewon II	Pemberdayaan Terpadu Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

(5) Kegiatan Pelaksanaan BLUD Puskesmas

Kegiatan BLUD merupakan salah satu kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di 27 Puskesmas yang

pembiayaannya di peroleh dari pendapatan Puskesmas. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul, dimana 16 Puskesmas diantaranya dilengkapi dengan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak Tanggal 2 Januari 2016, sehingga pengelolaan keuangan lebih fleksibel sehingga dapat mengikuti kebutuhan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp61.428.688.146,- yang dilaksanakan oleh masing-maing puskesmas. Adapun Anggaran dan realisasi masing-masing Puskesmas beserta realisasi di sajikan pada tabel dibawah ini

(6) Operasional Rumah Sakit

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan unutk peningkatan kesehatan rujukan. Pelaksanaan kegiatan di dukung oleh Pagu Anggaran sebesar Rp1.641.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.584.281.954,- atau sekitar 96.51%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan alat-alat kedokteran umum dan belanja bahan medis (obat-obatan) habis pakai.

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Di dukung anggaran APBD sebesar Rp185.000.000,-.Capaian realisasi dari kegiatan tersebut sebesar Rp178.951.500,- atau 96.73 %. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program tersebut adalah :

1) **Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

(a) Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)

Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PKP-IRT) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Pertemuan PKP-IRT sebanyak 6 kali/angkatan dengan pesertaa sebnyak 50 orang/angkatan. Output dari penyelenggaraan PKP-IRT 6 angkatan adalah sebanyak 300 orang mendapatkan Sertifikat PKP-IRT yang dapat digunkan untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

(b) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan

Proses sertifikasi PP-IRT dilaksanakan dari survei lokasi ke Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan permohonan Sertifikat PP-IRT. Sebanyak 250 unit IRTP berhasil memperoleh Rekomendasi Penerbitan Sertifikat

PP-IRT yang dapat digunakan untuk memproses Sertifikat PP-IRT melalui Apliaksi Online Singel Submission di DPMPT Bantul.

(c) Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT.

Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT dikemas melalui pertemuan yang diikuti oleh pelaku usaha IRTP di Bantul yang telah bersertifikat PP-IRT. Sebanyak 70 orang pelaku usaha IRTP mengikuti acara ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat dipantau konsistensi pelaku usaha IRTP terhadap SPP-IRT yang telah diperolehnya. Selain itu juga dapat dijaring usulan/masukan terkait dengan perbaikan layanan pada IRTP di Kabupaten Bantul.

(d) Pengawasan makanan dan minuman dalam rangka kesiapsiagaan hari raya 2 kali, pemeriksaan sampel makan dan minuman, cetak leaflet kemanan pangan.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan Program promosi kesehatan dengan didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp.1.950.450.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.863.743.150 (95.55%). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain:

a) Kegiatan Promosi Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mempromosikan kesehatan yang terjadi saat ini

kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan akan meningkat dan memandirikan masyarakat untuk lebih bisa menjaga kesehatan Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar Rp989.075.000,-. Capaian realisasi sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp961.970.650,- atau sebesar 97.26%.

Tabel 3.7 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2019

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

(4). Kesehatan Anak Sekolah

Kegiatan pembinaan kesehatan anak sekolah ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada warga sekolah. Kegiatan yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan adalah pelaksanaan kegiatan penjaringan kesehatan siswa baru yang dilakukan di SD, SMP, dan SMA, dengan

pelaksana dari Puskesmas dan pihak sekolah. Hasil penjaringan kesehatan di tingkat SD mencakup 100% siswa kelas satu setingkat SD, 100% siswa kelas satu setingkat SMP, dan 97,22% siswa kelas satu setingkat SMA.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan mempunyai maksud dan tujuan yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehat. Di dukung dengan anggaran APBD sebesar Rp.961.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.901.772.500,- atau 93,80%. Kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan melalui indikator desa siaga. Unit analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4 masalah kesehatan menjadi dusun bebas 4 masalah kesehatan. Hasil penilaian DB4MK tahun 2014-2019 disajikan pada grafik berikut.

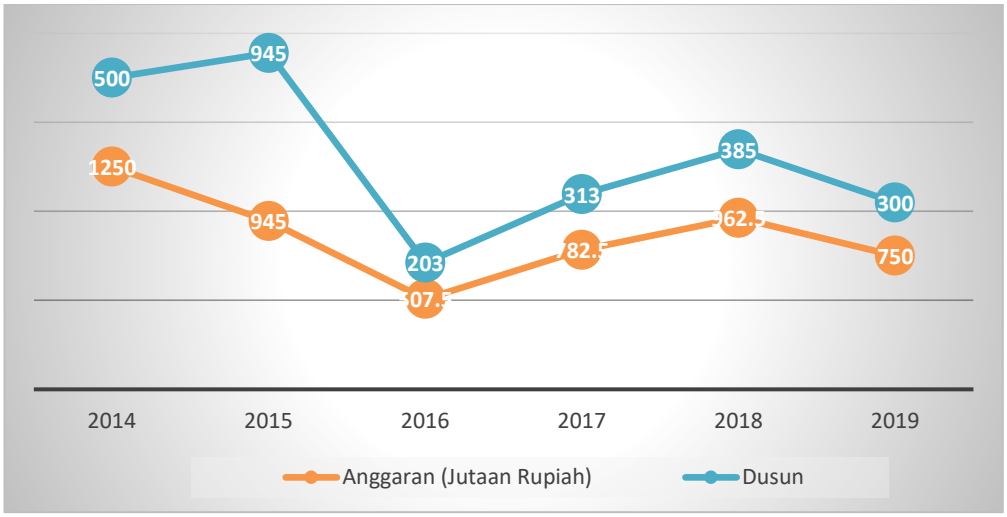

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 1 Capaian DB4MK di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan status gizi yang didukung pagu anggaran APBD sebesar Rp2.612.157.000,-.dengan realisasi sebesar Rp2.442.692.850,- atau sebesar 93.51 %. Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menanggulangi kasus gizi buruk dan stunting, menekan angka kesakitan bayi balita, mencegah kematian bayi baru lahir, mencegah balita stunting dan gizi buruk, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi keluarga dan penanggulangan permasalahan gizi sehingga tercipta generasi sehat dan berkualitas

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

Gambar 3. 1 Deklarasi Penangulangan Stunting di Kabupaten Bantul tahun 2019

Pada tahun 2019 status gizi buruk (BB/U) pada Balita sebesar 0,41% yaitu sebanyak 199 balita gizi buruk dari 48.502 balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR, dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan Kesehatan Lingkungan Masyarakat. Kegiatan pada program pengembangan lingkungan sehat adalah pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan yang didukung pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp3.820.391.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp3.362.083.100,- atau sebesar 88.01 %. Hasil pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah

tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk tahun 2019, Capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dinas Kesehatan berhasil mempertahankan penganugerahan STBM berkelanjutan pada tahun 2019.

b) Kabupaten Sehat

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan, workshop, pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapan lokasi tatanan menuju verfikasi di tahun 2019.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN
SWASTI SABA WISTARA

kepada :

KABUPATEN BANTUL

Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019 untuk Klasifikasi Taraf Pengembangan

(Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/MENKES/664/2019)

Jakarta, 6 November 2019

MENTERI KESEHATAN,

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

Gambar 3. 2 Penghargaan Kabupaten Sehat 2019

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2019 Kabupaten Bantul berhasil menerima Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara

Klasifikasi Pengembangan untuk ketiga kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi dalam penghargaan kabupaten sehat.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Kerja di Kabupaten Bantul, telah dilakukan pendampingan upaya kesehatan kerja pada 444 industri rumah tangga dengan jumlah pekerja 6.241 yang berada di 27 Puskesmas dengan 54 pos UKK. Sejalan dengan peningkatan pelayanan di Puskesmas telah dilaksanakan pembinaan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) di 27 Puskesmas.

Cakupan air bersih pada tahun 2019 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Dalam rangka mendukung pencapaian kualitas air, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pengelola air minum pedesaan (Pamaskarta). Kegiatan pembinaan berupa pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan *workshop* peningkatan kualitas air Pamsimas. Kegiatan diikuti oleh 100 orang dari Pamaskarta.

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk mengendalikan penularan penyakit dan menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular ini didukung oleh Anggaran APBD dan DAK sebesar Rp.918.577.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.774.394.731,- (84,30%) Kegiatan yang dilaksanakan di program ini meliputi:

a) Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit , pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate). Kegiatan ini di dukung oleh pagu anggaran APBD sebesar Rp316.195.000 dengan realisasi sebesar Rp. 246.629.000 (78,99%).

Angka kesakitan DBD pada tahun 2019 sebesar 151.5 per 100.000 penduduk (1424 kasus) jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018 19.52 per 100.000 penduduk (182 kasus). Pada tahun 2019 terdapat 4 kasus kematian penderita DBD, meningkat dibandingkan tahun 2018 di mana di tahun tersebut tidak terjadi kasus kematian akibat DBD.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh

dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di daerah urban dan semi urban, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat internasional. DBD pada umumnya menyerang anak-anak ≤ 15 Tahun, tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan proporsi pada dewasa.

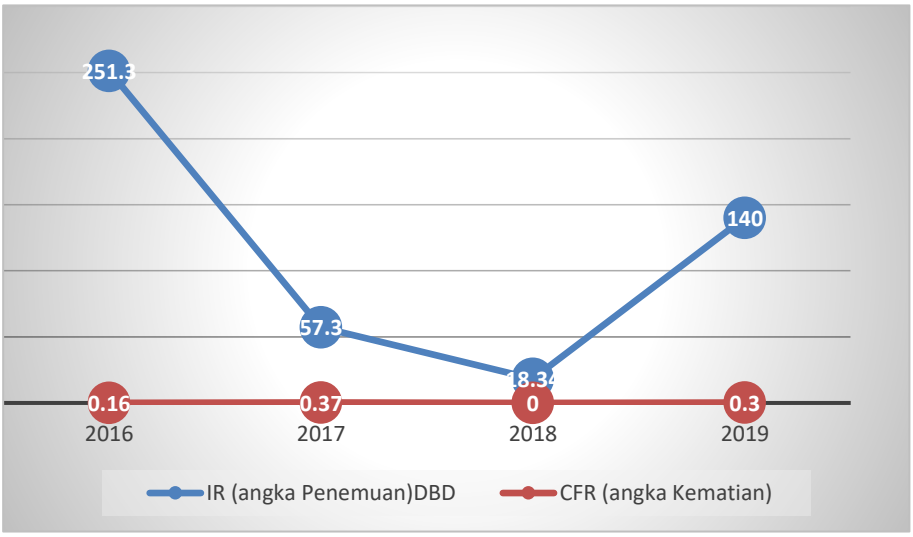

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 2 Angka IR DBD dan CFR DBD Tahun 2016-2019

b) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular di Kabupaten Bantul dengan tolok ukur kinerja meningkatkan angka bebas jentik, meningkatkan penemuan kasus HIV dan AIDS, pelayanan kesehatan orang dengan TBC. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, dengan didanai oleh anggaran DAK dan APBD sebesar Rp 602.382.500,-. Realisasi yang dapat

dicapai selama tahun 2019 sebesar Rp.527.765.731 (87.61 %). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :

(1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium,* yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya. Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TBC Adapun grafik penemuan kasus (*Case Detection Rate*/DR)) dan Angka Kesembuhan TB (*Cure Rate/CR*) dapat dilihat pada grafik berikut :

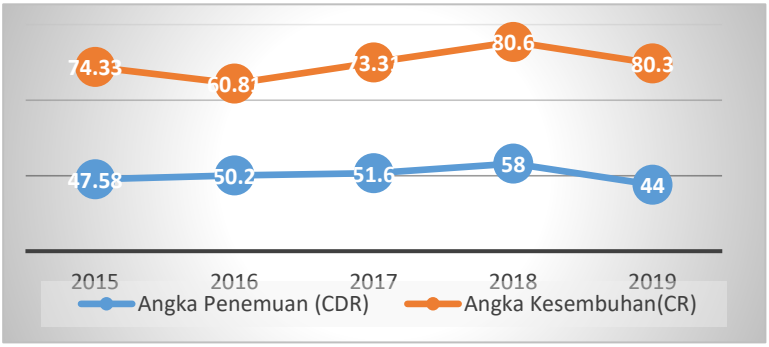

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2019

Grafik 3. 3 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

(2) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2019 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 92 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2019 adalah 9.79 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 10.5 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan.

(3) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut kami sajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2019.

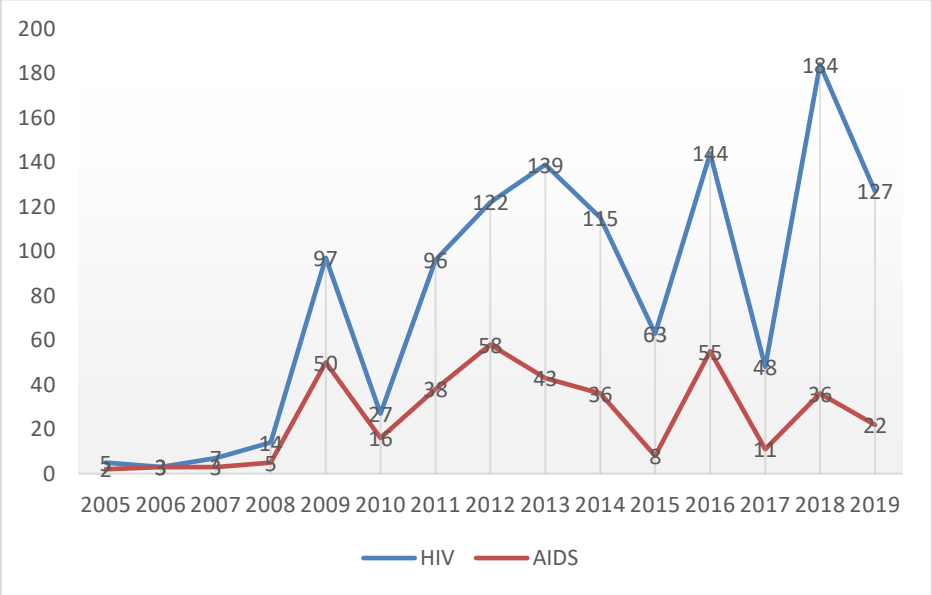

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 4 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2019

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2019 sebesar 0,12% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di bandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan kasus dari 184 kasus menjadi 127 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2019 digambarkan dalam grafik berikut ini :

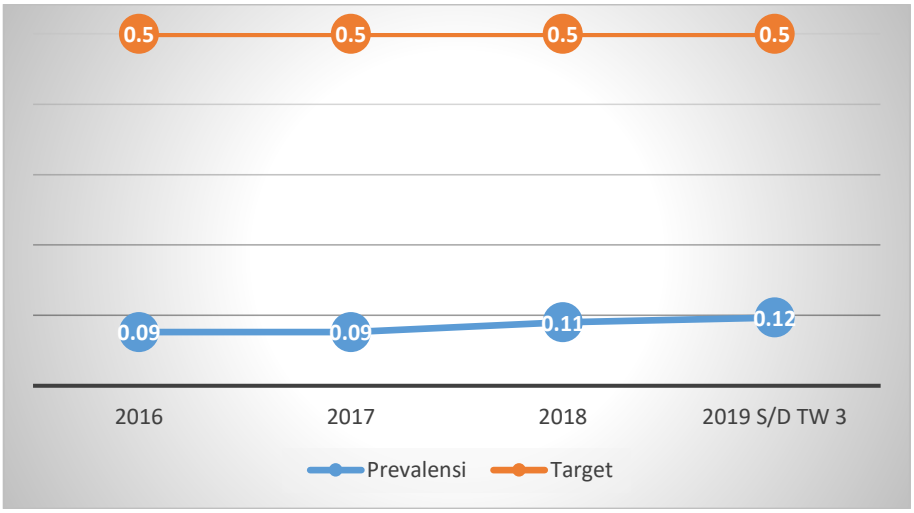

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 5 Prevalensi HIV di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2019

c) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji serta Meningkatnya Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral di dukung oleh pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp392.785.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.212.536.500 (54.11%).

Kendala capaian yang besar ini didapatkan dari kegagalan pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Surveilans sebesar Rp 167.850.000,00 selain juga adanya penurunan kasus dugaan Kejadian Luar Biasa di masyarakat. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji; Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral; Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji; Distribusi Vaksin serta Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji.

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan. Program ini didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar Rp1.402.522.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.306.371.697,- (93.14%). Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini terdiri atas :

a) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan di puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini didukung pagu anggaran sebesar Rp.845.562.300,- dengan realisasi sebesar Rp.737.297.648,-. (89.51%).

b) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana. Kegiatan ini di dukung oleh pagu anggaran APBD sebesar Rp459.135.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp452.009.170,- atau sebesar 98.44%.

Data Cakupan pelayanan PSC 119 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

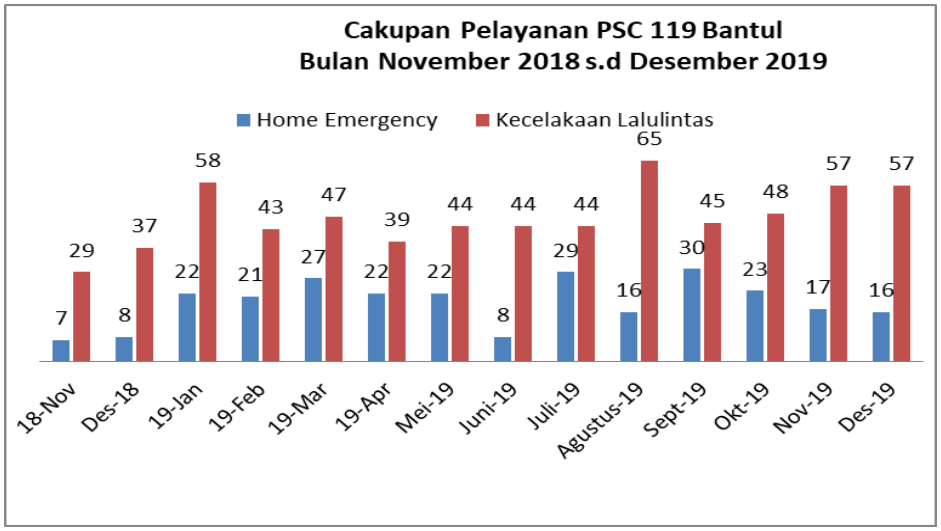

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul , 2019

Grafik 3. 6 Cakupan Pelayanan PSC 119

Pada Tahun 2019 setelah 1 (satu) tahun resmi beroperasi, PSC 119 Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan Gold Award untuk kategori SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto dan diterima oleh Bupati Bantul Drs. H. Suharsono didampingi Kepala Dinas Kesehatan Bantul drg Maya Sintowati Panji M.M

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul , 2019

Gambar 3. 3 Penghargaan Gold Award untuk kategori SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)

c) Kegiatan Pembangunan dan pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk pengembangan data kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran Rp97.825.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp97.064.879,- (99.22 %).

9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan dan maksud adalah program ini adalah terlaksananya pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin ini didukung oleh anggaran APBD sebesar

Rp18.279.898.000- dengan realisasi sebesar Rp17.559.482.634,- (96.05 %). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan Jamkesda pada UPT JAMKESDA bertujuan untuk memenuhi hak setiap penduduk Kabupaten Bantul (masyarakat miskin) dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

10) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Maksud dan tujuan dari program ini adalah terpenuhinya sarana prasarana puskesmas sesuai standar. Program ini di dukung oleh pagu anggaran sebesar Rp16.470.743.900,- dengan realisasi Rp.15.411.242.030,- (93.56%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp5.019.900.000,- dengan realisasi Rp.4.572.427.000,- (91.08%).

b) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

Kegiatan dengan pagu anggaran DAU dan DAK Rp6.825.765.900,-ini dilaksanakan pada tahun 2019. Capaian untuk kegiatan ini sebesar Rp6.352.755.541,- (92.98%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(1) Pengadaan Ambulan Transport Single Gardan dengan lokasi Sewon II, Jetis II, Banguntapan III
(2) Pengadaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator set/Energi terbarukan) dengan lokasi

puskesmas Bantul II, Pandak II, Imogiri I, Imogiri II, Sewon I, Jetis II, Sanden, Srandakan.

(3) Pembangunan Instalasi Pengolahan limbah (IPL) dengan Lokasi Puskesmas Kretek

c) Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran dari dana DAK dan DAU sebesar Rp4.625.078.000,- Realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp4.486.059.489 (96.99%)

fokus kegiatan ini adalah

(1) Pembangunan Public Service Center (PSC) di Bantul

(2) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Kretek

11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan memperluas mitra kerjasama untuk dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan penanganan masalah kesehatan dan didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar Rp460.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.453.499.872 (98,55%).

12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pelayanan dan penyuluhan kesehatan

anak Balita. Program ini didukung pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp.164.720.000,-.Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita. Pada tahun 2019 realisasi kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita adalah sebesar Rp.163.220.000,-atau sebesar 99.08%.

Pada tahun 2019 jumlah absolut kematian bayi sebesar 109 kasus meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 107 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 8,33% terjadi kenaikan dibanding tahun 2018 sebesar 8,28 per 1.000 kelahiran hidup, melebihi target renstra sebesar 8,2 per 1.000 kelahiran.

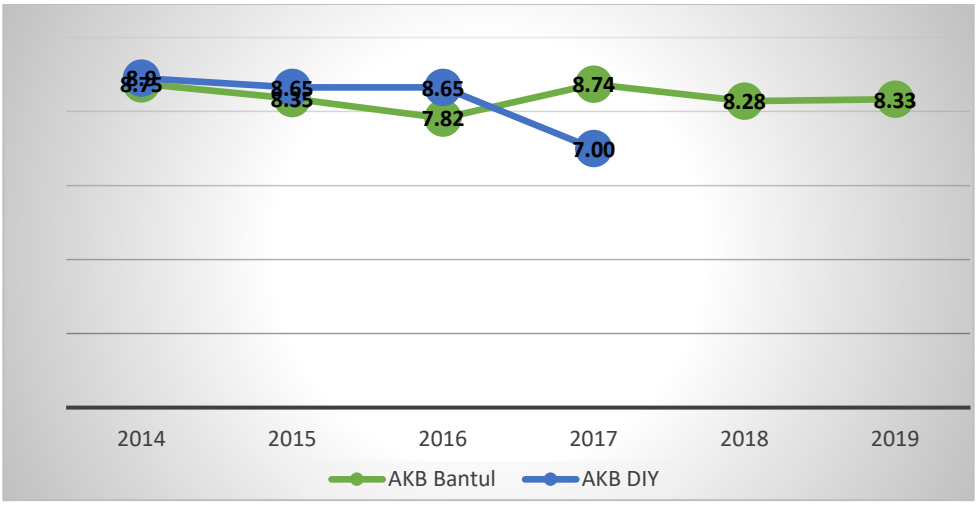

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

Grafik 3. 7 Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2014- 2019

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan

(DB4MK), meningkatkan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Maksud dan tujuan dari program ini adalah Meningkatkan kesehatan Lanjut Usia. Program ini didukung pagu anggaran APBD sebesar Rp147.000.000,- Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan IV 2019 adalah sebesar Rp. 138.684.992 atau sebesar Rp. 94.34%. Kegiatan yang dilaksanakan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1034 unit. Kegiatan di Posyandu lansia meliputi sekreening, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

14) Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang di dukung anggaran sebesar Rp5.035.920.058,- yang terdiri dari DAK dan APBD Realisasi Keuangan sampai dengan desember 2019 adalah sebesar Rp.2.110.373.361,- atau sebesar (41.90%).

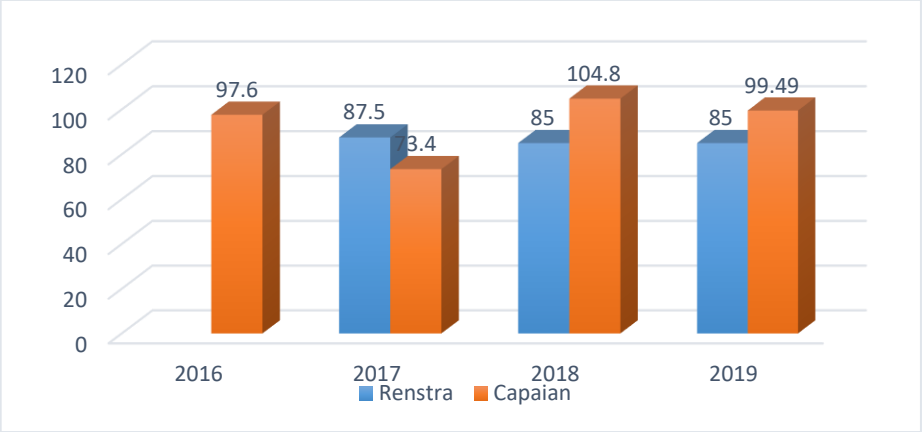

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Grafik 3. 8 Capaian Angka Kematian Ibu dan Target Renstra

Kegiatan yang dilakukan karena adanya kejadian kematian ibu adalah Audit Maternal Perinatal (AMP). AMP dilakukan pada semua kasus kematian ibu untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 yang tinggi adalah pendarahan (28,8%), eklampsi (27,11%) dan penyakit penyerta (25%). Sedangkan di luar ketiga hal tersebut prosentasenya di bawah 10%.

15) Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular serta mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa. Program ini didukung dengan kegiatan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit tidak menular dengan dana APBD sebesar Rp.1.869.610.892,-. Realisasi yang di capai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.790.396.000,- atau sebesar 95.76%.

Permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kesehatan disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.8 Permasalahan dan Solusi Dalam Urusan Kesehatan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Masih di atas target	1. Pelatihan / *update knowledge* EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas 2. Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil DIWAJIBKAN minimal 1 kali atau sesuai indikasi 3. Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regio puskesmas 4. Pengadaan USG untuk Puskesmas 5. Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru 6. Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah 7. Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang 8. Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko 9. Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up) 10. Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi

No.	Permasalahan	Solusi
		pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan
2.	Peningkatan Tajam Kasus DBD	➢ Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia ➢ Mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue ➢ Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD ➢ Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN ➢ Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan ➢ Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan. ➢ Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue ➢ Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik. ➢ Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE ➢ KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor ➢ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN
3	Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	➢ Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul ➢ Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas ➢ Deteksi dini pada penderita retardasi mental

No.	Permasalahan	Solusi
		➢ Pengobatan dan pemantaun keteraturan minum obat.
4	Banyak pasien HIV AIDS yang loss to follow up	➢ Validasi data layanan LFU (Lost Follow Up) dan kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah ditingkatkan dengan harapan pasien LFU dan alpa dapat ditekan untuk masa yang akan dating

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh masing-masing OPD terurai sebagai berikut:

A. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
   b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
   c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   a) Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
   b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
   c) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor ;
   d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   e) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
   a) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan;
   b) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan;

4) **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**
   a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat;

5) **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**
   a) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
   b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
   c) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

6) **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
   a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku;
7) **Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
   a) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya;
   b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
8) **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
   a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
   b) Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah
   c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
9) **Program Pengendalian Banjir**
   a) Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai
10) **Program Pembangunan Gedung**
   a) Kegiatan Pembangunan Gedung
11) **Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
   a) Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
   b) Kegiatan Peningkatan jalan
12) **Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan**
   a) Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong

13) **Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan**
    a) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan
14) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
    a) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
    b) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.667.513.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.243.752.000,00 atau tercapai 84,11% dengan efisiensi sebesar Rp.417.600.000,00.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk melakukan optimalisasi fungsi saluran irigasi agar dapat bermanfaat dalam penyediaan air irigasi. Anggaran program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya sebesar Rp. 19.639.796.950,00 dengan realisasi Rp. 18.127.216.505,00 atau 92,30%

Program ini mendukung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu kecukupan air irigasi.

Di kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.9 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi

Tahun 2016 – 2019

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19

Sumber: DPUPKP, 2019

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

   Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengembangan dan perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 301.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 298.560.000,00 atau tercapai 99,07% dengan efisiensi sebesar Rp.2.970.000,00.

2) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.18.989.096.950,00 terealisasi sebesar Rp.17.483.279.505,00 atau tercapai 92,07% dengan efisiensi sebesar Rp. 949.627.950,00

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(a) Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI)
(b) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale
(c) Rehabilitasi Gorong-Gorong
(d) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air

3) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada UPTD Pengamatan Pengairan Bedog dan Winongo Kecil, Opak Oyo, dan Winongo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.349.350.000,00 terealisasi sebesar Rp.345.377.000,00 atau tercapai 98,86% dengan efisiensi sebesar Rp.3.973.000,00

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(a) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi:
(b) Pengelolaan bendung untuk penyediaan air irigasi bagi petani

(c) Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air pada musim hujan

3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan cakupan penyediaan air baku. Anggaran program ini Rp.133.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.132.065.000,00 atau tercapai 98,74%.Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan prasarana penyediaan air baku yaitu pemeliharaan sumur bor. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.133.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.132.065.000,00 atau tercapai 98,74% dengan efisiensi sebesar Rp.470.000,00

4) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber mata air dalam mendukung penyediaan air irigasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, dan sumber daya air lainnya.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan:

1) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar

Rp.1.289.775.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.255.725.000,00 atau tercapai 97,36% dengan efisiensi sebesar Rp.29.225.000,00.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan output kegiatan berupa :

(a) Pembangunan Embung Kaliurang dan Embung Pokoh II di Kecamatan Dlingo,
(b) Embung Mrican di Kecamatan Pandak,
(c) Embung Tuk Demen di Kecamatan Pajangan dan
(d) Embung Tuk Siloning di Kecamatan Kretek.

2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.69.050.000,00 terealisasi sebesar Rp.67.760.000,00 atau tercapai 97,36%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan output kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan rambu larangan sebanyak 27 unit.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air

bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan. Anggaran program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sebesar Rp. 15.307.328.200,00 dengan realisasi Rp. 14.882.342.000,00 atau 97,22% dengan efisiensi sebesar Rp.194.756.333,00

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.156.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.152.231.000,00 atau tercapai 97,52% dengan efisiensi sebesar Rp.1.869.000,00.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dokumen kajian air minum dan sanitasi sebanyak 2 paket dalam rangka pemetaan sarana prasarana air minum dan sanitasi di Kabupaten Bantul.

1) Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

   Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyediaan sarana dan prasarana air minum.

   Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.4.469.244.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.304.480.000,00 atau tercapai 96,31% dengan efisiensi sebesar Rp.104.678.000,00

6) Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan lokasi penanganan banjir baik dari sungai maupun afvour akibat curah hujan yang tinggi. Anggaran program Pengendalian Banjir sebesar Rp. 15.522.509.800,00 dengan realisasi Rp14.294.826.000,00 atau tercapai 92,09%.

Dari 18 lokasi yang menjadi target kinerja tahun 2019 terealisasi 17 lokasi penanganan banjir atau 94,44% dari target.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.522.509.800,00 terealisasi sebesar Rp. 14.294.826.000,00 atau tercapai 92,09% dengan efisiensi sebesar Rp.1.197.430.600,00.

7) Program Pembangunan Gedung

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas gedung pemerintah dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. Anggaran program Pembangunan Gedung sebesar Rp.10.979.075.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.598.192.000,00 atau tercapai 96,53%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung pemerintah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.979.075.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.598.192.000,00 atau tercapai 96,53% dengan efisiensi sebesar Rp. 376.802.461,00.

8) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatnya kualitas jalan kabupaten dalam mendukung pencapaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan:

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 16.171.192.500,00 terealisasi sebesar Rp. 15.807.133.615,00 atau tercapai 97,75% dengan efisiensi sebesar Rp.376.802.461,00.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Rehabilitasi jembatan secanyak 6 unit yaitu Jembatan Pokoh, I, Jembatan Widuri, Jembatan Jragan I, Jembatan Ngentak, Jembatan Jarakan Sewon dan Jembatan Mangir.

(2) Pemeliharaan rutin jalan sebanyak 57 ruas.

b) Kegiatan Peningkatan jalan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.64.044.849.478,00 terealisasi sebesar Rp.54.236.725.135,00 atau tercapai 84,69% dengan efisiensi sebesar Rp.4.788.731.400,00.

.

Program ini mendukung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yaitu Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 75,08%, realisasi sebesar 75,10%, tercapai 100,70% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2019 sepanjang 465,73km atau 75,10% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 158,74km atau 25,42% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km.

9) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong. Anggaran program Pemabngunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dranase/ Gorong-gorong sebesar sebesar Rp.10.455.152.200,00 terealisasi sebesar Rp.10.074.801.000,00 atau tercapai 96,36%.

Indikator kinerja program ini adalah tertanganinya drainase jalan kabupaten, dengan formulasi panjang drainase terangani dengan target 500m. Capaian pada tahun 2019 berhasil tertangani 924m atau 184,8%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong

   Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong.

   Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.455.152.200,00 terealisasi sebesar Rp.10.074.801.000,00 atau tercapai 96,36% dengan efisiensi sebesar Rp.377.250.200,00.

   Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan dan rehabilitasi gorong-gorong sebanyak 8 unit, talud jalan sebanyak 26 unit dan gorong-gorong sebanyak 15 unit.

10) Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan penanganan infrastruktur perdesaan. Anggaran program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebesar Rp. 31.965.071.200,00 terealisasi sebesar Rp. 27.872.192.299,00 atau tercapai 87,20%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan

   Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 31.965.071.200,00 terealisasi sebesar Rp. 27.872.192.299,00 atau tercapai 87,20% dengan efisiens sebesar Rp.2.751.903.900,00.

11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi usaha jasa konstruksi. Anggaran program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp. 1.109.496.000,00 dengan realisasi Rp. 854.189.500 atau 76,99%

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan kompetensi tukang serta usaha jasa konstruksi lainnya.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 908.496.000,00 terealisasi sebesar Rp. 656.220.000,00 atau tercapai 72,23%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil, dan peningkatan kapasitas SDM.

2) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan teknolog informasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 201.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 197.969.500,00 atau tercapai 98,49%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan dan aplikasi, kajian Indeks Kepuasan

Masyarakat dalam Layanan Infrastruktur dan Survey Kinerja Rekanan.

Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Permasalahan	Solusi
1	Semakin besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten	Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.
2	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah (seperti : material dan tenaga kerja) dalam pemenuhan infrastruktur dasar	Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah
3	Belum optimalnya pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi untuk pengurangan ketimpangan wilayah.	Optimalisasi pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi
4	Masih rendahnya kualitas jasa konstruksi khususnya di bidang pengembangan permukiman	Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
5	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan dan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan dan irigasi
6	Terbatasnya pilihan alternatif pendanaan infrastruktur	Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat/swasta untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur.
7	Belum optimalnya pengelolaan cadangan air irigasi	Pengembangan dan pengelolaan air baku
8	Masih rendahnya cakupan pelayanan PDAM	Pengembangan sarara prasarana jaringan perpipaan PDAM

9	Rendahnya pelibatan peran serta masyarakat dalam penyediaan air bersih komunitas dan pengelolaan sanitasi masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam pengelolaan ari bersih dan sanitasi berbasis masyarakat
10	Belum optimal koordinasi bidang air bersih	Peningkatan koordinasi bidang air bersih
11	Belum optimalnya kinerja pengembangan sanitasi komunal	Peningkatan kinerja pengembangan sanitasi komunal

Sumber: DPUPKP, 2019

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh masing-masing OPD terurai sebagai berikut:

A. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

1) Program Pengembangan Perumahan
   a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;
   b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan perumahan;
   c) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
   d) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
   a) Penanganan Kawasan Kumuh;
3) Program pengelolaan areal pemakaman
   a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan dan pemukiman rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni. Anggaran Program Pengembangan Perumahan adalah sebesar

Rp.1.457.628.422,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.412.430.045,00 atau tercapai sebesar 96,90%

Indikator kinerja program ini adalah Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari 49% target yang ditetapkan pada tahun 2019 tercapai 80,74% atau 164,78% dari target atau 4.605 unit dari jumlah RTLH 5.703 unit.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan:

a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunana kebijanan program perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.309.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.308.323.000,00 atau tercapai 99,72%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

a) Penyusunan Dokumen Kajian Penyerahan Fasum dan Fasos,
b) Penyusunan Dokumen Kajian Penyelenggaraan Perumahan,
c) Penyusunan Dokumen Pemetaan RTLH dan
d) Pembuatan Sistem Informasi Jalan Desa

b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan perumahan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunana kebijanan program perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar

Rp.67.495.000,00 terealisasi sebesar Rp.61.754.000,00 atau tercapai 91,49%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan / pembuatan SIM Perumahan.

c) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan kebijanan program perumahan. Pagu anggaran kegiatan pada DPA Belanja Langsung di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Rakyat sebesar Rp.301.519.000,00 terealisasi sebesar Rp.284.155.900,00 atau tercapai 94,24%. Sedangkan belanja tidak langsung pada DPA PPKD adalah sebesar Rp.4.237.500.000,00

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pendampingan terhadap penerima manfaat bantuan stimulasi pembangunan rumah swadaya baik sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD Kabupaten Bantul. Sebesar 245 unit Rumah Tidak Layak Huni dientaskan mnejadi Rumah Layak Huni dengan anggaran APBD dan DAK.

d) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman (RSP). Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 779.414.422,00 terealisasi sebesar Rp.758.197.145,00 atau tercapai 97,28%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas desa.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

a) Penanganan Kawasan Kumuh;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menangani Kawasan kumuh. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 756.275.000,00 terealisasi sebesar Rp.732.790.000,00 atau tercapai 96,89%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas desa.

3) Program pengelolaan areal pemakaman

a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman (RSP). Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 779.414.422,00 terealisasi sebesar Rp.758.197.145,00 atau tercapai 97,28%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penanganan Kawasan kumuh pada 2 lokasi yaitu Kawasan kumuh Dusun Salakan Kecamatan Sewon dan Kawasan Kumuh Dusun Jaranan Kecamatan Banguntapan.

Tabel 3.11 Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Perumahan

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu	Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
2	Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu	Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
3	Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.	Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
4	Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.	Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni.

Sumber: DPUPKP, 2019

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Istilah ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah: “tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan, misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang atau tidak gelisah, tenang hati, pikiran. Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2) Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat (Kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal;
3) Program peningkatan ketertiban dan keamanan;
4) Program penegakan peraturan daerah.
5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
6) Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan urusan ini adalah: (1) Persentase Penegakan Perda dan (2) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3). Program yang mendukung tercapainya IKU tersebut adalah:

1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dengan anggaran Rp 644.431.000,00. Realiasasi anggaran sebesar Rp 641.350.000,00 atau sebesar 99,52 Indikator kinerja program ini adalah rasio Linmas dengan RT, dengan target 98% pada tahun 2019, tercapai 98 %, yaitu jumlah Linmas sebanyak 6.522 dan jumlah RT sebanyak 5.899.

2) Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp161.318.000,00, adapun realisasi anggaran sebesar Rp161.000.000,00 atau sebesar 99,8%. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan ketrampilan penyelamatan (rescue), penyuluhan bina masyarakat, dan peningkatan kapasitas aggota Satlinmas di 17 kecamatan.

3) Pemberdayaan Linmas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp 483.113.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 480.350.000,00 atau sebesar 99,4%. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Linmas dalam pelaksanaan HUT Sat Pol PP dan Linmas, dan Posko Siaga Bencana.

4) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator kinerja program ini cakupan pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut adalah 100%. Program ini didukung kegiatan operasi pengamanan dan patroli wilayah, dengan anggaran sebesar Rp 701.080.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp 701.080.000,00 atau 99,99%.

5) Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 436.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 433.680.000,00 atau 99,38%. Kegiatan patroli wilayah dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari. Hal ini dilakukan untuk menjaga Kantrantibmas di Wilayah Kabupaten Bantul serta untuk menertibkan pelanggaran Perda yang ada. Pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta tamu ataupun kegiatan organisasi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan pengamanan.

6) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. dengan anggaran Rp 563.262.000,00 dan realisasi sebesar Rp 562.475.000 atau 99,86%. Kurang maksimalnya realisasi ini dikarenakan dalam kegiatan ini terdapat anggaran/dana cadangan yang digunakan untuk penanganan konflik. Anggaran ini digunakan jika terdapat konflik, seperti demonstrasi atau kerusuhan. Indikator

kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib dengan target capaian sampai tahun 2019 adalah 19 kawasan. Target ini tercapai 100%.

7) Penegakan Perda

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 513.014.000,00 dan realisasi sebesar Rp 510.317.000,00 atau 99,47%. Indikator kinerja program ini adalah cakupan pelanggaran Perda yang ditindak dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.

(a) Operasi Penegakan Perda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp381.425.000,00 dan realisasi Rp 378.897.000,00 atau sebesar 99,33%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain operasi yustisi dan non yustisi terhadap pelanggaran Perda. Dari target 120 kali operasi terlaksana 100%.

(b) Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan ini dilaksankan anggaran Rp. 131.589.000,00 dan realisasi Rp 131.420.000,00 atau 99,87%. Output dari kegiatan ini adalah:

(1) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi sebanyak 3 (tiga) kali dan diikuti oleh 120 orang.

(2) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan Narkoba sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti oleh 160 orang.

(3) *Workshop* pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti oleh 160 orang.

(c) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp149.970.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.720.000,00 atau 93,88%. Output dari kegiatan ini adalah workshop pemberantasan barang kena cukai illegal dan operasi cukai ilegal di Kabupaten Bantul.

6. SOSIAL

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Sosial selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS
b) Peningkatan Kualitas Kampanye sosial pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
d) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

2) Program Permberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

a) Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
b) Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin
c) Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a) Peningkatan kualitas SDM kesejahhteraan sosial masyarakat.

b) Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional.

c) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.

4) Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial

a) Updating Keluarga Miskin

b) Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung anggaran pada APBD murni sebesar Rp. 8.491.075.000,00 penyerapan anggaran adalah sebesar Rp.8.351.093.100,00,00 atau 82,86%. Meski demikian capaian kegiatan fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan APBD Rp 7.174.154.000,00

b) Peningkatan Kualitas Kampanye sosial pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan APBD Rp 278.275.000,00

c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan APBD Rp 673.937.000,00

d) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya praktik prostitusi.

Selanjutnya keluaran atau kegiatan dari program ini secara rinci dijabarkan melalui pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS

(1) **Pelayanan Jamkesus**

Pelaksanaan Jamkesus di Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dengan jumlah target peserta/pasien sebanyak 500 orang peserta jamkesus, adapun kegiatan Pelayanan Jamkesus Terpadu ini dilaksanakan pada tgl 6 Agustus 2019 di Aula Pemda II Manding Trirenggo Bantul.

(2) **Workshop Lansia**

Pelaksanaan workshop lansia sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 100 orang, dan dilaksanakan pada :

(a) 10 April 2019 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul (50 orang)

(b) 3 September 2019 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul (50 orang)

(3) **Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019, dilaksanakan kegiatan antara lain :**

(a) Senam bugar Lansia dilaksanakan tgl 26 April 2019 di Lapangan Trirenggo Bantul

(b) Sarasehan dilaksanakan tgl 25 Juni 2019 di Aula Pemda II Manding Trirenggo Bantul

Adapun peserta kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ini sebanyak 1800 orang.

(4) **Permakaman Panti-Panti**

Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul memberikan fasilitas berupa konsumsi kepada Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk kegiatan panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tahun 2019, dengan besarnya dana Rp 105.000.000. Tahun 2019 diberikan kepada 14 Panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

(5) **Program Boga Sehat**

Sebagai langkah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul memberikan fasilitas berupa pemberian asupan makanan begizi kepada Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat . Adapun jumlah Penerima Manfaat sebanyak 900 orang dari 11 Kecamatan dan 53 Desa. Boga Sehat diberikan selama 300 hari dengan besar dana Rp 6.075.000.000,-. Adapun besaran anggaran setiap Penerima Manfaat sebesar Rp. 22.500 per hari.

Pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 504.085.000 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 7.174.154.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,8 %.

(6) **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampanye sosial pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS**

Sosialisasi PMKS, dengan jumlah peserta 250 orang dilaksakan selama 5 hari, antara lain **:**

(a) Balai Desa Parangtritis Kretek Bantul dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan peserta 50 orang

(b) Krapyak Wetan Panjangrejo Pundong Bantul dilaksanakan tanggal 21 Februari 2019 dengan peserta : 50 orang

(c) Aula Kecamatan Piyungan Bantul dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan jumlah peserta 50 orang

(d) Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul dilaksamnakan pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan peserta 50 orang

(e) Balai Desa Trimurti Srandakan Bantul dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan peserta 50 orang

(7) Razia Anjal Gepeng dan Psikotik

Kegiatan ini bekerjasama dengan Satpol PP Kab Bantul dan Sat Sabhara Polres Bantul , kegiatan dilaksanakan sebanyak 12 kali, mendapatkan 21 orang anjal gepeng/psikotik, dengan rincian sebagai berikut :

(a) 4 Oktober 2019 (1 orang anjal gepeng/psikotik)
(b) 6 November 2019 (2 orang anjal gepeng/psikotik)
(c) 14 November 2019 (3 orang anjal gepeng/psikotik)
(d) 22 November 2019 (2 orang anjal gepeng.psikotik)
(e) 26 November 2019 (1 orang anjal gepeng/psikotik)
(f) 30 November 2019 (3 orang anjal gepeng/psikotik)
(g) 3 Desember 2019 (3 orang anjal gepeng/psikotik)
(h) 5 Desember 2019 (2 orang anjal gepeng/psikotik)
(i) 9 Desember 2019 (0 orang anjal gepeng/psikotik)
(j) 11 Desember 2019 (2 orang anjal gepeng/psikotik)
(k) 13 Desember 2019 (0 orang anjal gepeng/psikotik)
(l) 14 Desember 2019 (2 orang anjal gepeng/psikotik)

(8) Penjangkauan oleh TRC Kab Bantul

Penjangkauan PMKS yang dilakukan oleh TIM Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bantul, berupa mengantar dan menjemput klien ke/dari rumah sakit/panti rehab, seperti RSJ Ghrasia Pakem, RSJD Dr.Soedjarwadi Klaten, Panti Margo Laras Pati dll. Selama tahun 2019 TRC Kab Bantul telah mengantar dan menjemput klien (mayoritas psikotik) sebanyak 34 kali. TRC Kab Bantul mendapatkan honor Rp175.000/per bulan selama 12 bulan penuh.

(9) Pemakaman Jenazah terlantar.

Untuk pemakaman jenazah terlantar tahun 2019, Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul menyiapkan dana untuk 30 jenazah (Rp 1.650.000,00 per jenazah), untuk perawatan dan pemakamannya. Tahun 2019 melaksanakan pemakaman sebanyak 22 orang jenazah terlantar.

Permasalahan :

Rujukan dan pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pemakaman jenazah terlantar karena berupa layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan. Hal ini juga dipengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.

Pada Progam Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial jumlah anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 399.500.000,- dengan capaian realisasi sebesar 80 % atau Rp. 318.609.900,-. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah anggaran adalah sejumlah Rp 278.275.000,- dengan capaian realsiasi sebesar 82% atau Rp. 229.160.000,-.

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS

(1) **Kegiatan Family Gathering (60 orang)**

Pelaksanaan : Sabtu, 16 Februari 2019 di Taman Wisata Kaliurang Sleman dengan peserta sejumlah 30 anak dan 30 wali/orangtua.

(10) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi LU Potensial (60 orang)

Pelaksanaan: 17 Juni 2019 di Balai Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul dengan peserta: 60 orang lansia

(11) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Rentan Sosial (160 orang)

Pelaksanaan:

(a) 30 April 2019 dan 1 Mei 2019, dengan peserta 40 orang (wanita rentan sosial ekonomi/janda) dan dilaksnakan di Triharjo Pandak

(b) 16 dan 17 Juli 2019 peserta 40 orang (wanita rentan sosial ekonomi/janda) dilaksanakan di Sidomulyo Bambanglipuro

(c) 25 dan 26 September 2019 peserta 40 orang (keluarga pemulung) dan dilaksanakan di Sitimulyo Piyungan

(d) 11 dan 12 November 2019 peserta 40 orang (Penyandang Disabilitas) dilaksanakan di Sumbermulyo Bambanglipuro

(12) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi PMKS (150 orang)

(a) 9 dan 10 April 2019, jumlah 30 orang (Exs NAPZA) di Kopi Kampung Ambarukmo Banguntapan Bantul.

(b) 22 dan 23 April 2019, jumlah 30 orang (Wanita Tuna Sosial) di Gedung Merpati Putih Parangtritis Kretek Bantul.

(c) 24 dan 25 April 2019 jumlah 30 orang (Penyandang Disabilitas) di Panti Bina Insan Mandiri Sedayu Bantul.

(d) 20 dan 21 Agustus 2019 jumlah 30 orang (Janda) di Balai Desa Pleret Pleret Bantul.

(e) 22 dan 23 Agustus 2019 jumlah 30 orang (Janda) di Kecamatan Dlingo Kab. Bantul.

(13) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

19 Juni 2019 dengan jumlah peserta 50 orang dan dilaksanakan di Balai

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Bantul

(14) Kegiatan Pembinaan Bagi Klien Panti

18 Juni 2019, dengan peserta 40 orang anak Panti dan dilaksanakan di Panti Asuhan “Amanah” Trimulyo Jetis Bantul.

(15) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

24 Juni 2019, peserta 50 orang Anak Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Bina Insan Mandiri Sedayu.

(16) Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana bagi Difabel

20 Juni 2019, peserta 50 orang Penyandang Disabilitas dan dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Bantul

(17) Kegiatan Workshop Untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

24 September 2019, peserta 50 orang Pengidap HIVAIDS dan dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Rohan Banguntapan Bantul

(18) Kegiatan Workshop Untuk Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA)

17 Oktober 2019, peserta 50 orang Anak dengan HIV-AIDS dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Rohan Banguntapan Bantul

Adapun ditahun 2019 ada beberapa kendala antara lain :

(1) Permasalahan, untuk jenis pelatihan ketrampilan bisa memenuhi keinginan/bakat masing-masing peserta.

(2) Upaya Pemecahan Masalah, penentuan jenis pelatihan ketrampilan sesuai hasil bermusyawarah dengan pendamping.

Pada progam Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlah anggaran pada tahun 2018 sejumlah Rp. 728.900.000,- dengan capaian realisasi mencapai 91 % atau sebesar Rp. 662.782.150,-. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah anggaran pada progam ini sejumlah Rp.673.937.000,- capaian realisasi mencapai 91% atau Rp.614.237.000,-.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi

(1) **Sosialisasi P4GN**

(a) 29 April 2019 kegiatan dilaksanakan di Aula SMA Negeri 2 Bantul dengan jumlah peserta 40 orang;

(b) 27 Agustus 2019 kegiatan dilaksanakan di Gedung Induk Mandala Saba Pracima Parasamya Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 40 orang;

(c) 6 November 2019 kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Simak Panggungharjo Sewon Bantul dengan jumlah peserta 40 orang;

(d) 7 November 2019 kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Simak Panggungharjo Sewon Bantul dengan jumlah peserta 40 orang.

(19) Workshop Anti Napza, dilaksanakan sebanyak 2 kali antara lain :

(a) 5 Juli 2019 di Rumah Makan Simak Panggungharjo Sewon Bantul, dengan jumlah 40 anak/peserta dari FORLANZA;

(b) 30 September 2019 di Universitas PGRI Yogyakarta, dengan jumlah peserta 40 anak/peserta.

(20) Sosialisasi Pembentukan Lingkungan Sehat bagi PMKS

(a) 27 Juni 2019 kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Simak Panggungharjo Sewon Bantul, dengan jumlah peserta 40 orang;

(b) 12 September 2019 kegiatan dilaksanakan di Rumah Budaya Tembi Sewon Bantul, dengan jumlah peserta 40 orang;

(c) 28 Oktober 2019 kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Gendal Gendul Patalan Jetis Bantul, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang waria.

Pada Program Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi ini anggaran pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 144.785.000,- dengan capaian realisasi sebesar 96 % atau Rp.138.248.950,- Sedangkan pada tahun

2019 sejumlah Rp. 364.709.000,- dengan capaian realisasi sebesar 98 % atau Rp. 357.509.000,-.

2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial

Dengan mendayagunakan SDM sebanyak 280 orang dana sebesar Rp 1.171.719.900,00 yang kemudian dilaksanakan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.153.669.900,00 program ini menghasilkan keluaran berupa :

a) Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dengan APBD Rp 76.250.000,00;
b) Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin dengan APBD Rp 602.987.500,00
c) Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan dengan APBD Rp 474.432.400,00

Keluaran atau kegiatan dari program ini secara rinci adalah sebagai berikut:

(2) Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin.

(1) Penyuluhan pengembangan KUBE PKH di enam lokasi penerima KUBE, yaitu kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Sanden, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Banguntapan 2 lokasi, dan kecamatan Bantul. Adapun pelaksanaan penyuluhan KUBE pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2019

(2) Bimbingan tehnis untuk KUBE fakir miskin yang baru dilaksanakan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul. Kabupaten bantul mendapatkan KUBE tahun 2019 sebanyak 30 kelompok dengan lokasi 15 kelompok di Kecamatan Pandak dan 15 kelompok di kecamatan Kretek. Adapun pelaksanaan bimtek pada bulan Juli 2019.

(3) Monitoring pelaksanaan KUBE tahun 2019 yang merupakan bantuan dari kementrian Sosial RI ada di kecamatan Kretek dan di kecamatan Pandak sebanyak 30 kelompok.

(4) Pemilihan KUBE berprestasi

Pemilihan KUBE berprestasi diawali dengan presentasi ketua KUBE dari setiap kecamatan, kemudian diambil 6 terbaik untuk dilakukan tinjauan lapangan, baru ditentukan kejuaraannya. Untuk hasil kejuaraan sebagai berikut :

(a) KUBE sejahtera XII Projotamansari DS 050 Cengkehan, Wukirsari
(b) KUBE PKH IMPIAN 11, Ngestiharjo, Kasihan
(c) KUBE Sejahtera XV BT.DS.007, Mulyodadi, Bambanglipuro
(d) KUBE KMM Ceme, Jatimulyo, Dlingo
(e) KUBE Melati Jatimulyo, Dlingo

(f) KUBE sejahtera XVI BT DS. 002 Balakan, Sumberagung, Jetis

Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin.

Merupakan kegiatan pendampingan bagi bantuan sosial dari Kementrian Sosial Republik Indonesia antara lain kegiatan program, PKH, KUBE PKH dan WRSE dan Pendampingan bantuan sosial dari APBD Kabupaten bantul antara lain Bantuan sosial WRSE peserta PKH. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bantuan agar sampai kepada warga miskin sebagai sasaran program. Kegiatan ini menggunakan dana anggaransebesar 602.987.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 595.677.500,00 serapan anggarannya adalah 98.8% dan capaian fisik sebesar 100%.

Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan

(1) Sosialisasi Bantuan Sosial (Bansos pangan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non tunai)

Sosialisasi BPNT dengan menghadirkan Tim Koordinasi BPNT tingkat Kabupaten, camat, Lurah dan TKSK se Kabupaten Bantul dilaksanakan di gedung pertemuan PEMDA Mandding II.

(2) Rapat koordinasi dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan sekali. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama 12 bulan mulai bulan Januari Sampai dengan Desember 2019, jumlah penerima 97.472 KPM masing-masing KPM mendapatkan Rp. 110.000,- untuk dibelanjakan sembako berupa beras dan telur.

(3) Bimbingan teknis RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Verifikasi calon penerima bansos RTLH di 14 kecamatan yang meliputi kecamatan Dlingo, Pleret, Pundong, Jetis, Pandak, Piyungan, Kasihan, Sedayu, Bambanglipuro, Kretek, Sewon, Bantul, Srandakan dan Sanden . Bantuan sosial RTLH tahun 2019 dari anggaran kabupaten bantul sebanyak 143 orang masing-masing mendapatkan bantuan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah,).

(4) Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan setiap tribulan sekali.

(5) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dilaksanakan di bulan Juli 2020 yang dihadiri oleh 100 SDM Tagana Kabupaten Bantul.

3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung dengan dana sejumlah Rp.499.900.000,00 dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 458.215.000,00 dan menghasilkan keluaran :

a) Peningkatan kualitas SDM kesejahhteraan sosial masyarakat.
b) Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional.
c) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.

.Keluaran atau kegiatan dari program ini secara rinci adalah sebagai berikut:

(3) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat.

Kegiatan dalam program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos) dan PSM di Kabupaten Bantul. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui pembinaan dan mekanisme lomba/evaluasi, mereka dituntut peran maksimal sehingga *output*nya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.566.020.400,00 anggaran yang terserap Rp. 555.315.400,00 (98,109%) dengan capaian fisik 100%. Orsos berprestasi:

Tabel 3.12 Organisasi Sosial Berprestasi

No.	Nama	Alamat	Nominasi
1	Sobi	Srunggan, Karangtengah, Imogiri	I
2	Daimah	Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan	II
3	Puji Winarni	Daleman, Gilangharjo, Pandak	III

Sumber : Dinsos PPPA. 2019

(21) TKSK berprestasi:

Evaluasi TKSK berprestasi di tahun 2019 tingkat Kabupaten Bantul dilaksanakan mulai bulan Februari sampai Maret dengan 3 tahapan seleksi, yaitu :

- Seleksi administrasi.
- Seleksi paparan presentasi di hadapan Tim penilai tentang kegiatan dilaksanakan.
- Seleksi kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Nominasi I tingkat Kab. Bantul maju ke tingkat tingkat DIY tahun 2019.

Tabel 3.13 Hasil Evaluasi TKSK tahun 2019

No.	Nama	Alamat	Nominasi
1.	Nur Kholis, S.Sos. I	TKSK. Kec. Pajangan	I
2.	Srihardono	TKSK Kec. Pleret	II
3.	Drs. Agus Jaka Yunianta	TKSK Kec. Kretek	III

Sumber : Dinsos PPPA. 2019

(22) PSM berprestasi:

Evaluasi PSM berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2019 dilaksanakan mulai bulan Februari dengan 3 tahapan, yaitu :

- Seleksi administrasi.
- Seleksi paparan presentasi di hadapan Tim penilai tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Seleksi kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dibawah sebagai upaya pembuktian.

Nominasi I berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam rangka Evaluasi PSM berprestasi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020.

Tabel 3.14 Hasil Evaluasi PSM 2019 Tk. Kab. Bantul

No	Nama	Alamat	Nominasi
1	S o b i	Srunggan, Karangtengah, Imogiri	I
2	Daimah	Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan	II
3	Puji Winarni	Daleman, Gilangharjo, Pandak	III

Sumber : Dinsos PPPA, 2019

Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial Nasional.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa kesetiakawanan sosial dan kesadaran untuk ikut serta dengan pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial, didukung dengan anggaran sebesar Rp.327.878.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.326.825.000,00 (99,679%) dengan efisiensi Rp 13.267.511,00.

Tahun Anggaran 2019 telah berakhir, satu kegiatan telah dilaksanakan yaitu

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Nasional. Sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan, bahwa Tahun 2019 telah berjalan dengan baik namun ada beberapa pos anggaran yang tidak bisa terserap 100% dan harus dikembalikan ke Kasda Pemda. Kabupaten Bantul sebesar Rp **1.053.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Rincian Pengembalian Anggaran

No	Kegiatan	Jumlah
1	Belanja pakaian Olah Raga	400.000,-
2	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	30.000,-
3	Jasa Tenaga Harian Lepas	623.000,-
	J u m l a h	**1.053.000,-**

Sumber : Dinsos PPPA, 2019

(1) Pendampingan Kegiatan Karang Taruna

Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 273.750.000,00 pada kegiatan ini telah terserap anggaran efisiensi dengan total sebesar Rp. 272.715.000,00 dan capaian fisik 100%, serta telah menghasilkan keluaran berupa pemberdayaan karang taruna. Adapun hasilnya adalah adanya karang taruna yang berprestasi sampai tingkat DIY, bulan bhakti karang taruna, dan kemah kebangsaan. Kegiatan pemberdayaan karang taruna berupa:

(1) Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2019 dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan akhir Maret dengan 3 tahapan seleksi.

Tabel 3.16 Hasil evaluasi Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2019

N0	NAMA	ALAMAT	NOMINASI
1	Karang Taruna Kusuma Bakti	Argore Sedayu	I
2	Karang Taruna Sasana Kridaning Arum	Mulyodadi Bambanglipuro	II
3	Karang Taruna Seta Jalanidi Timur	Sendangsari Pajangan	III

Sumber : Dinsos PPPA, 2019

(2) Bulan Bhakti Karang Taruna

Dalam rangka untuk meningkatkan bakti Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial perlu diadakan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) kegiatan ini di adakan di Desa secara bergilir untuk tahun 2019 jatuh di Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro, bekerjasama dengan Karang Taruna Sasana Kridaning Arum Desa Mulyodadi.

4) Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial.

Program ini dilaksanakan berangkat dari pentingnya Data Kemiskinan di kabupaten Bantul guna menunjang pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam jaminan sosial (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan bantuan sosial lainnya) Kurangnya data valid mengenai daftar kemiskinan di Kabupaten Bantul sangat berdampak pada bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Program ini mempunyai keluaran berupa 2(dua) Kegiatan, yaitu:

a) Updating Keluarga Miskin dengan APBD Rp.436.915.335,00

b) Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan dengan APBD Rp. 744.487.080,00

Kegiatan dari Program ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

(1) Updating Keluarga Miskin.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemutakhiran penerima jaminan bantuan sosial untuk masyarakat miskin maupun yang rawan miskin agar tepat sasaran guna penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Di dalam program ini terdapat data kegiatan yaitu Updating Keluarga Miskin dengan anggaran sebesar Rp. 436.915.335,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 434.271.250,00 serapan anggaran fisik 99,395% dikarenakan pengusulan angaran melebihi waktu deadline. Namun Walaupun anggaran tersebut tidak terserap 100% namun capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

(2) Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan

Program ini dengan dukungan dana sebesar Rp.744.487.080,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.743.871.580,00 dengan capaian fisik 99,917%.

Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Sosial

Tabel 3.17 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rujukan dan pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pemakaman jenazah terlantar karena berupa layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan. Hal ini juga dipengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.
2	Pada Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah, data Prelist yang akan di entry hasil verivikasinya tidak dapat di proses oleh aplikasi yang dari tnp2k	Melakukan Bimtek entru prelist dan sosialisasi MPM (mekanisme Pemutahiran Mandiri)
3	Beberapa kader desa yang berperan melakukan purifikasi belum paham dengan mekanisme yang dilaksanakan	Melakukan bimtek kepada kader desa petugas verifikasi di lapangan

Sumber: Dinsos PPPA, 2019

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2018 beserta hasil-hasilnya. Khusus untuk prestasi dan penghargaan yang diraih disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator kinerja disajikan pada Lampiran B.

1. TENAGA KERJA

a. Program dan Kegiatan.

Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

a) Kegiatan Kegiatan Pembinaan LPK
b) Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan
c) Kegiatan Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan
d) Kegiatan Uji kompetensi peserta latihan di BLK
e) Kegiatan Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja
f) Kegiatan Pelatihan Menjahit
g) Kegiatan Pelatihan Mekanik
h) Kegiatan Pelatihan Teknisi
i) Kegiatan Pelaltihan Meubelair
j) Kegiatan Pelatihan Juru Las
k) Kegiatan Pelatihan Juru Las
l) Kegiatan Pelatihan Software
m) Kegiatan Pelatihan Tata Boga
n) Kegiatan Pelatihan Batik Tulis

o) Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Kegiatan Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan

b) Kegiatan Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

3) Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

a) Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

b) Kegiatan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

c) Kegiatan Pendampingan dewan pengupahan

d) Kegiatan Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah

e) Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial

f) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

g) Kegiatan Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja

h) Kegiatan Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

a) Kegiatan Penyuluhan ketenagakerjaan

b) Kegiatan Penempatan tenaga kerja

5) Program Perluasan Kerja

a) Kegiatan terapan teknologi tepat guna

b) Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur

c) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat

d) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Maksud dan Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan ketrampilan bagi tenaga kerja supaya mampu berwirausaha dan bekerja di perusahaan.

Implementasi program ini didanai dengan anggaran daerah sebesar Rp 1.676.421.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.615.469.600,00 atau 96,3%.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan LPK

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK agar LPK dapat maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman atau revolusi industri 4.0

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 209.575.000,00 dengan realisasi Rp. Rp

208.966.750,00 atau 99.71%, waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel berikut

(d) Kegiatan pemberdayaan wirausaha bagi lulusan pelatihan

Maksud dan tujuan kegiatan ini Memberikan bekal kepada pencari kerja untuk mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha mandiri.

Implementasi kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp154.150.000,00 dengan realisasi Rp153.572.000,00 atau 99.62 %, waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 3.18 Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan I	22 s/d 25 April 2019		Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang
2.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan II	08 s/d 11 Juli 2019		Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang
3.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan III	28 s/d 31 Oktober 2019		Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(e) Kegiatan Pemagangan / OJT mantan peserta pelatihan di perusahaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini Pelatihan ketrampilan dilaksanakan guna menyiapkan tenaga trampil bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Dilaksanakan dengan sasaran 40 orang, dengan anggaran sebesar Rp186.191.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp180.591.000,00 atau 96.99%. Kegiatan Uji Komptensi Bagi Peserta Pelatihan di BLK

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan sertifikasi bagi peserta pelatihan, sehingga tenaga kerja dapat diperhitungkan dalam mencari pekerjaan.

Kegiatan ini menggunakan anggaran daerah sebesar Rp 48.575.000,00 dengan realisasi Rp 48.392.000,00 atau 99,9% , adapun pelatihan yang diujikan disajikan dalam tabel berikut ;

(f) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini Pengukuran produktivitas bermanfaat memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 189.485.000,00 dengan realisasi Rp 178.485.000,00 atau

94.19%.Adapun rincian kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.19 Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Analisa Pengkuran Produktivitas Tenaga Kerja	16 s/d 18 Juli 2019	Thiwul Ayu “Mbok Sum”, Jl. Mangunan KM. 4,5, Mangunan, Dlingo, Bantul	20 orang
2	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan I	08 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang
3	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan II	09 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang
4	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan III	10 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang
5	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	04 s/d 06 November 2019	IKM Mie Reshik Cap Dokar	20 orang
		11 s/d 13 November 2019	IKM Adrem Gula Jawa Mawar Merah	20 orang
		14 s/d 16 November 2019	IKM Kerupuk Barokah	20 orang
		18 s/d 20 November 2019	IKM Roti Widya	20 orang
		21 s/d 23 November 2019	IKM Rambak Mirasa	20 orang
		25 s/d 27 November 2019	IKM Rempelo Hanin	20 orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(g) Kegiatan Pelatihan Menjahit

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 171.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 170.722.400,00 atau 99,72%.

Tabel 3.20 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit

No	Jenis pelatihan	Tanggal pelaksanaan	Jumlah peserta	Lokasi
Insittusional				
1	Menjahit	02 Februari s/d 26 Februari 2019	16 Orang	BLK
		02 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang	BLK
		10 Juli s/d 13 Agustus 2019	16 Orang	BLK
		30 Agustus s/d 21 September 2019	16 Orang	BLK
MTU (Mobile Training Unit)				
		2 Februari s/d 26 Februari 2019	16 Orang	Sorowajan, Panggungharjo, Sewon
		2 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang	Menden, Babadan, Bantul
		30 Agustus s/d 21 September 2019	16 Orang	Paten, Timbulharjo, Sewon

Sumber: Disnakertrans 2019

(h) Pelatihan Mekanik

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 119.465.000,00 dan realisasi sebesar Rp 119.223.400,00 atau 99,79%

Pelaksanaan pelatihan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.21 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Mekanik

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Lokasi
Institusional				
1	Mekanik	06 Februari s/d 28 Februari 2019	16 Orang	BLK
		21 Mei s/d 03 Juli 2019	16 Orang	BLK

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Lokasi
		06 Agustus s/d 29 Agustus 2019	16 Orang	BLK
MTU (Mobile Training unit)				
1		6 Februari s/d 28 Februari 2019	16 Orang	Seloharjo, Pundong
2		6 Agustus s/d 29 Agustus 2019	16 Orang	Murtigading, Sanden

Sumber: Disnakertrans 2019

(i) Pelatihan Teknisi

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 36.335.000,00 dan realisasi sebesar Rp 36.159.500,00 atau 99,51%.

Tabel 3.22 Pelaksanaan Pelatihan Teknisi

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Lokasi
Institusional				
1	Teknisi	30 April s/d 23 Mei 2019	16 Orang	
MTU (mobile training unit)				
1		30 April s/d 23 Mei 2019	16 Orang	Caturharjo, Pandak

Sumber: Disnakertrans 2019

(j) Pelatihan Meubelair

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 45.915.000,00

dan realisasi sebesar Rp 45.818.900,00 atau 99,79%

Tabel 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meubelair

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Meubelair	30 April s/d 13 Juni 2019	16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(k) Pelatihan Juru Las

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 48.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp 48.043.900,00 atau 99,85%.

Tabel 3.24 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Juru Las

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Juru Las	30 April s/d 13 Juni 2019	16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(l) Pelatihan Software

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja

Kegiatan ini menyerap an’’ggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 184.025.000,00 dan realisasi sebesar Rp 142.669.700,00 atau 77,52%.

Tabel 3.25 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Softwere

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Software	01 Maret s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		22 Mei s/d 22 Juni 2019	16 Orang
		21 Agustus s/d 12 September 2019	16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(m) Pelatihan Tata Boga

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 186.975.000,00 dan realisasi sebesar Rp 186.674.000,00 atau 99,83%

Tabel 3.26 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Lokasi
Institusional				
1	Tata Boga	01 Februari 2019 s/d 25 Februari 2019	16 Orang	BLK
		02 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang	BLK
		09 Juli s/d 31 Juli 2019	16 Orang	BLK
		29 Agustus s/d 20 September 2019	16 Orang	BLK
MTU (mobile training Unit)				
		1 Februari s/d 25 Februari 2019	16 Orang	Ngentak, Timbulharjo, Sewon
		2 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang	Klenggotan, srimulyo, Piyungan
		9 Juli s/d 31Juli 2019	16 Orang	Suren Kulon, Canden , Jetis
		29 Agustus s/d 20 September 2019	16 Orang	Gumuk Ringinharjo, Bantul

Sumber: Disnakertrans 2019

(n) Pelatihan Batik Tulis

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 59.535.000,00 dan realisasi sebesar Rp 59.528.500,00 atau 99,98% Pelatihan dilaksanakan secara institusional di BLK

Pelaksanaan pelatihan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.27 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Batik Tulis

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Batik Tulis	10 Juli s/d 13 Agustus 2019	16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(o) Pelatihan Bahasa Inggris

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapka tenaga terampil bagi pemandu wisata khususnya, supaya biasa berkomunikasi dengan wisata manca

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 52.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp 52.737.000,00 atau 99,73%.

Tabel 3.28 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Bahasa Inggris	09 Juli s/d 12 Agustus 2019	16 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

Sementara kegiatan pelatihan dari dana APBN sebesar Rp 2.885.189.000,00 dengan realisasi Rp 2.724.571.000,00 atau 94,43%, dihasilkan pelatihan sebanyak 38 paket (608 orang) untuk pelatihan institusional di BLK.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Maksud dan tujuan program ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan pencari kerja.Hasil yang jelas terlihat adalah menurunnya angka pengangguran.

Program ini menggunakaan alokasi anggaran dana daerah sebesar Rp 576.805.000,00 dengan realisasi Rp 556.472.900,00 atau 96,4%. Adapun tujuannya adalah. Keluaran dari program ini adalah sebagai berikkut

(1) Kegiatan Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini salah satu wujud dari perlindungan kepada TKI Bantul. Adapun tugas tim penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja antara lain: meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 30.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.400.000,00 .

Tabel 3.29 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terselesaikan
1	*Trafficking*	1	1
2	Kecelakaan kerja di luar negeri	2	2
3	Penahanan dokumen	1	1
4	Tenaga kerja dalam negeri	6	6

Sumber: Disnakertrans 2019

(2) Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang cepat dan akurat.

Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dilaksanakan dengan anggaran daerah sebesar Rp 546.105.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 539.072.900,00 (98%).

3) Program perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta/BUMN/BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka

Program ini menggunakan dengan dana sebesar Rp 886.559.500,00 dan realisasi sebesar Rp 868.949.800,00 atau 98,1%.

Adapun keluaran program berupa pelaksanaaan hubungan industrial serta pengawasan, perlindungan, dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan penyelesain prosedure, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul apabila terjadi perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, dan murah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan ini menyerap dana APBD sebesar Rp 266.222.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 266.086.000,00 atau 99,94%.

Tabel 3.30 Tabel Sosialisasi dan Workshop Pencegahan perselisihan Dalam Kegiatan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No.	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Jumlah peserta
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	11 April 2019	RM Pawon Hayu	50 orang
2.	Pembinaan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Siswa Dengan Tema	27 April 2019	Aula MAN 2 Bantul	30 orang

No.	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Jumlah peserta
	"Membentuk Mental Generasi Muda Yang Unggul dan Produktif"			
3.	Isu Hukum Ketenagakerjaan Di Era Industri 4.0	3 Juli 2019	RM Waroeng Omah Sawah	50 orang
4.	Workshop Hukum Ketenagakerjaan Untuk Perusahaan Outsourcing	18 Juli 2019	Ruang Pertemuan "Goebog Resto"	50 orang
5.	Sosialisasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	31 Juli 2019	Keday Joy	50 orang
7.	Sosialisasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7 Agustus 2019	Meeting Room Apindo Bantul	60 orang
8.	FGD Perkembangan Norma Dalam Bidang Penyedia Jasa Pekerja dan Pemborongan Pekerjaan	2 Oktober 2019	Ruang Pertemuan RM Raos Djogja	40 orang
9.	FGD Perkembangan Norma Dalam Bidang Penyedia Jasa Pekerja dan Pemborongan Pekerjaan	3 Oktober 2019	Ruang Pertemuan RM Raos Djogja	40 orang
10	Praktek Pembuatan Struktur Skala Upah Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017	6 November 2019	Ruang Pertemuan Gedung Dakwah Muhammadiyah Bantul	30 orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(2) Kegiatan Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebanyak Rp 64.375.000,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 64.275.000,00 atau 99,9% dengan rincian kegiatan:

(1) Mensosialisasikan berbagai peraturan tentang norma ketenagakerjaan di perusahaan.

(2) Mensosialisasikan berbagai peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan.

(3) Melaksanakan perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat perusahaan.

Tabel 3.31 Kegiatan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No.	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Jumlah peserta
1.	Pembinaan Keselamatan Kerja di Perusahaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003	6 Maret 2019	Ruang Pertemuan PT Komratindo Emporio	26 orang
2.	Pembinaan Keselamatan Kerja di Perusahaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003	8 Maret 2019	Ruang Pertemuan PT Lentera Panen Mandiri	26 orang
3.	Pembinaan Keselamatan Kerja di Perusahaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003	21 Maret 2019	Ruang Pertemuan PT CMPN	30 orang
4.	Pembinaan Perusahaan	12 Juni 2019	Ruang Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	16 orang
5.	Pembinaan Perusahaan	6 Juli 2019	Ruang Pertemuan PT Maesindo Indonesia	26 orang
6.	Pembinaan Kelembagaan Ketenagakerjaan Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000	15 Juli 2019	Ruang Pertemuan PT Maesindo Indonesia	26 orang
7.	Koordinasi Penerapan Ketentuan Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	25 Juli 2019	RM Goebog Resto	26 orang
8.	Pembinaan Perusahaan	15 Agustus 2019	RM Kampoeng Mataraman	20 orang

No.	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Jumlah peserta
9.	Pembinaan Perusahaan	17 September 2019	Ruang Pertemuan PT Asatex	26 orang
10	Sosialisasi Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan	8 Desember 2019	RM Goebog Resto	66 orang
11	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Pesangon	10 Desember 2019	RM Warung Teduh	50 orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(3) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendorong setiap perusahaan untuk melaksanakan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp 55.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.860.000,00 atau 98,99% dengan sasaran untuk perusahaan yang belum punya peraturan perusahaan atau perusahaan tersebut sudah mati tapi belum atau tidak lapor ke Disnakertrans Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan

No	Jenis Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Peraturan Perusahaan	13 Februari 2019	RM. Enthok Rempah Imogiri	50 Orang
2	Sosialisasi Peraturan Perusahaan	10 April 2019	RM. Aliandra	50 Orang
3	Sosialisasi Peraturan Perusahaan	11 Juli 2019	RM. Sambel Pawon	40 Orang

No	Jenis Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
4	Sosialisasi Peraturan Perusahaan	08 Agustus 2019	RM. Goebog Resto	50 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(4) Kegiatan pendampingan dewan pengupahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Kegiatan pendampingan ini menggunakan anggaran daerah sejumlah Rp 112.735.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 100.765.400,00 atau 89,38%.

Dasar pembentukan Dewan Pengupahan Pabupaten Bantul yaitu SK Bupati Nomor 219 Tahun 2017 Tanggal 14 Juni 2017. Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul (Depekab) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Tripartit yaitu wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bantul, pakar ekonomi makro dari perguruan tinggi (UMY), serta unsur pemerintah yaitu BPS Bantul, Disperindagkop, Bagian Hukum, dan Disnakertrans. Depekab bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Gubernur.

Pemantauan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah

Minimum Kabupaten (UMK). Kegiatan yang dilakukan adalah memantau secara acak perusahaan di wilayah Bantul sejumlah 120 perusahaan yang dilaksanakan bulan Mei sampai dengan Juni 2019 serta pemantauan ke 60 perusahaan terhadap UMK tahun 2019 yang telah ditetapkan Gubernur sebesar Rp1.790.500,00. Selain itu juga dilakukan sosialisasi UMK ke 150 perusahan dan lembaga

(5) Kegiatan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 59.160.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 57.025.000,00 atau 96,39% meliputi dua kegiatan yaitu pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah dan pemberdayaan kerjasama Bipartit.

Tabel 3.33 Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

No	Jenis Sosialisasi	Tanggal pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Pemberdayaan LKS Bipartit	13 Maret 2019	RM. Gazebo Kali Putih	40 Orang
2	Sosialisasi Pemberdayaan LKS Bipartit	29 Agustus 2019	RM. Aliandra	40 Orang

3	Sosialisasi Pemberdayaan LKS Bipartit	9 Oktober 2019	RM. Sambel Pawon	40 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

Pemberdayaan Bipartit ke perusahaan dilaksanakan kunjungan *door-to-door* ke 10 (sepuluh) perusahaan untuk melakukan pembinaan pengurus LKS Bipartit dan penyuluhan

Tabel 3.34 Pemberdayaan Bipartit di Perusahaan

No	Jenis Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Pemberdayaan Bipartit	4 Februari 2019	PT Samku Glove Indonesia	10 Orang
2	Pemberdayaan Bipartit	06 Februari 2019	PT. Out Of Asia (OOA)	10 Orang
3	Pemberdayaan Bipartit	07 Februari 2019	PT. Ide Studio	10 Orang
4	Pemberdayaan Bipartit	02 Mei 2019	PT. MSS (Mitra Sehati Sekata)	10 Orang
5	Pemberdayaan Bipartit	03 Mei 2019	PT. Borwita Citra Mandiri	10 Orang
6	Pemberdayaan Bipartit	04 Mei 2019	CV. Perdana Mas	10 Orang
7	Pemberdayaan Bipartit	22 Juli 2019	BJ Home	10 Orang
8	Pemberdayaan Bipartit	24 Juli 2019	Pt. Bumi Purnama Jaya (SPBE)	10 Orang
9	Pemberdayaan Bipartit	29 Juli 2019	PT. Fajar Makmur	10 Orang
10	Pemberdayaan Bipartit	30 Juli 2019	Kiara Beautymed	10 Orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(6) Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan supaya dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundangan-undangan yang beralku.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 91.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 91.590.000,00 atau 99,88% dengan sasaran 300 orang peserta petugas HRD di Kabupaten Bantul yang berasal dari HRD, Pengusaha, dan Asosiasi Pengusaha.

Tabel 3.35 Realisasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan Penyelesaian
Perselisahan Hubungan Industrial

No.	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Jumlah peserta
1	Bimtek. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	11 Maret 2019	Ruang Pertemuan RM Sambel Paris	75 orang
2	Bimtek. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	16 Maret 2019	Ruang Pertemuan Gedung Dakwah Muhammadiyah	75 orang
3	Bimtek. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	19 Maret 2019	Aula Mister Sambal	75 orang
4	Bimtek. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	2 Mei 2019	Ruang Pertemuan Taman Inala Resto	75 orang

Sumber: Disnakertrans 2019

(7) Kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan wadah kegiatan kepada buruh dikabupaten Bantul pada saat memperingati hari buruh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidk diinginkan, misalnya : demo.

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 131.862.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 131.300.000,00 atau 99,57%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), dengan tujuan agar para buruh (karyawan perusahaan) dapat saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi antar karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini kegiatan yang diadakan antara lain :

Tabel 3.36 Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

No.	Tanggal pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Keterangan
1	27dan 28 April 2019	Lapangan Futsal DMT	Lomba Futsal
2	1 Mei 2019	Pasar Seni Gabusan	Lomba Tumpeng
3	1 Mei 2019	Pasar Seni Gabusan	Lomba Senam
4	1 Mei 2019	Pasar Seni Gabusan	Donor Darah

Sumber: Disnakertrans 2019

(8) Kegiatan pendampingan pembuatan persyaratan kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tujuannya untuk mensinergikan perusahaan-perusahaan tentang persyaratan kerja dimana perusahaan tersebut belum menerapkan syarat-syarat kerja, upah minimum dan lain-lain.

(9) Kegiatan pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan pekerja, kepastian hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, juga perbaikan kesejahteraan pekerja, serta untuk memotivasi peningkatan kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 55.990.000,00 dengan realisasi Rp 54.623.400,00 atau 97,55%. Selama tahun 2019 terlaksana 3 kali sosialisasi ke perusahaan secara klasikal dan pendampingan SP/SB

Tabel 3.37 Pendampingan SP/SB

No	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
1	Pendampingan SP/SB	30 Januari 2019	RS. Nur Hidayah	20 Orang
2	Pendampingan SP/SB	31 Januari 2019	PT. Samku Glove Indonesia	20 Orang
3	Pendampingan SP/SB	26 Februari 2019	PT Out Of Asia	20 Orang
4	Pendampingan SP/SB	26 Maret 2019	PT Ide Studio	20 Orang
5	Pendampingan SP/SB	13 Juni 2019	PT Lentera Panen Mandiri	20 Orang
6	Pendampingan SP/SB	15 Juli 2019	Kasih Bunda	20 Orang
7	Pendampingan SP/SB	23 Juli 2019	PT Maesindo	20 Orang
8	Pendampingan SP/SB	13 Agustus 2019	PT Samitex	20 Orang
9	Pendampingan SP/SB	27 Agustus 2019	FSPPR	20 Orang
10	Pendampingan SP/SB	15 September 2019	PT Estetika	20 rang

Sumber: Disnakertrans 2019

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

Maksud dan tujuan program ini adalah mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan anggaran sebesar Rp 511.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

482.102.360,00 atau 94,23%. Keluaran dari program ini adalah sebagai berikut

(1) Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan ketenagakerjaan, sehingga apabila masyarakat ingin menjadi TKI melalui jalur yang legal.

Kegiatan ini dilaksnakan dengan anggaran Rp. 104.400.000,00 dengan realisasi Rp. 101.445.000,00 (97%).Adapun kegiatan lainnya adalah penunjang penempatan melalui penyuluhan sebanyak 15 kali di 15 desa. Untuk 20 kali penyuluhan bursa kerja khusus semua dilaksanakan di Tempat Bursa Kerja Khusus masing-masing.

(2) melalui (AKL, AKAD,AKAN)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah. mempertemukan antra pemberi kerja dan pencari kerja.

Pada tahun 2019 Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 407.220.000,00 dengan realisasi Rp. 380.657.360,00 (93,47%). Realisasi penempatan melalui AKL, AKAD, dan AKAN sebanyak 2.691 orang. dengan rincian pada Tabel.

Tabel 3.38 Realisasi Penempatan Melalui AKL, AKAD, dan AKAN

No.	Bulan	AKL		AKAD		AKAN		JML		JML Total	Tujuan Penempatan
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Januari	0	0	0	0	7	10	7	10	**17**	Malaysia
2	Februari	10	150	25	24	7	10	42	184	**226**	Bantul, Batam dan Malaysia
3	Maret	56	149	0	0	8	21	64	170	**234**	Bantul dan Malaysia
4	April	24	240	0	0	10	26	34	266	**300**	Bantul dan Malaysia
5	Mei	31	46	6	4	9	47	46	97	**143**	Bantul, Batam, Malaysia
6	Juni	28	338	0	0	3	4	31	342	**373**	Bantul, Malaysia
7	Juli	16	7	6	35	5	14	27	56	**83**	Bantul, Malaysia
8	Agustus	3	44	0	10	6	8	9	62	**71**	Bantul, Malaysia
9	September	199	95	0	0	9	12	208	107	**315**	Bantul, Malaysia
10	Oktober	210	156	0	0	5	9	215	265	**380**	Bantul, Malaysia
11	November	119	104	0	0	4	5	123	109	**232**	Bantul, Malaysia
12	Desember	69	235	0	0	5	8	74	240	**317**	Bantul, Malaysia
	Jumlah	**765**	**1,564**	**37**	**73**	**78**	**174**	**193**	**727**	**2,691**	

Sumber: Disnakertrans 2019

5) Program Perluasan Kerja

Maksud dan tujuan Program perluasan kerja upaya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta terapan teknologi yang tepat guna sehingga tercipta dan terbentuk wirausaha baru.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebanyak Rp 22.748.005.000,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 22.050.583.596,00 atau 96,23% dan anggaran APBN sebesar Rp 60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesarRp 60.000.000,00 atau 100% pada kegiatan terapan teknologi tepat guna. Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan terapan teknologi tepat guna

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja meningkatkan produksinya sehingga produk yang dihasilkan lebih bagus dan banyak.

Kegiatan ini mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 94.270.000,00 dengan realisasi Rp 94.270.000,00 atau 100 %.Kegiatan ini dilaksanakan di dua desa sasaran yang disajikan dalam Tabel

Tabel 3.39 Kegiatan TerapanTeknologi Tepat Guna

No.	Kegiatan	DesaSasaran	JumlahPeserta	Sumber Dana
1	Pelatihan Pembuatan Batik Nitik	Blawongl, Desa Trimulyo, Kec. Jetis	20 Orang	APBD
2	Pembuatan Gula Jawa jahe (GUJAHE)	Kerto, desa Pleret, Kecamatan Pleret	20 Orang	APBD

Sumber: Disnakertrans 2019

Pada tahun 2019 mendapat anggaran APBN 1 paket dari Kegiatan Terapan TTG Sektor Pertanian dan Maritim /sektor Jasa dan Industri Kreatif Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi Rp. 60.000.000,00 atau 100%

Kegiatan ini dilaksanakan di desa muntuk, dlingo

(2) Kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya dalam menunjang perekonomian daerah dan nasional dibutuhkan beberapa unsur penunjang, yang salah satunya yaitu ketersediaan prasarana infrastruktur. Selain itu dilakukan pengembangan kebijakan perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dengan system padat karya.

Pada tahun anggaran 2019, Kabupaten Bantul memperoleh 193 paket/lokasi melibatkan 26 orang/paket dan dari Bantuan Keuangan Khusus APBD DIY 26 paket melibatakan 52 orang/paket. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 22.538.925.000,00 dengan relalisasi Rp. 21.842.978.596,00 (96,91%).

(3) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro.Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA

yang memiliki rintisan usaha. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 55.460.000,00 dengan realisasi Rp.53.985.000,00 atau 97.34%

Tabel 3.40 Pemanduan Dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik Dan Mandiri

No.	Kegiatan	Desa Sasaran	Jumlah Peserta	Sumber Dana
1	Pemasaran online	Tersebar di seluruh Kab Bantul	20 orang	APBD
2.	Pemasaran online	Tersebar di seluruh Kab Bantul	20 orang	APBD

Sumber: Disnakertrans 2019

(4) Kegiatan Pemanduan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat

Maksud dan tujuan Pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus lansia meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD ssebesar Rp 59.350.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.350.000,00 realisasi (100%).

Permasalahan Dan Solusi

Tabel 3.41 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Tenaga Kerja

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kesempatan kerja yang masih terbatas.	Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui *job canvasing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line* lebih ditingkatkan.
2	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.	Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
3	Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah.	1. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut. 2. Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.
4	Inkonsistensi antar peraturan/perundangan terkait ketenagakerjaan	1. Intensifkan konsultasi ke K/L baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber: Disnakertrans 2019

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;

a) Pengembangan Kabupaten Layak Anak
b) Operasional Forum Anak Bantul

2) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

a) Bimbingan manajemen usaha bagi kelompok desa PRIMA dan Serikat PEKKA
b) Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
c) Terselenggaranya & terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul

3) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan *gender* dan anak.

a) Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
b) Peningkatan SDM Forum perlindungan korban kekerasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
c) Pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak.

b. Realisasi dan Pelaksanaan Program

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Maksud dilaksakannya program ini adalah untuk memahamkan masyarakat tentang KIE kesetaraan Gender dan perlindungan anak, dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta.

Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Anggaran sebesar Rp 54.880.500,- adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 54.880.000 (100%). Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Maksud dilaksanakannya Pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) Kabupaten Bantul adalah untuk mengetahui dan menelaah capaian dalam mengembangkan KLA di Kabupaten. Pengembangan Kabupaten Layak Anak Anggaran sebesar Rp 181.056.100,- adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 181.016.000,- (99.98%).

a) Operasional Forum Anak Bantul

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menjaring aspirasi anak dan mengeluarkan ide-ide kepemimpinan anak yang tertuang dalam satu organisasi yaitu forum anak bantul dan forum anak kecamatan. Tujuan dari dilaksanakannya forum anak bantul dan forum anak kecamatan antara lain sebagai berikut: Memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa menjalan suatu organisasi yaitu forum anak bantul; Operasional Forum Anak Bantul Anggaran sebesar Rp 55.977.500,- adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 52.695.000,- (94.14%).

b) Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Maksud dan tujuan dari kegiatan GOW adalah agar lebih banyak perempuan yang terlibat didalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislative. Anggaran sebesar Rp. 49.359.600 adapun realisasi

Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 49.359.600,- (100%)

c) Terselenggaranya & terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul

Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan realisasi anggaran Rp. anggaran sebesar Rp. 58.005.000,- adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 57.405.000,- (100%)

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak, dan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak.

a) Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT PPT KKPA Kab. Bantul dengan anggaran sebesar Rp.289.864.000,00 dengan serapan anggaran Rp.287.230.900,00 capaian keuangan sebesar 99.092% dan capaian fisik 100%.

Tabel 3. 42 Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2015	118
2	2016	131
3	2017	163
4	2018	210
5	2019	235

Sumber: SIGA, 2019

b) Peningkatan SDM Forum perlindungan korban kekerasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya pengurangan angka korban kekerasan dan perdagangan manusia maka tujuannya diperlukan SDM yang mumpuni untuk menangani hal tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.93.385.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan Rp.92.185.000,00 realisasi keuangan sebesar 98.715%.

c) Pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.73.850.000,00. Realisasi fisik 105%, sedangkan realisasi keuangan Rp.73.295.000,00 realisasi keuangan sebesar 99.248%.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran *(awareness)* masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya terkait adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi korban serta mendukung pemulihan kondisi korban.

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak :

Maksud dan tujuan dari program ini adalah terdatanya data pilah gender dan terlaksananya pengolahan, updating dan analisa data gender serta peringatan hari besar. Penyusunan Pilah Gender dan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak anggaran sebesar Rp. 31.850.000 adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 30.105.000,- (94,52%) Terdapat efisiensi keuangan Rp. 1.745.000 (5,48%).

a) Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi kelompok desa PRIMA dan Serikat PEKKA

Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pelatihan Peningkatan Papasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak anggaran sebesar Rp. 56.100.390 adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 55.899.990,- (99.64%) Terdapat efisiensi keuangan Rp. 200.400,- (0.36%)

b) Operasional Gabungan Organisasi (GOW)

Maksud dan tujuan dari kegiatan GOW adalah agar lebih banyak perempuan yang terlibat didalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislative. Anggaran sebesar Rp. 49.359.600 adapun realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 49.359.600,- (100%)

(1) Rapat koordinasi internal 11 bulan
(2) Sosialisasi Program Kerja GOW Kabupaten Bantul
(3) Upacara Hari Kartini, 150 orang
(4) Seminar
(5) Upacara Hari Ibu 150 orang

c) Terselenggaranya & terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bantul

Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan realisasi anggaran Rp. anggaran sebesar Rp. 58.005.000,- adapun realisasi Fisik

100% dan realisasi keuangan Rp. 57.405.000,- (100%)

(1) Rapat Koordinasi
(2) Sosialisasi Program Kerja DWP
(3) Pelatihan kreatifitas, 120 orang
(4) Lomba kreatifitas, 120 orang
(5) Seminar perempuan di Ranah Publik, 120 orang
(6) Pelatihan masak, 120 orang
(7) Seminar parenting, 120 orang
(8) Pengajian di bulan Romadhon
(9) Peringatan puncak acara HUT Dharma Wanita, 200 orang

Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 3. 43 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak pada semua klaster.	1. Intensifikasi sosialisasi, advokasi, dan KIE menuju Bantul Kota Layak Anak sampai ke tingkat desa 2. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak. 3. Mengoptimalkan fungsi fasilitator forum anak terutama untuk pendampingan forum anak di kecamatan dan desa
2	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Pelatihan untuk SDM penanganan korban kekerasan.

Sumber: Dinsos PPPA, 2020

3. PANGAN

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan selama tahun 2019 dalam urusan pangan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

a) Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
b) Peningkatan Pengan Karagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
c) Peningkatan Ketersediaan Pangandan Penanganan Daerah Rawan Pangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Output program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan adalah terlaksananya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya informasi tentang stabilitas harga pangan, distribusi dan akses pangan serta pola konsumsi pangan masyarakat.

Program ini dijalankan melalui beberapa kegiatan yaitu:

a) Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui 3 subsistem, yaitu:

(1) Subsistem Ketersediaan Pangan
(2) Subsistem Keterjangkauan Pangan
(3) Subsistem Konsumsi pangan dan Gizi

Subsistem Ketersediaan Pangan meliputi : produksi pangan, cadangan pangan nasional,

ekspor dan impor pangan serta penanganan krisis atau rawan pangan. Sedangkan subsistem keterjangkauan/ distribusi pangan meliputi kegiatan sebagai berikut : distribusi pangan, pemasaran pangan, perdagangan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan serta bantuan pangan. Dalam rangka perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul terutama dari subsistem keterjangkauan/ distribusi pangan dan ketersediaan pangan, melalui dana APBD Kabupaten tahun 2019 telah dilakukan **Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.** Jumlah dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.193.500.000,.

b) Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan telah dilaksanakan dengan dukungan SDM, teknologi dan anggaran sebesar Rp 311.315.000;00. Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

(1) Pengembangan SDM KWT

Pada tahun 2019 terdapat 6 KWT yang diberikan kegiatan Pengembangan SDM KWT.

Tabel 3. 44 KWT yang diberikan kegiatan Pengembangan SDM KWT

No	KWT/Kelompok	Alamat	Pendamping
1	KWT KaryaBoga	Dukuh, Sabdodadi, Bantul	Suwarno
2	KWT SumberRejeki	Muntuk, Muntuk, Dlingo	Poniman, A.Md
3	KWT Mekar Sari	Bakung, Bangunharjo, Sewon	Agung
4	KWT SekarKenanga	Ngelosari, Srimulyo, Piyungan	TasiatunRahmawati, STP
5	KWT SidoMakmur	Ngaran, Gilangharjo, Pandak	Kiswanta, A.Md

No	KWT/Kelompok	Alamat	Pendamping
6	KWT Wigati	Muneng, Tirtohargo, Kretek	Ganjar

Sumber : DPPKP, 2019

Tabel 3. 45 Materi Pelatihan Olahan Pangan Lokal

Materi	Jml JPL	Narasumber
Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul	2	Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ir. Siti Nurjanah, M.Si)
Menu B2SA	1	Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Meikhati Kurniasari, STP, M.Ec.Dev)
Pentingnya Menu B2SA bagi Kesehatan, Cara Perhitungan Kalori dalam Makanan, dan Akibat Defisiensi Zat Gizi	2	Dinas Kesehatan Kab Bantul (Zubainindra Indah Meliawati, S.Gz)
Potensi pangan lokal Kabupaten Bantul dalam mendukung B2SA	1	Analis Ketahanan Pangan (Irlantoro, STP)

Sumber : DPPKP, 2019

(2) Sosialisasi Gerakan Makan B2SA

B2SA adalah singkatan dari Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Sosialisasi Gerakan makan B2SA dilatarbelakangi oleh kebiasaan makan di masyarakat yang masih belum B2SA. Kebiasaan konsumsi dengan porsi nasi yang paling besar dibandingkan dengan lauk dan sayurnya serta masih rendahnya porsi konsumsi sayur dan buah. Hal ini dapat mengakibatkan kurang lengkapnya asupan gizi sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada janin dan anak, serta dapat mengganggu metabolisme tubuh pada saat dewasa. Dampak lebih jauh lagi menjadi lebih rentan terhadap penyakit.

(3) Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada

sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

Tabel 3. 46 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.172,1	56	53,3	0,5	28,1	26,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	57,2	3	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	280,3	13	12,7	2,0	26,9	25,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	80,0	4	3,6	0,5	1,9	1,8	5,0	1,8
5	Buah/Biji Berminyak	57,3	3	2,6	0,5	1,4	1,3	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	198,3	10	9,0	2,0	19,0	18,0	10,0	10,0
7	Gula	27,7	1	1,3	0,5	0,7	0,6	2,5	0,6
8	Sayur dan Buah	190,4	9	8,7	5,0	45,7	43,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	20,8	1	0,9	-	-	-	-	-
	Total	2.084,2	100	94,7	11,5	125,1	118,5	100,0	93,7

Sumber : DPPKP, 2019

(4) Lomba Cipta Menu

Lomba cipta menu bertujuan untuk seleksi tingkat kabupaten untuk lomba olahan pangan lokal tingkat nasional tahun 2020, sehingga pemenang lomba ini akan mengikuti lomba di tingkat propinsi

(5) Pemantauan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Berdasarkan PP No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Kementerian Pertanian berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pangan Segar (belum diolah). Pangan Segar Produk Pertanian meliputi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Hewan. Jika diturunkan ke tingkat Kabupaten maka Pengawasan PSAT berada di Bidang

Ketahanan Pangan, sedangkan PSAH berada di Bidang Peternakan.

c) Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di daerah rawan pangan, dilakukan intervensi dengan kegiatan desa mandiri pangan untuk meningkatkan usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas dan masyarakat.Output kegiatan ini adalah terbinanya desa mandiri pangan sebanyak 22 desa. Jumlah dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.251.415.000,-. Lokasi desa mandiri pangan pada tahun 2019 sebanyak 22 desa.

Tabel 3. 47 Ketersediaan Energi, Protein & Lemak Berdasarkan Jenis Bahan Makanan

No	Jenis Bahan Makanan	Kalori		Protein	
		Kalori	%	Gram	%
1	Padi-padian	2.049	65,62	50,78	56,45
2	Makanan berpati	97	3,09	0,66	0,73
3	Gula	97	3,12	0,00	0,00
4	Buah / Biji berminyak	230	7,37	10,00	11,11
5	Buah-buahan	242	7,75	2,65	2,95
6	Sayur-sayuran	181	5,78	10,94	12,16
7	Daging	76	2,43	6,68	7,42
8	Tel r	28	0,90	2,14	2,38
9	Susu	0	0,00	0,01	0,01
10	Ikan	31	1,00	6,00	6,67
11	Minyak / Lemak	72	2,32	0,06	0,07
12	Lemak	19	0,61	0,03	0,04
	Nabati :	2.968	95,05	75,10	83,48
	Hewani :	154	4,95	14,86	16,52
	Jumlah :	3.123	100,00	89,95	100,00

Sumber : DPPKP, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan Protein pada tahun 2019 sebesar 89,95 gram per kapita per hari sementara Ketersediaan Energi sebesar 3.121 kilo kalori per kapita per hari.

Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang ditetapkan yaitu 2.400 kilo kalori per kapita per hari untuk ketersediaan energi dan dan 63 gram per kapita per hari.

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 48 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum semua Pekarangan dimanfaatkan secara baik	Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA
2	Masih adanya Desa Rawan Pangan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Perlunya dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
3	Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
4	Kurangnya pemanfaatan pangan lokal	- Fasilitasi pengembangan pangan berbasis sumberdaya lokal - Pelatihan inovasi pengolahan pangan berbasis sumber daya local sehingga bisa meningkatkan nilai jual
5	Belum beragamnya pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras	Mendorong diversifikasi pangan denganpangan local
6	Masih terbatasnya informasi harga dan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan untuk pengendalian stabilitas harga dan pasokan pangan guna menunjang Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat yang terjamin dan terjangkau.	Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan informatif
7	Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan oleh masyarakat guna mewujudkan Distribusi pangan yang merata dan terjangkau	Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi Pangan Masyarakat

Sumber: DPPKP, 2019

4. PERTANAHAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terurai sebagai berikut:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a) Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa

b) Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY

c) Kagiatan Pemanfaatan Tanah SG

2) Program Penyelesian Konflik-konflik Pertanahan

a) Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Maksud dan tujuan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah adalah mewujudkan penatausahaan pertanahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang penatausahaan pertanahan tanah kasultanan, tanah desa dan tanah pemerintah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bantul. Capaian kinerja dari Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dicapai melalui anggaran sebesar Rp 162.015.000,- dengan realisasi Rp 135.521.480,- atau 83,65 %. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan

Tanah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Inventarisasi Tanah Kas Desa

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa ini adalah tersedianya data inventarisasi tanah desa yang ada pada tiap kecamatan sehingga mendukung penatausahaan pertanahan kasultanan yang baik di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 27.775.000,- dengan realisasi Rp 27.775.000,- atau 100% dengan keluaran kegiatan berupa updating 75 database tanah desa dan sosialisasi tentang updating database tanah desa dengan jumlah peserta 80 orang.

Distribusi tanah desa berdasarkan jenis tanah dan penggunaan tanah disajikan sebagai berikut.

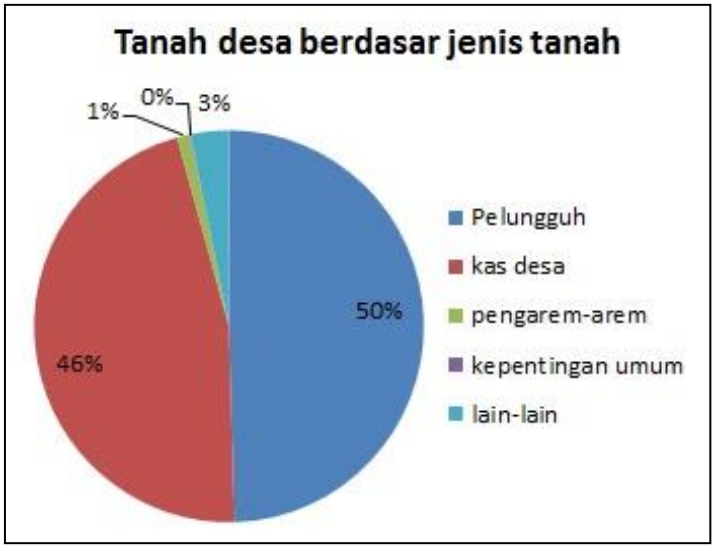

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 9 Tanah Desa Berdasar Jenis Tanah

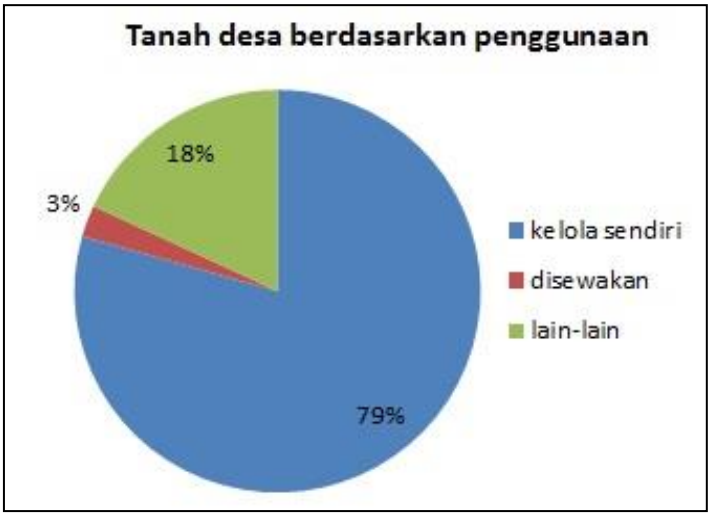

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 10 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Penggunaannya

Distribusi tanah desa berdasarkan fungsi penggunaan dan kepemilikan sertifikat disajikan sebagai berikut.

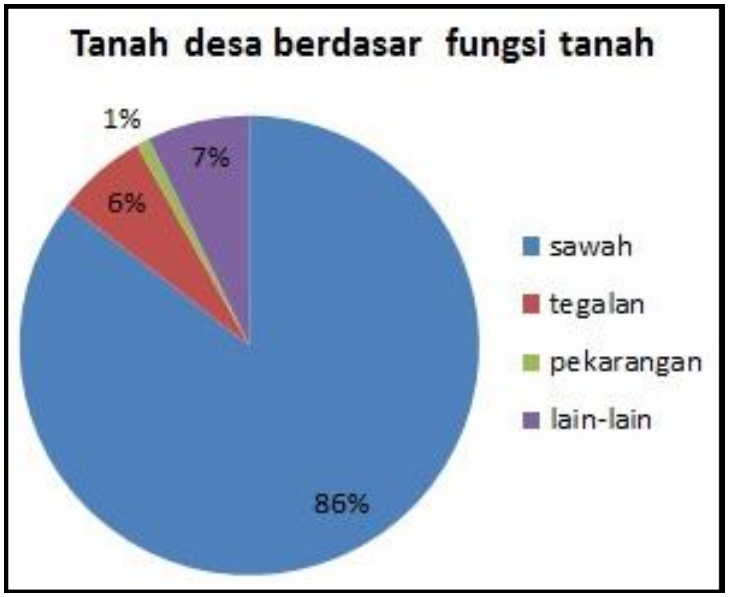

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 11 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Tanah

Sumber : DPTR, 2019

Grafik 3. 12 Distribusi Tanah Desa Berdasarkan Fungsi Dan Kepemilikan

b) Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pensertifikatan tanah yang dimiliki Pemda Bantul yang menjadi aset kabupaten yang belum memiliki sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 64.890.000,- dan realisasi Rp 54.911.480,- atau 84,62% dengan keluaran kegiatan pendaftaran tanah BPN sebanyak 64 dokumen sertifikat bidang tanah dari target 64 bidang.

c) Pemanfaatan Tanah SG

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah fasilitasi pemberian rekomendasi kepala dinas dalam pemberian ijin pemanfaatan tanah kasultanan sehingga pada akhirnya masyarakat atau instansi pengguna memperoleh ijin gubernur untuk pemanfaatan tanah desa atau serat kekancingan untuk pemanfaatan tanah SG di wilayah Kabupaten Bantul.

2) Program Penyelesian Konflik-konflik Pertanahan

Maksud dan tujuan program ini adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan yang melibatkan tanah desa, tanah perorangan, tanah pemda sehingga tercapai mufakat dengan keluarnya rekomendasi kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang dilaksanakan dengan anggaran Rp 31.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp 31.325.000,- atau 100% dengan keluaran kegiatan jumlah masalah yang tertangani sebanyak 14 kasus.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pertanahan.

Tabel 3. 49 Tabel Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Juknis nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di wilayah DIY baru terbit pada bulan Oktober 2019 menjadi factor penghambat penatausahaan / pensertifikatan tanah desa	1. Sosialisasi dan koordinasi intensif dan sinerginas antar pihak desa, DPTR, Panitikismo, BPN dan pihak terkait pelaksanaan pensertifikatan tanah desa di wilayah Kabupaten Bantul
2	Pemanfaatan tanah belum semua sesuai ketentuan	1. Sosialisasi aturan terkait pemanfaatan tanah kepada masyarakat 2. Mngintensifkan pengendalian Pemanfaatan tanah dengan melibatkan pihak desa dan stakeholder terkait
3	Adanya medan / lahan yang sangat ekstrim (pegunungan, jurang dan lainnya) sehingga menjadi permasalahan terkait teknis pelaksanaan dalam pengukuran tanah	Pemanfaatan sistem teknologi untuk pengukuran di masa mendatang

Sumber: DPTR, 2019

5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan
c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e) Kegiatan evaluasi adipura.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

a) Kegiatan pengkajian dampak lingkungan
b) Kegiatan Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
c) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan.

3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
b) Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
c) Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan
b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah.

c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d) Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup

e) Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul melalui penambahan pada kelompok-kelompok pengelola sampah dan jejaring persampahan sehingga mampu mendorong manajemen pengelolaan persampahan secara lebih baik. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 5.020.920.000 terealisasi sebesar Rp 4.672.370.599 atau 93,6%.

Sumber : DLH, 2019

Gambar 3. 4 Pick Up Operasional Sampah

(23) Pengadaan kendaraan roda tiga 18 unit

(24) Jumlah gerobak sampah 39 unit

Gerobak sampah yang diadakan ada 39 unit dengan perincian 26 unit merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan 13 unit merupakan belanja modal.

Sumber : DLH, 2019

Gambar 3.5 Gerobak Sampah

(25) Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik 27 unit

Mesin pencacah sampah organik yang diadakan sebanyak 27 unit dengan perincian 13 unit untuk diserahkan kepada masyarakat, 3 unit untuk belanja modal dan 15 unit belanja modal untuk dipinjam pakai oleh sekolah.

(26) Jumlah Mesin Pencacah Sampah Plastik 2 unit

Mesin pencacah sampah plastik yang diadakan sebanyak 2 unit Mesin pencacah sampah plastik ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan daur ulang sampah.

(27) Jumlah Mesin Pemotong Rumput 10 unit

(28) Jumlah Chain Saw 5 unit

(29) Pembangunan Rumah pilah type B

(30) Jumlah Rumah pilah type C 13 unit

Pembangunan rumah pilah sampah tipe C sebanyak 13 unit dengan ukuran 3 x 5 m. rumah pilah sampah ini nantinya akan digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah baik tingkat pedukuhan.

Sumber : DLH, 2019

Gambar 3. 6 Rumah Pilah Sampah Tipe C

(31) Pengadaan kendaraan roda empat berpenumpang 1 unit

Kendaraan roda empat yang diadakan adalah Toyota Innova 2.0 V.At dengan warna attitude black mica seharga 367.500.000.

Kendaraan ini digunakan untuk operasional Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(32) Pengadaan helm 20 buah

Pengadaan helm sebanyak 20 buah. Helm ini akan digunakan untuk mendukung operasional motor roda tiga yang digunakan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.

(33) Pengadaan tas belanja sebanyak 800 buah

(34) Pengadaan tong sampah dorong 10 unit

Pengadaan tong sampah dorong sebanyak 10 unit yang nantinya akan digunakan untuk operasional kebersihan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan Persampahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kerjasama pengelolaan tersebut melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) dan Pemda DIY. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.570.425.000. terealisasi sebesar Rp 1.335.351.634 atau 85,03 %.

c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pemantauan pengelolaan limbah B3 baik limbah pabrik maupun limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis yang salah satunya dilakukan oleh Puskesmas. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 228.305.000 terealisasi sebesar Rp

221.905.000 atau 9719%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) **Pembuatan alat pengolah limbah B3 sebanyak tiga buah untuk Puskesmas.**

Pengadaan alat pengolah limbah b3 puskesmas berupa alat untuk yang dibuat untuk mengolah limbah yang ada di Puskesmas. Alat digunakan oleh puskesmas Srandakan, Kasihan II Dan Sewon I

(35) Sosialisasi serta pendampingan pengelolaan limbah B3

Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah B3 di perusahaan – perusahaan yang akan mengajukan ijin limbah B3

(36) Pelaksanaan Sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3

Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan target peserta sosialiasi adalah siswa SMA di Kabupaten Bantul sebanyak 180 orang.

d) Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.087.760.000 terealisasi sebesar Rp1.068.270.900 atau 98,20%.

e) Kegiatan Evaluasi Adipura

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mendorong pencapaian Penilaian Adipura yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 467.505.000. terealisasi sebesar Rp454.232.500 atau . 97,16%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya volume sampah yang tertangani yakni mencapai 452.000 ton pada tahun 2019
b) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan berdasarkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan).
c) Meningkatnya jumlah kelompok pengelola sampah sebanyak 157 Kelompok di 75 Desa
d) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan yang meliputi Rumah Pilah Sampah, Pencacah Sampah, Gerobak Sampah dan Tempat Sampah

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya pada upaya-upaya secara berkesinambungan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, air dan tanah.

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 9 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.923.055.000,- terealisasi sebesar Rp 5.540.797.188 atau 93,54%.

b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan untuk pengujian kualitas lingkungan hidup yang mencakup air permukaan dan air limbah .. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 768.834.000 terealisasi sebesar Rp 738.482.925 atau 96.052 %.

c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami Dan Buatan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan baik secara alami maupun buatan di Kabupaten Bantul, serta peningkatan pengetahuan SDM pelaku tambang dan masyarakat umum tentang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.110.790.000 terealisasi sebesar Rp 1.102.544.450 atau 99.258.%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya rata rata kualitas air sungai yang mencapai nilai 39,63 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 34,67.

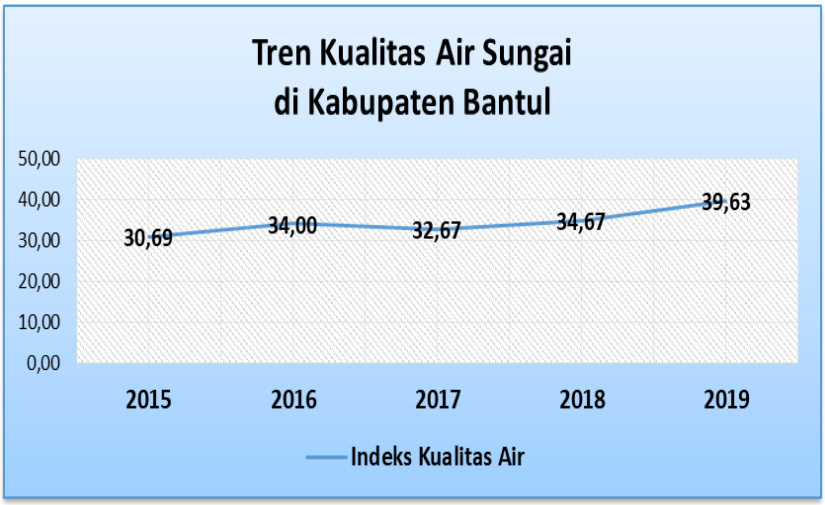

Sumber : DLH, 2019

Grafik 3. 13 Tren Kualitas Air Sungai

b) Meningkatnya rata-rata kualitas air sungai di Kabupaten Bantul yang diukur dari peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo sebesar 7.6 mg/L.

c) Meningkatnya rata-rata kualitas udara yang mencapai angka 90,90 atau termasuk kondisi baik.

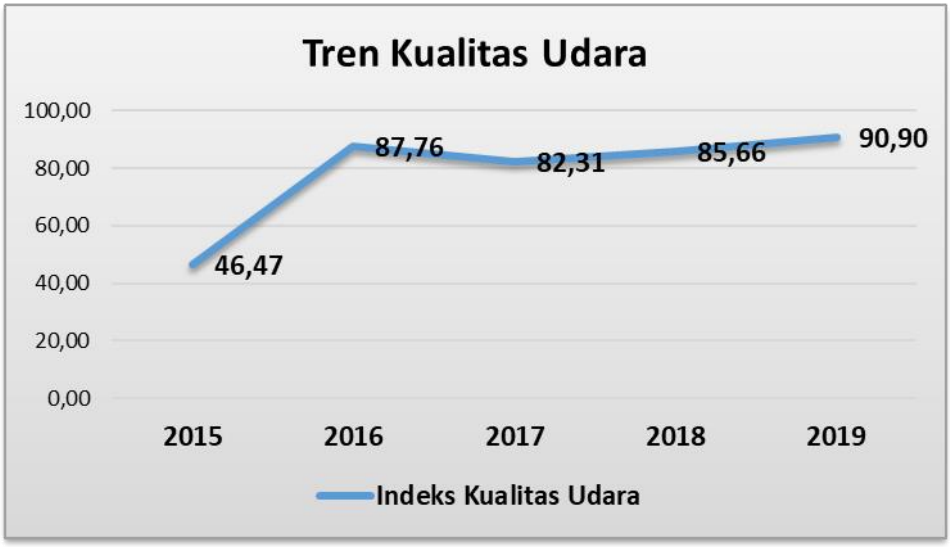

Sumber : DLH, 2019

Grafik 3. 14 Tren Kualitas Udara

3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan untuk menambah luas tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) sehingga diharapkan capaian Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul dapat lebih baik.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air dalam upaya pengurangan resiko bencana dan perlindungan lahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 9 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 944.500.000,- terealisasi sebesar Rp 923.875.000 atau 97.816%.

b) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkat pengelolaan konservasi SDA melalui penanaman dan penghargaan bagi masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 921.455.000,- terealisasi sebesar Rp 907.285.500 atau 98.46%.

c) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan keanekaragamanhayati

melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga diharapkan ada peningkatan terhadap pencapaian indeks tutupan lahan/vegetasi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 9 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 4.046.747.000,- terealisasi sebesar Rp 3.864.943.062 atau 95.50%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan, pantai, mata air, lahan kritis) seluas 1,15 Ha. Hal ini mendorong meningkatnya Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul yang mencapai 53,09 tahun 2019.

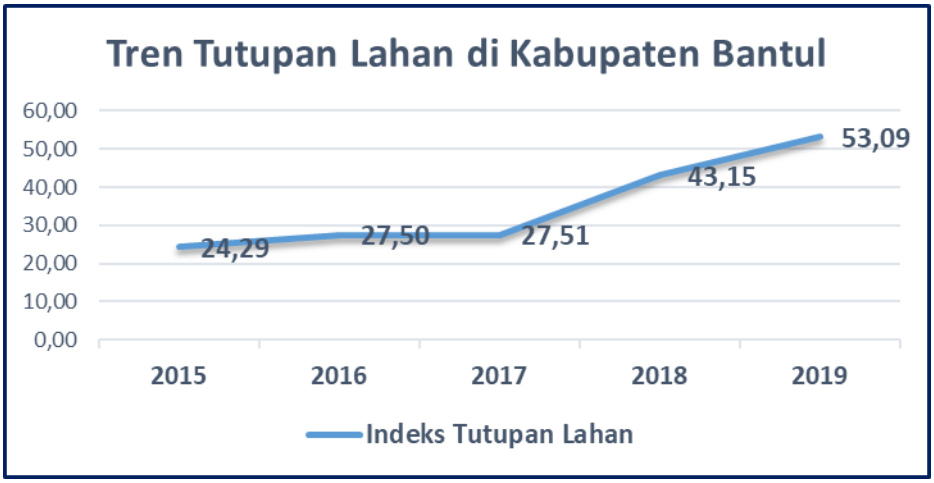

Sumber : DLH, 2019

Grafik 3. 15 Tren Tutupan Lahan Di Kabupaten Bantul

b) Meningkatnya jumlah RTH Publik yang mencapai sebesar 13% di Kawasan Perkotaan, dan merupakan salah satu upaya secara berkelanjutan untuk memenuhi ketersediaan minimal RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 20%.

4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mewujudkan kinerja penataaan dan pentaatan lingkungan hidup yang lebih baik melalui upaya-upaya peningkatan pada pelaku-pelaku usaha yang memiliki ijin lingkungan dengan mengedepankan pada aspek palayanan prima dan mudah.

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi lingkungan hidup dalam upaya penyampaian informasi publik yang komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 668.680.000,- terealisasi sebesar Rp 658.097.000 atau 98,41 %.

b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan informasi perencanaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 79.100.000,- terealisasi sebesar Rp 76.300.000 atau 97.81%.

c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi pengawasan terhadap

implementasi perijinan lingkungan hidup secara benar dan tepat serta meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidupnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 124.225.000,- terealisasi sebesar Rp 122.150.000 atau 98,33%.

d) Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat menyelesaikan aduan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaduan kasus lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 81.500.000,- terealisasi sebesar Rp 80.193.500 atau 98,39 %.

e) Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan bahan penyusunan Raperda Lingkungan Hidup berupa Naskah Akademik (NA) RPPLH Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diikuti 150 pelaku usaha.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 92.780.000,- terealisasi sebesar Rp 88.455.000 atau 95,33 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 50 Tabel Permasalahan Dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Solusi
1	Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul	1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya peningkatan kualitas air sungai 2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai 3. Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha
2	Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan	Penambahan luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat
3	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)	1. Merubah *mindset* cara pandang mayarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) 2. Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap desa 3. Peningkatan peran BUMDes dalam unit usaha penanganan sampah 4. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sumber: DLH, 2019

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Program dan Kegiatan

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)
b) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk
c) Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
d) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
e) Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM

2) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan
c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

3) Program Pengelolaan Data Kependudukan

a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan
b) Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan
c) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan
d) Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP,dan KIA), mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen pendaftaran penduduk.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk serta mewujudkan pemerintah yang baik dengan cakupan kegiatan pelaksanaan prinsip efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.910.527.000,- terealisasi sebesar Rp. 868.974.688,- atau 97%.

b) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik serta mewujudkan “Gerakan Indonesia Sadar Aministrasi Kependudukan” melalui pindah/ pindah datang secara online yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 9 (Sembilan) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 31.012.500,- terealisasi sebesar Rp.30.790.000,- atau 99 %.

c) Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan penduduk non permanen di lingkungan Kabupaten Bantul dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan untuk

memberikan gambaran kondisi perkembangan penduduk non permanen di Kabupaten Bantul.

Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data penduduk nonpermanen dapat digunakan dalam perancangan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kegiatan ini terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.98.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.929.000,- atau 100 %

d) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kepemilikan identitas penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan demi terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan berbasis NIK (nomor Induk Kependudukan) yang merupakan *single Identity Number*. Kegiatan ini terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.981.472.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.954.853.966,- atau 99 %.

e) Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen kependudukan KK dan KTPel bagi penduduk, keakuratan data kependudukan, SDM yang berkualitas serta untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 319.948.000,- terealisasi sebesar Rp.318.435.500,- atau 100 %.

2) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan mendekatkan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melindungi dan mengamankan elemen data terkait pentingnya informasi yang terkandung di dalam arsip vital tersebut, melindungi fisik dokumen pencatatan sipil dari kerusakan, kehilangan dan kemusnahan serta mempermudah dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga lain guna pemanfaatan data.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.315.160.300,- terealisasi sebesar Rp.315.130.000,- atau 100 %.

b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan sinkronisasi data dan integrasi Sistem Informasi Managemen Nikah (SIMKAH) untuk data nikah dan rujuk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pengantin baru penduduk Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini terdiri dari 9 (Sembilan) sub kegiatan. Pagu anggaran ini sebesar Rp. 205.154.000,- terealisasi sebesar Rp.204.398.000,- atau 100 %.

c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian sesuai dengan target yang telah disusun dalam RPJMD.

Adapun bentuk inovasi dari kegiatan ini adalah GO AKTA dan SIMPATI. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 596.250.000,- terealisasi sebesar Rp.590.915.000,- atau 99 %.

3) Program Pengelolaan Data Kependudukan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk menyajikan data yang akurat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir. Kegiatan ini terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.71.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.745.000,- atau 100 %.

b) Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.

Adapun tujuan dari publikasi kependudukan yaitu terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan sehingga menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat.

Kegiatan ini terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar 418.748.760,- terealisasi sebesar Rp.418.648.750,- atau 100 %.

c) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Bantul yang bermanfaat untuk pengembangan pembangungan daerah, dan perumusan kebijakan.

Kegiatan ini terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.000.000,- terealisasi sebesar Rp.66.985.000,- atau 100 %.

d) Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sarana untuk memberikan solusi terkait masalah kependudukan. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar

Rp.24.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.820.000,- atau 100 %.

e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar Dinas/ Instansi yang melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.650.000,- terealisasi sebesar Rp.88.350.000,- atau 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 51 Permasalahan Dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan	Solusi
1	Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 – 16 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan dinas pendidikan untuk melakukan kerjasama mendata anak yang belum memiliki KIA
		Memberikan sosialiasi kepada guru dan orang tua
2	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun belum optimal	Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kalahiran
		Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi
3	Pemuthakiran data kependudukan belum optimal	Menciptakan inovasi smart on , untuk Proses input perubahan data menggunakan IT (HP)
4	Kesadaran mayarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajukan tidak valid dan akurat	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul
5	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah,masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Akasi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)

Sumber : Disdukcapil, 2019

7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten terurai sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

a) Kegiatan Pelayanan KIE
b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal
d) Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional
e) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
f) Kegiatan Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
g) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
b) Kegiatan Lomba forum PIK remaja
c) Kegiatan KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

a) Kegiatan Pendampingan Forum IMP

5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a) Kegiatan Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
b) Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)
c) Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
d) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA
e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

7) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

a) Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
b) Kegiatan Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
c) Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

b. Realiasi Pelaksanaan Program

1) Program Keluarga Berencana

Maksud dan tujuan dari Program Keluarga Berencana adalah 1) memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa; 2) mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup

rakyat dan bangsa; 3) memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana (KB) mendapat sokongan anggaran APBD sebesar Rp6.402.225.600,00,- . Program Keluarga Berencana dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pelayanan KIE

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang program KB dan meningkatkan kepesertaan KB. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.469.669.500,00,- dan sudah terrealisasi sebesar Rp.4.433.155.213,- atau 99,19%.

b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dari mitra kerja dalam hal ini adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.488.580.000,00,- terealisasi sebesar Rp1.488.100.000,00,- atau 99,97%. Tak bisa dipungkiri keberhasilan Program KKBPK di Kabupaten Bantul karena dukungan penuh dari IMP (Kader KB) se Kabupaten Bantul.

c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan KB aktif/baru dan program KBKR yang didukung oleh berbagai lintas sektor di lini lapangan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp46.500.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp45.000.000,- atau 96,78%.

d) Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian penduduk di lini lapangan sehingga *stakeholder* memiliki kepedulian dan kepekaan untuk menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang sehingga kepersertaan KB baru dan aktif bisa meningkat. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp138.141.100,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp136.291.100,- atau 98,66%.

e) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati Hari Keluarga sekaligus sebagai sarana pemasyarakatan Program KKBPK di Kabupaten Bantul dengan melibatkan PLKB, IMP atau Kader KB dan masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp201.910.000,-. Terealisasi sebesar Rp201.550.000,00,- atau 99,82%.

f) Kegiatan Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun masyarakat yang memiliki daya kemampuan dalam segala bidang. Sasaran Penggarapan Kampung KB adalah PUS, WUS, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder, Kader, LSM. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.22.875.000,- dan sudah terserap sejumlah Rp.22.875.000,- atau 100%.

g) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan, motivasi dan penghargaan kepada PKB, IMP dan Pasangan KB Lestari atas peran baktinya dalam penggerakan Program KKBPK di lini lapangan. Kegiatan ini terdiri dari perlombaan-perlombaan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp34.550.000,- dan sudah terserap sejumlah Rp.34.549.500,- atau hampir 100%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya pemahaman masyarakat/PUS, remaja, yang memahami pentingnya tentang Program KKBPK dan ikut mendukung Program KKBPK.
b) Meningkatnya kepesertaan KB aktif dan KB Baru di Kabupaten Bantul.
c) Bertambahnya Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2019 yaitu 9 Kampung KB.
d) PPKB dan peserta mampu lebih mengembangkan Kampung KB di wilayahnya.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja maupun pendewasaan usia perkawinan. Kelompok PIK Remaja berbasis sekolah di Kabupaten Bantul sebanyak 21 kelompok dan dan berbasis masyarakat sebanyak 63 kelompok. Pagu anggaran program ini adalah sebesar Rp170.650.000,-.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran kegiatan ini adalah tokoh masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat lapangan seperti Camat, Lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Badan Perwakilan Desa, Kepala Sekolah, Tokoh Agama sejumlah 225 orang.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp35.200.000,00,- terealisasi sebesar Rp35.200.000,00,- atau 100%.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada para remaja dalam hal pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam bentuk perlombaan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp40.450.000,00,- terealisasi sebesar Rp39.200.000,00,- atau 96,91%.

b) Kegiatan KIE Kesehatan Reproduki Remaja Bagi Remaja

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahamkan remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dengan sasaran 2.000 siswa di 40 SLTA di Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp95.000.000,00,- dan dapat terserap sebesar Rp95.000.000,00,- atau 100%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Masyarakat memahami program KKBPK, memahami pentingnya kesehatan reproduksi remaja.
b) Keberlangsungan kegiatan PIK remaja di jalur masyarakat dan sekolah tetap ada.
c) Meningkatnya pemahaman remaja tentang pentingnnya kesehatan reproduksi, mampu mengontrol diri untuk tidak melakukan seks pra

nikah dan mampu merencanakan kehidupannya di masa mendatang.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam program KB, terutama KB MKJP. Program Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan melalui:

a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi adalah salah satu upaya yang dilakukan DPPKBPMD untuk meningkatkan kepesertaan KB di Kabupaten bantul dengan memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp115.900.000,- terealisasi sebesar Rp85.892.250,- atau 74,11%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah peserta KB yang menggunakan KB MKJP yaitu MOP sebanyak 70 orang dan MOW 80 orang

4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri mendapat sokongan anggaran APBD sebesar Rp.75.365.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri terdiri dari:

a) Kegiatan Pendampingan forum IMP

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka penguatan kelembagaan Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berupa fasilitasi pertemuan forum IMP Kabupaten dan peningkatan kapasitas IMP. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp75.365.000,- terealisasi sebesar Rp75.365.000,-. Forum IMP Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor: 65 Tahun 2017 ini beranggotakan 34 orang yang merupakan perwakilan IMP dari 17 kecamatan. Setiap bulan Forum IMP Kabupaten melakukan pertemuan rutin dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan Program KKBPK.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK di lini lapangan.

5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga mendapat sokongan anggaran APBD sebesar Rp.317.275.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga terdiri dari:

a) Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kader BKB, BKR, dan BKL dalam memberikan penyuluhan kepada anggota BKB, BKR, dan BKL. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp31.000.000,00,- dan telah terserap sebesar Rp.31.000.000,00,- atau 100%.

b) Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta Tokoh Masyarakat terhadap pentingnya pola asuh anak Balita yang pada gilirannya akan lebih peduli pada pelaksanaan kegiatan BKB. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp26.375.000,00,- terealisasi sebesar Rp26.375.000,00 atau 100%.

c) Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kader POSDAYA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp13.400.000,- terealisasi sebesar Rp13.400.000,- atau 100%.

d) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA

Kegiatan ini merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui apakah kegiatan tribina dan POSDAYA sudah diterapkan dalam kehidupan, yaitu dengan melaksanakan lomba yang diawali dengan seleksi administrasi bagi masing-masing kategori lomba. Dari seleksi administrasi tersebut diambil 5 besar dari masing-masing kategori. Kemudian diadakan kunjungan bagi masing – masing kategori yang lolos seleksi administrasi. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp101.500.000,00,- terealisasi sebesar Rp101.480.000,- atau 100%.

e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau pengelolaan kegiatan UPPKS di lapangan dengan sasaran Kelompok UPPKS yang sedang meminjam bantuan modal. Selain itu juga diadakan pelatihan manajemen keuangan kelompok usaha bagi kelompok UPPKS PEKM dan KUPK. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp145.000.000,-terealisasi sebesar Rp144.167.000,- atau 99,43%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatnya wawasan kader tentang BKB, BKR, BKL serta permasalahannya, sehingga mampu memberikan penyuluhan dan solusi permasalahan di kelompok BKB, BKR, dan BKL.
b) Peserta BKB mampu menganalisis permasalahan balita dan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola asuh.
c) Terkoordinirnya kegiatan Posdaya di Kabupaten Bantul
d) Kegiatan Kelompok tribina dan POSDAYA berjalan sesuai fungsi di masyarakat.
e) Kelompok UPPKS lebih mampu menginovasi produk dan manajemen usaha kelompok dan memanajemen keuangan kelompok dengan baik.

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial mendapat pagu anggaran sebesar Rp27.500.000,.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terdiri dari:

a) Kegiatan Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Inti dari kegiatan ini adalah orientasi/ bimbingan teknis kepada kelompok UPPKS khususnya untuk KUPK dan PEKM dalam hal pengelolaan keuangan usaha yang dijalankannya, sehingga pencatatan keuangan dalam kelompok lebih rapih dan tertata. Sasaran kegiatan ini 225 orang Pengurus UPPKS. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp27.500.000,- terealisasi sebesar Rp27.500.000,-.

Adapun bentuk dan rincian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Tabel 3. 52 Kegiatan orientasi bagi keluarga miskin dan PMKS

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Tempat
1	26/11/2019	75 orang	Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul
2	27/11/2019	75 orang	Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul
3	28/11/2019	75 orang	Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari kelompok UPPKS terutama PEKM dan KUPK lebih mampu mengelola keuangan usaha yang dijalankannya, pencatatan keuangan dalam kelompok lebih rapih dan tertata.

7) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan memiliki pagu anggaran sebesar sebesar Rp249.483.400,-. Teori demografi mengatakan bahwa keberhasilan Keluarga Berencana akan membawa pada keberhasilan pembangunan kependudukan, dan keberhasilan kependudukan akan membawa pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori lain yang sejalan dengan teori demografi ini adalah jika keluarga berencana berhasil dan dapat bertahan dalam jangka panjang maka keberhasilan tersebut akan merubah struktur penduduk. Keberhasilan program KB secara nyata akan berdampak pada terciptanya kondisi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Hal tersebut akan memberi peluang bagi suatu negara untuk mencapai *The windows of opportunity* yang merupakan peluang mendapat bonus demografi, dampak selanjutnya kesejahteraan meningkat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan terdiri dari:

a) Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Kegiatan analisa data dan dampak kependudukan terdiri dari Cetak Formulir F1/Dal/Dus, Buku Database Program Dalduk Kecamatan, Desa dan Kabupaten, Formulir Kompilasi Laporan Program KKBPK dusun. Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi analisa data dan dampak kependudukan yang

mengundang perwakilan kader dengan tujuan memberikan informasi tentang kegiatan pendataan pada tahun 2019 dan diharapkan kepada peserta untuk mensukseskan kegiatan pendataan tahun 2019. Kegiatan pendataan yang dimaksud meliputi Updating Sistem Informasi Keluarga, Statistik Rutin, dan juga Update Aplikasi Simduk KKBPK. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.136.355.000,- terealisasi sebesar Rp136.355.000,- atau 100%.

Adapun bentuk dan rincian kegiatan meliputi, kegiatan Sosialisai Analisa Data dan Dampak Kependudukan yang mengundang perwakilan Kader sejumlah 100 orang yang terbagi dalam 2 gelombang. Kegiatan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Maret 2019 di Aula Pemda II Kabupaten Bantul.

b) Kegiatan Pengolahan Updating Serta Analisa Data dan Statistik Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan pengisian formulir pencatatan pelaporan bagi poktan. Bimtek dipandu oleh PPKB di wilayah kecamatan tersebut. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp33.550.000,00,- terserap sebesar Rp33.550.000 atau 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Updating Serta Analisa Data dan Statistik Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan serentak pada tangga 24 Juli 2019. Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi capaian kepesertaan KB sehingga segala permasalahan untuk mencapai target kepesertaan KB dapat teratasi. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp79.578.400,00,- terealisasi sebesar Rp.79.578.400,- atau 100%.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari tersedianya Datin secara tepat waktu dan pengelolaan aplikasi kependudukan berjalan secara optimal.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tabel 3. 53 Tabel Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya sinergitas pemangku kepentingan untuk program KB sehingga program KKBPK mengalami stagnasi	Keterlibatan secara intens lintas sektor
2	Kurangnya jumlah PKB	Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader
3	Angka *unmet need* masih cukup tinggi 10,55%	1. Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2. penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)
4	Masih tergantungnya pelayanan pemasangan kontrasepsi pada Baksos BKKBN Perwakilan DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi MOW.	Menganggarkan untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.
5	Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami kegagalan di tahun 2017, hal ini mengakibatkan kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.	Memberikan pemahaman kepada calon akseptor melalui KIE.
6	Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)	1. Pembentukan kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi Remaja.

No.	Permasalahan	Solusi
		2. Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan perihal Kesehatan Reproduksi.
7	Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R) belum berjalan secara maksimal	Penguatan kelembagaan dengan peningkatan manajemen kelembagaan dan anggaran
8	Pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum sesuai dengan harapan.	Pembinaan Kelompok UPPKS melalui Workshop, Study Banding dan Pelatihan
9	Pelaporan data keluarga masih belum optimal	Bimtek pada wali data
10	Banyak kelompok pindah platform ke pinjaman yang lebih besar karena kelompoknya berkembang.	1. meningkatkan jumlah platform pinjaman 2. pelaksanaan publikasi akan di gencarkan lagi 3. pelaksanaan pencairan diadakan setiap bulan 4. merubah alokasi anggaran • dari PEKM menjadi anggaran KUPK (1.000.000.000) • dari KUPK menjadi anggaran PEKM (720.000.000)

Sumber: DPPKBPMD, 2019

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
d) Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi Perdesaan
b) Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan
c) Kegiatan Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a) Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
b) Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa
c) Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
d) Kegiatan Pendampingan kegiatan TMMD

e) Kegiatan Bantul Ekspo dan karnaval
f) Kegiatan Pengembangan desa siaga
g) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

a) Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat
b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar. Pagu anggaran dari program ini sebesar Rp670.315.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk operasional pendampingan/fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa

(P2MD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan. Pagu anggaran ini sebesar Rp256.570.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp256.570.000,-.atau 100%.

Tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Bantuan P2MD dan BKK sebesar Rp.38.960.044.000,- yang terdiri dari bantuan P2MD sebesar Rp.20.160.000.000,- dan BKK sebesar Rp.18.800.044.000,- yang dialokasikan kepada 971 kelompok sasaran pada 75 desa di 17 kecamatan sebagai berikut: P2MD kepada 403 kelompok sasaran pada 70 desa di 17 kecamatan dan BKK kepada 568 kelompok sasaran pada 64 desa di 17 kecamatan.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah desa tentang pengawasan, perencanaan pembangunan desa, serta pengkajian potensi desa agar *stakeholders* di pemerintah desa dapat melaksanakan fungsi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp65.286.000,- terealisasi sejumlah Rp65.106.000,- atau 99,73%.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional pendampingan/fasilitasi

pelaksanaan pengumpulan hasil *updating* profil desa oleh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp115.375.000,- terealisasi sebesar Rp115.375.000,-.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas desa kurang berkembang, sebanyak 1 kali
(2) Bimbingan teknis profil desa dan desa on-line, sebanyak 1 kali
(3) Evaluasi profil desa tahun 2019.

d) Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional penyaluran dan pendampingan bantuan Pembangunan Pengelolaan Air Bersih (PPAB) dan Workshop Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp233.084.000,- terealisasi sebesar Rp233.064.000,-.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih secara mudah, murah, merata dan berkelanjutan dimasyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan air didaerah perbukitan dan daerah-daerah yang kesulitan air bersih, salah satu program Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu mengalokasikan untuk Bantuan PPAB melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) PPAB ke Pemerintah Desa. Alokasi anggaran BKK PPAB

tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- yang penyalurannya dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Selain BKK PPAB dari APBD, pada tahun 2019 Pensiunan Pegawai Bank Indonesia (PPBI) Cabang Yogyakarta juga memberikan bantuan berupa 1 (satu) unit bantuan PPAB di PAB Kalipakem Desa Seloharjo Kecamatan Pundong sebesar Rp.300.000.000 melalui program CSR.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Percepatan pembangunan fisik/infrastruktur di pedesaan;
b) Tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dari masyarakat;
c) Terpeliharanya budaya gotong-royong dimasyarakat;
d) Peningkatan perekonomian dimasyarakat;
e) Tumbuh dan berkembangnya potensi desa.
f) Peningkatan pemahaman pengelola profil desa dan evaluasi *updating* profil desa.
g) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan PPAB
h) Tersalurkannya bantuan PPAB dari APBD dan CSR di 20 lokasi.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pagu anggaran dari program ini adalah sebesar Rp853.862.000,-.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi Perdesaan

Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp.297.160.000,- terealisasi Rp.294.827.000,- atau 99,22%. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Pedesaan terdiri dari 8 sub kegiatan, diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola UP2K-PKK

Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah sebagai acuan bagi TP-PKK dan Kader UP2K-PKK dalam mengelola dan menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengetahui lebih dekat kegiatan UP2K-PKK khususnya dalam pengelolaan kegiatan beserta administrasinya.

Bimtek peningkatan kapasitas pengelola UP2K-PKK dilaksanakan hari/tanggal, Rabu 13 Maret 2019, pukul 8.30-Selesai bertempat di Gedung pertemuan Komplek Pemda ll dengan jumlah peserta 75 orang pengelola UP2K-PKK, serta 17 ketua TPPKK Kecamatan.

(2) Sub Kegiatan Pembinaan UP2K-PKK Kabupaten

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk acuan bagi TP-PKK dan Kader UP2K-PKK dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi serta meningkatkan pendapatan & kesejahteraan keluarga. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data & informasi tentang progress kemajuan, hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan UPK.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 dan 25 Maret 2019 pukul 8.30-selesai bertempat di Aula DPPKBPMD Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 102 peserta pengelola UP2K-PKK, dan 17 ketua TP-PKK Kecamatan Se Kabupaten Bantul.

(3) Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Global Gotong Royong (G2R)

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi secara langsung antara tokoh masyarakat & TPPKK Desa dengan pengurus Yayasan SGR untuk mendapatkan gambaran & informasi tentang keberhasilan dalam menumbuhkan semangat untuk membangun & memberdayajan desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 pukul 08.30-selesai bertempat di Balai Desa Girirejo Imogiri dengan peserta berjumlah 50 orang. Tahap kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 08.30-selesai

bertempat di Balai Desa Wukirsari Imogiri dengan peserta sebanyak 50 orang.

(4) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja pengelolaan UP2K-PKK Tahun 2019

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai media pembinaan dan penilaian sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para pelaku UP2K-PKK di Tingkat Kecamatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(a) Pelaksanaan evaluasi kinerja pengolaan UP2K-PKK Administrasi dan ekspose 17 Desa dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 8, 9, 10 April 2019.

(5) Pelaksanaan vertifikasi lapangan di 3 desa pemenang. Evaluasi kinerja pengelola UP2k-PKK pertama dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 April 2019, bertempat di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan. Evaluasi kinerja pengelola UP2k-PKK kedua dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, bertempat di Desa Murtigading Kecamatan Sanden. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Produk Unggulan Pedesaan Tahun 2019

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada pelaku ekonomi masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Sedangkan tujuan

dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan skill bagaimana memasarkan produk unggulan di setiap desanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Gedung Pertemuan Pemda II dengan peserta dari UED SP, Bumdes, Kelompok UPK

(6) Sub Kegiatan Fasilitas Pendampingan dan Pembentukan Bumdes

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat lebih terbuka bahwa perubahan kehidupan harus dimulai dari diri sendiri serta mengubah sikap masyarakat desa dalam berwirausaha. Sub Kegiatan : Monitoring & Evaluasi BUMDES

Maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan teknis & administrasi Bumdes supaya masing masing Bumdes dalam menjalankan usahanya tidak menemui hambatan.

(7) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Desa

Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dalam pengelolaan LKD, mengelola usaha secara efektif, mampu memasarkan barang yang di produksi, mampu menerima informasi pasar, memberi pandangan baru kepada masyarakat desa dalam berwirausaha. Sedangkan tujuan dari

kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui lebih dekat kegiatan UPK, Bumdes & UED SP khususnya dalam pengelolaan kegiatan beserta administrasinya, Sebagai sarana komunikasi secara langsung dengan dengan para pelaku pengelola UPK, Bumdes, UED SP, mengenai proses pelaksanaan kegiatan. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang progress kemajuan, hambatan dan permasalahan, yang berkaitan UPK, Bumdes, UED SP. Sebagai media pembinaan dan penilaian sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para pengelola UPK, Bumdes, UED SP di Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 08.30-selesai bertempat di Gedung pertemuan komplek pemda ll dengan peserta dari Pewakilan Pengelola Bumdes, UED SP, UPK

b) Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

Kegiatan ini di didukung dengan anggaran sebesar Rp276.637.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp276.637.000,- atau 100%. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Sub Kegiatan : Rakerda Asosiasi Pengelola Pasar Desa

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada Lurah Desa dalam

pengelolaan pasar tradisional. Dan bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa pasar desa memberikan manfaat yaitu tersedianya tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari – hari.

(2) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada Lurah Desa pengelola pasar desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Sedangkan tujuannya adalah Memberikan pengertian bahwa pasar desa memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

(3) Sub Kegiatan : Ekspose dan Administrasi Lomba Pasar Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi, bahasa dan sikap serta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman, pengetahuan maupun ketrampilan bagi pengelola, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam mengorganisasi, mengadministrasi dan manajemen pasar desa secara optimal dan profesional. Serta memantapkan dan mempertegas sistem koordinasi bersama lintas sektor untuk mensinkronisasikan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Pasar Desa.

(4) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelola Pasar Desa

Maksud dari kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyamakan persepsi Bahasa dan sikap sarta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman, pengetahuan maupun keterampilan bagi pengelola pasar untuk meningkatkan daya saing. Serta meningkatkan kemampuan pengelola pasar dan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar.

(5) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Lomba Pasar Desa

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyamakan persepsi Bahasa dan sikap serta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman pengetahuan, maupun keterampilan bbagi pengelola, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam mengorganisasi mengadministrasi dan managamen pasar secara professional. Serta memberikan wawasan kemampuan dan keterampilan bagi pengelola pasar untuk meningkatkan daya saing. Sub Kegiatan : Mobile Training Pelaku Pasar Desa

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada Lurah Desa dan Pengelola Pasar Desa dalam pengelolaan sebuah Pasar Tradisional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan

pengertian bahwa Pasar Desa memberi manfaat yaitu Tersedianya tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman bahwa pasar desa akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Desa sehingga mampu menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Desa. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Pembentukan BUMDES

Maksud dan tujuan pembentukan Bumdes untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga desa, serta memaksimalkan potensi desa menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kegiatan Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp280.065.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp. 280.065.000,- atau 100%. Terdapat 7 sub kegiatan dalam kegiatan ini, diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Hasil Pertanian & Peternakan Berbasis TTG

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pengelohan hasil pertanian berbasis TTG. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dalam bidang TTG melalui program & diseminasi atau sosialisasi hasil pertanian. Sub Kegiatan **:** Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan pandangan seluruh peserta sosialisasi dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga kualitas hasil pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat benar - benar terwujud.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 pukul 08.30 bertempat di Gedung Pertemuan Komplek Pemda II dengan peserta 100 Orang terdiri dari, Camat, Pengurus Posyantek, Pendamping Desa.

(2) Sub Kegiatan : Lokakarya Dalam Rangka Gelar TTG

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyamakan persepsi, bahasa dan sikap serta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman, pengetahuan maupun keterampilan bagi para penemu Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bantul. Memberikan apresiasi untuk pelaku/pencipta Teknologi Tepat Guna & Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi diberbagai sektor usaha. Memasyarakatkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya *entrepreneur*.

(3) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyantek

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyamakan persepsi, Bahasa dan sikap serta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman, pengetahuan maupun ketrampilan bagi para penemu inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bantul. Memberikan apresiasi untuk pelaku/pencipta Teknologi Tepat Guna. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi diberbagai sektor usaha. Memasyarakatkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya Entrepreneur.

(4) Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Posyantek

Maksud dari kegiatan ini dalam rangka inventarisasi data dan mengetahui perkembangan pengelolaan Posyantek di Kabupaten Bantul. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi diberbagai sektor usaha. Memasyarakatkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya *entrepreneur*.

(5) Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembentukan Posyentekdes

Tujuan kegiatan ini adalah memberi wadah para penemu TTG di setiap desa untuk mengembangkan apa yang ditemukanya sehingga menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sub Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Hasil Pertanian & Peternakan Berbasis TTG

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi untuk pelaku/pencipta TTG. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produksi di berbagai sektor usaha.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola UP2K-PKK sehingga dapat mengelola & mengembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga
b) Peningkatan kemampuan pengelola usaha ekonomi keluarga dalam usaha peningkatan ekonomi keluarga
c) Peningkatan kemampuan Lembaga Desa & tokoh masyarakat tentang pentingnya pengembangan potensi wisata
d) Peningkatan pengetahuan & kemampuan para pelaku ekonomi dari penentuan bahan baku, sampai dengan menjaga kualitas produk

e) Terfasilitasinya pembentukan Bumdes di setiap Desa

f) Peningkatan kapasitas lembaga keuangan desa, kapasitas pengelola Pasar Desa baik administrasi maupun tata kelola pasar

g) Peningkatan kemampuan pelaku pasar desa dalam pengelolaan pasar desa

h) Peningkatan kemampuan pelaku pengelola pasar desa khususnya untuk pasar desa yang belum berkembang dengan baik

i) Peningkatan pengetahuan tentang perkembangan Teknologi Tepat Guna serta pemanfaatanya dalam mutu & kualitas produksi di berbagai sektor usaha

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp1.695.233.100,-.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya adalah:

a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong dan mendampingi pelaksanaan musyawarah desa (Musrenbangdes) pada pemerintah desa agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp21.157.500,- terealisasi sebesar Rp21.157.500,- atau 100%.

Pemerintah Kabupaten Bantul di DPPKBPMD menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes dalam bentuk pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes dan pelaksanaan bimbingan teknis kapasitas pamong sebanyak 150 orang. Pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa bekerjasama dengan Tim Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kementerian Desa DT dan Transmigrasi pada Kabupaten Bantul.

b) Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional pelaksanaan lomba desa di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 dari tingkat kabupaten, pendampingan lomba desa tingkat provinsi dan lomba desa tingkat nasional/regional. Perlombaan Desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp837.595.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp837.595.000,- atau 100.

Adapun pelaksanaan dan penyelenggaraan lomba desa terdiri dari: pemberian hadiah lomba desa dan pelaksanaan lomba desa tingkat Kabupaten Bantul berupa penilaian administrasi, presentasi lurah desa serta kunjungan/verifikasi lapangan, pendampingan desa yang maju dalam lomba desa tingkat provinsi dan pendampingan desa bagi desa yang maju lomba tingkat nasional/regional.

c) Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD

Inti dari kegiatan ini adalah pencanangan BBGRM tingkat kabupaten, serta peningkatan kapasaitas bagi pengurus LPMD dan pengurus PKK serta melaksanakan lomba LPMD. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp234.005.000,- dan sudah terrealisasi sejumlah Rp. 234.005.000,- atau 100%.

(1) Sub Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMD

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus LPMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD serta meningkatkan wawasan pengurus tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Sasaran Bimtek sejumlah 92 orang terdiri dari 17 Camat se-Kabupaten Bantul, serta 75 Ketua / Pengurus LPMD se-Kabupaten Bantul.

(2) Sub Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pengurus PKK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PKK. Serta meningkatkan wawasan pengurus tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Sasaran dari kegiatan ini adalah 17 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bantul, serta 75 Ketua / TP PKK Desa se-Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, bertempat di Rumah Dinas Bupati Bantul. Materi dan narasumber kegiatan ini adalah :

(a) Kepemimpinan, oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bantul.

(b) Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (LP3PKK), oleh Balai Pemdes DIY

(c) Membangun Motivasi Diri serta Membangun Teamwork yang baik, oleh motivator Edy Risdiyanto.

(3) Sub Kegiatan Pencanangan BBGRM

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan semangat dan jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan, melestarikan budaya gotong royong masyarakat, meningkatkan peran LPMD dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 April 2019, bertempat di desa poncosari, Kecamatan Srandakan. Sasaran dari kegiatan ini berjumlah 300 orang yang terdiri dari :

(a) Kepala OPD se-Kabupaten Bantul
(b) Camat se-Kabupaten Bantul
(c) TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bantul
(d) Lurah Desa se-Kabupaten Bantul
(e) Ketua LPMD se-Kabupaten Bantul
(f) TP PKK Desa se-Kecamatan Srandakan
(g) Tokoh Masyarakat Desa Poncosari

(4) Sub Kegiatan Lomba LPMD Berprestasi

Tujuan dari diselanggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran dan fungsi LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, mengetahui sejauh mana peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas pengurus LPMD.

d) Kegiatan Pendampingan kegiatan TMMD

Bahwa untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan program pembangunan desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pelaksanaan TMMD di Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI

Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017. Program tersebut bertujuan untuk:

(1) Membuka akses wilayah terisolir dan/atau tertinggal
(2) Mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan lingkungan, pedukuhan, desa dan derah
(3) Meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa dan Negara
(4) Merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan desa.

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp388.680.600,- dan sudah terealisasi sebesar Rp388.680.600,- atau 100%. Kegiatan Pengembangan desa siaga

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif dan pelaksanaan pengelolaan Posyandu di 17 Kecamatan. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Aktif dimulai dengan Pembentukan Pokjanal Desa Siaga Kabupaten Bantul. Pembentukan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan dan Kelurahan Siaga Aktif.

Pada tahun 2019 pelaksanaan Evaluasi Desa Siaga Aktif dilaksanakan secara terpadu dengan Evaluasi Pengelolaan Posyandu dengan tujuan efektifitas dan efisiensi kegiatan. Peserta evaluasi desa siaga aktif dan pengelolaan Posyandu adalah 17 desa siaga aktif dan Posyandu yang merupakan perwakilan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp88.525.000,- dan sudah di terrealisasi sejumlah Rp88.350.000,- atau 99,81%.

e) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa

Kegiatan ini di dukung dengan anggaran Rp87.070.000,- dan sudah terealisasi Rp87.070.000,- atau. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan Bimtek Kelompok SPP

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan dan sikap serta kesempatan untuk mengembangkan diri, menyampaikan isu dan informasi penting pelaksanaan keberlanjutan PNPM-MPd, menjadi media untuk mengidentifikasi dan menangani maslah - masalah yang muncul dalam pengelolaan dana SPP, meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan pengalaman bagi pemanfaat dana bergilir SPP dalam mengelola potensi ekonomi di wilayahnya, memberikan pemahaman tentang pengurusan PIRT.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari, Rabu-Kamis, 27-28 Februari 2019, pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung Pertemuan

Komplek Pemda II dengan peserta Bimtek pada tanggal 27 Februari 2019: Kelompok SPP Kecamatan Bantul, Jetis, Sewon, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Kretek Pandak, & Srandakan. Peserta Bimtek Tanggal 28 Februari, Kelompok SPP Kecamatan Kasihan Sedayu Pajangan Pleret Sanden Piyungan Banguntapan & Dlingo

(2) Sub Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola UPK

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai acuan bagi UPK dalam mengelola dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi untuj meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui lebih dekat kegiatan UPK, khususnya dalam kegiatan dan administrasinya, sebagai sarana kominikasi secara langsung dengan para pelaku UPK mengenai proses pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan data & informasi tentang progress kemajuan hambatan dan permasalahan yang berkatan dengan UPK, sebagai media pembinaan & penilaian sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para pelaku UPK di tingkat Kecamatan.

(3) Sub Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BPUPK

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada pelaku PNPM-MPd tentang

pengawasan internal kegiatan UPK, memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan bagi pelaku PNPM-MPd di tingkat desa dan kecamatan dalam mengidentifikasi masalah pengelolaan UPK, memberikan bekal kepada pengawas UPK agar dalam pemeriksaan dan pengawasan bersinergi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga yang handal baik dari segi tekhnik, kualitas maupun akurasi dalam pengawasan UPK pada kegiatan PNPM-MPd, menambah wawasan & memberikan motivasi serta mendorong para pengawas UPK, pada kegiatan pengawasan pelaksanaan PNPM-MPd baik professional maupun desa untuk dapat bekerja secara *acceptable* sehingga kerjanya dapat diterima oleh semua penerima manfaat tanpa menimbulkan masalah baru, untuk mendapatkan data dan informasi tentang progress kemajuan, hambatan dan permasalahan yang berkaitan UPK, sebagai media pembinaan dan penilaian sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para pelaku UPK di tingkat kecamatan.

(4) Sub Sosialisasi Kerjasama Antar Desa

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pengelola kerjsama antar desa, memberdayakan masyarakat desa dalam usaha ekonomi desa, mengerakkan ekonomi desa. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini

adalah sosialisasi kerjasama Antar Desa untuk membangun mindset pentingnya melakukan kerjasama dan kemitraan antar desa serta meningkatkan kinerja kelembagaan BKAD agar peran dan fungsinya sebagai lembaga BKAD dapat berjalan baik & berkembang.

(5) Sub Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melestarikan nilai nilai social budaya masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peserta terhadap kerjasama antar desa, memberikan pemahaman peserta terhadap penyusunan aturan- aturan pemeliharaan dan perlindungan aset masyarakat, meningkatkan kepedulian peserta terhadap aset – aset yang dimiliki masyarakat.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan peran serta pengurus LPMD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.
b) Pendampingan pelaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
c) Desa Srimulyo, Piyungan terpilih sebagai Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional Regional II.

d) Peningkatan peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

e) Terlaksananya peran dan fungsi LPMD dalam pembangunan desa sera meningkatnya fasilitasi operasional kegiatan LPMD dari Pemerintah Desa.

f) Penguatan Kelembagaan kelompok simpan Pinjam Perempuan

g) Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus PKK dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan memiliki pagu anggaran sebesar Rp146.780.000,-. Program ini memiliki 1 kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera

Kegiatan ini di memiliki pagu anggaran sebesar Rp146.780.000,- terealisasi Rp146.780.000,- atau 100%

Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera terdiri dari 3 sub kegiatan, diantaranya adalah:

(1) Sub Kegiatan Sosialisasi Program dan Pelatihan Keterampilan

Manfaat atau tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, wawasan dan ketrampilan warga binaan /penerima program P2W-KSS. Meningkatkan orientasi, sikap dan perilaku warga binaan /sasaran program P2W-KSS. Memberikan bekal ketrampilan

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Mendukung Visi Kabupaten Bantul : Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Ketrampilan dilaksanakan dalam 4 Angkatan di 4 Lokasi Program Terpadu P2W-KSS Tahun 2019. Pelaksanaan tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 54 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Keterampilan

No	Desa	Hari	Tanggal	Tempat
1	Srimulyo	Senin-Selasa	18-19 Februari	Balai Dusun Jasem
2	Potorono	Rabu-Kamis	20-21 Februari	Gedung Serba Guna Genengan, Mertosanan
3	Triharjo	Senin-Selasa	25-26 Februari	Balai Desa Triharjo
4	Gadingharjo	Rabu-Kamis	27-28 Februari	Balai Desa Gadingharjo

Sumber : DPPKBPMD, 2019

(2) Sub Kegiatan Evaluasi P2W-KSS tingkat Kabupaten Bantul

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kelompok warga binaan. Mengetahui pelaksanaan kegiatan P2W-KSS dari 18 Indikator yang ada. Mengetahui pelaksanaan administrasi kegiatan P2W-KSS dan keterpaduan dengan administrasi PKK. Mengetahui dukungan dari Pemerintah Desa dan lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan kegiatan P2W-KSS.

(3) Sub Kegiatan Pembinaan Program Lanjutan P2W-KSS

Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kelompok warga binaan. Mengetahui pelaksanaan kegiatan P2W-KSS dari 18 Indikator yang ada. Mengetahui pelaksanaan administrasi kegiatan P2W-KSS dan keterpaduan dengan administrasi PKK. Mengetahui dukungan dari Pemerintah Desa dan lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan kegiatan P2W-KSS.

Pelaksanaan Pembinaan P2W-KSS dilaksanakan dalam 4 Angkatan di 4 Lokasi Program Terpadu P2W-KSS, pelaksaan tersebut digambarkan ke dalam tabel

Tabel 3. 55 Pelaksanaan Pembinaan P2W-KSS

No	Desa	Hari	Tanggal	Tempat
1	Argodadi	Jum'at	15/Maret/2019	Balai Desa Argodadi
2	Muntuk	Senin	18/Maret/2019	Balai Desa muntuk
3	Srihardono	Rabu	20/Maret/2019	Balai Desa Srihardono
4	Bawuran	Senin	25/Maret/2019	Balai Desa Bawuran

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan serta sikap dan perilaku peserta sosialisasi terhadap program P2W-KSS.
b) Peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga peserta program P2W-KSS.
c) Peningkatan kesejahteraan keluarga peserta program P2W-KSS di tahun kedua

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.705.684.200,-. Program ini memiliki kegiatan, diantaranya adalah:

a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp.282.600.000, terealisasi Rp.281.950.000,- atau 99,77%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan melalui Gerakan PKK. Memfasilitasi kegiatan operasional TP PKK Kabupaten Bantul. Melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan perempuan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Tabel 3. 56 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

No	Pokja /Sekretaris	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan
1	Sekretaris	Workshop Sekretaris/Pokja	170 orang PKK Kecamatan dan Desa	13, 21, 22, 25, 26 Februari 2019
		Puncak Acara Kesatuan Gerak PKK	225 orang OPD terkait, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa	5 April 2019
		Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa	17 TP PKK Kecamatan	2 Juli 2019
		Monev Tingkat Provinsi	4 TP PKK Desa	Agustus, September, Oktober, November 2019
		Monev 10 Program Pokok PKK	17 TP PKK Desa	Agustus, September 2019
		Pencanangan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	150 orang PKK Kecamatan dan Desa	16 Oktober 2019
2	Pokja I	Lomba GN-AKSA	17 TP PKK Kecamatan	27 Maret 2019
		Peningkatan Wawasan Perempua bidang Keagamaan (Syawalan)	OPD terkait, TP PKK Kecamatan dan Desa	21 Juni 2019

No	Pokja /Sekretaris	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan
		Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Hukum	TP PKK Kecamatan dan Desa	16 uli 2019
		Seminar Lansia	TP PKK Kecamatan dan Desa	19 November 2019
3	Pokja II	Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa	TP PKK Kecamatan dan Desa	04 April 2019
		Pembinaan UP2K PKK Terbaik	TP PKK Desa	2 Mei 2019
		Pelatihan Keterampilan Bagi Kader PKK	TP PKK Kecamatan dan Desa	27 September 2019
		Lomba Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD	TP PKK Kecamatan (Kader PAUD)	22 November 2019
4	Pokja III	Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Sandang dan Pangan	TP PKK Kecamatan dan Desa	02 April 2019
		Pembinaan HATINYA PKK Menghadapi Lomba Tk. DIY	TP PKK Desa	April dan Juni 2019
		Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	TP PKK Kecamatan dan Desa	27 Mei 2019
		Peningkatan Wawasan Perempuan di Bidang Tata Laksana Rumah Tangga	TP PKK Kecamatan dan Desa	20 September 2019
5	Pokja IV	Pemantapan Kegiatan Posyandu SCB	175 orang TP PKK Kecamatan, Desa dan Kader Posyandu	26 Februari 2019
		Peningkatan Peran Perempuan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan	175 orang TP PKK Kecamatan, Desa dan Kader Kesehatan	25 Maret 2019
		Peningkatan peran perempuan bidang Lingkungan Bersih Sehat	100 orang TP PKK Kecamatan dan Desa	29 Maret 2019
		Peningkatan peran perempuan bidang Perilaku Hidup Bersih Sehat	100 orang TP PKK Kecamatan dan Desa	26 April 2019
		Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB dan AKBAL	175 orang TP PKK Kecamatan, Desa	15 April 2019
		Optimalisasi Peran Kader Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB dan AKBAL	175 orang TP PKK Kecamatan, Desa	15 April 2019
		Peningkatan Perempuan dalam Mendukung HKG PKK	TP PKK Desa	Oktober, November 2019

Sumber : DPPKBPMD, 2019

b) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp5.423.084.200,- terealisasi Rp.5.363.999.600. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat terdiri dari 11 sub kegiatan, diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan : Bimtek Pengelola PMT-AS TK

Tujuan kegiatan ini adalah Memberikan Informasi mengenai Prinsip Dasar Penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT-AS TK. Mengetahui pentingnya program PMT-AS TK dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Tabel 3. 57 Bimtek Pengelola PMT-AS TK

Tahap	Hari	Tanggal	Tempat	Peserta
I	Senin	28/1	Gedung Pertemuan Kompleks Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul	Kepala Lembaga TK/RA dari Kec. Bantul, Sewon, Kretek, Jetis, Bambanglipuro, Pundong
II	Selasa	29/1	Gedung Pertemuan Kompleks Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul	Kepala Lembaga TK/RA dari Kec. Srandakan, Sanden, Pandak, Pajangan, Sedayu dan Kasihan
III	Rabu	30/1	Gedung Pertemuan Kompleks Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul	Kepala Lembaga TK/RA dari wilayah Kec. Piyungan, Pleret, Imogiri, Banguntapan dan Dlingo

Sumber : DPPKBPMD, 2019

(2) Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksana Terbaik PMT-AS TK

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana pelaksanaan PMT-AS TK di lembaga yang dinilai. mengetahui sejauh mana pelaksanaan Administrasi Kegiatan PMT-AS TK. mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pendukung. mengetahui sejauh mana dukungan masyarakat terhadap PMT-AS TK. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Tabel 3. 58 Evaluasi Pelaksana Terbaik PMT-AS TK

Tahap	Hari	Tanggal	Tempat	Peserta
I (Penilaian Administrasi dan Ekspose Kepala TK/RA)	Senin, Selasa, Rabu	8 – 10 Juli	Aula DPPKBPMD	17 TK
II (Verifikasi Lapangan)	Senin, Rabu dan Kamis	22, 24-25 Juli	6 TK Hasil Seleksi Tahap I	6 TK

Sumber : DPPKBPMD, 2019

(3) Sub Kegiatan : Bimtek Pengelola PMT PAUD

Maksud dan tujuan dari dilaksanaknnya kegiatan ini adalah memberikan Informasi /Prinsip Dasar Terkait PMT PAUD Non Formal. Memberikan Informasi Tentang Penyelenggaraan PMT PAUD Non Formal. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pengelola PMT PAUD Non Formal. Memperdalam pengetahuan terkhusus tentang asupan gizi bagi anak sekolah. Mengetahui seberapa pentingnya program PMT PAUD Non Formal.

(4) Sub Kegiatan : Bimtek Pengelola PMT Posyandu Balita Tingkat Kabupaten

Maksud dan tujuan Memberikan Informasi /Prinsip Dasar Terkait Pengelolaan PMT Posyandu Balita. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT Posyandu Balita. Mengetahui seberapa pentingnya program PMT bagi Balita. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 13 Maret 2019 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul Sasaran Bimtek terdiri dari: Camat 17 Kecamatan, 27 Kepala Puskesmas, 75 Koordinator PMT Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kabupaten Bantul

(5) Sub Kegiatan : Bimtek Pengelola PMT Posyandu Balita Tingkat Kecamatan

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan Informasi /Prinsip Dasar Terkait Pengelolaan PMT Posyandu Balita. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT Posyandu Balita. Mengetahui seberapa pentingnya program PMT bagi Balita.

(6) Sub Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu

Maksud dan tujuan ini adalah untuk memberikan Informasi tentang pengelolaan administrasi Posyandu. Meningkatkan peran dan fungsi Kader Posyandu dalam pengelolaan posyandu dan pencegahan stunting. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Evaluasi Desa Siaga Aktif

dan Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 26 dan 27 Juni 2019 di Gedung Pertemuan Pemda II Kabupaten Bantul. Sasaran pelatihan terdiri dari: Camat 17 Kecamatan, 75 Koordinator PMT Posyandu Desa.

(7) Sub Kegiatan : Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Mereview kembali peran pokjanal dan pokja posyandu dalam pembinaan dan pengembangan posyandu. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam program penanggulangan stunting. Menyampaikan Informasi tentang Evaluasi Pengelolaan Posyandu 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1 dan 2 Agustus 2019 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. Sasaran Bimtek terdiri dari: Camat 17 Kecamatan, 75 Lurah Desa, 17 Ketua TP PKK Kecamatan

(8) Sub Kegiatan : Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif dan pelaksanaan pengelolaan Posyandu di 17 Kecamatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap: Tahap I (Verifikasi Profil Kegiatan Desa Siaga Aktif dan Pengeloaan Posyandu) dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis, 7 – 8 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB s.d selesai bertempat di Aula DPPKBPMD Kabupaten Bantul. Tahap II (Verifikasi Lapangan) dilaksanakan pada hari Senin – Rabu, 26 – 28 Agustus 2019. Peserta evaluasi desa siaga aktif dan pengelolaan Posyandu adalah 17 desa siaga aktif dan Posyandu yang merupakan perwakilan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul.

(9) Sub Kegiatan : Pelatihan PMBA

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 25 dan 26 September 2019 bertempat di Ros In Hotel Yogyakarta , Jln. Ring Road Selatan No. 110, Sewon, Bantul.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik dan balita melalui makanan tambahan. Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi

pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dikelas. Mendidik anak untuk selalu menyukai makanan tradisional dan makanan/jajanan lokal.

Sasaran program PMT Kabupaten Bantul adalah peserta didik PAUD Formal (TK/RA), PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS) baik negeri maupun swasta dan Balita di Posyandu. Sasaran program PMT digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 59 Sasaran Program PMT Kabupaten Bantul

No	Nama Kegiatan	Besaran Indeks Bantuan PMT	Jml Sasaran		Jumlah Anggaran (Rp)
			Jml Lembaga	Jml Siswa	
1	PMT AS TK	Rp. 1.700/siswa/ pemberian	534	27.476	3.213.187.000
2	PMT PAUD	Rp. 1.400/siswa/ pemberian	719	15.582	610.824.400
3	PMT Posyandu	Rp. 900.000/ posyandu	1139	-	1.025.100.000
Jumlah Anggaran Total					3.213.187.000

Sumber : DPPKBPMD, 2019

❖ **Penyaluran Dana dan Alokasi Dana PMT**

Dana PMT–AS TK bersumber dari APBD Kabupaten Bantul dipergunakan untuk pengadaan makanan kudapan. Besaran indeks per anak per sekali makan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Tahapan penyaluran dana akan dilaksanakan setelah verifikasi nomor rekening di Bank BPD DIY.

❖ **Pelaksanaan Pemberian PMT**

Setelah dana ditransfer ke Nomor Rekening Lembaga, Lembaga diminta untuk segera mengambil dana tersebut dan menyerahkan kepada tim pemasak di masing-masing lembaga untuk pengadaan bahan makanan, pengolahan sampai penyajian kudapan kepada peserta didik/balita sesuai jumlah pemberian yang telah ditentukan.

❖ **Pertanggungjawaban**

Lembaga bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Pertanggung jawaban/ SPJ setiap kali menerima transfer. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban/ SPJ mengacu pada ketentuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban/ SPJ yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS TK digambarkan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 60 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS TK

No	Tahap	Tanggal Pencairan	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Anggaran
1	I	22 Februari 2019	534	27.476	Rp700.638.000,-
2	II	15 Maret 2019	534	27.476	Rp653.928.800,-
3	III	15 Agustus 2019	534	27.476	Rp950.619.600,-
4	IV	13 September 2019	534	27.476	Rp908.000.600,-
Jumlah Anggaran					Rp3.213.187.000,-

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS PAUD digambarkan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 61 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS PAUD

No	Tahap	Tanggal Pencairan	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Anggaran
1	I	20 Maret	719	15.582	Rp305.407.200,-
2	II	14 Juni	719	15.582	Rp305.407.200,-
Jumlah Anggaran					Rp610.824.400,-

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS POSYANDU digambarkan kedalam berikut ini:

Tabel 3. 62 Pelaksanaan Transfer Dana PMT-AS POSYANDU

No	Tahap	Tanggal Pencairan	Jumlah Posyandu	Jumlah Anggaran
1	I	10 Juli 2019	1139	Rp1.025.100.000,-
Jumlah Anggaran				Rp1.025.100.000,-

Sumber : DPPKBPMD, 2019

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Optimalnya peran perempuan dalam pembangunan melalui Gerakan PKK
b) Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT AS TK serta peningkatan dukungan dari lintas sektor terkait penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul
c) Peningkatan dukungan dari lintas sektor dan masyarakat dalam penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul.
d) Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT PAUD serta peningkatan dukungan terhadap penyelenggaraan PMT PAUD.
e) Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT Posyandu serta peningkatan

dukungan terhadap penyelenggaraan PMT Posyandu.

f) Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT Posyandu Balita

g) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan Kader Posyandu dalam pengelolaan Posyandu

h) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan peran serta Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam pembinaan dan pengembangan Posyandu.

i) Peningkatan pengetahuan dan wawasan serta ketrampilan Kader Posyandu dalam Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak.

c. Pemasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Maasyarakat Desa

Tabel 3. 63 Tabel Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih (PAB) yang belum dapat berfungsi secara optimal	1. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat. 2. Peningkatan pemeliharaan 3. Penguatan Kelembagaan
2	Belum optimalnya pengelolaan profil desa	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profl Desa
3	Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa dalam mengelola bantuan kenangan kepada Pemerintah Desa(BKK&P2MD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat
4	Belum terlaksananya kegiatan Lomba Desa di tingkat Kecamatan sesuai dengan Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa(Lomba Desa)	Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81 Tahun 2015
5	Kekuatan perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di desa	Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal pelaksanaan musrenbangdes

No.	Permasalahan	Solusi
6	Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi	1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai 2. Intensifikasi pelatihan
7	Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat/ warga binaan	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program.
8	Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa	1. Intensifikasi pembentukan bumdes 2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes 3. Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD) 4. Optimalisasi pengelola pasar desa
9	Dengan berakhirnya program PNPM maka belum ada payung hukum untuk UPK(Unit Pelaksana Kegiatan) dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	Di konsultasikan kenotaris untuk pembentukan badan hukum

Sumber: DPPKBPMD, 2019

9. PERHUBUNGAN

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan umum, khususnya pelayanan urusan perhubungan yang menjangkau masyarakat secara merata dengan kualitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan antara lain penyediaan pelayanan dasar berupa aksesibilitas transportasi, peningkatan ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

1) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ;

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
b) Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
c) Kegiatan Pelayanan perijinan di bidang perhubungan
d) Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

3) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

a) Kegiatan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

4) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan
b) Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp
c) Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a) Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB

6) Program Pengembangan Kelalulintasan

a) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas
b) Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas
c) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 2,392,821,500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 2,347,670,975,00 atau 98,11% dengan keluaran sebagai berikut:

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Maksud dan tujuan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor, adalah meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian kendaran bermotor, melalui servis dan kalibrasi terhadap alat uji kendaraan bermotor di Pengujian

Kendaraan Bermotor (PKB) Sewon, sehingga alat uji tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alat uji yang diservis meliputi *diesel smoke tester*, *gas analyzer*, *joint play detector*, *head light tester, side slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound level meter, tint tester*, kompresor, dan generator set. Melalui kegiatan ini alat uji kendaraan bermotor yang digunakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan Pelaksanaan service dan kalibarasi dalam setahun dilaksanakan sebanyak 2 kali. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 176.175.000,00 terealisasi sebesar Rp 172.840.000,00 atau sebesar 98.11%

b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Maksud dan tujuan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), rambu lalu lintas, dan marka jalan adalah meningkatkan fungsi APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan. Kegiatan ini berupa pemeliharaan APILL, rambu, serta *flashing lamp*. Pemeliharaan yang dilaksanakan sebanyak 219 kali. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 665.200.000,00 terealisasi sebesar Rp 662.501.000,00 atau sebesar 99.56%

c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU

Maksud dan tujuan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan LPJU berfungsi baik. Kegiatan ini ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.551.446.500,00 terealisasi

sebesar Rp 1,512,329,975,00 dengan keluaran kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dengan volume pekerjaan sebanyak 3603 LPJU yang terpelihara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.551,446,500,00 terealisasi sebesar Rp 1.512.329.975,00 atau sebesar 97,48%

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Maksud dan tujuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase angkutan umum yang layak jalan. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 803,276,000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 797,513,360,00 atau 99,28% dengan keluaran sebagai berikut:

a) Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

Maksud dan tujuan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. Terminal yang terpelihara adalah terminal imogiri dan Terminal Parangtritis.

Pemeliharaan terminal Imogiri berupa pemeliharaan kios terminal yang dilaksanakan oleh CV Eka Karya Mandiri; Terminal Imogiri berupa pemeliharaan kios terminal yang dilaksanakan pemasangan rolling door aluminium 0,7 mm kuantitas 20 unit oleh CV Multi Indotech. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 352.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 351,619,360,00 atau sebesar 99.7%

b) Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis *Database* Pelayanan Angkutan

Maksud dan tujuan kegiatan Pengumpulan dan analisis *database* pelayanan angkutan adalah meningkatkan perencanaan pelayanan angkutan. Kegiatan ini menghasilkan:

(1) Kajian Bongkar Muat Barang;
(2) Kajian Trayek Angkutan Obyek Wisata;
(3) Survey Angkutan Barang;
(4) Survey Angkutan Umum dan Tradisional.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 151.675.000 terealisasi sebesar Rp 150,343,000,00 atau sebesar 99,1%

c) Kegiatan Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan

Maksud dan tujuan kegiatan Pelayanan perijinan di bidang perhubungan adalah meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perhubungan, Kegiatan ini berupa pembinaan, pengendalian, dan pengawasan manajemen penyelenggaraan kegiatan sumber retribusi sektor perhubungan. Jenis retribusi mencakup retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 12,950,000,00 terealisasi sebesar Rp 12,950,000,00 atau sebesar 100%.

d) Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban LLAJ

Maksud dan tujuan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLAJ adalah meningkatkan kualitas SDM

dalam pelayanan angkutan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 285.851.000,00 terealisasi sebesar Rp 282.601,000,00 atau sebesar 98,9%. Kegiatan ini meliputi:

(1) Sosialisasi kepada awak angkutan dengan peserta 700 orang;
(2) Media siaran radio dan iklan layanan masyakat;
(3) Rampcheck terhadap angkutan di Kabupaten Bantul.

3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan ketersediaan simpul transportasi yang memadai. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 164.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 162.996.000,00 atau 99,3% dengan kegiatan Pembangunan Halte Bus dan Taksi, Gedung Terminal. Kegiatan ini mempunyai keluaran berupa kegiatan pengadaan halte sebanyak empat unit yang terpasang di halte SMPN 1 Sewon, Pasar Angkruksari, SMAN 1 Bambanglipuro, dan SMAN 1 Sewon. Indikator program ini adalah persentase ketersediaan simpul yang memadai dengan capaian sebanyak 100%, sama dengan target yang direncakanan sebesar 100%.

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Maksud dan tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas keselamatan jalan. Program ini menggunakan anggaran sebesar Rp 20,922,174,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 19,894,393,496,00 atau 95,08% meliputi:

a) Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Maksud dan tujuan kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan adalah meningkatkan keselamatan jalan dengan tersedianya pagar pengaman jalan. Adapun kegiatan ini mempunyai keluaran sebagai berikut:

(1) Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang 315 meter

(2) Jumlah Delinator Solar Cell yang terpasang 10 unit dan Jumlah Delinator yang terpasang 250 unit

(3) Jumlah Paku Jalan yang terpasang 726 unit

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 905,449,800,00 terealisasi sebesar Rp 861,890,000 atau sebesar 95,2%

b) Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp

Maksud dan tujuan kegiatan Pengadaan Flashing Lamp adalah meningkatkan keselamatan jalan dengan tersedianya flashing lamp. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 686,900,000,00 terealisasi sebesar Rp 682,780,550,00 atau sebesar 99,4%

c) Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Maksud dan tujuan kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan adalah meningkatkan keselamatan jalan dengan tersedianya LPJU. Kegiatan ini mempunyai keluaran pemasangan LPJU sebanyak 1171 unit yang berupa 806 LPJU LED, 20 LPJU Solar Cell dan 345 buah LPJU Jalan desa.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 19,329,825,000 terealisasi sebesar Rp 18,349,722,946 atau sebesar 94,93%.

Persentase ketersediaan LPJU yang terpasang yang merupakan indikator kinerja program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebesar 61%. Nilai ini naik dari target 35% yang direncanakan. karena ada kenaikan total jumlah pengadaan LPJU di tahun 2019.

5) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.152.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.139.635.500,00 atau 98,86%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB dengan keluaran pengadaan plat uji, Cetak Stiker Tanda Uji, Cetak Blangko Permohonan Uji, Cetak Surat Penetapan Retribusi, Cetak Kartu Pemeriksaan Kendaraan, Smart Card PKB, Cetak Surat Ketrangan Tidak Lulus Uji, Upgrade Software, Kajian.

Indikator kinerja program ini adalah persentase kendaraan bermotor yang wajib uji yang lolos uji dengan capaian sebanyak 97% (sejumlah 19.431 kendaraan lolos uji dari 20.000 kendaraan wajib uji). Hasil tersebut lebih besar dari target yang direncanakan sebesar 86,5%.

6) Program Pengembangan Kelalulintasan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan lalu lintas yang aman, tertib, selamat, dan lancar. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 4,680,991,000 dan terealisasi sebesar Rp 4,595,417,140 atau 98,17% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu Lintas adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 860,431,000,00 terealisasi sebesar Rp 824,935,000,00 atau sebesar 95,9%.

b) Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Maksud dan tujuan kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah meningkatkan kualitas perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 459,160,000,00 terealisasi sebesar Rp 455,932,000,00 atau sebesar 99.3%.

c) Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu Lintas

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan adanya fasilitas rekayasa lalu lintas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 3,361,400,000,00 terealisasi sebesar Rp 3,314,550,140,00 atau sebesar 98,6%.

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan

kompetensi teknis yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Tabel 3. 64 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	274.487.900	243.802.762	88.821
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	291.580.000	289.803.096	99.391
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.406.995.000	1.348.199.092	95.821
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	862.287.500	815.176.769	94.537
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	50.000.000	49.940.960	99.882
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	360.200.000	358.240.162	99.456
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	77.000.000	63.162.000	82.029
2.5	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.607.800.000	1.465.875.100	91.173
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	116.700.000	107.745.900	92.327
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	23.226.000	22.851.000	98.385
5	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**			

No	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	176.175.000	172.840.000	98.107
5.2	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	665.200.000	662.501.000	99.594
5.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	1.551.446.500	1.512.329.975	97.479
6	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**			
6.1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	352.800.000	351.619.360	99.665
6.2	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	151.675.000	150.343.000	99.122
6.3	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	12.950.000	12.950.000	100
6.4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	285.851.000	282.601.000	98.863
7	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**			
7.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	164.075.000	162.996.000	99.342
8	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**			
8.1	Pengadaan pagar pengaman jalan	905.449.800	861.890.000	95.189
8.2	Pengadaan Flashing Lamp	686.900.000	682.780.550	99.4
8.3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	19.329.825.000	18.349.722.946	94.93
9	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**			
9.1	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	1.152.795.000	1.139.635.500	98.858
10	**Pengembangan Kelalu-lintasan**			
10.1	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	860.431.000	824.935.000	95.875
10.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	459.160.000	455.932.000	99.297
10.3	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	3.361.400.000	3.314.550.140	98.606
	Jumlah	35,186,409,700	33,702,423,312	95.783

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan perhubungan

Tabel 3. 65 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perhubungan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Semakin menurunnya sarana dan kualitas angkutan umum	1. Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat. 2. Revitalisasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
2	Kelaiakan kendaraan yang kurang	Peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
3	Terjadi kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam tertentu	1. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu linta. 2. Melakukan peremajaan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa traffic cone, road barier, rambu portable dan tali pembatas
4	Kurangnya kesadaran tertib lalu lintas	1. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian parkir 2. Melaksanakan pam insidentil dalam rangka pengamanan lalu lintaspada event tertentu. 3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media
5	Belum optimalnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, *guardrail*, *flashing lamp* dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU
6	Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan	Melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara angkutan umum.

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berperan mengawal gerakan 100 Smart City dari Kementrian Kominfo. Kabupaten Bantul mengikuti *Assesment* gerakan 100 Smart City dan dinyatakan memenuhi untuk mengikuti pembinaan oleh Kementerian Kominfo. Kegiatan berupa bimbingan selama empat kali dengan melibatkan OPD, Desa, Dewan Smart City dan Stakeholder terkait untuk menjaring inovasi dari masing-masing OPD, Kecamatan dan Desa sebagai pendukung terwujudnya Smart City Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul berhasil mengikuti semua tahapan pembinaan dan menyelesaikan dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul. Dalam dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul ini disampaikan program inisiatif dan kerangka kerja Smart City. Dokumen Masterplan juga memuat tentang profil Kabupaten Bantul yang meliputi visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi, potret arsitektur TIK, *Quick Win* dari 6 dimensi Smart City dan *Quick Win* dari masing-masing OPD. Dari tahun 2018 tercatat 75 *Quick Win* dari OPD, beberapa Kecamatan dan 1 Desa sebagai *pilot project*.

Dari hasil evaluasi tahap II tahun 2019 Kabupaten Bantul di peroleh data sebagai berikut :

Tabel 3. 66 Hasil Evaluasi Tahap II Tahun 2019 Kabupaten Bantul

No	Dimensi	Jumlah Program	Realisasi Hingga 2019		
			Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
1	Smart Governance	25	24	1	96%
2	Smart Economy	12	9	3	75%
3	Smart Branding	7	7	0	100%
4	Smart Society	13	8	5	62%
5	Smart Living	13	10	3	77%
6	Smart Environment	5	2	3	40%

No	Dimensi	Jumlah Program	Realisasi Hingga 2019		
			Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
	TOTAL	**75**	**60**	**15**	**80%**

Sumber : Diskominfo, 2019

Membangun ***Bantul Smart City*** merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *E-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *E-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *E-Government* menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat lepas dari tuntutan kebutuhan vital sarana dan prasarana teknologi informasi. Oleh karena itu mutlak bagi pemerintah Kabupaten Bantul, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini. Beberapa sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis ilmu pengetahuan teknologi adalah pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS *center*, Lapor Bantul, *website* daerah yaitu *www.bantulkab.go.id*, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan *telecenter*, juga menuju *Online Single Submission* (OSS) dalam perijinan sehingga lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 total anggaran sebesar Rp 21.223.456.634 tersealisasi sebesar

20.296.896.651 dengan serapan sebesar 96% dari keseluruhan program dan kegiatan. Program kegiatan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa;

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
c) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi
d) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

2) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

3) Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;

a) Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
b) Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID Pengembangan dan
c) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4) Program Kerjasama informasi dengan media masa;

a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

b) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa

Maksud dan tujuan program ini adalah penyediaan infrastruktur jaringan serta pembangunan pusat data *(warehouse data)* sebagai penunjang penyelenggaraan Digital Government service di lingkungan pemerintah kabupaten bantul.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 15.179.080.000 realisasi anggaran 14.538.090.142 dengan serapan anggaran dalam 95,78% Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan fasilitas layanan jasa akses internet secara gratis untuk masyarakat khususnya di OPD, kantor pemerintah desa, Puskesmas dan kecamatan. Informasi informasi dapat dengan cepat dan mudah diperoleh masyarakat melalui jaringan internet.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 5.033.800.000 dapat terealisasi Rp. 4.605.451.239 dengan serapan anggaran sebesar 91,49 %. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet bagi seluruh OPD hingga ke Desa baik sisi LAN untuk klien maupun sisi WAN yang menghubungkan koneksi pusat ke OPD-OPD dan Desa. Saat ini total titik yang terlayani yaitu 222 titik yang terdiri atas OPD, Unit Pelaksana Teknis , Desa , Puskesmas dan beberapa Sekolah.

(2) Perancangan dan Pembangunan backbone

Kegiatan perancangan pembangunan backbone ini sebagai persiapan melaksanakan pembangunan *backbone* sebagai kelanjutan kegiatan tahun 2017, untuk menghubungkan jalur utama yang melewati Kecamatan dan Puskesmas.

Peningkatan kapasitas jaringan dilakukan melalui pengadaan peralatan jaringan internet dan radio wireless yang selesai dilaksanakan pada triwulan II dengan pemilihan penyedia melalui lelang cepat. Peningkatan kapasitas ini terutama penmabahan akses wifi bagi pelayanan di 17 kecamatan yang dimanfaatkan masyarakat umum.

(3) Pembangunan jaringan backbone

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembangunan jalur utama (*Backbone)* jaringan internet dengan *fiber optic* melanjutkan pembangunan yang

sudah dimulai tahun 2017. Pembangunan *backbone* untuk tahun 2019 sepanjang 37 Km sehingga total backbone yang di bangun oleh dinas komunikasi dan informatika sepajang 135 KM yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpusda dan Pasar Bantul. Pembangunan dilakukan pada triwulan III dengan pemilihan penyedia melalui lelang.

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendukung kestabilan kebutuhan komponen pokok infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul. Di samping itu dukungan sarana *warehouse* data sebagai *data center* untuk mendukung pelayanan kebutuhan data dan informasi.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 4.271.625.000,00 dapat terealisasi 4.185.691.465 dengan serapan anggaran sebesar 97,99%.

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjang layanan *Digital Government Service (DGS)* layanan kesehatan dan pengadaan jaringan *backbone* satu paket pekerjaan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 5.761.030.000 dapat terealisasi Rp 5.653.147.438 dengan serapan anggaran sebesar 98,13 %

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Peningkatan layanan DGS Kesehatan

Kegiatan dalam rangka peningkatan layanan DGS Kesehatan meliputi pengembangan aplikasi DGS Layanan Kesehatan dan Penambahan Kapasitas Bandwith untuk layanan DGS Kesehatan. Pengembangan aplikasi DGS layanan Kesehatan, mengakomodir usulan dari puskesmas yang menginginkan aplikasi berbasis web dan terintergrasi dengan layanan BPJS Kesehatan.

(2) Pembuatan Aplikasi / Software

Dinas Komunikasi dan Informatika mengawal pengembangan aplikasi untuk pelayanan guna mewujudkan Pemerintahan yang Efisien.

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 112.625.000 dapat terealisasi Rp 93.800.000 dengan serapan anggaran sebesar 83,29%.

Keberhasilan komunikasi dan informatika dapat di lihat dari beberapa hal sebagai berikut :

a) Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 53 Km yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpusda dan Pasar Bantul., kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas. Jalur pembangunan *bacbone* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2018 sebagai berikut :

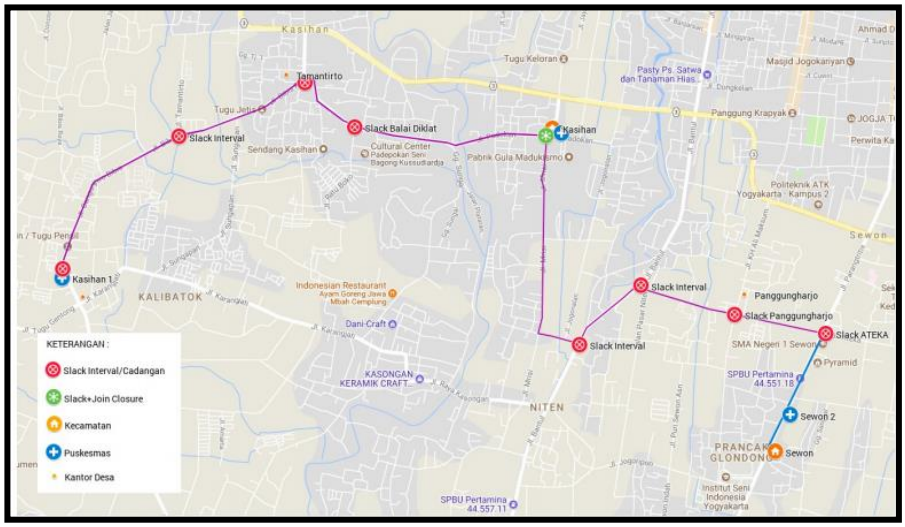

Sumber : Diskominfo, 2019

Peta 3. 1 Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Bantul Th. 2019

b) Terpeliharanya kestabilan koneksivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul.

c) Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah.

d) Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.

e) Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan E-Government sebagai alah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.

f) Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.

2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatan pengetahuan dan keterampilan

Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 60.620.000 dapat terealisasi Rp 53.270.000 dengan serapan anggaran sebesar 88%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Melalui kegiatan ini telah dilakukan bimbingan teknis untuk mendukung penerapan aplikasi sistem informasi desa seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul dengan peserta masing-masing desa mengirimkan dua orang personil aparat pemerintah desa. Di samping itu juga dilakukan bimbingan teknis bagi admin aplikasi Lapor Bantul, yang bertugas menerima segala laporan permasahan dan keluhan – keluhan di sekitar Kabupaten Bantul. Jumlah peserta yang berhasil dilatih untuk aplikasi sistem informasi desa sebanyak 150 peserta dan aplikasi Lapor Bantul sebanyak 50 peserta yang terdiri atas perwakilan semua OPD.

3) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 880.515.000 realisasi sebesar Rp 860.232.900 dengan serapan anggaran 97,70 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya penyusunan legitimasi/payung hukum untuk mewujudkan kota cerdas Bantul Smart City.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 173.500.000,-; realisasi sebesar Rp 167.639.000 dengan serapan anggaran 96,62%

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Sosialisasi Lapor Bantul, Kamis 28 Maret 2019.

Sosialisasi aplikasi LAPOR BANTUL bertujuan untuk memudahkan masyarakat atau warga seluruh Bantul yang memiliki kendala maupun permasalahan dapat langsung mengirimkan permasalahan yang dihadapi melalui aplikasi untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Sosialisasi yang bertempat di ruang Saba Madya Gedung Induk lantai 3 Kompleks Parasamya Bantul, menghadirkan tiga nara sumber yang berkompeten di bidangnya. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Bantul, Ir. Fenty Yusdayati, menyampaikan bahwa LAPOR BANTUL ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat di

Kabupaten Bantul. Aplikasi LAPOR BANTUL merupakan bagian dari pencanangan Bantul menuju Kabupaten Smart City atau Kota Cerdas.

Sumber : Diskominfo, 2019
Gambar 3. 7 Sosialisasi Lapor Bantul

(2) Workshop Quickwin Bantul Smart City, Senin 20 Mei 2019.

Kabupaten Bantul terus berbenah dengan menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan yang semakin baik. Program itu terus dikembangkan dalam bentuk *Bantul Smart City. Bantul smart city* ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Untuk meningkatkan pemahaman tentang bantul Smart City diselenggarakan workshop bertempat di Hotel Ros In. Penggunaan aplikasi tekhnologi diharapkan dapat mendukung pemerintahan Bantul yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan

daya saing masyarakat Bantul yang dominan dari pekerjaan industri kreatif.

Sumber : Diskominfo, 2019

Gambar 3. 8 Workshop Quickwin Bantul Smart City

(3) Launching dan Sosialisasi DGS Kesehatan, 24 Juni 2019.

Sosialisasi Digital Government Services (DGS) Layanan Kesehatan diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung Induk Lantai III Parasamya. DGS Layanan Kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Bantul masyarakat Bantul yang sehat. Juga untuk menjembatani komunikasi antara Puskesmas dan rumah sakit, guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul.

(4) Sosialisasi Satu Data Indonesia, Selasa 30 Juli 2019.

Forum Group Discussion (FGD) Satu Data, berlangsung di Ruang Parangkusumo, Hotel Rose-In, Jl.Ringroad Selatan,Sewon, Bantul. Diundang pada acara tersebut diantaranya Kepala Diskominfo se-DIY, Kepala Statistik se-DIY, Kepala Bappeda se-DIY, dan Kepala OPD terkait di Kabupaten Bantul.

Data yang dihasilkan juga harus memiliki meta data, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan memiliki kode referensi atau data induk. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data.Dengan latar belakang tersebut diharapkan seluruh peserta diskusi ini dapat memahami dan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing dan saling berkoordinasi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka persiapan implementasi pelaksanaan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sumber : Diskominfo, 2019
Gambar 3. 9 Sosialisasi Satu Data Indonesia

(5) Sosialisasi dan TOT Modul Akuntansi dan E-Sakip pada Aplikasi Sepakat, Rabu-Kamis, 25-26 September 2019.

Peserta sosialisasi dan TOT berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Dilaksanakan di Ruang Pelatihan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul selama 2 hari.

Pemateri dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Deputi Bidang Teknologi Informasi , Energi dan Material (TIEM). Terdiri dari Bapak Wenwen, Bapak Faisal B dan Bapak Triyono S.

(6) Workshop Penandatanganan Nota Kesepakatan BIG dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Jum'at 25 Oktober 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) memperkuat kerjasama di bidang pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkait informasi geospasial. Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kepala BIG Prof. Hasanuddin Z Abidin dan Bupati Bantul Drs. H. Suharsono di Hotel Ros In. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Ir. Fenty Yusdayati, MT. menginisiasi pembangunan geoportal dengan platform geonode yang diakses melalui alamat geoportal.bantulkab.go.id. Portal ini masih memerlukan dukungan berbagai pihak yaitu, seluruh produsen data, BIG dan Pusat Pengembangan Insfrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Gajah Mada. Juga akan bekerjasama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan peta dasar dan hasil kegiatan peta batas desa.

(7) Sosialisasi Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman SLIP Desa, Kamis 14 November 2019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan

publik harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Desa termasuk didalamnya karena mengelola dana dari pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Bantul PPID Desa belum terbentuk karena belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selaku PPID Utama telah menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang Pedoman PPID Desa. Untuk menjaring aspirasi, saran dan masukan demi penyempurnaan Perbup diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Budaya Tembi.

(p) Pemberdayaan Komisi Informasi Daerah (KID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kegiatan Pemberdayaan Komisi Informasi Daerah (KID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Disamping itu, kegiatan ini mendukung penyelenggaraan data dan statistik untuk mewujudkan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 367.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp 355.743.400,00 dengan serapan anggaran sebesar 96,74%.

Sumber : Diskominfo, 2019

Gambar 3. 10 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sumber : Diskominfo, 2019

Gambar 3. 11 Gambar. Penyerahan penghargaan PPID Award

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Partisipasi PPID Pembantu kategori OPD meningkat pesat dan begitu juga katergori kecamatan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian PPID Award dengan peningkatan untuk kategori OPD dalam hal konten website pelayanan informasi publik meningkat sebesar 173% pada tahun 2019 dari tahun 2018. Sedangkan PPID Pembantu kategori kecamatan meningkat sebesar 589% dalam hal konten website pelayanan informasi publik tahun 2019 dari 2018. Meskipun mengalami peningkatan signifikan, nilai rata-rata PPID Pembantu kecamatan sebesar 42,15 lebih rendah dari nilai rata-rata PPID Pembantu OPD sebesar 65,50.

(q) Pengembangandan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kegiatan yang Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM). sebelum Dinas Kominfo berdiri, di masyarakat sudah ada kelompok masyarakat bernama klompencapir, kemudian berganti nama KPIKM, Pada Tahun 2017 berganti nama

KIM sejak tahun. KIM merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Keberadaan KIM berperan dalam penyebaran informasi dan ajang komunikasi antar Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Masyarakat.. Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban untuk memfasilitasi kelompok tersebut.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 339.300.000 dan terealisasi Rp 336.850.500 dengan serapan anggaran sebesar 99,28%.

Sumber : Diskominfo, 2019
Gambar 3. 12 Kunjungan KIM Kabupaten Bantul ke Diskominfo kab. Banyumas

Selain Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kegiatan ini di sampiri tugas pemantauan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bantul. kegiatan pemantauan dilaksanakan sebagai bentuk fungsi kontrol pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dari aspek teknis, lingkungan dan kepentingan umum. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul dalam mewujudkan peningkatan PAD serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul yaitu monitoring dan pengendalian menara telekomunikasI.

4) Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.946.435.000 terealisasi sebesar Rp 1.914.325.350 dengan serapan anggaran sebesar 98,35%. dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu:

a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah menyebarluaskan informasi tentang segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.755.435.000 terealisasi Rp 1.730.785.350 dengan serapan anggaran sebesar 98,60 %.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Siaran Televisi

Siaran televisi yang dilaksanakan meliputi Siaran Taman Paseban, yang merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta, disiarkan setiap Selasa pukul 17.00 – 18.00 terdiri 24 episode. Sedangkan siaran televise Wedhang Ronde dilaksanakan di luar studio sebanyak 6 episode dengan siaran tunda (off air).

Sumber : Diskominfo, 2019

Gambar 3. 13 Rekaman Taman Paseban di Studio TVRI Stasiun Yogyakarta

Sumber : Diskominfo, 2019

Gambar 3. 14 Siaran Langsung Wedang Ronde

Tujuan acara ini adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *Good Governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah.

(2) Dialog Interaktif di Radio

Kegiatan ini merupakan dialog interaktif dalam satu tahun dengan maksud terjalinnya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah

daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(3) Pembuatan video profil PemerintahKab. Bantul

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan prestos/keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bantul baik di bidang, pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun pariwisata.

(4) Penerbitan Buletin Sejada

Kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Dalam setiap tahunnya diterbitkan empat kali edisi.

(5) Dialog Generasi Muda

Dialog generasi muda dilaksanakan dengan menggelar acara di sekolah-sekolah menengah tingkat atas dengan narasumber dari Bupati atau Wakil Bupati, psikolog dan figur enterpreneur. Dialog membahas berbagai hal yang harus dilakukan oleh generasi muda yang saat sedang pada masa mencari jati diri, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang negarif. Sebaliknya generasi muda diberikan gambaran-gambaran untuk mulai mempersiapkan masa depan sejak dini.

Sumber : Diskominfo, 2019
Gambar 3. 15 Dialog Generasi Muda

Kegiatan ini pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 12 kali di 12 lokasi yang berbeda,

(6) Liputan Dinamika Pembangunan Desa

Liputan dinamika pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kerjasama dengan para wartawan dalam bentuk peliputan kegiatan Usaha/Perekonomian/UMKM masyarakat yang khas atau unik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi dan perlu mendapatkan dukungan publikasi media masa baik elektronik atau media cetak.

Sumber : Diskominfo, 2019
Gambar 3. 16 Liputan dinamika pembangunan desa

*Outcome*nya adalah terpublikasikannya potensi masyarakat Bantul lewat media cetak dan elektronik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jumlah omzet dan pemesanan pemilik usaha UMKM yang pada gilirannya nanti adanya peningkatan kunjungan ke Kabupaten Bantul, dengan volume kegiatan sebanyak 8 (delapan) kali.

(r) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan dengan pengelolaan *website*, media social dan aplikasi Lapor. Dengan sarana atau media tersebut diharapkan dapat terwujudnya proses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah sehingga terjalin dengan mudah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 191.000.000,- dan terealisasi secara fisik 100% dan

realisasi keuangan sebesar Rp 183.540.000,- dengan serapan anggaran sebesar 96,094%.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Terfasilitasinya media pengaduan masyarakat kepada Pemerintah kabupaten bantul berupa aplikasi LAPOR BANTUL

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika

Tabel 3. 67 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan	Solusi
1. Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul	1. Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi *Fiber Optic* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE
2. Belum adanya regulasi pengembangan *e-government* dan *master Plan IT, juga*	2. Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul
3. Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.	3. Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.	4. Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
5. tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	5. Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.

Sumber: Diskominfo, 2019

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
b) Peningkatan Manajemen Perkoperasian
c) Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi
d) Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA

2) Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif

a) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

a) Pengembangan Kewirausahaan

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

a) Peningkatan Promosi UMKM

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Maksud dari program ini untuk menjadikan Koperasi semakin berkembang dan menjadi lebih kuat dalam

menghadapi datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan menjadi suatu badan usaha yang tidak hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan produktifitas.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadahkepentingan bersama bagi anggotanya. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.181.800,- Adapun keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Kegiatan dimaksudkan untuk mengukur koperasi dalam menjalankan usahanya apakah sudah sesuai dengan jati diri dan peraturan perkoperasian, hasil dari pengukuran tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan.

Tujuan kegiatan ini agar koperasi menjalankan usahanya sesuai dengan jati diri dan perundang-undangan perkoperasian.

Dengan melaksanakan penilaian kesehatan koperasi kepada seluruh koperasi KSP/KSPPS dan USP/USPPS berbadan hukum Kabupaten Bantul sebanyak 217 koperasi.

Tabel 3. 68 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah dan Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Tahun Tutup Buku 2019

No	Jenis Koperasi	Tahun 2019				Jumlah
		Kategori Penilaian				
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	
1	Koperasi Simpan Pinjam	20	39	1		60
2	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah	17	15	1		33
3	Unit Simpan Pinjam operasi	55	63	2		120
4	Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi	2	2			4
	Jumlah	94	119	4	0	217

Sumber: DKUKMP,2019

(1) Penilaian koperasi berprestasi bagi 20 koperasi.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 17 Penyerahan hadiah Koperasi Berprestasi

Koperasi berprestasi, memilih koperasi terbaik di masing-masing jenis koperasi (simpan pinjam, konsumen, produsen, jasa dan pemasaran) bagi koperasi yang telah berbadan hukum di Kabupaten Bantul, yang akan dinilai dari prestasi dan pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi,

tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak koperasi.

(2) Revitalisasi koperasi bertujuan untuk mengaktifkan dan menguatkan koperasi dari segi kelembagaan, usaha dan pelaporan keuangan dan kegiatan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) sepuluh kali.

(3) Monev NRB Dana Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali diikuti oleh 25 koperasi di Kabupaten Bantul yang mengelola dana pemerintah, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui nilai realisasi bersih dana bergulir yang dimiliki koperasi.

(4) Uang Pembinaan Pelaporan Online. Pada tahun 2019 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan penghargaan berupa uang pembinaan bagi koperasi yang melaksanakan pelaporan Triwulan secara tepat waktu yang diraih oleh KSPPS BMT Niten. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dengan anggaran Rp.122.050.000, terealisasi Rp, 90.975.000 atau 74,54 %.

b) Peningkatan Manajemen Perkoperasian

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pengurus dan anggota koperasi di bidang manajemen dan promosi produk koperasi/anggota koperasi. Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen

Perkoperasian sebesar Rp 660.250.000,00, terdiri atas APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp 222.750.000,00 dan Dana Alokasi Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NF PK2UKM) sebesar Rp 437.500.000,00 . Adapun kegiatan yag dilaksanakan dalam Kegiatan Peningkatan Manajemen Perkoperasian ini adalah:

(1) Pelatihan Kompetensi Juru Buku. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar bahwa pengelola simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pelatihan Pengembangan Usaha. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan, dengan jumlah peserta 20 orang.Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendorong koperasi mengembangkan atau memperluas usaha yang telah ada, maupun membuka unit usaha baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota.

(3) Pelatihan Pengelolaan Usaha. Kegiatan ini merupakan usulan usulan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dari Desa Banguntapan kecamatan Banguntapan. Pelatihan dilaksanakan dalam 1 angkatan, dengan jumlah peserta 30 orang di balai Desa Banguntapan.

(4) Pelatihan Permodalan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan, dengan peserta warga Desa Triharjo Pandak sejumlah 30 orang per angkatan. Adapun kegiatan ini merupakan usulan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dari Desa Triharjo Pandak Bantul.

(5) Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi. Kegiatan ini dilaksankan dalam 1 angkatan, dengan peserta adalah pengawas koperasi syariah sejumlah 30 orang peserta. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan dilanjutkan praktek lapangan ke KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan.

Sumber: DKUKMP,2019

Gambar 3. 18 Praktek Lapangan Peserta Pelatihan Bai Pengawas ke KSPPS BMT UGT Sidogiri

(6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM. Pelatihan atau diklat yang dibiayai anggaran DAK NF PK2UKM sebanyak 8

(delapan) pelatihan. DAK Non Fisik PK2UKM dilaksanakan pada Bidang Koperasi dan Bidang UKM, digunakan untuk membiayai pelatihan/diklat peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM sebanyak 8 (lima) paket.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 19 Diklat Kompetensi Juru Buku DAK

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 20 Diklat Pengawasan Koperasi DAK, 1 – 5 Mei 2019

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 21 Pelatihan Design Fashion, 17-21 Juni 2019

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 22 Pelatihan Make-Up Artis dan Hair Do

(7) Hari Koperasi Nasional, dilaksanakan dengan mengirimkan peserta Pameran Produk UKM Anggota Koperasi dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional. Pameran Harkopnas Expo 2019 dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2019 di GOR Satria Purwokerto. Pada pameran kali ini diikuti 2

(dua) peserta dari KSU Sido Katon dan Koperasi AMBOY.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 23 Pameran Harkopnas Expo 2019, GOR Satria Purwokerto

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi

Kegiatan dimaksudkan untuk mendorong dan mempersiapkan kerjasama dan kemitraan koperasi dengan pihak lain.

Tujuan kegiatan ini adalah agar terwujud kerjasama dan kemitraan koperasi dengan pihak lain.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 93.467.400,- dan terealisasi Rp.88.417.400,- (94,60%). Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan koperasi adalah dengan kerjasama dan kemitraan koperasi disertai dengan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan koperasi adalah:

(1) Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi, diharapkan koperasi peserta pelatihan dapat meningkatkan pemasaran produknya dengan

memberikan materi strategi pemasaran dan pengembangan produk.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 24 Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi

(2) Workshop Pengembangan Koperasi.

Workshop ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan bagi operasi untuk mengembangkan usahanya, diperluas ke sektor riil dengan tetap memperhatikan AD masing-masing koperasi. Workshop dilaksanakan 2 angkatan, dengan peserta masing-masing sejumlah 40 peserta.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 25 Workshop Pengembangan Koperasi, 26 Februari 2019

(3) Bimtek Pengurus Koperasi terkait Pengentasan Kemiskinan.

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang memiliki *social content.* Isian atau watak sosial itu, antara lain ditandai oleh beragam kegiatan koperasi yang yang membantu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan menyelenggarakan bakti sosial, khitanan massal, santunan anak yatim, beasiswa dan pemberdayaan fakir miskin. Bimtek ini dilakasanakan dalam 2 (dua) angkatan, masing-masing peserta sejumlah 30 orang. Adapun upaya pengentasan kemiskinan melalui koperasi dapat dilakukan melalui penumbuhan, penguatan dan pendampingan usaha bagi warga miskin.

Sumber: DKUKMP,2019

Gambar 3. 26 Bimtek Pengurus Koperasi terkait Pengentasan Kemiskinan

(4) Monitoring dan evaluasi Pengentasan Kemiskinan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan, setiap angkatan terdiri dari 30 pengurus koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terkait pelaksanaan penyaluran dana sosial koperasi (CSR) untuk pengentasan kemiskinan.

Sumber: DKUKMP,2019

Gambar 3. 27 Monev Pengentasan Kemiskinan, 20 Nov 2019

(5) Workshop Akad Syariah.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali, diikuti oleh 40 orang pengawas koperasi syariah, baik pengawas manajemen maupun pengawas syariah di Kabupaten Bantul. Adapun workshop ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya forum komu nikasi antar pengawas syariah, mendorong koperasi syariah untuk menjalankan prinsip syariah melalui kegiatan pelatihan dan workshop dan mendorong koperasi memaksimalkan dana Maal untuk kegiatan produktif diantaranya pengentasan kemiskinan.

(6) Coffe Morning Temu Mitra Koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul bersama Gerakan Koperasi dan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul. Tujuan yang

diharapkan dari kegiatan ini antara lain dapat membuka wawasan pengurus dan stakeholder koperasi untuk memanfaatkan asset dan dana koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotamelaluikerjasama antar koperasidalam mengembangkan usahadan sebagai forum mendapatkan rumusan dalam pemecahan masalah koperasi.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 28 Coffe Morning Temu Mitra Koperasi, 14 November 2019

c) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dekopinda

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada gerakan koperasi di Kabupaten Bantul melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bantul dengan bentuk penyelenggaraan :

(1) Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SMP dan SMA,dengan peserta 25 SMA/SMK/MA dan 51 SMP/MTs se-Kabupaten Bantul. Lomba dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Ruang Mandhala Saba (Gedung Induk Lantai 3) Komplek Parasamnya Kab. Bantul.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 29 Tangkas Terampil Perkoperasian

(2) Sarasehan dalam rangka hari Koperasi, dengan peserta seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Bantul . Adapun tema sarasehan tahun 2019 ini adalah “Reformasi Total Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0”.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 30 Sarasehan dalam rangka Hari Koperasi ke 72

(3) Pelatihan Anggota Dekopinda, untuk 30 peserta disertai dengan kunjungan lapangan untuk meningkatan wawasan anggota dekopinda.Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dilanjutkan praktek lapangan di Koperasi Pegawai Kota Bandung (KGKB).

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 31 Pelatihan bagi Anggota Dekopinda

(4) Hari Koperasi tingkat kabupaten Bantul, dengan menyelenggarakan upacara Peringatan Hari Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2019. Upacara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 di Lapangan Paseban Bantul.Pada kesempatan yang sama disampaikan hadiah atau penghargaan terhadap Juara Koperasi Prestasi Tingkat Kabupaten Bantul, Juara Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, serta Juara Pelaporan Online.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 32 Upacara Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Bantul ke 72 Tahun 2019

(5) Dana Bergulir Penguatan Permodalan Koperasi

Adapun maksud pemberian dana bergulir kepada koperasi adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatannya.

Dana bergulir melalui koperasi pada tahun 2018 direalisasikan sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 5 koperasi di Kabupaten Bantul. Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat angsuran sebesar Rp 61.683.768,-, saldo akhir 31 Desember 2019 Rp 123.316.232,-. Adapun pendapatan Bunga yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 5.500.000,-

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul. UMKM terbukti tangguh ketika menghadapi masa sulit seperti krisis moneter. Karena itu, keberadaan UMKM harus terus didukung sehingga usaha yang dijalankan semakin besar.

Di Kabupaten Bantul tercatat 48.148 UMKM yang melakukan usaha. Dari jumlah tersebut 29.098 merupakan usaha mikro, 11.992 kecil, dan baru sekitar yang merupakan 7.058 usaha menengah, data ini menunjukkan perkembangan UMKM luar biasa karena semakin banyak dan UMKM ini tangguh saat ada krisis ekonomi jadi harus selalu didampingi dan didorong agar usahanya semakin besar, Jumlah UMKM terus

berkembang karena pergerakan usaha lokal sangat dinamis. Selain itu, juga diberikan pembinaan dan pendampingan UMKM seperti pelatihan produksi, manajemen kewirausahaan, hingga legalitas usaha.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul terus mendorong UMKM yang sudah mapan usahanya mulai mengurus legalitas karena hal ini cukup penting untuk keberlangsungan usaha .Jumlah UMKM yang mengurus legalitas masih cukup kecil jika dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bantul, dari 48.148 UMKM yang terdata, 23.814 baru UMKM. Berikut data UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2017 –2019 :

Tabel 3. 69 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	27.828	28.384	29.098
2.	Usaha Kecil	11.594	11.768	11.992
3.	Usaha Menengah	6.956	6.991	7.058
	Jumlah	46.378	47.143	48.148

Sumber: DKUKMP, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 jumlah Usaha Mikro 29.098 unit usaha, Usaha Kecil 11.992 unit usaha dan Usaha Menengah 7.058 unit usaha dengan jumlah keseluruhan UMKM 48.148 unit usaha.

Penyerapan Tenaga Kerja melalui UMKM pada tahun 2017 sampai 2019 di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3. 70 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	55.656	56.768	58.225
2.	Usaha Kecil	34.782	35.130	36.048
3.	Usaha Menengah	6.956	111.856	112.977
	Jumlah	201.734	203.754	207.250

Sumber: DKUKMP, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja melalui UMKM pada usaha mikro dapat menyerap 58.225 tenaga kerja, Usaha Kecil 36.048 tenaga kerja dan Usaha Menengah dapat menyerap 112.977 tenaga kerja dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap 207.250 tenaga kerja.

Penyerapan Tenaga Kerja melalui UMKM pada tahun 2017 sampai 2019 di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3. 71 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	55.656	56.768	58.225
2.	Usaha Kecil	34.782	35.130	36.048
3.	Usaha Menengah	6.956	111.856	112.977
	Jumlah	201.734	203.754	207.250

Sumber: DKUKMP,2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja melalui UMKM pada usaha mikro dapat menyerap 58.225 tenaga kerja, Usaha Kecil 36.048 tenaga kerja dan Usaha Menengah dapat menyerap 112.977 tenaga kerja dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap 207.250 tenaga kerja.

Berikut data penerbitan IUMK pada tahun 2017, 2018 dan 2019:

Tabel 3. 72 Data Penerbitan IUMKTahun 2015-2019

No.	TAHUN	JUMLAH
1	2015	4.531
2	2016	4.674
3	2017	2.749
4	2018	4.996
5	2019	6.864
Jumlah		23.814

Sumber: DKUKMP,2019

Pada tahun 2019 di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Ijin Usaha Mikro Kecil sebanyak 6.864 ijin, dengan jumlah keseluruhan jumlah Ijin Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Bantul 23.814 ijin.

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif dengan indikator kinerja program Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan pada tahun 2019 dengan target 60 unit usaha, dan terealisasi 60 unit usaha atau tercapai 100%.

Tabel 3. 73 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realiasi	%
1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	unit usaha	60	60	100
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Bertambahnya jumlah wirausaha baru	unit usaha	80	280	350
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Partisipasi Produk Usaha Mikro	jenis	3	5	166,67

Sumber: DKUKMP,2019

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan indikator kinerja program Bertambahnya jumlah wirausaha baru pada tahun 2019 dengan target 80 unit usaha, dan terealisasi 280 unit usaha atau tercapai 350%.

Sedangkan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan indikator kinerja program Cakupan Partisipasi Produk Usaha Mikro pada tahun 2019 dengan target 3 unit usaha, dan terealisasi 5 unit usaha atau tercapai 166,67%.

2) Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Program ini dilaksanakan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan juga pengembangan UMKM supaya menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 491.490.000,00 Adapun kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah untuk penumbunan dan penguatan usaha dengan orientasi menaikkan kelas UMKM.

Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhakan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh dirinya serta lingkungan sekitarnya.

(1) Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Untuk Pelaku Usaha Mikro

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 11 kali dengan setiap angkatan 20 orang. Sasaran dari pelatihan ini adalah UMKM yang sudah memiliki usaha rintisan paling tidak enam sampai tiga tahun. Jenis pelatihan yang disampaikan adalah pelatihan keterampilan untuk peningkatan inovasi produk dan pelatihan manajemen usaha untuk penguatan kelembagaan UMKM Kabupaten Bantul.

(2) Pelatihan untuk Calon Wirausaha Baru

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan setiap angkatan 20 orang. Sasaran dari pelatihan ini adalah calon wirausaha baru yang belum memiliki usaha rintisan.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 33 Pelatihan menjahit

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 34 Pelatihan Merajut

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Kabupaten Bantul dan juga untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.300.000,00 Adapun kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Promosi UMKM

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memasarkan produk dan jasa kepada konsumen dengan mengikuti pameran. Kegiatan pameran sebagai peluang bagi para pelaku usaha memperkenalkan merek dan produknya langsung kepada target konsumen maupun target rekanan bisnis.

Mengikuti Pameran Peluang Investasi dan Produk Unggulan Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL. Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 28 April 2019 bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta. Dalam pameran ini Kabupaten Bantul mengirimkan lima UMKM dari berbagai jenis usaha.

Sumber: DKUKMP,2019

Gambar 3. 35 Pameran Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL JEC Yogyakarta

(1) Mengikuti Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL Expo 2019 (Gemerlap Expo 2019). Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 April 2019 bertempat di Java Supermall Kota Semarang. Dalam pameran ini Kabupaten Bantul mengirimkan lima UMKM dari berbagai jenis usaha.

Sumber: DKUKMP,2019

Gambar 3. 36 Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL Expo 2019

Pada tahun anggaran 2019, realisasi keuangan untuk program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah Rp. 604.288.360,-(83,28%).

4) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Maksud dan tujuan program ini untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kanjaringan kerjasama UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.478.200.000,- terealisasi Rp.718.594.644,- dengan capaian 98,71 %. Adapun keluaran dari program ini adalah dilaksanakannya Kemitraan Bagi UKM sebanyak 150 pelaku usaha,

a) Pengembangan UMKM

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah untuk penumbunan dan penguatan usaha dengan orientasi munculnya wirausaha baru .

Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhakan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 37 Workshop Kemitraan 2019

b) Pasar Rakyat

Pasar Rakyat Menjelang Lebaran di 5 kecamatan, di Kecamatan Bantul, Banguntapan, Pundong, Pajangan dan Imogiri. Kegiatan pasar rakyat ini bertujuan untuk mengenalkan produk UMKM lokal masing kecamatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran dengan harga yang terjangkau.

Sumber: DKUKMP,2019
Gambar 3. 38 Pasar Rakyat 2019

Kampung UKM Digital adalah program pemberdayaan masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui upaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara komprehensif dan integrative untuk mendukung proses bisnis yang berjalan, sehingga bisa meningkatkan produktifitas pelaku UKM penggunanya. Implementasi Kampung Digital adalah membantu para pelaku UKM dalam rangka modernisasi dan peningkatan kompetensi UKM melalui ICT (Information and Communication) atau teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui ICT diharapkan UKM mampu memiliki daya saing dan bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul melalui teknologi digital. Kampung UKM Digital merupakan kegiatan yang memfasilitasi sarana dan prasarana para UKM dalam memanfaatkan teknologi internet dalam pemasaran produk UKM.

Program Kampung Digital merupakan pemberdayaan masyarakat UMKM melalui upaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan Kampung Digital di Bantul yang difasilitasi jaringan kabel optic dari PT Telkom dengan pelaksanaan berpusat pada sentra-sentra kerajinan di Bantul. Yang menjadi pilot proyek program ini yaitu sentra-sentra di Kecamatan Sanden dengan dua titik kabel optic, serta sentra kerajinan batik kayu krebet Sendangsari, Pajangan dengan lima titik kabel optic.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

Tabel 3. 74 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2019

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya SDM Koperasi yang kompeten dan bersertifikat	Fasilitasi pelatihan kompetensi
2.	Belum adanya penilaian kinerja bagi koperasi (masih terbatas KSP/USP)	Pemeringkatan koperasi
3.	Masih terdapat koperasi belum taat terhadap aturan (perizinan, NPWP, dll)	Mendorong koperasi patuh terhadap aturan (pengawasan kepatuhan)
4.	Kesulitan pengurusan izin melalui OSS	Pendampingan bagi koperasi dalam mengurus izin di OSS
5	Kurang optimalnya peran Dekopinda	Mendorong Dekopinda berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi
6	Masih kurangnya inovasi produk dan pemasaran produk bagi UMKM	Diadakan pelatihan peningkatan inovasi dan pemasaran secara online maupun mengikutkan pameran.
7	Masih kurangnya pengetahuan terkait manajemen bisnis bagi UMKM	Diadakan pelatihan manajemen kewirausahaan

Sumber : DKUKMP, 2019

12. PENANAMAN MODAL

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terurai sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
b) Peningkatan Promosi Penanaman Modal
c) Pengembangan Potensi Penanaman Modal

2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
b) Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

a) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

4) Program peningkatan pengelolaan perijinan.

a) Sosialisasi Pengelolaan Perijinan
b) Operasional Pelayanan Perijinan
c) Pendataan dan Penetapan Perijinan
d) Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan
e) Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perijinan
f) Pengelolaan Perijinan Online
g) Survei Kepuasan Masyarakat
h) Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo
i) Lokakarya Penanganan Pengaduan
j) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan

k) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Maksud dan tujuan dari program ini adalah sebagai upaya mempromosikan peluang dan promosi Kabupaten Bantul kepada para pemangku kebijakan, masyarakat, para investor dan pelaku usaha sehingga pada akhirnya ada investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Bantul.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain :

a) Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama kemitraan antara instansi pemerintah dan dunia usaha, khususnya UMKM dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini terdiri dari 2(dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 68.050.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp67.752.500,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99.563%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Sub KegiatanTemu Bisnis;

Pada Bulan Maret 2019 telah dilaksanakan kegiatan Temu Bisnis pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal di Hotel Ros In, Bangunharjo, Sewon, Bantul, oleh Dinas PMPT Bantul Bidang Penanaman Modal.

Pada penyelenggarakan temu bisnis ini diharapkan menghasilkan *output:*

- Terwujudnyakerjasamaantara UMKM dengan Investor;
- Meningkatnyapengetahuanteknisberusa hapada UMKM.

(2) Sub Kegiatan Kajian kemudahan berusaha

Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta dalam rangka meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Kabupaten Bantul, maka melalui sub kegiatan inimelaksanakan penyusunan "Naskah Akademik Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bantul".Naskah akademik ini dipersiapkan sebagai tahapan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Bantul.

b) Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Maksud kegiatan ini adalah :

(1) Mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Bantul;

(2) Memfasilitasi berkembangnya kerjasama kemitraan antara PMA/ PMDN dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

Tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Memperkenalkan kepada para investor mengenai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul beserta fasilitas kemudahan perizinan yang tersedia;

(2) Memfasilitasi sebuah forum promosi investasi untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;

(3) Percepatan realisasi kepeminatan bagi investor yang masih melakukan penjajagan;

(4) Percepatan realisasi perijinan (Izin Prinsip) terhadap kepeminatan investasi di Kabupaten Bantul;

(5) Membangun kemitraan antar pelaku usaha untuk bersama-sama membangun kerjasama kemitraan dalam mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 211.100.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 210.002.000- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ribu Rupiah) atau

99.480%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Promosiinvestasi pada Pameran APKASI Otonomi Ekspo 2019 di Jakarta
(2) Promosi investasi pada Medan Investment Tourism and Trade Expo 2019 di Medan.
(3) Promosi investasi pada Surabaya Invesment Agriculture, Tourism, Trade and Export Commodity Expo 2019 (SIATEK EXPO) di Cito Mall Surabaya.

c) Pengembangan Potensi Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan adalah :

(1) Tersedianya data dan Informasi yang memberikan gambaran mengenai potensi Investasi di Kabupaten Bantul;
(2) Terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan stakeholder mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal Kabupaten Bantul;
(3) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi dan stakeholder untuk saling tukar menukar informasi, pemikiran,usulan, membahas berbagi permasalahan yang terkait dengan penanaman Modal Daerah serta upaya mencari alternative solusi dan program/tindakan yang konstruktif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan iklim penanaman Modal Kabupaten Bantul;
(4) Untuk mempercepat proses realisasi penanaman Modal di Kabupaten Bantul;.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.300.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 199.849.200,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99.775%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penelitian prospektus investasi;

Arah kebijakan penanaman modal elemen utamanya adalah 'Promosi Penanaman Modal'. Untuk itu pembuatan materi promosi penanaman modal mutlak dilakukan untuk dapat menarik penanaman modal ke Kabupaten Bantul.

Penelitian Prospektus Investasi adalah menyediakan informasi yang aktual dan akurat tentang potensi investasi sektor insfrastruktur daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengakselerasi peningkatan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah di masa mendatang. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah rekomendasi terkait sektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan dan mampu menjadi prospektus pembangunan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul.

(2) Pengembangan website dan protal perizinan;

Sub Kegiatan ini diupayakan untuk mengembangkan fungsi dan layanan Portal Perizinan DPMPT Kabupaten Bantul dalam

proses penyampaian informasi dan penerimaan informasi dari masyarakat pada umumnya dan pengunjung website pada khususnya. Sehingga upaya ini diharapkan mampu meningkatkan fungsionalitas dari aplikasi Portal Perizinan untukmenyajikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan fungsionalitas dalam pengelolaan informasi yang akan disampaikan oleh DPMPT Bantul dan mampu meningkatkan layanan dalam hal perizinan dan penanaman modal.

(3) Pembuatan infografi atau video.

Uraian sub kegiatan ini adalah membuat video prosedur dan proses pelayanan perizinan berusaha serta perizinan dan nonperizinan di DPMPT Kabupaten Bantul yang didalamnya menggunakan video riil dan animasi guna menyajikan informasi yang menarik serta melibatkan tim DPMPT Bantul.

2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

Maksud dan tujuan program ini adalah:

a) Menyediakan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
b) Melaksanakan bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
c) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui

koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;

d) Mewujudkan kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain :

a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

(1) Memperoleh data realisasi penanaman modal;

(2) Teridentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal;

(3) Melakukan bimbingan & fasilitasi penyelesaian masalah & hambatan yang dihadapi perusahaan;

(4) Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.650.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 50.567.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99.836%. Adapun

bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Pemantauan terhadap 128 PMA/ PMDN);

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di mana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

(2) Pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dimaksudkan guna melakukan penyesuaian terhadap regulasi tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.

Ruang lingkup materi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ini meliputi :

- Mengembangkan metadata pada sistem informasi investasi untuk mengakomodir data dari LKPM;
- Sistem mempunyai fitur untuk dapat mengelola data izin usaha dan izin komersial;
- Sistem dapat memetakan perusahaan-perusahaan dengan skala modal investasi tertentu;
- Mengembangkan informasi statistik sebagai dampak yang terjadi dari pengembangan sistem;
- Sistem dapat mencetak laporan sesuai dengan format yang dibutuhkan;
- Sistem mempunyai fitur export file ke dalam format excel.

Pengembangan sistem informasi penanaman modal, maka diharapkan :

- Sistem dapat memberikan informasi data perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Bantul;
- Sistem dapat melakukan penyesuaian metadata investasi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Sistem dapat memberikan kemudahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPT Kabupaten Bantul.

b) Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 78.050.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 77.940.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 99.859 %. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Koordinasi penanaman modal antara dunia usaha dengan Pemerintah;

Kegiatan Koordinasi Penanaman Modal pada kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal Tahun 2019 bertempat di Tembi Rumah Budaya (Jl. Parangtritis Km 8.4, Timbulharjo, Sewon, Bantul). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat dunia usahadan aparat pemerintahan untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Bantul, proses legislasi **Peraturan Daerah**, jenis-jenis insentif dan kemudahan investasi yang bisa didapatkan oleh investor, serta LKPM dan tata cara pengisian.

Koordinasi Penanaman Modal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Koordinasi Penanaman Modal yang pertama dilaksanakan di Tembi Rumah Budaya (Jl. Parangtritis KM 8,4, Timbulharjo, Sewon, Bantul) pada Hari Kamis, 25 April 2019 dan materinya sebagai berikut:

- Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Terhadap Barang Ekspor dan Impor oleh Kepala Kanwil DJP DIY;
- Peraturan dan Fasilitasi Dinas Perindag DIY Terkait Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Kepala Dinas Perindag DIY;
- Peraturan dan Fasilitas DJBC kepada Eksportir dan Importir oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

Dengan peserta 35 baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Koordinasi Penanaman Modal yang kedua dilaksanakan di Tembi rumah Budaya (Jl. Parantritis Km 8.4, Timbulharjo, Sewon, Bantul) pada Hari Kamis, 26 September 2019 dan materinya sebagai berikut:

- Penyusunan NA tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bantul oleh PT. Inspect Multi Konsultan
- Pendampingan penyusunan NA tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bantul oleh

Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI

- ❖ Kebijakan Insentif Penanaman Modal oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM RI

Dengan peserta 35 aparat baik dari pengusaha maupun dari aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

(2) Kajian penanaman modal atau Review Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul. Akan tetapi, seiring dengan dinamika perkembangan di tingkat nasional yang menunjukkan perhatian pemerintah pada upaya untuk menarik penanaman modal ke Indonesia, Kabupaten Bantul perlu merumuskan reviu atas Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul tersebut.

Berbagai kebijakan nasional yang terkait kebijakan penanaman modal, antara lain: *Online Single Submission*/OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha, revisi Daftar Negatif Investasi dan

berbagai Paket Kebijakan yang memberikan berbagai fasilitas , insentif dan kemudahan penanaman modal. Berbagai dinamika yang terjadi di DIY dan Kabupaten Bantul, yakni rencana penetapan Kawasan Pantai Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penetapan Tembi-Kasongan-Wukirsari dan Kawasan Pantai Parangtritis-Parangkusumo sebagai 2 (dua) dari 7 (tujuh) Kawasan Prioritas Pengembangan Pariwisata DIY.

3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Maksud dan tujuan dari program ini adalah:

a) Pengembangan jumlah perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul agar lebih optimal di sistem perizinan *online* daerah ;

b) Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan proses perizinan secara *online.*

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni pemeliharaan aplikasi dan database pelayanan perizinan online.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.105.400.000,- (Seratus lima Juta Rupiah Empat Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 100.550.000,- (Seratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 95.398 %.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemeliharaan aplikasi pelayanan perizinan online dengan uraian kegiatan: Pembuatan aplikasi sesuai dengan hasil assessment kebutuhan yang diperlukan oleh user dan jadwal yang telah direncanakan dan bebas dari bug (error). Kemudian dilakukan ujicoba aplikasi (sistem) yang telah selesai disusun. Proses ujicoba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung didalamnya. Aplikasi yang dikembangkan mempunyai garansi selama 6 bulan, sehingga kalau terjadi masalah atau ditemukan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun dapat segera ditangani.

4) Peningkatan Pengelolaan Perijinan

Maksud dan tujuan pelaksanaan program Peningkatan Pengelolaan Perijinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi/penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat; danpelayanan konsultasi.

Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain :

a) Sosialisasi Pengelolaan Perijinan

Maksud kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis dan nama izin, persyaratan, dan prosedur untuk mendapatkannya.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan ini adalah:

(1) Menyebarluaskan informasi tentang perizinan;

(2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan ini terdiri dari 2(dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 352.375.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 349.935.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99.308%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Publikasi melalui radio, televisi, baliho dan media sosial lainnya seperti (twitter, facebook, instagram);

(2) Sosialisasi langsung kepada masyarakat (tatap muka langsung).

b) Operasional Pelayanan Perijinan

Maksud kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan adalah untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan izin kepada masyarakat.

Tujuan dari kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan ini adalah:

(1) Menyediakan ATK untuk pelayanan;
(2) Menyediakan formulir permohonan perizinan;
(3) Menyediakan berbagai bahan cetakan seperti map khusus, leflet, dan booklet sebagai penunjang pelayanan.
(4) Menyediakan makanan dan minuman rapat untuk mengkoordinasikan masalah-masalah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99.167%.

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaftlet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c) Pendataan dan Penetapan Perijinan

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

(1) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan erizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;

(2) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu) terealisasi sebesar Rp. 13.165.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 98.799%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan

izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan.

d) Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 8.225.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99.697%.

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

Tabel 3. 75 Data Pengaduan tahun 2019

No.	Sarana Pengaduan	2019
1	Telepon	-
2	Langsung	12
3	Faksimile	-
4	SMS	-
5	Online	5
7	Surat	11
8	Email	-
	Jumlah	**28**

Sumber: DPMPT, 2019 (diolah)

e) Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan:

(1) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;

(2) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kegiatan ini terdiri dari1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 33.850.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 32.125.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 94.904**%.**

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah penyelenggaraan 'Workshop Perizinan'mengundang 80 orang peserta. Adapun peserta workshop ini meliputi:Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-KabupatenBantul dan Wakil Pelaku Usaha.

f) Pengelolaan Perijinan Online

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;

(2) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 31.400.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 31.300.000,-

(Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 99.682%.

g) Survei Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.520.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 97.778%.

Rekomendasi dari hasil survei sebagai upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai berikut:

(1) Melakukan sosialisasi terhadap layanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sehingga lebih banyak pengguna layanan / *stakeholder* memahami proses dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Standar Pelayanan (SP).

(2) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk unsur Biaya / Tarif, unsur Waktu Pelayanan dan unsur Prosedur sehingga dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi “Sangat Baik”.

(3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama bagian Front Office seiring

dengan adanya dinamika perubahan peraturan dan sistem layanan publik.

h) Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo

Maksud Kegiatan Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran berizin serta dan menyebarluaskan informasi tentang potensi investasi di Kabupaten Bantul.

Tujuan dari Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo ini adalah:

(1) Menyampaikan informasi tentang persyaratan dan mekanisme perizinan;
(2) Menyampaikan informasi tentang manfaat memiliki izin;
(3) Memberikan konsultasi tentang perizinan;
(4) Memberikan informasi tentang potensi investasi di Kabupaten Bantul;
(5) Memberikan pelayanan periziinan di Lokasi Bantul Ekspo.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 32.780.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 31.285.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 95.439%.

Kegiatan ini merupakan keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam event Bantul Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan

Kabupaten Bantulsecara rutin setahun sekali.Pada acara ini, DPMPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet, banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran.Penyelenggaraan pada tahun2019 telah berjalan dengan baik dan lancar, dengan antusias pengunjung cukup tinggi, yaitu pengunjung yang mengisi buku tamu berjumlah sekitar 800-an orang.

i) Lokakarya Penanganan Pengaduan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan pengaduan dan pemahaman lingkup layanan pengaduan perizinan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 19.748.867,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 18.598.867,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) atau 94.177%.

j) Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) atau 100.000%.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Tabel 3. 76 Data Capaian Target Tahun 2015 – 2019

Tahun	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2015	65	56,88	87,5
2016	**75**	**81,60**	**108,8**
2017	**77**	**70,98**	**92,1**
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46

Sumber : DPMPT, 2019

k) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk**:**

(1) Menyebarluaskan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan mengurus perizinan;

(2) Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

(3) Membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control);

(4) Mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control) yang diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan termasuk praktik KKN serta untuk memperbaiki penyimpangan tersebut agar sesuai dengan standar pelayanan.

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.168.708,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 42.668.708,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau 94.465%.

Keberhasilan Pelaksanaan Urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun

2019, yakni meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didukung oleh pelaksanaan program:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
2) Program Peningkatan Pengelolan Perijinan.

Telah mencapai melampaui target yang ditetapkan yang tersaji dalam tabel, sebagi berikut:

Tabel 3. 77 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	81	83,80	103,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	85,89	108,08
3	Pertumbuhan realisasi investasi	9	9,30	103,34

Sumber : DPMPT, 2019

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 78 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah
		Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul

Sumber : DPMPT, 2019

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda

2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda

3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

4) Program Pengembangan Kebijakan dan Menajemen Olahraga

a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi

b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Maksud dan tujuan program ini adalah mendorong pemuda agar dapat mengembangkan dirinya dan selalu meningkatkan kompetensinya. Potensi-potensi pemuda harus didukung dan difasilitasi dengan sebaik-baiknya, sehingga pemuda Bantul dapat berprestasi hingga kancah internasional.

a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan potensi pemuda dan memberikan kesempatan untuk berprestasi sesuai dengan keahliannya. Kegiatan yang dilakukan melalui berbagai macam kompetisi atau lomba kepemudaan. Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp818.165.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp758.435.000,00 atau 92,70%. Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Lomba Tata Upacara Bendera Sekolah, karena juknis dari DIY/Nasional belum ada dengan nilai anggaran sebesar Rp59.730.000,00. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Seleksi Jambore Pemuda Daerah/Indonesia

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi dan publikasi kepada seluruh OKP se-Kabupaten Bantul dan camat se-Kabupaten Bantul. Hasil dari tahap tersebut, terdaftar 35 peserta yang mendaftar dan memenuhi persayaratan administrasi.

(2) Lomba Wirausaha Muda Bantul

Kegiatan ini berupa kompetisi ide, gagasan dan kreativitas pemuda Bantul untuk berwirausaha. Bidang yang di kompetisikan adalah Pangan, Industri Kreatif dan Inovasi Teknologi. Diharapkan dengan kegiatan ini akan tercipta wirausahawan muda yang mumpuni, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mandiri.

(3) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul

Kegiatan ini adalah bantuan fasilitasi pelaksanaan MTQ Pelajar Umum di tingkat Kecamatan. Sehingga kafilah-kafilah perwakilan Kecamatan kualitasnya meningkat.

(4) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar Umum Kabupaten Bantul

MTQ pelajar umum Kabupaten Bantul ini dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 di SMA Negeri 1 Imogiri. Kegiatan ini diikuti siswa SD, SMP, dan SMA sederajat se-Kabupaten Bantul (17 kecamatan x 56 siswa). Dilaksanakan dalam 43 Kategori lomba (MTQ SD/SMP/SMA putra dan putri, puitisasi saritilawah SD putra dan putri, MTtQ SD/SMP/SMA putra dan putri, MHQ SD/SMP/SMA putra dan putri, MAz SD/SMP/SMA putra, lomba ceramah agama SD/SMP/SMA putra dan putri, CCA SD/SMP/SMA putra dan putri, seni lukis SD, MSQ SMP/SMA, khutbah Jum'at SMP/SMA,

nasyid SMA putra dan putri, kaligrafi SMP/SMA putra dan putri, dan LKKMS SD/SMP/SMA).

(5) Lomba Mural

Kegiatan ini berupa perlombaan Mural, dilakukan sebagai wahana untuk mengurangi vandalisme. Sehingga para pemuda dapat berkreasi dengan baik lewat karya seni yang lebih bermanfaat dan bertema. Kegiatan ini dilaksanakan di tembok sisi utara BLK Kabupaten Bantul pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019. Kegiatan ini mengambil tema "Pemilu Damai". Diambilnya tema tersebut karena pelaksanaan sekaligus sebagai sumbangsih pemuda untuk mengkampanyekan Pemilu yang Jurdil dan Bersih. Peserta Lomba ini berjumlah 30 tim dengan jumlah personil setiap tim 2-3 orang.

(6) Pembinaan Kafilah & MTQ DIY

Kegiatan ini merupakan pembinaan juara-juara di MTQ Pelajar Kabupaten Bantul yang dipersiapkan untuk mengikuti MTQ Pelajar tingkat DIY. Pelaksanaan MTQ pelajar umum tingkat DIY pada tanggal 18 Juni 2019 di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo.

(7) Lomba Baris Berbaris (LBB) Kabupaten Bantul

Lomba Baris Berbaris Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2019 di Pasar Seni Gabusan sebagai kegiatan

menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Tahun ini melibatkan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Lomba diikuti oleh peleton putra dan putri se-Kabupaten Bantul dengan jumlah 135 peleton. Juara dari kegiatan ini akan mendapat kesempatan untuk mengikuti Lomba Baris Berbaris Tingkat DIY.

(8) Kompetisi Mural (ABT)

Kegiatan ini berupa perlombaan Mural, dilakukan sebagai wahana untuk mengurangi vandalisme. Sehingga para pemuda dapat berkreasi dengan baik lewat karya seni yang lebih bermanfaat dan bertema. Kegiatan ini dilaksanakan di areal Pasar Seni Gabusan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019. Kegiatan ini mengambil tema “Sumpah Pemuda”. Diambilnya tema tersebut karena pelaksanaan sekaligus menyambut Hari Sumpah Pemuda. Peserta kompetisi ini berjumlah 25 tim dengan personil tiap tim 3-4 orang.

2) Program Pembinaaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda

Maksud dan tujuan program ini adalah melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan agar selalu eksis dan terjaga semangat membangun Bantul. SDM pemuda yang berkualitas merupakan potensi yang luar biasa dalam pembangunan.

a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menemukan dan membina pemuda-pemuda Bantul yang berpotensi tinggi dan berjiwa kepeloporan. Kepeloporan disini adalah peran aktif pemuda dalam membangun daerah setempat dan memiliki andil kepada masyarakat, baik dari segi lingkungan, pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, dan lain-lain. Masyarakat akan sangat terbantu dengan kehadiran pemuda tersebut.

Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp147.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp144.750.000,00 atau 98,30%. Sisa anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dilakukan efisiensi pada jumlah juri yang bertugas. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Seleksi Pemuda Pelopor

Seleksi pemuda pelopor bertujuan untuk mencari pemuda-pemuda Kabupaten Bantul yang mempunyai jiwa kepeloporan di masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu menginspirasi dan menggerakkan pembangunan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Seleksi ini dilaksanakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolalan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi. Di tahun ini seleksi

dimulai pada bulan April 2019, dengan tahapan sosialisasi dan publikasi kepada camat se-Kabupaten Bantul. Dari seleksi yang dilaksanakan, Kabupaten Bantul mengirimkan perwakilan peserta di lima kategori bidang kepeloporan untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat DIY.

(2) Fact Finding Pemuda Pelopor DIY

Pada tingkat DIY, dari lima kategori bidang kepeloporan, Kabupaten Bantul dapat meloloskan 3 pemuda untuk mewakili DIY ke tingkat nasional dan berhak di Fact Finding (Kunjungan Lapangan) oleh Tim dari Kemenpora RI.

(3) Fact Finding Pemuda Pelopor Nasional

Dari 3 pemuda Bantul yang di Fact Finding, maka 1 pemuda Kabupaten Bantul dapat meraih juara nasional, atas nama Susilo Nugroho (Wisata Puncak Sosok) dalam kategori Pengelolaan SDA dan Lingkungan.

b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membina organisasi pemuda agar selalu aktif dalam pembangunan. Sehingga SDM pemuda dapat meningkat kualitasnya, tindak hanya meningkat secara akademik akan tetapi meningkat juga dari segi skill dan kemampuan bermasyarakat. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda ini didukung dengan dana dari APBD sebesar

Rp2.305.639.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.247.337.000,00 atau 97,47%. Sisa anggaran sebesar Rp58.302.500,00 karena dilakukan efisiensi pada rekening makan minum kegiatan, honorarium juri, honorarium panitia non pns, belanja perlengkapan dan belanja obat-obatan. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Seminar TUB Sekolah

Kegiatan ini adalah penyampaian materi Tata Upacara Bendera Sekolah yang benar dan sesuai aturan kepada pihak sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Bantul. Sehingga penanaman rasa bela Negara sejak dini dapat dilakukan kepada calon penerus bangsa.

(2) Kursus Mahir Dasar Pramuka

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kapasitas pembina-pembina Pramuka di Kabupaten Bantul. Sebagai peserta adalah guru-guru honorer di Kabupaten Bantul berjumlah 40 orang. Selama satu minggu, peserta mendapatkan materi-materi kepramukaan, teknik-teknik membina pramuka, dan praktek lapangan.

(3) Kursus Instruktur Muda

Kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan ilmu kepramukaan kepada Instruktur-Instruktur Muda di Kabupaten Bantul. Mereka ada dibekali dengan materi-materi khusus hingga menguasai mencapai level tertentu.

(4) Gladian Pimpinan Satuan Pramuka (Dianpinsat)

Kegiatan diikuti oleh 50 siswa sebagai pimpinan regu SMA/SMK se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak kader-kader pramuka sejak dini, membekali jiwa nasionalisme dan kepemimpinan. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan praktek lapangan.

(5) Kursus Mahir Lanjut Pramuka

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kapasitas pembina-pembina Pramuka di Kabupaten Bantul. Sebagai peserta adalah guru-guru honorer di Kabupaten Bantul berjumlah 40 orang. Selama satu minggu, peserta mendapatkan materi-materi kepramukaan, teknik-teknik membina pramuka, dan praktek lapangan.

(6) Seleksi Paskibraka

Tujuan kegiatan ini adalah memilih putra/putri terbaik Kabupaten Bantul untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Maret 2019 di Stadion Sultan Agung. Materi seleksi berupa PBB, kesemaptaan, postur, fisik, dan wawancara. Peserta seleksi ini adalah siswa SMA/SMK yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan berjumlah 362 siswa dari 36 sekolah se-Kabupaten Bantul. Hasil seleksi diambil 80 siswa yang akan mengikuti proses pelatihan dan akhirnya 72 siswa akan bertugas di

Kabupaten Bantul dan delapan siswa akan bertugas di Gedung Agung, DIY. Pada tahun ini perwakilan dari Bantul dapat lolos seleksi dan bertugas sebagai Paskibraka Nasional 2019 atas nama Muhammad Ma'ruf (SMK Negeri 1 Sanden).

(7) Diklatsar KOKAM

Peningkatan kemampuan rescue harus dimiliki setiap organisasi, sehingga sebagai salah satu organisasi masyarakat yang besar dan mempunyai anggota yang solid, maka perlu dibentuk devisi rescue di tubuh KOKAM. Hal ini sangat beralasan, karena Bantul merupakan salah satu daerah yang diintip oleh kerawanan.

(8) Pra Pelatihan Paskibraka

Kegiatan ini merupakan rangkaian panjang dari peringatan HUT RI. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan calon anggota Paskibraka agar siap dalam menjalankan tugas dan berhasil serta sukses tidak ada kesalahan sedikitpun. Dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019.

(9) Pendidikan Dasar Pramuka Peduli

Kegiatan ini diikuti oleh Siswa Pramuka, agar memiliki kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi Bencana. Pramuka juga ingin menunjukkan bhakti kepada masyarakat, maka kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan kemanusiaan harus sering diasah.

(10) Pelatihan Resmi Paskibraka

Kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari Persiapan Peringatan HUT RI Kabupaten Bantul Tahun 2019, berupa pelatihan resmi tidak menginap (1 Agustus s.d. 6 Agustus 2019), dan pelatihan resmi menginap (6 Agustus s.d. 19 Agustus 2019, menginap di SKB Sewon). Peserta berjumlah 72 siswa lolos seleksi dan sebagai pelatih/pembina terdiri dari anggota Kodim 0729 Bantul, Polres Bantul, Dinas Kesehatan Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bantul.

(11) Pelatihan Tallent Mapping

Potensi pemuda harus digali dan diarahkan, sehingga perlu adanya pemetaan potensi pemuda. Ini dilakukan agar pemuda Bantul memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bermasyarakat dan menentukan masa depannya masing-masing. Pemuda Bantul harus yakin atas kemampuan pada dirinya sendiri.

(12) Lomba Pawai, Karnaval, Drumband HUT RI

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua hari, yaitu tanggal 18 dan 19 Agustus 2018. Maksud utamanya adalah rasa syukur atas kemerdekaan dan merupakan kegiatan dari dan untuk masyarakat. Hari pertama berupa lomba pawai bagi siswa SD, SMP, dan SMA sederajat se-Kabupaten Bantul dengan jumlah

125 peleton dan lomba drumband TK, SD, dan SMP sederajat se-Kabupaten Bantul dengan jumlah 43 kelompok. Rute dari lomba hari pertama adalah lapangan Trirenggo-simpang lima Bejen-perempatan Gose-perempatan Paseban-lapangan Paseban. Hari kedua berupa lomba karnaval dan mobil hias yang diikuti 41 kelompok. Rutenya, sama dengan Hari pertama hanya Finis di Masjid Agung/Perempatan Klodran.

(13) Pengadaan Website & Aplikasi Kepemudaan

Prestasi-prestasi pemuda harus mulai terdokumentasi dengan baik. Kegiatan-kegiatan pemuda harus terakumulasi dan tersimpan dengan baik sebagai pemicu pembangunan. Sehingga perlu adanya wadah website dan aplikasi kepemudaan untuk memfasilitasi hal tersebut. Sehingga semua kiprah pemuda akan nyata tersampaikan kepada semua stakeholder dan masyarakat.

(14) Expo Pemuda 2019

Dilaksanakan dengan konsep baru yaitu berupa Pekan Pemuda Bantul 2019. Dilaksanakan selama 1 minggu, dari tanggal 17 s/d 23 Oktober 2019 di Area Pasar Seni Gabusan. Diikuti oleh 100 pengusaha muda Bantul. Expo Pemuda bertujuan untuk menciptakan pasar bagi pengusaha-pengusaha muda Bantul, sebagai sarana promosi.

(15) Seminar Bedah Perpang

Baris-berbaris memang bukan cara hidup pelajar atau pemuda. Baris-berbaris adalah buah karya pemikiran dari TNI, akan tetapi sebagai warga Negara yang baik kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan bela Negara sejak dini. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan baris berbaris. Sebagai dasar pelaksanaan adalah Perpang TNI No 58 Tahun 2018. Dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pemda II.

(16) Festival Santri & Pondok Pesantren Expo

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Santri Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2018. Dilaksanakan di Komplek Kampus IIQ An-Nur Ngrukem pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2019 dengan acara Expo dan Lomba-lomba bagi Pondok Pesantren dan Santri.

(17) Pembinaan Kader P4GN

Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan masa depan bangsa. Khususnya di Bantul, angka penyalahgunaan Narkoba sangat meningkat pesat. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan mendesak untuk melaksanakan pencegahan terhadap hal tersebut. Dengan diadakan pelatihan kader anti narkoba, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangkal penyalahgunaan Narkoba di kalangan siswa dan pemuda. Dilaksanakan di Area Pasar Seni Gabusan dan Pantai Gua Cemara dengan jumlah peserta 50 pemuda se-Kabupaten Bantul.

(18) Pelatihan Bisnis Online bagi Pemuda (ABT)

Dunia teknologi tidak bisa dipungkiri berkembang pesat. Sebagai pemuda harus bijak untuk menggunakannya, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan kemajuan teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan. Kemandirian dapat tercipta dan mengurangi pengangguran.

(19) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul 2019 (ABT)

Kegiatan ini dilaksanakan di Jojoran Kulon, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Dengan peserta 50 pemuda se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini adalah kegiatan perubahan yang diharapkan bahwa dapat menjadi peran aktif pemuda agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini berupa rehab 5 rumah, rehab 1 wc umum dan rehab 1 tempat ibadah.

(20) Kemah Bela Negara (ABT)

Bela Negara harus di tanamkan sejak dini, dengan berbagai cara. Sehingga dilakukan kemah selama 3 hari dengan peserta 150 siswa SMA/K sederajat di Kabupaten Bantul dengan disampaikan berbagai materi kebangsaan dan diajak untuk melakukan bhakti kepada masyarakat.

3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para

pemuda, sehingga pemuda-pemuda Bantul dapat mandiri.

a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bekal bagi pemuda dalam berwirausaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan dari pakar-pakar wirausaha, seperti kuliner, industri kreatif, inovasi teknologi, dan lain-lain. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp59.410.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.410.000,00 atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemula

Kegiatan ini berupa pelatihan pengolahan pangan yang dilaksanakan di Rumah Makan Mbok Jinah. Jumlah Peserta 50 orang pemuda peminat usaha bidang kuliner se-Kabupaten Bantul dari 130 pendaftar. Pelatihan berupa penyampaian materi dari pakar-pakar kuliner dan praktek.

(2) Pelatihan Kewiarusahaan Pemuda Lanjutan

Pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan dari pelatihan dasar yang pernah kita laksanakan. Setelah pemuda mendapat kemampuan untuk membuat produk, kemudian kita bekali lagi dengan kemampuan Publik Speaking. Dengan pinter berbicara dan

membranding produknya, diharapkan dapat meningkatkan omzet.

4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Mutu Olahraga.

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan mutu tenaga olahraga agar dapat mengajar siswa-siswa menjadi atlet berprestasi. Selain itu membuat olahraga menjadi kegiatan sportif dengan wasit yang kredible dan mumpuni. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp78.496.780,00 dan terealisasi sebesar Rp78.496.780,00 atau 100%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan, yaitu :

a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pelatih dan wasit agar siswa-siswa Bantul menjadi atlet yang berprestasi. Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2 sub kegiatan dengan keluaran berupa Pelatihan Wasit Tenis Lapangan se-Kabupaten Bantul yang diikuti oleh 30 peserta dan Pelatihan Pelatih Sepak Takraw yang diikuti 30 peserta.

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Maksud dan tujuan program ini adalah membina cabang olahraga agar selalu berprestasi. Selain itu memasyarakatkan olahraga yang berkembang di masyarakat agar tidak lekang dimakan jaman. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp9.532.298.924,00 dan terealisasi sebesar Rp9.296.545.300,00 . Sisa Anggaran

sebesar Rp235.753.624,00 atau 97,53%. Kegiatan ini meliputi :

a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memasyarakatkan olahraga yang berkembang di masyarakat termasuk olahraga tradisional. Sehingga olahraga akan tetap terjaga dan masyarakat sehat jasmanai dan rohani. Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp5.713.487.200,00 dan terealisir sebesar Rp5.618.444.400,00 atau 98,34%. Sisa anggaran atau efisiensi sebesar Rp95.042.800,00 yang terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan car free day di Jalan Jenderal Sudirman yang dilaksanakan setiap minggu sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Dengan tujuan memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga di tempat yang cukup sehat dan nyaman tanpa asap kendaraan bermotor.

(2) Penyelenggaraan lomba olahraga tradisional dengan tujuan melestarikan Olahraga Tradisional sebagai warisan leluhur. Olahraga Tradisional memiliki nilai-nilai pembentukan karakter Bangsa. Selain warisan budaya olahraga tersebut merupakan suatu proses transfer nilai-nilai dan ketrampilan hidup yang dilakukan antar generasi.

(3) Penyelenggaraan Pemassalan Olahraga, yang saat ini baru diminati masyarakat Bantul

untuk menciptakan masyarakat sadar berolahraga, yang diselenggarakan sebanyak 160kali di wilayah Kabupaten Bantul, diaksanakan senam massal, jalan sehat dan sepeda sehat untuk menjaga kebugaran masyarakat sehingga masyarakat Bantul bisa menciptakan masyarakat yang gemar berolahraga dan memperpanjang harapan hidup masyarakat sesuai dengan visi misi Bupati Bantul, sehingga Bantul tercipta masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan kompetisi olahraga prestasi. Sehingga atlet-atlet muda Bantul dapat bermunculan dan berprestasi hingga kancah internasional. Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga didukung APBD sebesar Rp3.818.811.724,00 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp140.710.824,00 dan terealisasi sebesar Rp3.678.100.900,00 atau sebesar 96,32%, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi/Tri lomba juang, dengan mengirimkan atlet ke DIY sebanyak 120 atlet. Tri Lomba Juang mempertandingkan lari 4km Pelajar SMP Pi, 5km Pelajar SMP Pa dan Pelajar SMA Pi, 8km Pelajar SMA Pa dan 17km untuk umum Pi dan Pa.

(2) Penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang atau Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA, mempertandingkan 23 cabang olahraga, kegiatan ini merupakan seleksi yang hasil juaranya berhak mewakili kabupaten Bantul maju POPDA DIY.

Tabel 3. 79 Prestasi POPDA DIY

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	65	46	60	171	1
2	Kota Yogyakarta	52	34	32	118	2
3	Kab. Sleman	43	61	65	169	3
4	Kab. Kulonprogo	14	21	52	87	5
5	Kab. Gunungkidul	16	28	53	97	4

Sumber : Didikpora, 2019

(3) Penyelenggaraan POSPEDA, pada ajang POSPEDA DIY Kabupaten Bantul mengrimkan sebanyak 152 atlet dan 18 official/pendamping dari FKPP Kabupaten Bantul. POSPEDA DIY 2019 memertandingkan 7 Cabang Olahraga dan 9 cabang seni Kabupaten Bantul hanya meraih peringkat 2 dari 5 Kabupaten Kota memperoleh medali 16 emas, 20 perak dan 6 perunggu sebagai berikut :

Tabel 3. 80 Prestasi POSPEDA DIY Cabang Olahraga

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kota Yogyakarta	13	13	8	34	1
2	Kab. Bantul	10	13	3	26	2
3	Kab. Sleman	10	7	16	33	3
4	Kab. Kulonprogo	0	0	5	5	5
5	Kab. Gunungkidul	6	7	19	32	4

Sumber : Didikpora, 2019

Tabel 3. 81 Prestasi POSPEDA DIY Cabang Seni :

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	**6**	**7**	**3**	**16**	**1**
2	Kota Yogyakarta	**4**	**3**	**2**	**9**	**2**
3	Kab. Gunungkidul	**3**	**4**	**6**	**13**	**3**
4	Kab. Sleman	**3**	**3**	**6**	**12**	**4**
5	Kab. Kulonprogo	**2**	**1**	**1**	**4**	**5**

Sumber : Didikpora, 2019

(4) Penyelenggaraan PEPARPEDA, sub kegiatan ini menyeleksi 3 cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi dan mengirimkan atlet luar biasa ke tingkat DIY sebanyak 40 atlet pada 3 cabang olahraga yaitu atletik, bulutangkis, dan tenis meja, kontingen Kabupaten Bantul kembali meraih **juara umum** dengan perolehan medali 8 emas, 8 perak dan 2 perunggu.

Tabel 3. 82 Prestasi PEPARPEDA

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	**8**	**8**	**2**	**18**	**1**
2	Kota Yogyakarta	**3**	**3**	**3**	**9**	**2**
3	Kab. Gunungkidul	**2**	**4**	**6**	**12**	**3**
4	Kab. Sleman	**2**	**0**	**3**	**5**	**4**
5	Kab. Kulonprogo	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**

Sumber : Didikpora, 2019

(5) Sosialisasi Hibah KONI, dengan keluaran yaitu pelaksanaan sosialisasi penatausahaan keuangan bagi pengguna dana hibah KONI Tahun 2019 dan bendahara 40 cabang olahraga di Kabupaten Bantul agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih transparan dan akuntabel

(6) Pengiriman Atlet Liga Pendidikan (LPI) Tingkat DIY, tahun 2019 mengirimkan 2 Tim, masing-masing mendapatkan juara 3.

(7) Penyelenggaraan Kompetisi Kelas Olahraga, penyelenggara di Kabupaten Bantul.

(8) Pemberian Penghargaan/Bonus Atlit dan Pelatih POPDA, POSPEDA dan PEPARPEDA 2019 di Kabupaten Bantul sebanyak 549 Atlit dan 95 Pelatih.

(9) Pembinaan Atlet Berprestasi Tingkat Daerah, dengan keluaran pembinaan 90 atlet berprestasi dari 10 (sepuluh) cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bantul.

(10) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang berkembang di masyarakat mempertandingkan beberapa cabang olahraga sebagai berikut :

- ❖ Cabang Olahraga Bola Voli
- ❖ Cabang Olahraga Tenis Meja
- ❖ Cabang Olahraga Tenis Lapangan
- ❖ Cabang Olahraga Bulutangkis
- ❖ Cabang Olahraga Futsal
- ❖ Cabang Olahraga Pencak Silat
- ❖ Cabang Olahraga Gate Ball
- ❖ Cabang Olahraga Wood Ball
- ❖ Cabang Olahraga Basket
- ❖ Cabang Olahraga Korf Ball
- ❖ Cabang Olahraga Yoong Moo Do
- ❖ Cabang Olahraga Golf
- ❖ Cabang Olahraga Sepak Bola Putri

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga Kabupaten Bantul, melalui tiga kegiatan yaitu: rehabilitasi lapangan tenis, pengadaan alat-alat olahraga, dan pemeliharaan rutin/berkala sarana-prasarana olahraga. Program ini

didukung oleh dana APBD sebesar Rp 6.094.936.974,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.345.412.260,50 atau 87,70%. Program peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini :

a) Belanja Pembangunan Penambahan Pagar Keliling
b) Pembangunan Pagar Gudang Lapangan Panahan
c) Pengaspalan dan pelebaran Jalan Area Stadion
d) Pembangunan Mushola
e) Perkerasan jalan Area Sirkuit Sepatu Roda SSA
f) Pemasangan Tambahan Lampu Penerangan Jalan SSA
g) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

Tabel 3. 83 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Permasalahan	Solusi
1	Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memilki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat.	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional.
2	Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga.
3	Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten Bantul belum mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi.	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka.
3	Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional.

No.	Permasalahan	Solusi
	memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional.	

Sumber: Disdikpora, 2019

14. STATISTIK

a. Program dan Kegiatan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

c. Permasalahan dan Solusi

15. PERSANDIAN

Penerapan urusan persandian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

a. Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan persandian yang dilaksanakan oleh masing- masing opd terurai sebagai berikut :

1) Program Pengkajian Dan Pengembangan Persandian

a) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

b) Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian

Maksud dan tujuan program ini adalah memberikan layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik *(good govermance*). Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar 805,233,577 realisasi anggaran 777,812,184 dengan serapan anggaran dalam 96.59% Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

Maksud dan tujuan program ini adalah mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 446.481.823 dapat terealisasi Rp 425.697.968 dengan serapan anggaran sebesar 95.34%

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon dan radio komunikasi internal pemda

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua OPD dan 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun anggaran 2019 sambungan telepon extention baik analog maupun IPPhone jumlah total 238 sambungan. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frequensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frequensi. Pemanfaatan oeleh Dinas Sosial, BPBD, SatpolPP, Dinas Perikanan dan kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

(2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya potensi kebocoran

informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat. Kedua hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan informasi berklasifikasi penting dan atau rahasia. Bocornya informasi penting tersebut sangat rawan terhadap kebijakan-kebijakan penting yang diambil maupun stabilitas pemeintahan. Tahun anggaran 2019 kegiatan ini oleh Dinas Kominfo dilaksanakn dengan lokus kegiatan pada ruang kerja Bupati dan Sekpi Bupati, Wakil Bupati dan Sekpri, Sekda dan Ruang Rapat Sekda.

(3) Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandianse-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY(Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiridari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY,Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas,Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

(4) Pengamanan Berita Rahasia

Keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun propinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya melalui persandian. Hal ini menjadi mutlak dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala BSSN RI. Proses penyadian harus dilakukan terhadap berita yang akan

dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh personil sandi, karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional

(5) Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul

Pengamanan sinyal ditujukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting dilaksanakan dimana dalam acara terseut dihadiri pejabat tinggi. Dengan pelaksanaan pengamanan sinyal diharapkan acara dapat berjalan lebih lancara dan hikmat. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengamanan sinyal tahun anggaran 2019 ditujukan untuk kegiatan Syawalan Gubernur DIY di Kabupaten Bantul dan Upacara Ulang Tahun hari jadi Kabupaten Bantul.

(6) Perancangan Komunikasi Radio Pemkab. Bantul

(7) Penyediaan Filter Repeater RPU

(8) Layanan Call Center 112

Menurut Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112,

diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal, paling lambat tahun 2022 harus sudah terlaksana integrasi panggilan.

Sumber : Diskomifo, 2019
Gambar 3. 39 Launching Panggilan Darurat 112

Panggilan Darurat 112 di launching oleh Bupati Bantul bersama Kapolres Bantul dan Direktur Pengembangan Pita lebar Kementrian Kominfo RI dihadiri juga Forkopimda, Kepala OPD bertempat di Gedung Induk Lantai III, Pada Hari Senin, 11 November 2019

b) Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi dalam penerapan

Digital Government Service di pemerintahan kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 358.751.754 dapat terealisasi Rp 352.114.216 dengan serapan anggaran sebesar 98.15%

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul

Pemanfaatan Radio Komunikasi Internal untuk mendukung komunikasi di beberapa OPD yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta repeaternya.

(2) Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi

Kegiatan sosialisasi Bidang Keamanan Informasi yang dilaksanakan yaitu peningkatan kesadaran keamanan informasi , dengan pemanfaatan tanda tangan digital yang memanfaatkan *crytografy* / persandian pada algoritmanya. Narasumber kegiatan ini dari Badan Siber dan Sandi Negara serta praktisi IT dari Yogyakarta.

Peserta sosialisasi kepala OPD untuk memberikan pemahaman pemanfaatan tanda tangan digital yang akan diimplementasikan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi perijinan online.

(3) Peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pula meningkatnya resiko keamanan atas aplikasi yang ada di server Pemkab. Bantul, oleh karena itu beberapa personil dari Diskominfo diikutkan dalam Bimtek Penetration Testing dengan metode Black Box untuk dapat menemukan celah keamanan dari sudut pandang penyerang (orang di luar system).

(4) Penambahan saluran telepon Pemkab. Bantul

Saluran telepon Pemkab Bantul kini telah dapat memfasilitasi seluruh OPD dan kecamatan di wilayah Kab. Bantul. Perubahan dan penambahan ruangan di masing-masing OPD dan kecamatan berdampak pada meningkatnya kebutuhan titik pemasangan telepon dan hal tersebut yang terus diusahakan untuk dipenuhi oleh Diskominfo Bantul.

(5) Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul

Selama 12 bulan penyelenggaraan layanan tentunya tidak lepas dari kendala yang dapat disebabkan oleh faktor alam, aus nya peralatan dan faktor lain yang kadang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu pemantauan dan pemeliharaan terhadap prasarana jaringan telepon harus secara rutin dilakukan.

(6) Terbangunnya repeater radio komunikasi

Penyelenggaraan komunikasi menggunakan radio saat ini masih terkendala dengan adanya beberapa *blind spot* di daerah-daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau sinyal radio atau kualitas sinyal yang kurang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penambahan repeater di titik-titik strategis sehingga kualitas sinyal radio menjadi lebih baik/ kuat, semakin luasnya area yang dapat dijangkau dan berkurangnya *blind spot*.

(7) Pengamanan sistem elektronik

Berjalanya proses menuju Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan.

(8) Penanganan insiden keamanan informasi

Maraknya penggunaan internet di seluruh lapisan masyarakat dunia, sangat berhubungan dengan meningkatnya kerawanan siber. Tak luput dengan jaringan internet yang dikelola Pemkab Bantul. Pada tahun 2019 tercatat sudah 5 insiden siber

dengan total obyek serangan sejumlah 61 aplikasi/web, yang meliputi dos, *Defacement, SQL Injection* dan *malware.*

Keberhasilan Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian dapat di lihat dari berbagai hal sebagai berikut :

a) Implementasi tandatangan digital di beberapa OPD di pemerintal kab. Bantul seperti Perijinan online (DPMPT), Simerkes (Dinkes), layanan dokumen kependudukan pada Disdukcapil, Penerbitan SPPT pajak PBB (BKAD), Sigadispentul (Dikpora).
b) Terfasilitasinya komunikasi Radio (frekuensi HT) di beberapa OPD di pemerintal kab. Bantul
c) Tersedianya komunikasi IP Phone di OPD dan Kecamatan
d) Memiliki software yang dapat mendeteksi insiden siber yang masuk di wilayah pemerintah kabupaten bantul
e) Melaksanakan layanan panggilan darurat 112 di di kab. Bantul

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Persandian.

Tabel 3. 84 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Persandian

Permasalahan	Solusi
Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN
Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.

Sumber : Diskomifo, 2019

16. KEBUDAYAAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan terurai sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

a) Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

b) Kegiatan Film Dokumenter

2) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

a) Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

3) Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

a) Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

b) Kegiatan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Kegiatan Seminar dalam rangka Reaktualisasi Budaya Lokal

c) Kegiatan Pengelolaan Tata Nilai

4) Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

a) Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya

b) Kegiatan Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya

c) Kegiatan Rehab Cagar Budaya

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan

dan pemenfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.

Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan , antara lain:

a) Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan peristiwa seni budaya, kegiatan yang dilaksanakan melalui 7 sub kegiatan ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 4.520.190.000 dan terealisasi sebesar Rp 4.470.002.745 atau 98,89% (efisiensi 1,11.

b) Kegiatan Film Dokumenter

Maksud kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan bentuk sajian kesenian Montro khususnya yang ada di Kauman Pleret, dan bertujuan untuk pelestarian, pembinaan dan pengembangan kesenian Montro di Kabupaten Bantul. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 terealisasi Rp. 78.974.000 atau sebesar 98,72% (efisiensi 1,28%). Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembuatan Film Dokumenter Kesenian Tradisional Montro dalam rangka untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan adat budaya yang ada dalam masyarakat.

2) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Maksud dan tujuan program ini adalah terjalinnya kerjasama bidang kebudayaan dengan daerah lain sekaligus sebagai media pengembangan diplomasi budaya.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah yang merupakan salah satu upaya pembinaan dan pelestarian seni dramatari yang ada di Bantul dengan bekerjasama dan berpartisipasi pada Acara Pesta Kesenian Bali ini bertujuan untuk pemanfaatan potensi kesenian lokal Bantul, serta mengenalkan kesenian tradisional ke kancah nasional. Didukung pagu anggaran sebesar Rp. 47.900.000 terealisasi sebesar Rp 45.900.000 atau 95,82% (efisiensi 4,18%)

3) Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan perlindungan , pengembangan, dan pemanfaatan kesenian nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian dokumentasi warisan budaya tak benda.

Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

Sebagai upaya dokumentasi situs sejarah yang ada di Kabupaten Bantul, kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk Kajian Situs Sejarah Panembahan Bodo yang berada di Pandak, Bantul didukung pagu anggaran sebesar Rp. 48.550.000 dan terealisasi Rp 46.735.000 atau 96,26 %. Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk mengenalkan dan melestarikan kajian sejarah, juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga akan sejarah lokal;

b) Kegiatan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

Bertujuan untuk mengenalkan bahasa dan sastra di kalangan pelajar dan masyarakat umum serta seniman. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan berpagu anggaran Rp. 41.220.000 yaitu Dialog Bahasa dan Sastra yang diikuti 70 peseta yabg terdiri dari Guru Bahasa Jawa Tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK, serta sastrawan di Kabupaten Bantul. Realisasi anggaran sebesar 99,47% (Rp. 41.220.000);

c) Seminar dalam rangka Reaktualisasi Budaya Lokal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan penggunaan bahasa dan sastra Jawa secara baik dan benar melalui pelatihan Pranatacara kepada Siswa dan Masyarakat Umum. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Pawiyatan Pranatacara Bahasa Jawa di Pandak dan Pajangan. Pagu anggaran sebesar Rp 115.100.000 terealisasi sebesar Rp 114.236.000 atau sebesar 99,25%.

d) Kegiatan Pengelolaan Tata Nilai

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya tata nilai berbudaya di masyarakat, dalamsegala aspek kehidupan, baik tata nilai perilaku, bahasa maupun busana/pakaian sehingga orang Jawa tidak kehilangan filosofi jawanya. Pagu anggaran yang tersedia Rp73.050.000 terealisasi Rp71.225.000 atau 97,50%.

4) Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian dokumentasi warisan budaya benda. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk meingkatkan pengetahuan, pengelolaan, pemanfaatan cagar budaya dan memahami pentingnya pengetahuan Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya untuk kepentingan agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sasaran seminar yaitu seluruh pengelola cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan inis ebesar Rp. 308.400.000 terealisasi sebesar Rp. 299.611.000 atau 97,15%.

b) Kegiatan Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan warisan budaya, meningkatkan pengetahuan warisan budaya yang ada di Kabupaten Bantul, dan melestarikan/mendokumentasikan WBCB. Disamping juga untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pagu anggaran sebesar Rp 120.000.000 terealisasi sebesar Rp 123.107.000 atau 95,58%.

c) Kegiatan Rehab Cagar Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melestarikan kekayaan budaya berupa Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB) dan tertatanya WBCB secara lebih baik dan bermanfaat. Diharapkan dengan kegiatan ini warisan budaya dan cagar budaya Bantul semakin terjamin kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi muda, nusa dan bangsa. Sasaran kegiatan adalah obyek-obyek warisan budaya maupun cagar budaya di Kabupaten Bantul. Didukung pagu anggaran sebesar Rp. 147.250.000 terealisasi 94,81% atau senilai Rp. 139.609.500 (efisiensi 5,19%), dengan hasil kegiatan berupa DED Goa Seluman Banguntapan Bantul dan DED Umbul Koripan Dlingo Bantul.

Sebagai salah satu OPD pengampu IKU Bupati, maka keberhasilan program-program di Dinas Kebudayaan menjadi salah satu indikator capaian dalam perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dari tahun ketahun IPK Kabupaten Bantul senantiasa mengalami kenaikan, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2019 ini angka IPK Kabupaten Bantul 69,9 dari target sebesar 65, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 85 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019

No	Indikator	Nilai
1.	Capaian Kinerja Pembangunan Kebudayaan berbasis Program Pengembangan	99,2
2.	Capaian Obyek Pemajuan Kebudayaan	82
3.	Capaian Pemajuan Ekonomi Budaya	28
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	**69,7**

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2019

Faktor pendukung upaya pembangunan di bidang kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1) Keberadaan obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni, dan ritus
2) Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat untuk melestarikan atau *nguri-uri* tradisi
3) Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah
4) Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar disetiap desa dan ditingkat kecamatan, 5) terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat
5) Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada
6) Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam proses-proses upaya pembangunan kebudayaan, ditemui faktor-faktor penghambat diantaranya regenerasi, pendanaan, pembinaan, serta pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

17. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Menjadi kewajiban pemerintah menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagaima diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul megemban misi II Bupati dengan indikator kinerja utama (IKU) persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan. Sebelum disampaikan tentang program dan kegiatan yang mendukung IKU tersebut berikut ini data jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Bantul serta data jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 3. 86 Jumlah Perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD	392
4	Perpustakaan SMP	113
5	Perpustakaan SMA/SMK	83
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	7
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
	Jumlah	840

Sumber : DISPUSIP, 2019

Tabel 3. 87 Jumlah Pojok Baca

No	Tahun	Jumlah
1	2017	2
2	2018	12
3	2019	17
	Jumlah	31

Sumber : DISPUSIP, 2019

Tabel 3. 88 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah	832.826	841.154

Sumber : DISPUSIP, 2019

Tabel 3. 89 Jumlah Pengunjung Menurut Usia

No	Jenis Pemustaka	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Paud/TK	3-6 th	7.116	8.999	16.115
2	SD	7-12 th	196.792	266.977	463.769
3	SMP	13-15 th	32.331	43.036	75.367
4	SMA	16-18 th	47.456	99.093	146.549
5	Mahasiswa	>18 th	6.421	13.537	19.958
6	Pegawai	>18 th	25.123	42.179	67.302
7	Umum/lain-lain	>18 th	22.976	29.118	52.094
	Jumlah		338.215	502.939	841.154

Sumber : DISPUSIP, 2019

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan;

b) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;

c) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;

d) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan;

e) Pengembangan Sarpras Perpustakaan;

3) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

a) Pengembangan Pelayanan Perpustakaan;

b) Peningkatan Promosi Perpustakaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Than 2019 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Anggaran sebesar Rp164.450.000,-; realisasi Rp161.310.000,- atau 98,09%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Pendidikan, sosialisasi, BImtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp164.450.000,- terealisasi sebesar Rp161.310.000,- atau 98,09%.

2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa yang memiliki Akreditasi Nasional , Pagu anggaran program ini Rp1.856.242.601,- terealisasi sebesar Rp1.703.187.736 atau 91,75%. Indikator kinerja program ini adalah jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang

terakreditasi nasional. Target tahun 2019 sejumlah 6 terealisasi 6 atau tercapai 100%.

Tabel 3. 90 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi

No	Perpustakaan yang Terakreditasi	Jumlah Th. 2019
1	Perpustakaan Desa	2
2	Perpustakaan SD	7
3	Perpustakaan SMP	5
4	Perpustakaan SMA/SMK	8
	Jumlah	22

Sumber : DISPUSIP, 2019

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Forum Komunikasi Pustakawan, Pengelola Perpustakaan Sekolah/Desa dan TBM. Pagu anggaran Rp48.150.000,- terealisasi sebesar Rp48.150.000,- atau 100%.

Adapun bentuk uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Forkom Taman Bacaan Masyarakat pada tanggal 18 April 2019 tema “Berkegiatan melalui TBM” peserta Pengelola TBM.

(2) Forkom IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) pada tanggal 23 April 2019 tema “ Minat Baca dalam Keluarga”, peserta IPI Kabupaten Bantul.

(3) Forkom Akreditasi Perpustakaan pada tanggal 12 Juni 2019 tema “Menuju Perpustakaan Berstandar Nasional” peserta Pengelola perpustakaan sekolah pengelola perpustakaan desa dan pustakawan.

(4) Forkom Satgas Literasi pada tanggal 17 Juni 2019 tema “Satgas Literasi sebagai Ujung Tombak Perpustakaan “ peserta Satgas Literasi Kabupaten Bantul.

(5) Forkom Duta Literasi pada tanggal 17 Juli 2019 tema “Belajar dan Berkarya” peserta Siswa SMA, SMP dan Karyawan swasta.

b) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Maksud dan tujuan terlaksananya bedah buku, penerbitan bulletin, Workshop Pengelolaan Buku, Sosialisasi Pojok Baca dan kegiatan Kampung Literasi. Pagu anggaran Rp283.252,601,- terealisasi sebesar Rp277.505.900,- atau 97,97%.

(1) Penerbitan Buletin Kaloka Pustaka Tahun 2019 sebanyak 500 eksemplar.

(2) Workshop Pengelolaan Buku dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 dengan tema “ Tata Cara Pengelolaan Buku Perpustakaan“, peserta Pengelola Perpustakaan Sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, perpustakaan khusus.

(3) Kegiatan Kampung Literasi dilaksanakan pada tanggal 11-26 Maret 2019. Kegiatan ini berisi Sosialisasi Pembentukan Satgas Literasi di 5 Pedukuhan di Kabupaten Bantul. Peserta Satgas Literasi di Desa Ringinharjo, Satga Literasi Dusun Ngentak, Tobulharjo, Satgas Literasi Dusun Ngireng-ireng Panggungharjo, Satgas Literasi Dusun Druwo, Satgas Literasi Dusun Bantul Karang, Bantul, Satgas Literasi Dusun Neco.

(4) Sosialisasi Pojok Baca dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 30 November 2019 di 17 lokasi. Peserta sosialisasi calon penerima hibah pojok baca. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informasi terkait hibah pojok baca dan pengelolaan pojok baca.

c) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini terlaksananya penyediaan bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul dan menambah koleksi buku di Pojok Baca. Pagu anggaran Rp248.555.000,- terealisasi Rp246.375.140,- atau 99,12%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buku sebanyak 730 judul 2920 eksemplar.

d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya lomba perpustakaan desa/sekolah, pembinaan perpustakaan. . Pagu anggaran Rp307.500.000,- terealisasi sebesar Rp304.303.400,- atau 98,96%.

e) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan sekolah, desa dan komunitas . Pagu anggaran Rp58.310.000,- terealisasi sebesar Rp58.310.000,- atau 100%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan pada tanggal 21-25 Juni 2019 dengan peserta Pengelola Perpustakaan Desa, Pengelola Perpustakaan Sekolah, Pengelola Perpustakaan Komunitas.

f) Kegiatan Pengembangan Sarpras Pepustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perpustakaan/ pojok baca bagi masyarakat.

Pagu anggaran Rp910.475.000,- terealisasi sebesar Rp768.543.296,- atau 84,41%.

3) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Pagu anggaran program ini Rp468.420.000,- terealisasi Rp465.960.000, atau 99,47%. Indikator kinerja dari program ini adalah Indek kepuasan terhadap layanan masyarakat (IKM). Target tahun 2019 82,8% terealisasi 89,23% atau tercapai 108,15%.

a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya layanan perpustakaan keliling dan pelayanan perpustakaan di kantor oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pagu anggaran Rp185.100.000,- terealisasi sebesar Rp185.100.000,- atau 100%.

Adapun uraian kegiatan yang dilksanakan adalah :

(1) Layanan keliling di 192 lokasi antara lain di sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca Pemerintahan.
(2) Layanan Sabtu-Minggu
(3) Layanan di lokasi wisata dan event-event tertentu seperti Car Freeday,
(4) Bantul Expo
(5) Layanan Pemutaran Film Edukasi

b) Kegiatan Peningkatan Promosi Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pameran, festival cerita, karnaval dan hari Jadi Bantul. Pagu anggaran Rp283.320.000,- terealisasi sebesar Rp280.860.000,-atau 99%.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada program dan kegiatan di Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 91 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perpustakaan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi	• Meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat • Mengoptimalkan peran masyarakat dalam promosi perpustakaan dengan pembentukan Satgas Literasi

2	Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Daerah (terbatasnya ruang baca dan koleksi perpustakaan), Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan komunitas serta TBM, dan Pojok Baca	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan, missal dengan dibangunnya Pojok Baca, penambahan koleksi perpustakaan

Sumber : DISPUSIP, 2019

18. KEARSIPAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada Urusan Kearsipan sebagai berikut :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a) Kegiatan Pengklasifikasian Data;
b) Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan;
c) Kegiatan Pengawasan Kearsipan;

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

a) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;
c) Akuisisi dan Pengolahan Arsip;

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip;
b) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis;
c) Peningkatan Pelayanan Kearsipan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Urusan Kearsipan sebagai berikut :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan system administrasi kearsipan tertata baik. Pagu anggaram R305.346.588,- terealisasi Rp301.269.400 atau tercapai 98,66%. Indikator kinerja program ini adalah jumlah OPD dan desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik.

Target tahun 2019 sebanyak 30 OPD/Desa terealisasi 30 OPD/Desa atau tercapai 100%.

Program Perbaikan Sistem Informasi Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Kegiatan Pengklasifikasian Data

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip.

Pagu anggaran kegiatan ini Rp 50.419012,- terealisasi sebesar Rp 49.983.700 atau tercapai 99,14%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip dengan maksud untuk mengetahui arsip yang permanen, arsip sementara dan arsip yang akan dimusnahkan. Pada tahun 2019 arsip yang diusulkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk dimusnahkan adalah arsip Eks Keuangan kelompok B sebanyak 3.176 nomor berkas. Sedangkan arsip permanen 375 nomor berkas.

b) Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya peraturan kearsipan. Pagu anggaran Rp 155.800.000,- terealisasi sebesar Rp 153.899.500,- atau tercapai 98,78%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(1) Disusun Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Statis.

(2) Penyusunan petunjuk pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

c) Kegiatan Pengawasan Kearsipan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kearsipan di OPD. Pagu anggaran Rp99.127.576,- terealisasi Rp97.386.200,- atau tercapai 98,24%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip pada 52 OPD di Kabupaten Bantul. Unsur penilaian meliputi tata naskah, pengelolaan kearsipan, SDM, dan sarpras yang ada di masing-masing OPD. Dari hasil pengawasan ini diperoleh :

Tabel 3. 92 Data Hasil Pengawasan Kearsipan

No	Kategori Nilai	Jumlah Opd
1	Sangat Baik	5
2	Baik	22
3	Cukup	3
4	Kurang	22

Sumber : DISPUSIP, 2019

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah peningkatnya cakupan arsip statis yang diakuisisi. Pagu anggaran Rp1.174.783.286,- terealisasi sebesar Rp1.150.656.700,- atau tercapai 97,95%. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan arsip statis yang diakuisisi. Pada tahun 2019 mentargetkan 22% terealisasi 22% atau tercapai 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan

arsip. Pagu anggaran Rp183.000.000,- terealisasi sebesar Rp 180.300.000,- atau tercapai 98,52%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah alamari fotografi, almari Roll Opec dan meja restorasi.

b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdatanya dan tertatanya dokumen arsip . Pagu anggaran Rp571.432.121,- terealisasi sebesar Rp554.433.700,- atau tercapai 97,03%. Adapaun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(1) Dilaksanakan pendataan dan penataan dokumen arsip sejumlah 12.928 daftar arsip.

(2) Dilaksanakan sosialisasi arsip keluarga di Dusun Garon, Dusun Ponggok, Dusun Cepor, Dusun Gandok, Dusun Sawahan, Dusun Sonopakis, Dusun Sudimoro, Dusun Tegalijo, Dusun Trirenggo.

c) Kegiatan Akuisisi dan Pengolahan Arsip

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya akuisisi tokoh/tema dan terlaksananya pengolahan arsip. Pagu anggaran Rp 420.351.165,- terealisasi sebesar Rp415.923.000,- atau tercapai 98,95%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(1) Akuisisi tokoh batik “Jogo Pertiwi”

(2) Melakukan restorasi arsip Desa Palbapang dengan hasil register nikah 50 berkas

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Pagu anggaran Rp199.975.000,- terealisasi sebesar Rp186.598.000,- atau tercapai sebesar 93,31%. Indikator kinerja program ini adalah nilai IKM. Pada tahun 2019 mentargetkan 82,5 terealisasi 89,23 atau 108,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen naskah sumber arsip dan menambah jumlah tema/tokoh sumber arsip Pagu anggaran kegiatan ini Rp45.975.000,- terealisasi Rp44.798.000,-.atau 97,44%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah tersusunya naskah sumber arsip Tokoh Seni mengambil judul “Sang Maestro Seni Pedalangan Gaya Yogyakarta KI Timbul Hadi Prayitno KMT. Cermo Manggolo” Pada buku ini ada dua (2) bab yang ditulis yaitu “Wayang Nusantara” oleh Dr. Hanggar Budi Prasetya, S.Sn. dan “Ki Timbul Hadi Prayitno Dalang Terkenal dari Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Dr. Sumaryono,M.A.

b) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pengembangan system informasi kearsipan . Pagu anggaran kegiatan ini Rp90.675.000,- terealisasi Rp82.725.000,- atau tercapai 91,23%. Adapun uraian dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya workshop penggunaan teknologi informasi (SIKN/Sistem

Informasi Kearsipan Nasional) dalam penanganan dan pengelolaan kearsipan dengan peserta petugas arsip/Kepala TU dari OPD dan UPT Puskesmas se-Kabupaten Bantul.

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kearsipan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pameran kearsipan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp 63.325.000,- terealisasi Rp59.075.000,- atau tercapai 94,27%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pameran kearsipan dengan tema “Parangtritis Tempo Doeloe”.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Arsip adalag sebagai berikut :

Tabel 3. 93 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kearsipan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum semua OPD memiliki SDM Kearsipan/ Arsiparis	• Rekrutment PHL dan mengusulkan formasi Arsiparis • Bimtek Kearsipan
2	Belum Optimalnya Sarpras Pengolahan Arsip di OPD	Pemenuhan Sarpras pengelolaan arsip secara bertahap oleh OPD
3	Pengelolaan Arsip di masing-masing OPD belum sesuai standar	• Implementasi UU, Perda dan Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan. • Dilakukakn Pendampingan kearsipan, pengawasan kerasipan serta monev penyelenggaraan kearsipan di OPD.

Sumber : DISPUSIP, 2019

URUSAN PILIHAN

19. KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Produksi Perikanan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Peningkatan Produksi Perikanan.

Program peningkatan pproduksi perikanan tahun 2019 telah dilaksanakan dengan dukungan SDM, teknologi, dan anggaran dari pemerintah sebesar Rp 2.213.209.500,00. Outcome dari program ini adalah peningkatan produksi ikan, baik yang berasal dari usaha perikanan budidaya maupun dari usaha perikanan tangkap. Program ini dijalankan melalui beberapa kegiatan yaitu:

(1) Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 kg dari 12.291.000 kg pada tahun 2018 menjadi 12.440.597 kg pada tahun 2019. Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yang meliputi BBI Barongan, Sanden,

Gesikan, dan Krapyak, dan melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasarana pembesaran ikan maupun perbenihan ikan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan.

Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pelaku utama perikanan baik dari aspek teknis maupun kelembagaan, meningkatkan peran dan partisipasi pelaku utama perikanan dan stakeholder terkait dalam peningkatan produksi perikanan dan pengembangan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap

Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan serta sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap dalam hal ini nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir. Kegiatan meliputi pemenuhan sarana

prasarana yang digunakan di 5 unit TPI di Kabupaten Bantul yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,76 ton atau 4,97%. Produksi tangkap perairan umum juga mengalami peningkatan 9,55 ton atau 3,13%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal dan ikan layur. Selain itu, program restocking ikan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan

Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan (UPT. BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang perikanan. UPT BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih dan ikan konsumsi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Sumber : DPPKP, 2019

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kelautan dan perikanan

Tabel 3.94 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap karena pengaruh cuaca	Pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya
		Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
2	Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya
3	Masih adanya kejadian penyakit ikan	Pelatihan budidaya ikan CBIB sehingga dapat mencegah penyakit ikan
		Peningkatan Pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur

Sumber: DPPKP, 2019

20. PARIWISATA

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mencapai 5.166.615 orang. Capaian tersebut sudah melebihi target RPJMD sebanyak 4.445.781 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, pada 2019 mencapai Rp31.756.578.250,00 atau meningkat sebesar 9,25% dari perolehan tahun 2018 yang berjumlah Rp29.066.376.750.000,00.

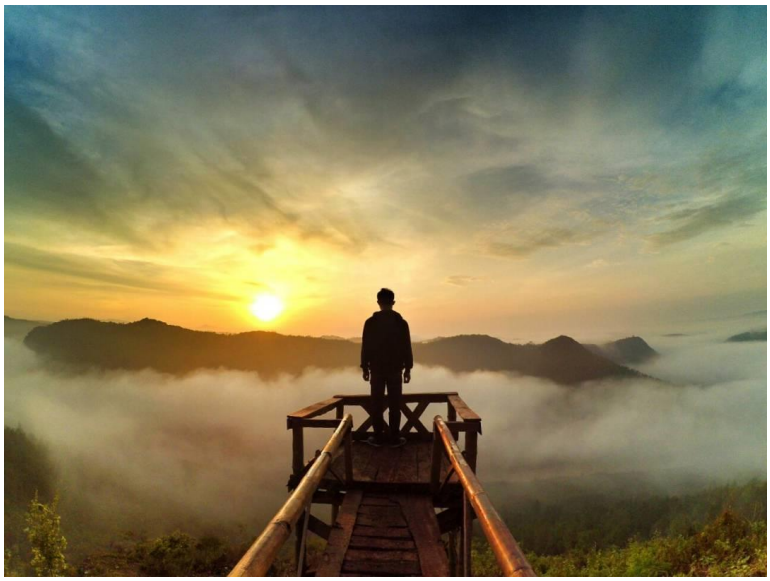

Gambar 3. 40 Obyek Wisata Watu Mabur

Banyaknya kunjungan wisatawan mampu memberikan efek ganda berupa belanja wisatawan dan pencapaian target PAD sebesar Rp. 31.756.578.250,00 sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 3.95 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2019

No.	Daya Tarik Wisata	2018	2019	Satuan	Keterangan
1	Alam	25	32	Unit	
2	Buatan	59	84	Unit	
No.	**Usaha Pariwisata**			**Satuan**	
1	Hotel bintang	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	142	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

Peningkatan perolehan di atas selain didukung oleh keanekaragaman daya tarik wisata yang meliputi alam, budaya/religius, kerajinan rakyat dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) **Program Pengembangan pemasaran pariwisata**
   a) Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek
   b) Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
   c) Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
   d) Kegiatan Pengembangan sistem informasi dan pengendalian pemasaran pariwisata

2) Program Pengembangan destinasi pariwisata
   a) Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata
   b) Kegiatan Peningkatan daya tarik wisata

c) Kegiatan Peningkatan pelayanan kepariwisataan

3) Program Pengembangan kemitraan

a) Kegiatan Pengembangan SDM, kelembagaan dan pengendalian pariwisata

b) Kegiatan Pengembangan kelembagaan pariwisata

c) Kegiatan Pemberdayaan desa wisata

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Hasil program ini adalah:

a) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui kunjungan wisatawan yang sesuai dengan destinasi wisatanya (sebaran wisatawannya).

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kajian tentang analisa pasar, Length of stay, semar seto dan appraisal lokasi TPR Parangtritis. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp265.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp262.274.500,00.

b) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mempromosikan destinasi wisata melalui bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk promosi melalui *famtrip*, *travel dialog*, *java promo*, temu pelaku wisata, dan pertukaran wisata pelajar. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp210.750.000,00 dengan

realisasi Rp208.842.500,00. Melalui kegiatan tersebut diharapkan informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dikenal secara lebih luas.

c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk mempromosikan destinasi wisata melalui pameran-pameran yang diselenggarakan baik didalam DIY maupun di luar DIY.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pameran, penerbitan bahan promosi, promosi melalui media, pemberdayaan Dimas-Diajeng Bantul, cerdas cermat, *festival*, cetak *leaflet*, dan pameran. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.126.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.877.341.575,00.

d) Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui aplikasi agar memudahkan wisatawan mengunjungi destinasi wisata.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan Sim Data Kepariwisataan dan pemeliharaan konten sosial media dan pemeliharaan aplikasi jelajah Bantul. Anggaran yang terserap untuk sejumlah kegiatan ini adalah Rp. 227.697.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 228.300.000,00. Melalui kegiatan tersebut

diharapkan informasi mengenai wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata

Hasil program ini adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan daerah tujuan wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar dalam pengembangan destinasi wisata sudah mempunyai perencanan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pembanguna destinasi wisata sesuai dengan konsep. Total realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.122.241.893,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.350.373.500,00.

b) Peningkatan Daya Tarik Wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sesuai dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Anggaran yang terserap untuk sejumlah kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.590.468.825,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.688.450.000.000,00. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata, sekaligus juga memberdayakan kelompok seni budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Bantul.

c) Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan, agar wisatawan nyaman. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 349.040.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 377.500.000,00.

2) Pengembangan Kemitraan

Mengembangkan dan menggalakan kerja sama kemitraan dalam sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing. Prinsip dasar kemitraan mengusung kesetaraan, transparansi, formal dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan, alih pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, serta kelembagaan.

Kegiatan dari program pengembangan kemitraan ini di antaranya adalah:

a) Pengembangan SDM, kelembagaan dan pengendalian pariwisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan SDM desa wisata dalam mengelola desa wisata maupun homestaynya.

Kegiatan pengembangan SDM, kelembagaan dan pengendalian pariwisata berupa menyelenggarakan pelatihan bagi Pokdarwis dan desa wisata. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 897.932.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 913.038.000,00.

b) Pengembangan kelembagaan pariwisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan kelembagaan desa wisata maupun pokdarwis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan maupun lama tinggal wisatawan.

Kegiatan pengembangan kelembagaan pariwisata berupa penyelenggaraan sarasehan forum komunikasi Pokdarwis dan saka pariwisata sebanyak 10 kali. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 248.718.800,00 dari rencana anggaran sebesar Rp. 348.760.000,00.

c) Pemberdayaan desa wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan desa wisata maupun homestay agar lama tinggal wisatawan meningkat yang merupakan indikator kinerja dari Dinas Pariwisata.

Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 225.655.000,00 dari rencana anggaran sebesar Rp. 229.950.000,00. Melalui kegiatan tersebut kemampuan para pelaku usaha jasa wisata dan pengurus desa wisata di Kabupaten Bantul dapat lebih ditingkatkan.

c. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata dan solusi penyelesaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.96 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pariwisata

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah	Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
2	Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Bantul	Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata
3	Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata	Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidanginya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

21. PERTANIAN

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
2) Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
3) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
4) Peningkatan produksi hasil peternakan;
5) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
6) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Hasil pelaksanaan program pada urusan pertanian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan produksi pertanian/perkebunan yang optimal, dengan produktivitas yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh petani semakin tinggi. Dengan menyediakan berbagai prasarana dan sarana pertanian serta pelatihan dan pendampingan/ pembinaan pada kelompok petani, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.489.743.300,00.

Capaian dari kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk penambahan luasan tanaman kakao dan penambahan

pengetahuan teknis budidaya kakao. Keluaran kegiatan ini ada 3 yaitu: Workshop penangkaran benih, Sosialisasi penanganan benih tanaman, dan Pelatihan pengembangan perbenihan/pembibitan kakao.

b) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan berkelanjutan

Keluaran kegiatan ini adalah Pelatihan Pengembangan Kakao, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Budidaya tanaman buah buahan, Pelatihan Budidaya Pertanian Organik, Pelatihan Budidaya tanaman Buah buahan, Pelatihan tanaman hortikultura (Cabe) , Pelatihan Budidaya Hortikultura (Pangan Lokal), Pelatihan Budidaya Tanaman Herbal dan Pengolahannya, Pelatihan Budidaya tanaman Toga, Pelatihan GAP Hortikultura, SL Penerapan Teknologi Tajarwo Padi, Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal, Workshop Pengembangan TPHbun, Workshop Pola Tanam Berbasis Pasar TPHBun, Meningkatkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan.

c) Peningkatan kapasitas pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)

UPTD Balai Benih Pertanian dibentuk berdasar peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul. UPTD Balai Benih Pertanian

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai Benih Pertanian. Keluaran kegiatan ini adalah produksi benih padi dan pembelian GKP calon benih padi. Produksi benih padi dari UPTD ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.

Tahun 2019 bekerjasama dengan 9 Kelompok Penangkar Agribisnis dengan total luasan 38,5 Ha. Total luasan yang dikelola oleh kelompok penangkar tersebut merupakan total luasan dalam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penangkar yangbekerjasama dengan UPT Balai Benih Pertanian melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun.

Tabel 3.97 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi

No	Nama Kelompok Penangkar	Alamat	Luas (ha)
1	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Makmur	KBD, Sumberagung	2.5
2	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Rejeki	Sumber, Sumberagung	3,5
3	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudyo Makmur	Ponggok, Trimulyo	1,5
4	Kel. Agribisnis Penangkaran Madya	Jayan, Imogiri	1
5	Kel. Agribisnis Penangkaran Paker	Paker, Mulyodadi	1
6	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Makmur	Gulon, Srihardono	2
7	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak, Sumberagung	4,5
8	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Lestari	Pangkah, Tirtosari	1
9	Kel. Agribisnis Penangkaran Tani Mulyo	Kersan, Timbulharjo, Sewon	1,5
	Jumlah		**18.5**

Sumber: Diperpautkan, 2019

Pada tahun 2019, UPT BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 14,700 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan. Target produksi tahun 2019 adalah 166.600 kg. Produksi benih padi tahun 2019 sebanyak 168.360 kg, meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 147.355 Kg. kenaikan 21.005 kg atau sekitar 0.14 %.Produksi benih di BBP Barongan dapat dilihat pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98 Produksi Benih Padi Tahun 2019

No.	Varietas	Jumlah Produksi (Ton)		Total (Ton)
		Bd	Bp	
1	Inpari 30	-	13.080	13.080
2	Inpari 23 Bantul	3.180	30.365	33.545
3	Situ Bagendit	2.875	27.325	30.200
4	Inpari 24 Gabusan	-	5.560	5.560
5	Ciherang	1.465	21.170	22.635
6	Pepe	2.755	26.520	29.275
7	Mekongga	1.240	28.080	29.320
8	Inpari 33	595	-	595
9	Sunggal	2.590	-	2.590
10	Inpari 42	-	1.560	1.560
Jumlah		14.700	153.660	168.360

Sumber: Diperpautkan, 2019

d) Pengendalian dan Perlindungan

Gangguan atau ancaman pada tanaman dapat berupa jasad penganggu atau organisme penganggu tanaman (OPT), keadaan cuaca/iklim, keadaan tanah, maupun kesalahan dalam budidaya tanaman pertanian. Organisme penganggu tanaman (OPT) merupakan faktor pembatas produksi

tanaman di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Kegiatan pengendalian dan perlindungan yang telah dilakukan antara lain Pelatihan Traps Barrier System (TBS), Pelatihan Pengendalian OPT dan Perlindungan Tanaman, Pelatihan Pengaruh Iklim Terhadap Tanaman, Workshop Pengendalian OPT, dan Gerakan Pengendalian OPT.

e) Pengembangan agribisnis pertanian

Tujuan kegiatan adalah bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian dan mendapatkan harga jual yang maksimal sehingga fokus utama kegiatan ini adalah terhadap penanganan pasca panen dan pemasaran dengan melalui pelatihan-pelatihan, pameran, serta pelaksanaan pasar tani. Keluaran kegiatan meliputi operasional kebun buah Mangunan, Pelatihan Pengolahan Hasil, Pelatihan Penanganan Pasca Panen, kegiatan promosi hasil pertanian, pengadaan baliho Kebun Buah Mangunan, dan Festival Pisang.

f) Pengembangan Agribisnis Tembakau

Dengan adanya pelatihan diharapkan petani dapat meningkatkan penanganan pasca panen tembakau sehingga meningkatkan pendapatan petani. Selain kegiatan pelatihan, pada tahun 2019 ini juga mengadakan studi lapangan ke Kabupaten Karanganyar. Studi lapangan ke Kabupaten

Karanganyar yang memiliki karakter yang hampir sama yaitu tembakau lokal, yang mana dikelompok Ngasem, Colomadu ini mengusahakan rajangan, asapan dan janturan. Gudang tembakau uang ada di Boyolali menerima tembakau asapan dan janturan untuk selanjutnya diproses di Yogyakarta sebelum dilakukan pengepakan di Jawa Timur lalu di distribusikan ke pasar terutama di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi Maluku dan Papua.

Capaian dari Program ini adalah peningkatan produksi maupun produktivitas pertanian/ perkebunan baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan dengan data-data sebagai berikut :

(1) Produksi Tanaman Pangan

Upaya yang dilakukagn demi peningkatan produktivitas ini diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian, pelatihandan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari on farm sampai dengan off farm, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan Organisme Penggangu Tanaman (OPT). Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP).

Gambar 3. 41 Gerakan Panen Padi di Kecamatan Sedayu dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi

Pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi padi sebesar 0.05 % atau turun sebesar 94 ton dibandingkan tahun 2018. Dari produksi padi sebesar 188.183 ton GKG menjadi 188.089 ton GKG. Penurunan produksi padi tahun 2019 ini disebabkan adanya kemarau yang cukup panjang. Produksi jagung pada tahun 2019 adalah 34.903 ton sedangkan tahun 2018 adalah 26.086 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami kenaikan yaitu sebesar 25,28 % atau naik sebesar 8.823 ton dibandingkan tahun 2018. Walaupun begitu, terjadi penurunan produktivitas yang disebabkan karena kekurangan air terutama masa pertumbuhan biji yang berakibat pada berkurangnya ukuran tongkol.

Pada tahun 2019 produksi kacang tanah sedikit mengalami penurunan produksi sebesar 0,074 % atau 3 ton dibandingkan

tahun 2018. Produksi kedelai, pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Penurunanan produksi kedelai mencapai 23,26 % atau 438 ton. Penurunan produksi kacang tanah dan kedelai ini di sebabkan karena faktor panjangnya musim kemarau selama tahun 2019, sehingga mengalami kemunduran tanam , dimana petani sudah menyiapkan benih siap tanam, tetapi hujan tidak kunjung turun. Faktor air yang menjadi sumber kehidupan tanaman kedelai dimana dibutuhkan pada saat masa pengisian polong tetapi tanaman kekurangan air , jadi pengisian polong tidak penuh sehingga menyebabkan produktivitasnya menurun.

(2) Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 3.99 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Bawang Merah,Cabai Merah,dan PisangTahun 2018-2019

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket
			2018	2019	
1	Bawang	Luas Panen	835	893	Ha
		Produksi	7.979,8	9.427	Ton
		Produktivitas	9,61	10,56	ton/ha
2	Cabai Merah	Luas Panen	402	298	Ha
		Produksi	7.979,8	1.166,41	Ton
		Produktivitas	4,79	3,91	Ton/ha

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket
			2018	2019	
3	Pisang	Produksi	5.902,90	5.211,40	Ton

Sumber: Diperpautkan, 2018 (**Angka Sementara)

Bawang merah mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan sebesar 18,14 % atau 1.447,2 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 9,9 %. Peningkatan produksi ini karena adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat. Akan tetapi, Produksi cabai merah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019.

Penurunan produksi ini disebabkan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Selain itu, pisang juga mengalami penurunan produksi sebesar 11,7 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 5.211,40 ton pata tahun 2019.

Penurunan produksi cabe dan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi. Kemarau panjang mengakibatkan pohon pisang kekurangan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun. Sementara itu, kemarau panjang menyebabkan kekurangan air yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan Cabe.

Akibatnya tanam Cabe menurun sebesar 25,87 % dari 402 Ha pada tahun 2018 menjadi 298 Ha pada tahun 2019.

(3) Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, tebu, dan kelapa.

Pada tahun 2019 produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 54,33 % atau 1571,7 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,95 ku/ha dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen pada tahun 2019 sebanyak 132 Ha. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 862,9 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,78 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2019.

2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Dalam upaya memberdayakan petani agar terjadi percepatan pencapaian kesejahteraan maka kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat strategis guna mentransfer ilmu pengetahuan teknologi untuk merubah sikap perilaku dan ketrampilan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan didukung dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 241.895.000,00.

Keluaran kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh, penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten dan kecamatan, pelatihan penyuluh swadaya, talk show media televisi, penyebaran informasi melalui media radio, penerbitan buletin Suluh Pangan dan koordinasi BPP dan manajemen teknologi.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sebaran penyakit ternak. Input yang mendukung tercapainya program ini adalah SDM peternakan, sarana dan prasarana peternakan dan anggaran sebesar Rp. 189.720.000,-. Output yang dicapai antara lain terlaksananya pelayanan kesehatan ternak melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), terlaksananya pemotongan hewan sesuai kaidah yang benar melalui UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH), peningkatan status kesehatan ternak. Outcome program adalah peningkatan status kesehatan hewan ternak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a) Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan

Keluaran kegiatan ini digunakan untuk operasional UPT Puskeswan diantaranya sebagai berikut :

(1) Penanganan kasus penyakit oleh UPT Puskeswan sebanyak 11.154 kasus, dari penanganan kasus tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bantul terdapat tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (helminthosis), avitaminosis, dan scabies.

(2) Pengadaan obat-obatan medis dan alat perlengkapan pelayanan kesehatan hewan.

b) Pendukung kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

(1) Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama).
(2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-morteminspection) dan pemeriksaan karkas,dan jeroan (pose-mortem inspection)untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia.
(3) Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortemguna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Adapun alasan tidak tercapainya PAD pada tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

(1) Sesuai dengan Perda maupun UU kami hanya melakukan menarikan retribusi sesuai dengan apa yang kami layani di RPH dan tidak

melakukan menarikan retribusi di luar RPH atau di TPH,sedangkan jumlah pemotongan di TPH lebih banyak daripada pemotongan yang di RPH sehingga jumlah perolehan PAD hanya sesuai dengan jumlah pemotongan yang dilakukan di RPH.

(2) Kapasitas pemotongan dan SDM di RPH yang sangat terbatas

(3) Sarana prasarana pemotongan yang masih konvensional tdk sesuai dengan standar tekhnis.

(4) Rencana relokasi yang sampai saat ini masih sebatas wacana dan belum juga terwujud memungkinkan masih banyaknya pemotongan yang dilakukan di TPH atau di rumah.

(5) Pengawalan perda tentang retribusi yaitu perda No.7 tahun 2011 masih lemah dan dukungan stekholder kurang maksimal.

c) Peningkatan Kesehatan Ternak

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

(1) Terlaksananya 14 kali sosialisasi penyakit hewan menular (Avian Influenza (AI), leptospirosis,anthrax, dan rabies),

(2) Desinfeksi dan pendistribusian desinfektan ke masyarakat/ Puskeswan,

(3) Vaksinasi avian influensa dan ND di 17 kecamatan sebanyak 97.000 dosis, AI Ayam 10.000 dosis, ND Ayam 28.000 dosis dan AI Itik 15.000 dosis.

(4) Pemeriksaan gangguan reproduksi dan ATR pada sapi sebanyak 500 ekor.

(5) Pemrosesan surat ijin praktik dokter hewan praktisi terhadap 7 permohanan ijin praktek,
(6) Monitoring peredaran obat hewan,
(7) Kegiatan ko-asistensi reproduksi bagi mahasiswa FKH UGM.

4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peternakan merupakan sektor yang ikut andil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul menjadi pemasok utama kebutuhan daging di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi ternak yang disembelih masih ada yang diambil dari daerah lain. Dari tahun ke tahun, populasi ternak yang ada di Kabupaten Bantul diharapkan semakin meningkat. Dalam mencapai tujuan program ini memanfaatkan beberapa input berupa SDM, sarana dan prasarana peternakan serta dukungan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 682.641.000,00. Outcome program berupa peningkatan produksi hasil peternakan dandilakukan antara lain melalui:

(1) Bimtek Pembuatan Pakan

Kegiatan Pembuatan Pakan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Kabupaten Bantul terutama dalam hal peternakan.

(2) Evaluasi kelompok dan petugas peternakan

Sebagai wujud penghargaan dan dalam upaya peningkatan semangat beternak, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program evaluasi petugas dan kelompok ternak.

(3) Pelaksanaan program UPSUS SIWAB Tahun 2019

Dalam rangka peningkatan populasi ternak guna mendukung swasembada daging Pemerintah Pusat

mengadakan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting). Program ini berlangsung sejak Tahun 2017 dan di tahun 2019, Kabupaten Bantul memperoleh target akseptor dari program ini sebanyak 27.000 dosis, target bunting 18.900 ekor dan lahir 15.120 pedet Dari target tersebut diperoleh realisasi akseptor sebanyak 37.258 (138%), bunting 20.732 (110%), dan lahir 16.492 (109%). Dan hasil dari program ini adalah kelahiran pedet atau penambahan populasi sapi di Kabupaten Bantul apabila di hitung menurut rupiah maka hasil kelahiran 16.492 ekor x Rp. 8.000.000 harga SNI anak sapi yaitu bisa membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul senilai Rp. 131.936.000.000 milyar.

(4) Penetasan

Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan mutu bibit ayam buras melalui kegiatan penetasan ayam buras menggunakan mesin tetas untuk menghasilkan Day Old Chicken (DOC) yang berada di Bakulan Wetan, Patalan, Jetis.

Tabel 3.100 Laporan PAD Penetasan Ayam Buras

No	Telur Masuk	Telur Menetas	Penjualan DOC	Jumlah PAD yang diperoleh (Rp)	Target PAD Tahun 2019 (Rp)
1	33.000	16.649	16.649	70.249.100	55.000.000
				127,27 %	

Sumber: Diperpautkan, 2019

(5) Pengawasan dan pengujian terhadap sampel pakan ternak yang beredar di Kabupaten Bantul.

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dan didukung dengan SDM, teknologi dan anggaran sebesar Rp. 355.343.750,00 Keluaran dari kegiatan ini adalah :

(1) Pengawasan peredaran dan pemeriksaan daging meliputi pemeriksaan daging sapi, daging kambing, dan daging ayam;

(2) Selama Tahun 2019 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan telah memeriksa 120 sampel daging ayam dengan pemeriksaan uji TPC (Total Plate Count) untuk mengetahui jumlah total mikroba pada sampel.

(3) Di Kabupaten Bantul terdapat + 10 orang pemelihara sapi perah yang aktif berproduksi telah diambil sampel sejumlah 50 sampel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Baik	:	8 sampel
Cukup	:	32 sampel
Jelek	:	10 sampel

(4) Pengawasan produk pangan asal hewan, yang meliputi pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium terhadap bakso. Pengawasan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan bahan yang menyebabkan pangan tersebut kehilangan keutuhannya.

(5) Sosialisasi peduli ASUH, dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan total peserta 325 orang dari pelaku usaha pangan asal hewan, peternak, dan ibu rumah tangga yang terlibat langsung dalam penyediaan pangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan asal hewan. (ASUH akronim dari Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

(6) Bimbingan teknis pemotongan hewan kurban bagi takmir merupakan agenda tahunan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran Hari Raya Idhul Adha 1440 H, diikuti oleh 150 orang peserta.

(7) Koordinasi petugas pemantau dan pemeriksa hewan qurban demi kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hewan qurban.

(8) Dalam kegiatan ini disampaikan pengenalan produk peternakan, sosialisasi pentingnya produk peternakan serta promosi produk peternakan. Pemberian bahan percontohan untuk gemar konsumsi produk peternakan berupa pemberian paket produk olahan peternakan. Acara Launching Promosi produk peternakan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019 di SD Negeri 1 Sumberagung oleh Perwakilan Bapak Bupati Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi dilakukan selama bulan Juli – September 2019 di 29 Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bantul dengan total 3.471 paket produk peternakan. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin gemar mengkonsumsi produk peternakan asli Bantul sehingga tujuan Bantul sehat, cerdas, sejahtera dapat direalisasikan

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan populasi ungags. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Dari tabel di atas diketahui adanya penurunan jumlah kasus AI dari 2018 ke 2019. Hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat tentang bagaimana cara menangani kasus tersebut dengan adanya binaan dari petugas PKH maupun Dinas terkait. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi daging dan telur. Kenaikan produksi daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 2,51% dari tahun 2018. Produksi daging dan telur mengalami peningkatan pada tahun 2019. Produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2018 yang disebabkan karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung produksi pertanian. Dalam mencapai tujuan program ini memanfaatkan beberapa input berupa SDM, sarana dan prasarana pertanian serta dukungan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp

3.186.958.750,00. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini meliputi kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian, dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian.

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian bertujuan untuk menyediakan prasarana pertanian guna mendapatkan produktivitas yang optimal. Adapun keluaran kegiatan meliputi Sosialisasi Pembiayaan Pertanian, Evaluasi LKMA PUAP, Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A, dan Sekolah Lapang Iklim. Selain itu, pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi :

Tabel 3.101 Pembangunan Jaringan Irigasi (PIK)

No	Kelompok	Alamat
1	Kelompok Tani Putra Mandiri	Bongos I, Gadingsari, Sanden
2	Gapoktan Ngupoyo Boga	Gadingsari, Sanden

Sumber: Diperpautkan, 2019

Tabel 3.102 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)

No	Kelompok	Alamat
1	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Karanganom, Sitimulyo, Piyungan
2	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Wanujoyo Kidul, Srimartani, Piyungan
3	Kelompok Tani Guyup Rukun	Pangkah/Kabregan, Srimulyo, Piyungan
4	Gabungan Kelompok Tani Tri Manunggal Sedyo	Triharjo, Pandak
5	Kelompok Tani Rahayu	Krekah, Gilangharjo, Panda
6	Kelompok Tani Manunggal	Banjarwaru, Gilangharjo, Pandak
7	Kelompok Tani Cawan	Cawan, Argodadi, Sedayu

8	Kelompok Tani Kismo Dadi	Sungapan Dukuh, Argodadi, Sedayu
9	Kelompok Tani Demangan	Demangan, Argodadi, Sedayu
10	Kelompok Tani Ngudi Lestari	Lanteng II, Selopamioro, Imogiri

Sumber: Diperpautkan, 2019

Tabel 3.103 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (SILPA DAK)

No	Kelompok	Alamat
1	Kelompok Tani Sido Dadi	Cikal, Srimulyo, Piyungan
2	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Jaten, Sendangsari, Pajangan
3	Kelompok Tani Bareng Mukti	Ponggok, Sidomulyo, Bambanglipuro
4	Kelompok Tani Sedyo Manunggal	Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro
5	Kelompok Tani Setia	Nogosari I, Wukirsari, Imogiri

Tabel 3.104 Pembangunan DAM Parit (SILPA DAK)

No	Kelompok	Alamat
1	Kelompok Tani Sido Makmur	Sanggrahan II, Muntuk, Dlingo
2	Kelompok Tani Sido Maju	Saradan, Terong, Dlingo

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian dialokasikan untuk pelatihan operasional Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Kegiatan Pelatihan Alat Mesin Pertanian meliputi tiga jenis alat (rice transplanter dan combine harvester) dilaksanakan sebanyak 2 kali dan traktor rotary dilaksanakan 1 kali.

a. Pemasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pertanian.

Tabel 3.105 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanian

No.	Permasalahan	Solusi
1	Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyakan demplot dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan minat petani untuk menerapkan teknologi baru
2	Regenerasi petani yang lambat	Sosialisasi, pembentukan dan pelatihan taruna tani Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani
3	Akses pasar belum mantap dan skala masih kecil	Pelatihan tentang pemasaran sehingga meningkatkan pengetahuan tentang strategi menembus pasar Dukungan terhadap terciptanya akses pasar dengan menjalin kemitraan
4	Alih fungsi lahan pertanian.	Percepatan Perda LP2B dan Sertifikasi gratis lahan pertanian
5	Belum optimalnya penanganan pascapanen.	Pelatihan penanganan pasca panen Dukungan terhadap inovasi baru dalam pengolahan hasil panen
6	Manajemen pengelolaan peternakan belumoptimal.	Optimalisasi pengelolaan peternakan.

Sumber: Diperpautkan, 2019

22. KEHUTANAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, di dalam LKPJ ini, urusan kehutanan tidak dibahas lagi.

23. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

a. Program yang Dilaksanakan

Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri dilaksanakan memalui pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) berupa sosialisasi dan fasilitasi standarisasi produk industri dengan anggaran sebesar Rp585.700.000,00.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan berbagai permasalahan program dalam urusan energi dan sumberdaya mineral beserta solusi yang sudah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kesil Menengah dan Perindutrian (KUKMP) Kabuapten Bantul tahun 2018.

Tabel 3.106 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Permasalahan	Solusi
1	Data potensi energi terbarukan belum lengkap	Dilakukan kegiatan kajian potensi energi listrik dari tenaga air BendungTegal
2	Data kebutuhan Gas LPG untuk industri belum lengkap	Dilakukan kegiatan kajian kebutuhan Gas LPG untuk industri di Kabupaten Bantul
3	Distribusi Gas LPG yang kurang merata pada musim liburan hari raya keagamaan dan tahun baru menyebakan peningkatan harga yang sangat tinggi	Dilakukan rapat koordinasi untuk mengatasi masalah distribusi dan kenaikan harga dengan berbagai pemagku kepentingan

Sumber: Diperpautkan, 2019

24. **PERDAGANGAN**

a. Program dan Kegiatan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a) Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi/ Pengusaha

b) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk;

b) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang

c) Kegiatan Peningkatan pelayanan Perdagangan

4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

a) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

b) Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5) Program Pemberdayaan Pedagang

a) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar

6) Program Penataan Pasar Rakyat

a) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat

b) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI

c) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

d) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Maksud dan tujuan program ini adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi untuk meningkatkan jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang . Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1,628,020,760 dan terealisasi sebesar Rp 1,574,654,223 atau 9,8 %.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Pembangunan Gedung yang mendukung pelayanan.

Alokasi Anggaran	:	Rp 1.628.020.760,-
Realisasi Anggaran	:	:Rp1.574.654.223,- (96,72%).

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.510.315.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.502.871.750 atau 99,51%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

(2) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/ Asosiasi/Pengusaha

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai ekspor dari para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran : Rp 229.300.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 226.207.000,- (98,65%)

b) Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Ekspor merupakan tolok ukur pasar produk dalam negeri yang diminati publik. Dengan meningkatnya kualitas produk daerah (dalam negeri) dan meningkatkan SDM pelaku usaha, agar mampu bersaing dalam pangsa pasar dalam dan luar negeri. Sangat dibutuhkan adanya pelatihan dan promosi untuk memperkenalkan produk daerah di pasaran dunia

Alokasi Anggaran : Rp 1.281.015.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 1.276.664.750,- (99,66%)

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Maksud dan tujuan program ini adalah mengendalikan kenaikan harga terutama harga bahan pokok. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 148.783.000 dan terealisasi sebesar Rp 148.668.500 atau 99,92%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Alokasi Anggaran : Rp 69.842.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 69.758.000,- (99,88%).

b) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem Resi Gudang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tunda jual hasil panen yang diresikan di gudang SRG

Alokasi Anggaran : Rp 35.770.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 35.770.500,- (100%)

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin keamanan produk yang diperdagangan di masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen

Alokasi Anggaran :Rp 43.170.000,-

Realisasi Anggaran :Rp 43.140.000,- (99,93%)

4) Program-Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul. .Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.584.759.500 dan terealisasi sebesar Rp 1.468.767.301 atau 92,68%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lebih mengkhususkan pada prioritas pembangunan tempat untuk berjualan para Pedagang Kaki Lima.

Alokasi Anggaran : Rp 832.975.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 747.257.000,- (89,71 %).

b) Kegiatan Pemberdayan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melengkapi bangunan atau tambahan sarana pendukung fasilitas menjadi lebih lengkap sehingga dapat menjadi daya tarik pembeli

Alokasi Anggaran : Rp 751.784.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 721.510.300,59 (95,97%).

5) Program Pemberdayaan Pedagang

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan omzet pedagang pasar melalui promosi pasar dan pendampingan APPSI. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.158.119.671 dan terealisasi sebesar Rp 1.142.285.200 atau 98,63%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

d) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan SDM Para Pedagang Rakyat khususnya dalam hal pengelolaan APPSI agar lebih berdaya dalam turut serta mengelola pasar rakyat bersama sama dengan Pengellola pasar dari Dinas Perdagangan.Dengan pelatihan ini diharapkan dapat melatih kemandirian APPSI dalam mengatasi permasalahan permasalahan kecil yang ada di Pasar Rakyat.

Alokasi Anggaran Rp 1.158.119.671,-

realisasi Anggaran Rp 1.142.285.200,- atau (98,63%).

6) Program Penataan Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kondisi pasar dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 8.477.466.161 dan terealisasi sebesar Rp 8.283.482.174 atau 98%.

Program Penataan Pasar Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran : Rp 4.792.158.535,-
Realisasi Anggaran : Rp 4.720.245.074,- (98,50%)

b) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat ber SNI

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi Kualitas Pasar Rakyat Imogiri

Alokasi Anggaran : Rp 40.429.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 31.750.600,- (78,53%)

c) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul

Alokasi Anggaran :Rp 3.400.000.000,-

Realisasi Anggaran :Rp 3.293.315.000,- (96,86%)

d) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi peningkatan pendapatan pasar.

Alokasi Anggaran : Rp 244.878.626,-

Realisasi Anggaran : Rp 238.171.500,- (97,26%)

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.107 Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	• Terjadinya gejolak harga cabai karena kurangnya pasokan • Gejolak harga bawang merah (produksi Bantul) kalah bersaing dengan kualitas kompetitor	• Meningkatkan pasokan dengan kemitraan dengan pelaku usaha. • Fasilitasi dengan stakeholder/shareholder dalam memberikan nilai tambah produk cabai merah • Revitalisasi Pasar Lelang Bawang Merah di Parangtritis, Kretek
2	Fungsi gudang dengan mekanisme resi belum optimal	• Evaluasi pengelola gudang SRG • Optimalisasi pengelolaan gudang SRG
3	Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum bisa dilaksanakan oleh Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan	• Kemitraan dengan kominfo dalam penyediaan jaringan internet • Peningkatan kapasitas admin sibapok untuk 5 pasar sampel (Pasar Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri, Pijenan) • Monev kegiatan sibapok di 5 pasar sampelm
4	Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	Revitalisasi PSG : • Peningkatan Sarpras (panggung hiburan, public area, industri pariwisata, relokasi PKL) → kemitraan/program kolaboratif • Pengelolaan pedagang • Peningkatan kapasitas pengelolaan PSG (aspek product, harga product, aspek promosi, aspek tempat)
5	• Tidak bertambahnya/berkurangnya pengunjung pasar • Kurangnya daya saing pedagang pasar dengan toko modern dan pedagang keliling	• regulasi perubahan jam operasi pasar • promosi pasar antara lain melalui undian berhadiah dan promo/diskon secara berkala mendorong pedagang pasar untuk melakukan inovasi teknik berjualan
6	• Empat puluh satu persen (13 pasar) dalam kategori kurang baik • Enam persen (2 pasar) dalam kategori rusak	• Rehab sedang untuk Pasar Bantul, Pasar Niten, Pasar Piyungan, Pasar Sorobayan, Pasar Pijenan, Pasar Jodog, Pasar Turi, Pasar Pundong, Pasar Gatak, Pasar Barongan, Pasar Dlingo, Pasar Pleret dan Pasar Klitikan Niten • Rehab berat untuk Pasar Mangiran dan Pasar Gumulan
7	Tiga puluh delapan persen (32 pasar) Penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean	• Fasilitasi penguasaan kepemilikan tanah kas desa dan Sultan Ground untuk pasar rakyat dan kawasan PKL. • Sewa tanah kas desa untuk pasar rakyat
8	Penataan dan pemanfaatan los pasar bantul lt.2 belum optimal	Revitalisasi Lt.2 Pasar Bantul
9	Penyelenggaraan kemetrologian yang belum optimal	• Updating data wajib tera • Sosialisasi

No.	Permasalahan	Solusi
		• Pengawasan kemetrologian • Peningkatan kapasitas untuk SDM • Penyempurnaan gedung metrologi • Pengadaan alat standar kemetrologian

Sumber: Diperpautkan, 2019

25. PERINDUSTRIAN

a. Program dan Kegiatan

1) Program Penataan Struktur Industri

a) Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri

2) Program Pegembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

a) Pemberdayaan IKM Sentra

3) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

a) Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul

b) Pengembangan dan Pemberdayaan IKM

c) Pengembangan Pemasaran IKM

d) Pengembangan Industri Kreatif

4) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

a) Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri

Kawasan Industri Piyungan yang sedang dikembangkan di wilayah Desa Srimulyo Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan bisa dikonsep menjadi penampung produk para industri kecil menengah yang ada di kabupaten Bantul, untuk mendorong pertumbuhan industri kecil dan mengurangi angka kemiskinan.

Adapun pada Program penataan struktur industri dengan indikator kinerja program Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri pada tahun 2019 dengan target 2 IKM, dan terealisasi 2 IKM atau tercapai 100% dan Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan indikator kinerja program Presentase nilai produksi pada tahun 2019 dengan target 5 %, dan terealisasi 5% atau tercapai 100%

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Penataan Struktur Industri

a) Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri

Maksud dari Kegiatan ini adalah meningkatkan nilai produksi serta jumlah industri kecil menengah di dalam sentra dan tersedianya infrastruktur industri di kawasan peruntukan industri.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

(1) Peningkatan teknik produksi dan kelembagaan bagi industri kecil menengah di dalam sentra dan pelatihan bagi kelompok industri kecil menengah yang berpotensi menjadi sentra ikm.

(2) Peningkatan akurasi data IKM Sentra dan program pengembangannya.

(3) Terbukanya pasar bagi IKM.

2) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Maksud dari Program ini adalah Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah di Kabupaten Bantul sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian agar industri kecil menengah dapat tumbuh dan berkembang dan atau secara keekonomian dapat bertahan.

a) Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra

Maksud dari kegiatan ini untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini dilaksanakan untuk mempersiapkan IKM dalam menghadapi persaingan global sehingga IKM bisa dan mampu bersaing baik dari kompetensi, kualitas, dan terutama teknologi di era industry 4.0. Industri Kecil Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan dan membangun ekonomi kerakyatan, sehingga sumber daya manusia, teknologi dan kualitas produk perlu terus ditingkatkan. Program ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.113.965.000,- Adapun keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan IKM Melalui Dekranasda Kabupaten Bantul

Maksud kegiatan Pembinaan IKM melalui Dekranasda Kabupaten Bantul melalui beberapa sub kegiatan Pameran produk IKM melalui even pameran Inacraft di Jakarta, Pameran produk IKM melalui even pameran Kriyanusa di Jakarta, Pameran produk IKM melalui even pameran Bantul Ekspo di Bantul, Pameran produk IKM melalui even pameran korwil Dekranasda Kecamatan di Mall Malioboro, dan Kegiatan Workshop Dekranasda Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan kesempatan bagi IKM dalam promosi produknya, perluasan akses pasar serta peningkatan kesejahteraan IKM.

Tujuan dari kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan IKM ini adalah

(1) Meningkatkan akses pasar bagi IKM
(2) Meningkatkan kesejahteraan IKM dan masyarakat setempat.
(3) Meningkatkan perekonomian daerah.

Maksud kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan IKM dengan sub kegiatan Pelatihan Industri Produk Pangan dan Produk Fungsional adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan, ketrampilan dan penumbuhan IKM/wirausaha baru, perluasan akses pasar serta pengurangan angka kemiskinan.

b) Pengembangan Pemasaran IKM

Maksud kegiatan Pengembangan Pemasaran IKM melalui beberapa sub kegiatan Pameran produk IKM melalui even pameran Crafina dan Pameran Indonesia Fashion Week di Jakarta. adalah untuk memberikan kesempatan bagi IKM dalam promosi produknya, perluasan akses pasar serta peningkatan kesejahteraan IKM.

Tujuan dari kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan IKM ini adalah:

(1) Meningkatkan akses pasar bagi IKM
(2) Meningkatkan kesejahteraan IKM dan masyarakat setempat.
(3) Meningkatkan perekonomian daerah

Gambar 3. 42 Pameran Inacraft, Jakarta Convention Center

Pameran TTI Expo, Pameran ini adalah pameran berskala Nasional yang dilaksanakan di Jogja City Mall, dengan peserta pameran IKM Makanan antara lain : Omah Cokla tJogja, Emping Rendah Purin Bu Marto, dan Keripik Bonggol Pisang Al-Barik.

Gambar 3. 43 Pameran Intradex Expo, Mal Panakukkang Makassar

Tabel 3.108 Realisasi Anggaran Pada Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

No	Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
1	Pembinaan IKM melalui Dekranasda Kabupaten Bantul	365.710.000	360.675.000	99
2	Pengembangan Industri Kreatif	144.025.000	134.900.000	94
3	Pengembangan Pemasaran IKM	222.750.000	216.300.000	97
4	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	402.940.000	402.090.000	97
	Jumlah	1.135.425.000	1.113.965.000	98

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 2019

Upaya untuk meningkatkan peran sektor perindustrian, Kabupaten Bantul telah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

potensial di wilayah Kecamatan Piyungan, Sedayu dan Pajangan. Upaya ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik Perangkat Daerah, Asosiasi Industri maupun stakeholder lain untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada tahun 2019 telah ditargetkan bahwa pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020 telah selesai dibebaskan dua persil tanah untuk pembangunan jalan akses Kawasan Peruntukan Industri Piyungan. Selanjutnya di Tahun Anggaran 2020 akan dimulai bangun jalan akses tersebut.

c) Pengembangan Industri Kreatif

Maksud kegiatan Pengembangan Industri Kreatif melalui beberapa sub kegiatan antara lain Pameran APKASI OTONOMI EXPO melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta, Focuss Group Discussion Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul dengan mengundang akademisi, masyarakat, pegiat industry, pariwisata dan kebudayaan, serta stake holder terkait; Rapat Koordinasi Wilayah APKASI DIY yang membahas tentang project strategis terkait pengembangan industry kreatif dan ekonomi kreatif.

4) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Maksud dari Program ini adalah untuk pengembangan kapasitas sistem produksi pada industri sebagai upaya peningkatan daya saing dan ketahanan/keberlanjutan industri.

a) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri

Maksud dari Kegiatan ini adalah Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah di Kabupaten

Bantul sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yaitu dengan Standarisasi dan sertifikasi produk agar industri kecil menengah mempunyai daya saing yang meningkat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

(1) Daya saing IKM meningkat;
(2) Peningkatan Mutu produk industri
(3) Terbukukanya pasar bagi IKM yang telah bersertifikasi;
(4) Konsumen lebih terlindungi akan mutu barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan
(5) Terlindunginya kekayaan intelektual IKM Bantul

Program yang disupport anggaran sebesar Rp.252.530.000,00 mampu terealisasi Rp244.330.000,00 atau 98% anggaran karena adanya efisiensi pada berbagai unsur sub kegiatan.

b) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil tembakau

Temu IKM dan Perusahan Rokok yang ada di Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Juli 2019 di RosIn Hotel BantulProgram yang disupport anggaran sebesar Rp.18.800.000,00 mampu terealisasi Rp.16.800.000,00 atau 89%.

Besarnya anggaran yang dipergunakan untuk pengembangan kebijakan dan kerjasama industri tahun 2018 sebesar Rp.730.761.500,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp.679.451.620,00 dengan serapan 92% anggaran karena dilakukan efisiensi

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.109 Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perindustrian

Tahun 2019

NO	Permasalahan	Solusi
1.	Perkembangan sentra dan industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah belum optimal	Dilakukan identifikasi potensi daerah yang bisa dijadikan basis Industri Kecil dan Menengah
2.	Keterbatasan pemenuhan bahan baku	Peningkatan kerjasama antara dengan model hexahelic (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha/asosiasi, Pelaku Usaha, Mass Media, Masyarakat, Dunia Pendidikan)
3.	Belum optimalnya perkembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu- Pajangan	Peningkatan sarana dan infrastruktur KPI Piyungan guna memudahkan akses dalam melakukan usaha dan untuk menarik minat para investor dan melaksanakan review Master Plan KPI Sedayu - Pajangan
4.	Data Industri dan Industri Kreatif belum aktual dan faktual	Dilaksanakan updating data Industri dan Industri Kreatif

26. TRANSMIGRASI

a. Program dan Kegiatan

1) Program Transmigrasi Umum

a) Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

b. Realisasi dan Pelaksanaan Program

1) Program Transmigrasi Umum

Maksud dan Tujuan Program ini adalah meningkatkan kesehjateraan masyarakat, mendukung pemerataan pembangunan daerah dan mengurangi kemiskinan.

Program ini menyerap anggaran sejumlah Rp. 445.426.500dan terealisir sebesar .Rp.419.027.650,00(APBD) atau 94 %. Program transmigrasi umum menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan.

Kegiatan ini menyerap anggaran sejumlah Rp. 445.426.500dan terealisir sebesar .Rp.419.027.650,00(APBD) atau 94 %.

Adapun rincian kegiatan tersebut :

(1) **Penyuluhan**

Dalam rangka pengenalan dan publikasi masalah ketransmigrasian, penyuluhan dilaksanakan baik melalui pertemuan kelompok, perorangan maupun kepada masyarakat sasaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingpembangunan transmigrasi sehingga

terbentuk anggapan positif masyarakat terhadap pembangunan transmigrasi.

Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan penyuluhan secara langsung yang meliputi penyuluhan tingkat pedukuhan sebanyak 13 kali serta penyuluhan tidak langsung yang dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat desa sebanyak 8 kali dan siaran radio sebanyak 3 kali, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian tingkat kecamatan 2 kali, Edukasi (KIE) ketransmigrasian tingkat kabupaten 1 kali.

(37) Pelatihan dan pendikan calon transmigran;

Pendidikan dan pelatihan calon transmigran sangat perlu dilaksanakan guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada calon transmigran sehinggapengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh selama latihan menjadi bekal dan benar-benar dapat diterapkan di lokasi transmigrasi.Pada tahun 2019 kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran dilaksankan sebanyak satu angkatan dengan sasaran 25 Kepala Keluarga (KK).

(38) Penjajagan dan cheking lokasi;

Pada tahun 2019 kegiatan penjajagan dilakukan sebanyak empat kali dan *checking* ke lokasi transmigrasi dilaksanakan sebanyak lima kali. Melalui kunjungan langsung untuk melihat kondisi lokasi transmigrasi yang akan ditempati. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan apakah lokasi sudah memenuhi syarat sebagai lokasi transmigrasi yaitu

sudah *clear and clean* (2C) serta memenuhi 3L (layak huni, layak usaha, dan layak berkembang).

(39) Pembinaan calon transmigran;

Sub Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantapan kesiapan calon transmigran dan keluarganya selama waktu menunggu pemberangkatan ke lokasi transmigrasi.Para calon transmigran terus diberikan pembinaan agar motivasi untuk mengikuti program transmigrasi tetap terjaga sampai mereka siap untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Pembinaan calon transmigran untuk tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 13 kali

(40) Penampungan calon transmigran;

Penampungan dilaksanakan sebelum calon transmigran diberangkatkan ke lokasi transmigrasi dengan tujuan untuk mengecek kembali atau seleksi terakhir di tingkat kabupaten serta mengecek berapa orang anggota yang diajak serta berapa banyak barang yang akan dibawa.

(41) Pelepasan dan pengawalan calon transmigran;

Pelepasan transmigrasi dilaksanakan oleh Bupati Bantul sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada warga calon transmigran yang telah siap meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengubah nasib di lokasi transmigrasi.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Transmigrasi.

Tabel 3.110 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Transmigrasi

Tahun 2019

No.	Permasalahan	Solusi
1	Alokasi penempatan transmigran tidak sesuai dengan animo calon transmigran	Memberiakan gambaran lokasi daerah tujuan melalui penyuluhan, dan penjajjakan kerja sama ketransmigrasian ke daerah tujuan baru
2	Adanya kebijakan untuk menangguhkan pola *costsharing*	Konsultasi ke pusat untuk membuka kembali peluang keberlanjutan *cost sharing*

C. FUNGSI PENUNJANG

27. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Data/Informasi

a) Kegiatan penyusunan dan pengelolaan data daerah;

b) Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

2) Program Kerjasama Pembangunan

a) Kegiatan penelitian dan pengembangan

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Kegiatan perencanaan penganggaran;

b) Kegiatan perencanaan pembangunan sektoral;

c) Kegiatan perencanaan pembangunan kewilayahan.

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Kegiatan perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri;

b) Kegiatan perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam.

5) Program Perencanaan Sosial Budaya

a) Kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan;

b) Kegiatan perencanaan pembangunan pemberdayaan pasyarakat;

c) Kegiatan perencanaan pemabngunan kesejahteraan masyarakat.

6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

a) Kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah.

7) Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
   a) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
8) Program Sistem Inovasi Daerah
   a) Kegiatan pengembangan system inovasi daerah.
9) Program Peningkatan Akuntabilitas SIstem Kinerja Pemerintah Daerah
   a) Kegiatan penguatan akuntabiitas knierja pemerintah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pada Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Data/Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan

Program Pengembangan Data/Informasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyusunan dan pengelolan data daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini mengkompilasi data & informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akurat

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu penyusunan profil daerah dan penyusunan dokumen SIPD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp188.370.000,- terealisasi sebesar Rp176.110.000,- atau 93.492%

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan profil daerah;

(2) Penyusunan dokumen SIPD.

b) Kegiatan Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD

Kegiatan ini hanya ada satu sub kegaiatan yaitu penyusunan LKPJ. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar 164.400.000,- terealisasi sebesar Rp161.950.000,- atau 98.510%

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan LKPJ

2) Program Kerjasama Pembangunan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan persentase dokuman kerjasama daerah.

Program Kerejasama Pembangunan ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp287.275.000,- terealisasi sebesar Rp285.302.500,- atau 99.313%.

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.

Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan penganggaran;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.128.150.000,- terealisasi sebesar Rp 1.006.540.800,- atau 94.539%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
(2) Musrenbang kabupaten;
(3) Konsinyering perencanaan;
(4) Bimtek e-planning aplikasi SEPAK@T;
(5) Penyusunan Perbup SEPAK@T.

b) *Kegiatan perencanaan pembangunan sektoral*

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya konsistensi dokumen perencana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp195.099.500,-terealisasi sebesar Rp193.094.500,- atau 98.972%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan dokumen Renja PD;
(2) Bimtek e-Proposal;
(3) Bimtek Simlaras;
(4) Kajian perencanaan pembangunan;
(5) Konsinyering penyusunan Renja PD.

c) *Kegiatan perencanaan pembangunan kewilayahan*

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp271.800.000,- terealisasi sebesar Rp265.784.500,- atau 97.787%.

d) *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan ekonomi dalam pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

(1) Kegiatan perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp723.255.000,-

terealisasi sebesar Rp710.572.000,- atau 98.246%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);

(2) Penyusunan studi perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri.

(2) Kegiatan perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi peencanaan ketahanan pangan dan SDA. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp397.355.700,- terealisasi sebesar Rp391.678.700,- atau 98.571%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penguatan kelembagaan GP3A/IP3A (17 kelompok);

(2) Penyusunan studi perencanaan ketahanan pangan dan SDA.

e) *Program Perencanaan Sosial Budaya*

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan Sosial dan Budaya.

Program Perencanaan Sosial Budaya dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

(1) Kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp215.075.000,- terealisasi sebesar Rp179.226.200,- atau 83.332%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan dokumen studi IGI;
(2) Penyusunan RAD Kependudukan;
(3) Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan perencanaan pembangunan pemberdayaan pasyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp419.725.000,- terealisasi sebesar Rp401.548.000,- atau 95.66%.

Kegiatan perencanaan pemabngunan kesejahteraan masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesejahteraan rakyat.. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar

Rp415.290.000,- terealisasi sebesar Rp383.455.000,- atau 92.334%.

f) *Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam*

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

(1) Kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui satu sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp898.650.000,- terealisasi sebesar Rp819.496.500,- atau 91.192%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa: Penyusunan studi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah.

g) *Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah*

Maksud dan tujuan program ini adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

(2) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya capaian daerah di RKPD dengan predikat tertinggi . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp133.780.000,- terealisasi sebesar Rp125.465.000,- atau 93.785%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan laporan DAK;
(2) Penyusunan evaluasi hasil RKPD;
(3) Peyusunan hasil evaluasi RPJMD.

h) *Program Sistem Inovasi Daerah*

Maksud dan tujuan program ini adalah mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah, lembaga (litbang, pendidikan, dunia usaha), dan masyarakat..

Program Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

(1) Kegiatan pengembangan sistem inovasi daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya IPTEKMAS yang diterapkan di masyarakat . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3

(tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp207.720.000,- terealisasi sebesar Rp198.070.000,- atau 95.354%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan Jurnal Riset Daerah;
(2) Koordinasi implementasi roadmap SIDa;
(3) Jumlah pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi.

i) *Program Peningkatan Akuntabilitas SIstem Kinerja Pemerintah Daerah*

Maksud dan tujuan program ini adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Program Peningkatan Akuntabilitas SIstem Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

(2) Kegiatan penguatan akuntabiitas knierja pemerintah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi dan koordinasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp726.409.000,- terealisasi sebesar Rp680.685.200,- atau 93.706%.

Keberhasilan perencanaan pembanguan daerah dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam era globalisasi dewasa ini dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan tugas teknis di bidangnya masing-masing guna mencapai pemerintahan yang efektif. Sadar akan pentingnya kapasitas SDM dalam era global ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai institusi pembantu bupati dalam urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan menempuh upaya melakukan pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan publik agar menjadi lebih baik.

Melalui program ini Bappeda melaksanakan audit manajemen mutu atau ISO 9001 2015 dan lolos mendapatkan sertfikat tersebut.

Gambar 3. 44 audit manajemen mutu atau ISO 9001 2015

2) Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mendapat peringkat pertama dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Gambar 3. 45 Juara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.111 Permasalahan Dan Solusi Urusan Perencanaan

No	Permasalahan	Solusi
1	Sistem aplikasi terintegrasi belum bisa mengendalikan kegiatan hanya masih untuk bekerja sebagai alat untuk membantu kegiatan	- Melakukan pengembangan aplikasi dengan berkoordinasi dan konsultasi Kemen.PAN dan BPPT sebagai pemilik aplikasi (MoU dengan Kemen PANRB, PKS dgn BPPT). - Bimtek dan pendampingan kepada Desa, dan PD.

28. KEUANGAN

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kegiatan Penyusunan analisa standar belanja
b) Kegiatan Penyusunan standar satuan harga
c) Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS
d) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
e) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
f) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
g) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
h) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
i) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
j) Kegiatan Peningkatan manajemen investasi daerah
k) Kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
l) Kegiatan Penyusunan anggaran kas
m) Kegiatan Penerbitan SPD
n) Kegiatan Penerbitan SP2D
o) Kegiatan TPTGR
p) Kegiatan Penyusunan neraca dinas / instansi
q) Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan
r) Kegiatan Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
s) Kegiatan Operasional pajak daerah

t) Kegiatan Penyusunan laporan semesteran
u) Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
v) Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
w) Kegiatan Pengendalian PAD
x) Kegiatan Optimalisasi pendapatan daerah
y) Kegiatan Pelayanan pajak daerah
z) Kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah
aa) Kegiatan Pendataan dan penetapan wajib pajak
bb) Kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
cc) Kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
dd) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
ee) Kegiatan Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
ff) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB P2
gg) Kegiatan Pengelolaan Belanja ASN
hh) Kegiatan Rekonsiliasi data laporan
ii) Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
jj) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

2) Program Pengelolaan Barang Daerah

a) Kegiatan Peningkatan SDM aparatur Pemda
b) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
c) Kegiatan Penataan aset
d) Kegiatan Penghapusan barang daerah
e) Kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
f) Kegiatan Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

g) Kegiatan Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

h) Kegiatan Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan penunjang keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah:

a) Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah ,

b) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis Akrual

c) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah

d) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

e) Penyerapan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan anggaran kas

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyusunan analisa standar belanja

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Implementasi ASB dalam penyusunan RKA sehingga diharapkan dengan adanya ASB ini belanja yang direncanakan akan lebih terukur. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp27.750.000,- terealisasi sebesar Rp700.000,- atau 2,52%.

b) Kegiatan Penyusunan standar satuan harga

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan Bupati tentang SHBJ

sebagai acuan OPD dalam penyusunan RKA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp136.000.000,- terealisasi sebesar Rp121.655.000,- atau 89,45 %.

c) Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun dokumen KUA-PPAS. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp137.500.000,- terealisasi sebesar Rp120.830.000,- atau 87,88 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Tahun 2019 adalah tahun pertama untuk BKAD dalam menyusun KUA-PPAS, sebelumnya kegiatan ini disusun oleh Bappeda. Alur penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan berawal dari RKPD dan Perubahan RKPD dari Bappeda yang sudah difinalkan, Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan dilakukan oleh tim yang terdiri dari TAPD beserta Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bantul yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur DIY.

d) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2020. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp116.375.000,- terealisasi sebesar Rp93.284.000,- atau 80,15 %.

e) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp105.675.000,- terealisasi sebesar Rp86.985.000,- atau 82,31%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

f) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 57.750.000,- terealisasi sebesar Rp52.867.500,- atau 91,54%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2019.

g) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp51.625.000,- terealisasi sebesar Rp49.170.000,- atau 95,24 %. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang perubahan APBD.

h) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul selama tahun anggaran. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp127.560.000,- terealisasi sebesar Rp123.427.500,- atau 96,76%.

i) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun penjabaran dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp61.380.000,- terealisasi sebesar Rp59.068.500,- atau 96,23%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Koordinasi, konsolidasi dan penyusunan uraian terperinci terkait pelaksanaan APBD di Kabupaten Bantul; dan

(2) Koordinasi dengan legislatif mengenai informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul.

j) Kegiatan Peningkatan manajemen investasi daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Pemanfaatan *idle cash.* Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp118.300.000,- terealisasi sebesar Rp98.005.000,- atau 82,84 %. kegiatan yang

dilaksanakan berupa peningkatan manajemen investasi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Selama tahun 2019 dari pemanfaatan uang daerah yang belum digunakan atau pemanfaatan *idle cash* yang telah diiinvestasikan dalam jangka pendek atau dalam bentuk deposito di 12 bank mitra bank telah diperoleh penerimaan bunga deposito sebesar Rp24.638.532.717,12.

Pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Gedung Mandala Sabha Komplek Parasamya telah dilaksanakan Penandatanganan MoU oleh Bupati Bantul Drs. H. Suharsono dengan 9 mitra perbankan. Dengan MoU tersebut diharapkan akan bersinergi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten dengan kepentingan bank dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Penandatangan MOu tersebut dilanjutkan dengan acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan 9 (sembilan) pimpinan mitra perbankan yaitu :

(1) Bank BPD DIY Cabang Bantul,
(2) Bank BTN,
(3) Bank BNI,
(4) Bank BRI,
(5) Bank Mandiri,
(6) Bank Mandiri Taspen,
(7) Bank Muamalat,
(8) Bank Woori Saudara, dan

(9) Bank Bukopin.

Sumber : DPKAD, 2019

Gambar 3. 46 Penandatangan PKS

k) Kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Pencermatan kesesuaian antara kode rekening dengan kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.000.000,- terealisasi sebesar Rp3.919.000,- atau 78,38 %.

Sejak Tahun 2019 telah digunakan aplikasi SEPAK@T untuk:

(1) Input anggaran kas atas pendapatan yang akan dicapai setiap triwulan bagi Perangkat Daerah penghasil

(2) Input belanja tidak langsung maupun belanja langsung oleh seluruh Perangkat Daerah setiap triwulan

l) Kegiatan Penyusunan anggaran kas

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah mengatur aliran kas masuk dan keluar. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.541.000,- atau 50,82 %.

m) Kegiatan Penerbitan SPD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menerbitkan SPD sesuai alokasi anggaran. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.320.000,- terealisasi sebesar Rp1.125.000,- atau 85,23 %.

Selama tahun 2019 telah diterbitkan 541 SPD dengan jumlah dana yang disediakan sebesar Rp2.565.728.756.991,- untuk 56 Perangkat Daerah dan PPKD.

n) Kegiatan Penerbitan SP2D

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempercepat penyerapan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp138.625.000,- terealisasi sebesar Rp108.647.500,- atau 78,38 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD. Selama tahun 2019 melalui kegiatan Penerbitan SP2D telah diterbitkan 8.413 SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan nilai bruto sebesar Rp2.121.356.445.411,22 yang terdiri dari :

(1) SP2D yang diterbitkan sebagai pembebanan anggaran belanja sebesar Rp2.073.423.073.301,22 ;dan
(2) SP2D bukan sebagai pembebanan anggaran belanja sebesar Rp47.933.372.110,-.

Dalam rangka mempermudahkan ketugasan tersebut tahun 2019 telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan aplikasi DTH RTH yang dipergunakan untuk menjembatani bendahara pengeluaran dalam pelaporan Daftar Transaksi Harian.

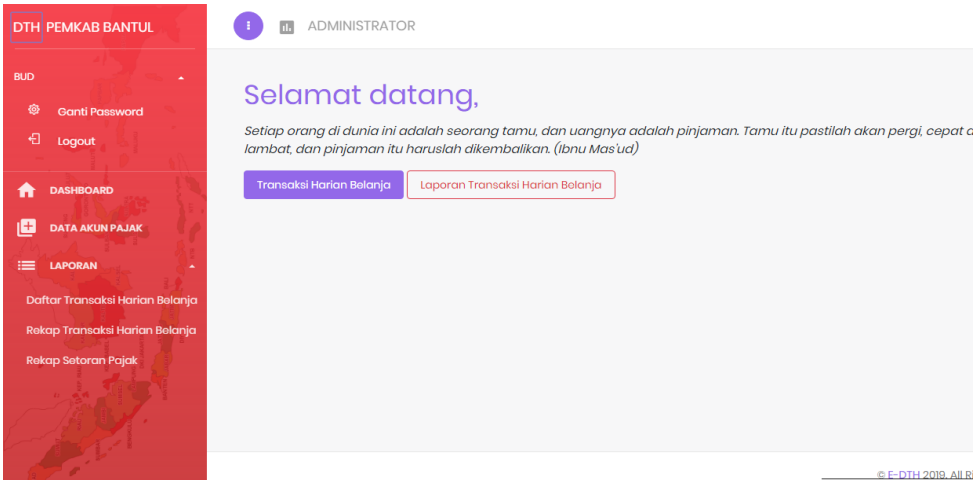

Sumber : DPKAD, 2019

Gambar 3. 47 Aplikasi DTH

o) Kegiatan TPTGR

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemantauan pemulihan kerugian daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp11.260.000,- terealisasi sebesar Rp5.779.000,- atau 51,32 %.

Sampai dengan semester II tahun 2019 terdapat 23 kasus senilai Rp720.318.000,00 termasuk angsuran kerugian daerah oleh mantan anggota DPRD periode tahun 1999-2000, telah disetor kerugian daerah ke Kas Daerah sebesar Rp301.704.372,45 selama tahun 2019.

p) Kegiatan Penyusunan neraca dinas / instansi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporannya di seluruh OPD di Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp25.950.000,00 terealisasi sebesar Rp13.706.600,00 atau 52,82 %.

q) Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendistribusikan form 1721A. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp67.750.000,- terealisasi sebesar Rp66.655.000,- atau 98,38 %. Pada kegiatan ini telah disusun formulir 1721-A2 sebanyak 11.283 dan penyusunan SPT masa bulan Desember 2018. Formulir ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai lampiran SPT tahunan (tahun 2019) yang dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan e-filling yaitu penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

r) Kegiatan Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.250.000,- terealisasi sebesar Rp1.865.000,- atau 29,84 %.

Pada kegiatan ini juga disusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD untuk menjadi pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2019 pada tanggal 26 Desember 2019

s) Kegiatan Operasional pajak daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan pajak daerah ke kasda. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp335.900.000,- terealisasi sebesar Rp224.080.500,- atau 66,71 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Pembuatan garasi mobil kelling pajak;

(2) Sosialisasi pajak daerah

Sosialisasi pajak daerah dilaksanakan dengan mengundang 390 wajib pajak daerah Kabupaten Bantul di hotel Grand Dafam Rohan pada tanggal 9 Desember 2019

Sumber : DPKAD, 2019

Gambar 3. 48 Sosialisasi Pajak Daerah

t) Kegiatan Penyusunan laporan semesteran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun laporan semester I dan prognosis semester II guna memberikan informasi realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan pelaksanaan dan perkiraan keuangan semester berikutnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.500.000,- terealisasi sebesar Rp2.000.000,- atau 80,00%

u) Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan dana bagi hasil PPh OP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp51.295.200,- terealisasi sebesar Rp44.610.000,- atau 86,97 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Sosialisasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Sosialisasi ini dilaksanakan di gedung induk lantai 3 pada tanggal 13 Desember 2019 dengan mengundang 200 orang peserta yang terdiri atas bendahara pengeluaran desa, kecamatan, OPD, BUMD dan bendahara pembantu di Kabupaten Bantul.

Sumber : DPKAD, 2019

Gambar 3. 49 Sosialisasi PPh OP (PPh Pasal 21)

v) Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pencermatan dan kajian revisi DPA dan melebihi standar. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp9.695.000,-terealisasi sebesar Rp7.679.000,- atau 79,21 %.

w) Kegiatan Pengendalian PAD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kerjasama yang selama ini terjalin antara BKAD, IPPAT,BPN dan KPP Pratama Bantul dan meningkatkan pemahaman SDM pengelola pajak daerah tentang pajak. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp81.550.000,- terealisasi sebesar Rp76.312.500,- atau 93,58 %.

x) Kegiatan Optimalisasi pendapatan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yakni Rekonsiliasi Pajak Daerah, Rekonsiliasi PAD dan Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp40.629.200,- terealisasi sebesar Rp25.360.000,- atau 62,42 %.

y) Kegiatan Pelayanan pajak daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pajak daerah yang semakin baik dan sesuai SOP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp411.250.000,- terealisasi sebesar Rp405.209.000,- atau 98,53 %.

Tabel 3.112 Pelayanan Pajak DaerahTahun 2019

No	Jenis Pajak	Jumlah	Keterangan
1	PBB P2	8091	Permohonan pelayanan
2	BPHTB	11675	Permohonan pelayanan
3	Pajak Reklame	336	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
4	Pajak Restoran	86	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
5	Pajak Hotel	120	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
6	Pajak Parkir	4	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
7	Pajak MBLB	33	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
8	Pajak Air Tanah	26	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
9	Pajak Hiburan	14	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
10	Pajak Sarang Burung Walet	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
11	Pajak Penerangan Jalan	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru

Sumber : Bidang Pelayanan dan Penetapan, 2019

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan seperti menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif dan nyaman, kursi tunggu, serta menyediakan berbagai blangko antara lain blangko permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan lain lain.

z) Kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan PBB P2 yang terhutang. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp453.156.915,-terealisasi sebesar Rp394.901.915,- atau 87,14 %.

aa) Kegiatan Pendataan dan penetapan wajib pajak

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah wajib pajak dan objek pajak baru serta mengoptimalkan wajib pajak yang ada. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp29.161.000,- terealisasi sebesar Rp20.087.000,- atau 68,88 %.

bb) Kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempercepat pemasukan PBB P2 dan pajak daerah yang lain ke kasda. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini

sebesar Rp3.559.969.685,- terealisasi sebesar Rp2.884.325.900,- atau . 81,02 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Terlaksananya pameran dan layanan pembayaran di Bantul Ekspo yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli – 5 Agustus 2019
(2) Terlaksananya Pajak Bantul Award 2019 pada tanggal 8 Oktober 2019

Sumber : BKAD 2019

Gambar 3. 50 Pajak Bantul Award 2019

cc) Kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan PBB. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.123.544.100,- terealisasi sebesar Rp1.977.051.170,- atau 93,10 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2).

Pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

(1) Cetak masal SPPT PBB pada tanggal 02 Januari 2019 dimulai dengan mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2.

(2) Penyerahan secara simbolis SPPT PBB dilaksanakan tanggal 06 Maret 2019 bertempat di Pendopo Parasamya oleh Bupati Bantul kepada perwakilan desa, pemberian penghargaan kepada perangkat desa berprestasi dalam pembayaran PBB P2 tahun 2018, serta penyerahan piagam penghargaan kepada wajib pajak panutan.

Sumber : BKAD 2019

Gambar 3. 51 Penyerahan SPPT PBB P2 2019

(3) Sosialisasi tentang inovasi dan jadwal pelaksanaan serta perubahan aturan mengenai pengelolaan PBB P2 dilakukan setelah tersampaikannya SPPT PBB P2 ke seluruh wilayah desa Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan menjadi 5 waktu berdasarkan jatuh tempo pembayaran PBB P2, dengan mengundang Camat, Lurah Desa, Perangkat Desa yang membidangi PBB P2, serta dukuh.

(4) Monitoring penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat, dilaksanakan dengan membagi berdasarkan wilayah jatuh tempo pembayaran PBB P2.

(5) Pelayanan terhadap wajib pajak PBB P2 juga dilaksanakan dengan membuka pelayanan di kantor terkait mutasi, perubahan, pembetulan, penghapusan, keberatan, serta pengurangan atas SPPT PBB P2. Dari semua

pelayanan tersebut telah disediakan segala bentuk blangko permohonan PBB P2.

dd) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan dana bagi hasil cukai. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp207.000.000,- terealisasi sebesar Rp150.613.600,- atau 72,76 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Sosialisasi ketentuan dibidang cukai yang dilaksanakan di aula Bank Bantul pada tanggal 17 Desember 2019.

Gambar 3. 52 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai

ee) Kegiatan Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun pedoman kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan perundang - undangan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp9.250.000,- terealisasi sebesar Rp1.739.100,-

atau 18,80%. Kegiatan ini berupa penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dalam pengelolaan keuangan di seluruh Perangkat Daerah.

ff) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan validitas data subjek dan objek pajak PBB. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp742.391.016,- terealisasi sebesar Rp656.344.000,- atau 88,41 %.

gg) Kegiatan Pengelolaan Belanja ASN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menertibkan penyaluran belanja gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.955.000,-terealisasi sebesar Rp1.400.000,- atau 23,51 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pengelolaan gaji PNS di Kabupaten Bantul meliputi proses pembuatan dan pencetakan daftar gaji induk bulanan serta kekurangan gaji mempergunakan SIM Gaji dari PT Taspen (Persero).

hh) Kegiatan Rekonsiliasi data laporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akuntabilitas data dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dengan melakukan pembandingan data mempergunakan sistem yang terpadu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp30.900.000,00 terealisasi sebesar Rp15.071.750,00 atau 48,78%.

ii) Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan dana transfer. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp18.910.000,- terealisasi sebesar Rp17.060.500,-. atau 90,22 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengelolaan dana Transfer yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah.

jj) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah di masing - masing Perangkat Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp241.480.000,- terealisasi sebesar Rp205.505.000,- atau 85,10 %.

(1) Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan peserta sosialisasi pengelola keuangan SKPD se Kabupaten Bantul.

(2) Pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan Daerah (SIDAT KEUDA). Dengan aplikasi ini maka pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul lebih transparansi dimana masyarakat dapat

berperan aktif ikut mengawasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu melalui SIDAT KEUDA dapat dipergunakan sebagai alat kontrol oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terhadap realisasi anggaran belanja daerah di masing-masing perangkat daerah. Peluncuran aplikasi SIDAT KEUDA diresmikan oleh Wakil Bupati Bantul pada tanggal 25 Juli 2019 bertempat Pendopo Parasamya Bantul.

Sumber : DPKAD 2019

Gambar 3. 53 Launching SIDAT KEUDA

Keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan dapat dilihat dari hal berikut :

a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak
b) Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah
c) Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2019 oleh

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Kanwil Propinsi DIY.

1) Program Pengelolaan Barang Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah terinventarisasinya aset daerah Perangkat daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daearah dilaksankan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Peningkatan SDM aparatur Pemda

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas SDM pengurus barang. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp38.605.959,- terealisasi sebesar Rp27.138.000,- atau 70,29 %. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen sebagai dasar perencanaan kebutuhan BMD n+1. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp19.775.000,- terealisasi sebesar Rp8.665.000,- atau 43,82 %.

b) Kegiatan Penataan aset

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemanfaatan aset sesuai dengan peruntukannya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp100.200.000,- terealisasi sebesar Rp 47,239,000,- atau 47,14 %.

c) Kegiatan Penghapusan barang daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp138.310.000,- terealisasi sebesar Rp85.711.600,- atau 61,97 %.

d) Kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akurasi data aset tetap. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp264.280.000,- terealisasi sebesar Rp256.325.000,- atau 96,99 %.

e) Kegiatan Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan validitas data aset SKPD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp208.890.000,- terealisasi sebesar Rp189,422,000,- atau 90,68 %.

f) Kegiatan Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan dokumen BMD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.395.000,- terealisasi sebesar Rp1.975.000,- atau 58,17 %.

g) Kegiatan Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun peraturan tentang pengelolaan BMD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp26.100.000,- terealisasi sebesar Rp19.800.000,- atau 75,86 Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.113 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Keuangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Permasalahan Pembayaran PBB P2 terkait dengan terbatasnya tempat pembayaran PBB P2 dan jam pembayaran yang tersedia pada jam kerja;	Mulai tanggal 7 Februari 2018 BKAD Bantul BKAD Bantul melakukan inovasi berupa penyediaan layanan jemput bola pembayaran PBB melalui layanan **Mobil Keliling Pajak Bantul**

No	Permasalahan	Solusi
		dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB dengan peningkatan kualitas layanan PBB yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah
2	Keterbatasan Akses Informasi Pajak Daerah Terbatasnya akses terhadap informasi tagihan, status pembayaran PBB dan informasi proses BPHTB yang masih terpusat di kantor layanan BKAD;	Sejak 27 Agustus 2018 BKAD Kabupaten Bantul meluncurkan **LAPak BAntul (Layanan Aplikasi Pajak Bantul)** yang merupakan Layanan berbasis android. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh informasi tagihan PBB P2,status pembayaran sampai dengan 5 tahun dan juga proses BPHTB melalui smartphone berbasis android;
3	Belum terwujudnya disiplin anggaran kas dalam penyerapan belanja daerah;	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan dan capaian realisasi keuangan dipergunakan dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja perangkat daerah tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diterima oleh perangkat daerah.
4	Terdapat perubahan aplikasi penatausahaan keuangan daerah dari Aplikasi Simda ke Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (Sepak@t). Menu dan proses pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah pada Sepak@t sangat berbeda dengan menu dan	Pendampingan dan konsultasi dengan Tim BPPT; Konsultasi melalui media social dengan **Tim BPPT** pada saat terjadi permasalahan penatausahaan keuangan daerah terutama system dalam aplikasi Sepak@t; Pendampingan penatausahaan keuangan daerah melalui **aplikasi**

No	Permasalahan	Solusi
	pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah di Simda Keuangan System cloud Sepak@t masih berada di BPPT Tangerang Selatan sehingga apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sangat tergantung dengan tim dari BPPT Tangerang Selatan;	**Sepak@t** dengan pengelola keuangan di perangkat daerah;
5	Kepatuhan wajib pajak rendah;	Menggunakan **Sistem Teknologi Informasi** untuk mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah dan Menegakkan **law enforcement** (memberikan sanksi),
6	Beberapa Perangkat Daerah belum tepat dalam penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur kegiatan serta dalam pelaksanaanya yang tidak konsisten dengan aturan SHBJ;	Mengirimkan surat edaran kepada semua OPD untuk memperhatikan penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur. Melakukan Desk ke setiap Perangkat Daerah. Pengajuan revisi dan melebihi standar harga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Sumber : BKAD 2019

29. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

a. Program dan Kegiatan

1) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

2) Uji Kompetensi dan Psikologi

3) Pendidikan dan Pelatihan PNS

4) Penyelenggaraan Pendidikan PNS

5) Perencanaan dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

3) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

a) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

b) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

c) Pelaporan LP2P dan LHKPN

d) Penilaian PNS

e) Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan

f) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

4) Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS.

a) Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS

b) Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional

c) Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT

b. Realisasi Pelaksanaan Program

a) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan ini adalah tercapainya pelaporan capaian kinerja tepat waktu guna kelancaran tugas pemerintahan.

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang yang tertib serta

pelaporan yang tepat waktu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp13.050.000,- terealisasi sebesar Rp8.855.000,- atau 67,85%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penatausahaan keuangan dan barang, penyusunan laporan keuangan dan barang, penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja

b) *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijasah untuk memberikan kesempatan dalam pengembangan karier dan kesejahteraan PNS. Selain itu dalam hal kepangkatan bagi PNS dapat digunakan untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan ujian dinas/penyesuaian ijasah diatur dalam SE bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/811 dan Nomor 193/SEK/LAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.250.000,- terealisasi Rp2.205.000,- atau 67,85%.

b) Uji Kompetensi dan Psikologi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpetakannya kompetensi pejabat struktural Kabupaten Bantul dan calon PNS yang mengajukan mutasi ke Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.633.000.000,- terealisasi Rp1.603.420.000 atau 98,19%.

c) Pendidikan dan Pelatihan PNS

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kompetensi bagi PNS Kabupaten Bantl melalui kediklatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.491.435.750,- terealisasi Rp6.344.507.516,- atau 97,74%

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Pelatihan Indikator Kinerja dan Perencanaan Daerah

Dalam rangka peningkatan dan pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja.

(2) Pendidikan Latsar bagi Calon PNS

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat Terintegrasi (Pelatihan Prajabatan) untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

d) Penyelenggaraan Pendidikan PNS

(1) Pengiriman Diklat Teknis Fungsional

Diklat Fungsional adalah bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan/ atau ketrampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

(2) Pengiriman Diklat Struktural

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan diklat yang diselenggarakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang dan jabatan struktural. Tujuan dari diadakannya Diklat PIM adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk

melaksanakan tugas jabatan struktural eselon secara profesional, juga memantapkan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

e) Perencanaan dan Pengadaaan Calon ASN

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga ketersediaan PNS dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun anggaran kegiatan untuk program ini adalah Rp496.805.000,- dengan jumlah serapan Rp55.540.000,- atau 11,18%. Tahapan seleksi CPNS 2019 yang semula direncanakan selesai pada tahun 2019, baru mulai pada bulan oktober dan tahap seleksi hanya sampai pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Desember 2019. Sedangkan pelaksanaan tes dengan CAT direncanakan pada bulan Februari 2020 sehingga anggaran pelaksanaan tes tidak dapat direalisasikan

c) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp528.537.400,- dengan realisasi sebesar Rp463.201.400,- atau 87,64%, Adapun kegiatan yang mendukung program pembinaan dan pengembangan aparatur ini adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dianggarkan sebesar Rp19.040.000,- dan terealisasi Rp13.495.500,- atau 70,88%. Indikator dari kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai adalah jumlah update data PNS dengan target 8.200 orang tercapai 8.200 orang atau 100%. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan penerapan sistem aplikasi online untuk data kepegawaian pada SAPA ASN berupa entry data dan scan data PNS. Selain itu ada pengembangan SAPA ASN berbasis Android.

b) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp15.489.000,- dan terealisasi sebesar Rp14.040.000,- atau 90,65%, Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan penghargaan satya lancana dengan target 400 PNS . Pada tahun 2019 jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI sebanyak 240 orang, terdiri dari 63 orang kategori 10 tahun, 65 orang kategori 20 tahun, dan 112 orang kategori 30 tahun.

Gambar 3. 54 Penerimaan penghargaan Satya Lancana

c) Pelaporan LP2P dan LHKPN

Kegiatan LP2P dan LHKPN pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp30.590.000,- dan terealisasi Rp26.625.000,- atau 87,04%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang wajib melaporkan LP2P dan LHKPN dengan target 400 PNS dan tercapai 380 PNS yang telah melaporkan.

d) Penilaian PNS

Kegiatan penilaian PNS pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp41.968.400,- dan terealisasi Rp41.968.400,- atau 100%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang dinilai kinerjanya dengan target 8.000 orang pada awal tahun dan terealisasi 8.246 PNS atau 103,08% dari target yang ingin dicapai.

e) Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan

Kegiatan pengelolaan administrasi dan kesejahteraan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp379.810.000,- dan terealisasi Rp332.629.500,- atau 87,56%. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan KORPRI dengan target 5 kegiatan dapat terealisasi 5 kegiatan. Jumlah PNS yang mengajukan Dokumen Kepegawaian sebanyak 350 PNS dan tercapai 443 PNS.

f) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pada tahun 2019 terdapat 45 kasus dari 40 kasus yang diperkirakan yang terdiri dari kasus hukuman disiplin, pengajuan perceraian dan uji kesehatan, hal tersebut berarti ada peningkatan kasus pelanggaran disiplin PNS selama tahun 2019.

d) *Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS*

Program ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp790.644.000,- dengan realisasi sebesar Rp711.313.313,- atau 89,97%. Adapun indikator program pengelolaan kepegawaian pindah/purna tugas PNS adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS

Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp73.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp72.331.818,- atau 99,04%, Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun dengan target 1.600 orang dan tercapai 1.927 orang atau 120,44% dari target.

Hal ini dikarenakan adanya program dari Badan Kepegawaian Negara yaitu program Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) sehingga bagi BKPP memudahkan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat PNS.

Gambar 3. 55 Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

b) Pengelolaan Mutasi jabatan Fungsional

Pengelolaan jabatan fungsional tertentu merupakan suatu rangkaian siklus manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi perencanaan dan pengadaan pegawai, pengembangan kualitas, mutasi, disiplin, serta pemberhentian dan pensiun pegawai. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah pembinaan yang bersifat berjenjang dan berkesinambungan.

c) Pengelolaan Mutasi jabatan Administrasi dan JPT

Pada dasarnya pelaksanaan mutasi merupakan program pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada awalnya untuk melakukan pemindahan, pengisian jabatan pada aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi jabatan/posisi tertentu sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Mutasi/promosi struktural dilaksanakan sebanyak 4 kali. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengalami mutasi dan pelantikan dengan target 1.000 orang dengan jumlah anggaran Rp658.884.000,- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penataan PNS sebanyak 972 orang atau 102% dengan jumlah realisasi keuangan Rp586.634.700,- atau 89,03%.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan fungsi penunjang kepegawaian.

Tabel 3.114 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Permasalahan	Solusi
1	Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indispliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Sosialisasi dan monitoring sampai ke UPT, Kecamatan dan Puskesmas
2	Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kompetensi, penerbitan ijin belajar serta penataan kembali PNS yang sudah ada

30. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a. Program dan Kegiatan

a) Program pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

b) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pemantauan orang asing

b) Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis

c) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

a) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b) Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan

d) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a) Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin

b) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

e) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Forkom Ormas, Orsos, dan LSM.

b) Pendidikan politik di masyarakat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksankan melalui kegiatan-kegiatan, anggaran program Rp 283.950.000 dengan realisasi Rp279.185.000,- atau 98.63% antara lain:

a) Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 283.050.000,- terealisasi sebesar Rp 279.185.000,- atau 98.63.%.

2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Maksud dan tujuan program ini adalah Untuk memantau keberadaan orang asing yang tinggal di Bantul dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. anggaran program Rp123.490.000,- dengan realisasi Rp114.256.000,- atau 92.52 %

Program Kemitran Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pemantauan Orang Asing.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memantau keberadaan orang asing yang tinggal di Bantul Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp8.440.000,- terealisasi sebesar Rp7.540.000. atau 89.33%.

b) Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan antar umat beragama dan etnis;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Kerukunan anatar umat beragamadan etnis. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 115.050.000,- terealisasi sebesar Rp 106.716.000,- atau 92.75%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Maksud dan Tujuan Program : Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, anggaran program Rp200.185.000,- dengan realisasi Rp 198.830.000,-atau 99.32%

a) Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan di Masyarakat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 81.500.000,- terealisasi sebesar Rp 81.495.000,-atau 99.94%.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk kewaspadaan Dini dan menjaga keamanan Linghkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalahMenciptakan kewaspadaan dini dalam menjaga keamanan lingkungan Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 118.685.000,-. terealisasi sebesar Rp 117.335.000,- atau 98.86.%.

4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Maksud dan tujuan dari Program ini: Meningkatkan pemberantasan adanya penyakit masyarakat . anggaran program Rp92.850.000,- dengan realisasi Rp80.200.000,- atau 86.37 %.

a) Kegiatan Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin

Maksud dan tujuan kegiatan ini menigkatkan disiplin pelajar adalah Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp51.450.000,-. terealisasi sebesar Rp 42.375.000,-atau 82.36.%.

b) Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 41.400.000,- terealisasi sebesar Rp 37.825.000,- atau 91.36.%

5) Program Pendidikan Politik Di Masyarakat

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi anggaran program Rp 309.325.000,- dengan realisasi Rp 273.907.000,- atau 88.54 %, adapun kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6) Kegiatan Pendidikan politik di masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di semua jenjang Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4. sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 267.750.000,- terealisasi sebesar Rp232.332.000,-. atau 86.77%.

7) Kegiatan Forkom ormas,orsos dan LSM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman bagi Ormas,Orsos,dan LSM mengenai Peraturan Perundangan Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 41.575.000,- terealisasi sebesar Rp 40.350.000,-. atau 97.05%.

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.115 Permasalahan Dan Solusi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Permasalahan	Solusi
1	Kegiatan Dialog Politik setelah Pemilu tidak berjalan sesuai Jadwal, karena tertunda dengan masa peralihan anggota DPRD dan alat kelengkapan dewan baru terbentuk di bulan Oktober 2019.	Kegiatan Dialog politik dapat diselesaikan pada TW IV (Oktober Nopember dan Desember 2019)
2	Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik baru dapat dipenuhi sebesar Rp 1.927,- per satu suara sah per tahun bagi partai politik yang mempunyai wakil di kursi DPRD,karena terjadi penambahan suara sah pada PEMILU 2019 (577.151) DIBANDING Pemilu 2014 (548.056)	Kekurangan akan diusulkan lewat anggaran biaya tambahan (ABT) TA 2020.

31. PENGAWASAN (SAMPAI SINI)

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemerintahan (Pengawasan) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terurai sebagai berikut:

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
   a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
   b) Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;
   c) Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul;
   d) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun **2019 adalah sebagai berikut:**

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Maksud dan tujuan program ini adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, tanggap, profesional, efisien dan efektif transparan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp326.792.176,00 terealisasi sebesar Rp322.531.200,00 atau 98,70%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pemeriksaan reguler

Pemeriksaan reguler dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan sumber daya manusia. Pemeriksaan reguler tahun 2019 dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul.

(2) Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan capaian 3 E (Efektifitas, Efisien dan Ekonomis) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3) *Review* atas laporan keuangan

Review dilaksanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di*review* disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini);

(4) *Review* atas Laporan Kinerja

Review dilaksanakan terhadap laporan kinerja untuk memastikan laporan kinerja sudah disajikan secara secara akurat dan valid. Hasil *review* disampaikan kepada Gubernur DIY sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk dilakukan evaluasi. Untuk mendukung hasil *review* LKJ, dilakukan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) pada 37 (tiga puluh tujuh) SKPD dan 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.

(5) *Review* atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Review atas RKA dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinkan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan KUA PPAS, RKPD, Renstra dan Renja serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

(6) *Review* atas Pengadaan Barang dan Jasa dan Dana Desa (DD) dalam rangka mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos, mengetahui jumlah atau posisi belanja modal dan barang yang telah dilakukan pelelangan, mengidentidikasi hambatan dan solusi/saran perbaikan atas hambatan atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

(7) Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman kerja pengawasan yang diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menghindari tumpang tindih pengawasan.

b) Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun kinerja aparat pemerintah. Selama tahun 2019 terdapat 8 (delapan) pengaduan dan sudah ditindaklanjuti. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp116.406.000,00 dengan realisasi sebesar Rp111.935.000,00 atau 96,16%.

c) Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi penyelenggaraan pemerintah Daerah, pengamanan aset dan barang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan upaya tersebut, pada tahun 2019 nilai maturitas SPIP sebesar 3,18 atau mengalami kenaikan sebesar 0,105 % dibanding tahun 2018.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp99.815.000,00 terealisasi sebesar Rp99.789.300,00 atau 99,97%.

d) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp936.886.400,00 terealisasi sebesar Rp935.346.400,00 atau 99,83%.

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* dilaksanakan untuk memberikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *on-line.* Penilaian mandiri di tahun 2019 selain di tingkat pemerintah daerah dengan melibatkan asesor penilai mandiri dari masing-masing SKPD, juga menggunakan sampel sebanyak 10 (sepuluh) PD antara lain:

- Inspektorat Daerah;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan;
- RSUD Panembahan Senopati.

Pada tahun 2019 nilai PMPRB Online pada Kabupaten Bantul mencapai 85,75.

(b) Evaluasi penetapan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi pada 6 (enam) PD, dan 1 (satu) puskesmas sebagai berikut:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Dinas Kesehatan;

- Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- RSUD Panembahan Senopati;
- Kecamatan Piyungan; dan
- Puskesmas Sewon I.

(c) Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya akselerasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. Bentuk dari kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi Pencegahan KKN dengan beberapa tema antara lain sebagai berikut :

(d) Fasilitasi Forum Pemantau Independen (Forpi) di Kabupaten Bantul

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Intergritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul dibentuk Forum Pemantau Independen (Forpi) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pakta intergritas. Forpi beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Tabel 3.116 Permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya implementasi tentang SPIP	Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada OPD

32. PEMERINTAHAN UMUM

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam fungsi penunjang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
2) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5) Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6) Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
7) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
8) Program Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kelembagaan
9) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah;
10) Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
11) Peningkatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Dan Keprotokolan
12) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13) Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Dan Keprotokolan;
14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
15) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah

Pagu anggaran Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp70.682.000,00 atau sebesar 5,25% dari total pagu anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan (Rp1.346.298.700,00). Realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp67.662.000,00 atau sebesar 95,73%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Bantul. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan keluaran yang diharapkan dapat tercapai melalui program ini dengan dukungan dana sebesar Rp747.526.200,00 atau 55,52% dari total seluruh anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan .

Realisasi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebesar RP.737.558.800,00 atau sebesar 98,67%. Rincian pagu dan realisasi anggaran pada pprogram ini seperti tersaji pada tabel berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di tahun 2019 dilaksanakan dalam wujud beberapa sub kegiatan antara lain meliputi:

a) Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul;

(1) Publikasi i-LPPD melalui surat kabar

(2) Pembakuan Nama Rupabumi

(3) Pemasangan pilar batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, publikasi i-LPPD melalui surat kabar dan penerapan SPM merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi pada tahun 2019 dilaksanakan untuk pertama kalinya memanfaatkan aplikasi Sistem Akuisisi Data Toponim Indonesia (SAKTI) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pemasangan pilar batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dalam

rangka perapatan/penambahan pilar-pilar batas wilayah di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul sekaligus pengukuran secara geodetik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi di wilayah perbatasan dan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan-permasalahan terkait batas daerah kedepannya. Pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah dilakukan sebanyak 13 titik dengan 13 pilar yang dengan mengacu pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

3) Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah.

Maksud dan tujuan Program ini adalah tersedianya dokumen sebagai bahan untuk pengembangan ekonomi daerah. Anggaran program Rp 628.540.900 dengan realisasi Rp. 619.228.100,- atau 98,5%

a) Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini Bagian Adm Perekonomian merangkul OPD OPD yang bergerak dan mendukung ekonomi masyarakat agar terujud sinergi.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 99.590.900 realisasi anggaran Rp. 99.312.000 (99,7%) tingkat capaian program kegiatan 100%.

b) Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kajian yang dilaksanakan adalah 1 (satu) yaitu :

(1) Kajian Pengembangan Potensi perekonomian Bidang Pertanian dengan maksud dan tujuan

- ❖ Mengetahui perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi di level teknis
- ❖ Mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang telah ada dengan implementasi pelaksanaan pembangunan di daerah

- ❖ Mengetahui kendala dan permasalahan terkait pengendalian inflasi daerah yang dapat dijadikan dasar rekomendasi penyusunan kebijakan
- ❖ Menampung dan mensinkronisasikan persepsi terhadap perubahan yang ada dalam peraturan perundangan yang berlaku
- ❖ Memberikan inovasi / terobosan dalam pengendalian daerah.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp.50.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.950.000 prosentase keuangan mencapai 98,7 % tingkat capaian kegiatan 100%.

c) Monitoring dan evaluasi Ekonomi Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Masyarakat merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait 6 sektor yang menjadi fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian yaitu Bidang usaha kecil menengah, perindustrian, energi, sumber daya alam, penanaman modal, pelayanan terpadu, pariwisata.

Maksud dan tujuan kegiatan agar dapat menyiapkan bahan rumusan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 30.200.000 realisasi Rp. 30.200.000 prosentase mencapai 100% tingkat capaian kegiatan100%.

d) Kajian Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat

Kajian yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu :

(1) Kajian Pengembangan Sarana Perkonomian Bidang Peternakan dengan judul Efektivitas Inseminasi Buatan pada kambing dan Domba. Maksud dan tujuan kajian ini untuk membuat basis data, sehingga dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengembangan khususnya bidang peternakan

(2) Kajian Pengembangan sarana Perkonomian Masyarakat dengan judul Kebijakan Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan Ekonomi Kreatif.

Maksud dan tujuan kajian ini untuk mengetahui potensi dan prospek usaha ekonomi kreatif khususnya usaha sate klathak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul

Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 82.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 81.550.000 prosentase mencapai 99,33 % tingkat capaian program 100%

e) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah

(1) Meningkatkan kesejahteraan petani perikanan
(2) Memberikan kejelasan proses dan prosedur perijinan
(3) Mendukung adanya produk yang paten dan khas dari Kabupaten Bantul

Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 40.200.000 realisasi anggaran Rp. 39.850.000 (99,13%) tingkat capaian kegiatan 100%.

f) Monitoring dan Evaluasi kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan persediaan kebutuhan pokok dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian Rakyat merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah bidang sarpras terkait 5 sektor yang menjadi fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian yaitu Bidang perdagangan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 56.725.000 realisasi Rp.56.631.000 prosentase mencapai 99,8% tingkat capaian program 100%.

g) Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Menningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk BUMD agar kinerjanya meningkat.

Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 187.700.000 realisasi anggaran Rp 180.580.100 (96,2%) tingkat capaian program 100%.

h) Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Kajian yang dilaksanakan adalah Kajian Optimalisasi Radio Bantul dengan maksud dan tujuan

(1) Melakukan kajian potensi optimalisasi PT Radio Sangga Buana

(2) Mengidentifikasi permasalahan di PT Radio Sangga Buana

(3) Mengevaluasi kinerja unit-unit PT Radio Sangga Buana

Dokumen yang dihasilkan adalah Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir Hasil Kajian.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 52.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 51.830.000 prosentase mencapai 99,48 % tingkat capaian program 100%

i) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait BUMD dan LKM di Kabupaten Bantul.

Monev yang dilaksanakan adalah Monev BUMD sebanyak 3 kali, Monev BUKP sebanyak 3 kali dan Monev LKM sebanyak 3 kali. Dari kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat menyiapkan bahan rumusan sebagai bahan penyusunan Kebijakan Daerah Bidang BUMD dan LKM.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 29.325.000 realisasi Rp.29.325.000 prosentase mencapai 100% tingkat capaian program 100%.

4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Anggaran program Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp626.525.200,00 (enam ratus dua puluh enam jyta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi Rp607.646.900,00 (enam ratus tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 96,99%.

Adapun hasil dari berbagai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau membuat keadaan hukum yang seharusnya ada dalam masyarakat, yang didukung dengan legal drafting serta dengan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik.

Pembentukan raperda Tahun 2019 sebanyak 16 Raperda,yangterdiri atas inisiatif Bupati sebanyak 11Raperda dan 5 Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bantul. Selain program pembentukan raperdadalam kegiatan Legislasi ini juga dilakukan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan melalui *public hearing*/konsultasi publik atas rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

Pagu anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp254.100.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp248.175.000,00 (dua ratus empat puluh

delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen).

Adapun untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Program Pembentukan Peraturan DaerahTahun 2019, Raperda yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan hasil sebagai berikut:

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari PD. BPR. Bank Bantul Menjadi PT. BPR. Bank Bantul (Persero);
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
(8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; dan
(9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya terdapat beberapa raperda dari Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu:

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

(6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan; dan

(7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b) **Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum Pemerintah Daerah baik secara *offline* maupun secara *online*.

Melalui kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.370.200,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp80.395.200,00 (delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau 96,43 % (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

c) **Penerbitan Lembaran Daerah**

Pada tahun 2019 dapat dilaksanakan penerbitan buku Lembaran Daerah Kabupaten Bantul yang berisikan peraturan daerah tahun 2018 sebanyak175 eksemplar dengan nilai pengadaan sebesar Rp34.125.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

d) **Pendokumentasian Produk Hukum Daerah**

Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui pemberian nomor produk hukum dan nomor pengundangan serta penyimpanan naskah asli produk hukum dalam bentuk Himpunan Peraturan Perundang-undangan sebagai dokumentasi hukum.

Pada tahun 2019 tercatat Peraturan Bupati pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 132 Peraturan Bupati sedangkan untuk Keputusan Bupati sebanyak 508 Keputusan Bupati yang didokumentasikan.

e) **Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Website**

Melalui kegiatan ini dilakukan proses penyusunan ulang produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan bupati maupun SK bupati dalam format dokumen pdf yang disesuaikan dengan dokumen aslinya untuk diunggah/di*upload* dalam *jdih.bantulkab.go.id*.

f) **Publikasi Program/Kegiatan Bagian Hukum melalui Media Massa**

Dalam kegiatan ini dipublikasikan berbagai kegiatan Bagian Hukum melalui Bantul Radio baik siaran langsung (*live report*) maupun dialog sesuai jadwal yang

ditetapkan atau mengikuti agenda kegiatan di Bagian Hukum.

g) **Sosialisasi Produk Hukum Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum yang telah diterbitkan maupun yang berlaku sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Tahun 2019 sosialisasi dapat terselenggara sebanyak 4(empat) kali yang diikuti sejumlah 100 (seratus) orang setiap angkatan yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah Desa dan pihak swasta se Kabupaten Bantul, dengan Narasumber dari Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan produk hukum yang disosialisasikan.

h) **Legal Expo (Pameran Produk Hukum)**

Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun sekali dengan tujuan tidak hanya sebagai ajang evaluasi pembentukan produk hukum baik di tingkat pusat maupun daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tetapi lebih mendalam yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemakai atau user dari hukum yang telah ada dan telah diterapkan. Tahun 2019 Legal Expo dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2019.

i) **Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi berupa pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah dan desa serta masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan beracara di Pengadilan serta membantu dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat, aparatur pemeriantah maupun desa pada saat berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pendampingan. Permasalahan yang mendapat

pendampingan adalah masalah perdata dan tata usaha negara.

. Dengan pagu anggaran sebesar Rp167.650.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp150.473.800,00 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)atau89,75% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) dapat ditangani sejumlah permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dengan hasil sebagai berikut:

j) **Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi**

Hasil dari kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara litigasi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 117 Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

No	Perkara	Permasalahan
1.	PTUN	Gugatan PTUN yang diajukan oleh Veronica Lindayati I, terhadap penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu, meskipun telah ada Putusan Hakim PTUN Perkara 3/G/2019/PTUN YK, Pemohon masih mempermasalahkan dan mengirim surat ke DPMPT dan Satpol PP untuk tidak mengurus perubahan IMB tersebut.
2.	Perdata	Perkara diajukan oleh Saudara Budiono dengan alamat Dusun Geblak Bantul, yang digugat adakah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dituduh mengganti data SPPT PBB dan saat ini masih proses sidang di Pengadilan Negeri.
3.	Perdata	Perkara diajukan oleh Saudara Katrin Kandarina kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo yang dituduh tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl. Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.
4.	Perdata	Pemerintah Desa Bantul/TURUT TERGUGAT I dituduh mengeluarkan Letter C untuk dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik tanpa izin yang berhak, yakni Letter C No. 175 Persil 31 P VII, luas 14.280m2 milik Alm. Ky. Siyo Bin Ky. Nrimo Karyo alias Samin, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.

k) **Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Pemerintah Desa**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pendampingan ke Pemerintah Desa pada saat penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, sehingga diharapkan produk hukum yang ditetapkan di Desa sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dalam rangka pelaksanaan asistensi tersebut, pada tahun ini telah ditetapkan Peraturn Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selain itu dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang juga telah disosialisasikan melalui kegiatan ini. Dengan pagu anggaran sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan ini dapat terealisasi sebesar Rp26.595.000,00 atau 99,98 %(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen).

l) **Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Maksud dari kegiatan ini adalah merupakan salah bentuk pendampingan Bagian Hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan hukum di masyarakat.

Pada tahun 2019 telah dibentuk Kadarkum “Jagoriko” yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 281 Tahun 2019 yang merupakan wakil dari Kabupaten Bantul sebagai peserta Lomba Kadarkum Tingkat DIY pada bulan September 2019, dimana Kabupaten Bantul meraih Juara III.

Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp47.725.000,00 atau 81.13% dari pagu anggaran sebesar Rp58.828.000,00

m) **Kegiatan Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk penyebarluasan produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi Peraturan Dearah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupat bientuk penyebarluasan melalui sistem jaringan informasi hukum melalui jdih.bantulkab.go.id/produkhukum dan pembuatan buku Lembaran Daerah yang berisi Peraturan Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

Melalui kegiatan dengan anggaran sebesar Rp19.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.375.000,00 atau 94,96%.

n) **Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah.**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan salah bentuk atau cara dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati antara produk hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan produk hukum Daerah Kabupaten Bantul berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp27.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.804.900 atau 89,45 %. Adapun produkhukum yang telah ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(1) Peraturan Bupati : 132 buah
(2) Keputusan Bupati : 508 buah
(3) Instruksi Bupati : 4 buah

Dari target kinerja sebanyak 120 Peraturan Bupati sampai dengan bulan Desember tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 138 buah Peraturan Bupati, sedangkan untuk penyusunan Keputusan Bupati dari target kinerja sebanyak 400 Keputusan Bupati tersusun sebanyak 508 Keputusan Bupati. Dengan demikian kegiatan penyusunan produk hukum daerah ini melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3. 118 Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan yang harus melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintahan pusat	Pembahasan dan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan pada Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undangan Daerah tahun berikutnya.
2	Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum sangat dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan yang diadukan/ dikonsultasikan/dimintakan pendampingan hukum serta tingkat kerumitan permasalahan yang mengharuskan keterlibatan banyak pihak.	• Mensosialisasikan program-program kegiatan bantuan hukum kepada Perangkat Daerah, pemerintah desa dan masyarakat • Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

5) Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Maksud dan tujuan program ini adalah terlaksananya berbagai perumusan kebijakan yang mendukung ketersediaan regulasi yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD teknis pengampu urusan dalam menjalankan tupoksinya.

Pagu anggaran program ini sebesar Rp557.600.000,- terealisasi sebesar Rp534.457.900,- atau 95,84%. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) **Kegiatan Perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah kependudukan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp167.250.000,- terealisasi sebesar Rp159.607.800,0 atau 95,43%.

b) **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal kependudukan dan ketenagakerjaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp23.650.000,- terealisasi sebesar Rp17.578.400,- atau 74,32%.

c) **Kegiatan Perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah sosial kemasyarakatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp144.000.000,- terealisasi sebesar Rp141.276.900 atau 98%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kampung KB,

(2) Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.

d) **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp23.620.000,- terealisasi sebesar Rp22.966.800,- atau 97,23%.

e) **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bantuan masyarakat;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal bantuan masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp28.310.000,- terealisasi sebesar Rp26.650.000,- atau 94,13%.

f) **Kegiatan Kajian bantuan sosial bagi warga miskin;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyelenggarakan kajian terkait bantuan sosial bagi warga miskin. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp73.575.000,- terealisasi sebesar Rp71.930.000,- atau 97,76%.

g) **Kegiatan Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp73.575.000,- terealisasi sebesar Rp72.565.500,- atau 98,62%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

h) **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp23.620.000,- terealisasi sebesar Rp21.882.500,- atau 92,64%.

6) Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Maksud dan tujuan program ini adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang keagamaan..

Pagu anggaran program ini sebesar Rp7.695.175.889,- terealisasi sebesar Rp7.344.071.747,- atau 95,43%. Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) **Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul kepada kelompok warga masyarakat yang kurang beruntung, yakni anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.052.772.233,- terealisasi sebesar Rp1.037.827.000,- atau 98%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemberian tali asih yang berupa tas sekolah dan alat tulis.

b) **Kegiatan Pendamping halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka wujud nyata mengahdirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk memberikan berbagai macam fasilitasi kegiatan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 13 sub kegiatan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.609.873.000,- terealisasi sebesar Rp5.332.664.247,- atau 95,05%.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan kepedulian pemerintah daerah kepada kelompok warga masyarakat yang telah mengabdi dan berjasa di masyarakat namun masih belum memperoleh penghargaan yang setimpal. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp872.543.605,- terealisasi sebesar Rp860.253.000,- atau 98,59%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian tali asih yang berupa kain bahan baju, sarung, dan peci.

c) **Kegiatan Kajian kitab keislaman;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan semangat belajar agama dari sumber-sumer primer dan sekunder, sehinga masyarakat dapat memiliki keilmuan yang luas dalam beragama. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp153.987.051 terealisasi sebesar Rp113.327.500 atau 70,83%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Ceramah dan diskusi tentang ilmu Agama Islam

7) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp

129.555.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 95.701.400,00 atau 84%.

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini ;

a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengkajian dan evaluasi kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparatur negara.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.339.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.688.400,00 atau 63%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen draft Peraturan Bupati baru yang mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang akan digunakan mulai tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang baru sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Formasi Dan Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.829.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.809.000, atau 97 %.

c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten Bantul

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 40.204.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.204.000,00 atau 72 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

8) Program Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kelembagaan

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 121.440.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 105.550.000,00 atau 87 %

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 57.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.430.000,00 atau 85 %.

b) Pelaksanaan Pengukuran Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

(1) mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
(2) merumuskan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
(3) menyusun bahan kebijakan dalam rangka perbaikan tingkat kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
(4) memonitor dan mengevaluasi tingkat kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 37.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.570.000,00 atau 93 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya workshop penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah serta tersusunnya Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahuin 2018 tentang

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah .

c) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata laksana perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk mengampu perubahan peraturan teknis masing – masing urusan yang mewajibkan penyesuain tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 26.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.550.000,00.

9) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 260.352.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 221.140.100,00 atau 85 %. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas mutu pelayanan publik pemerintah daerah karena salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pelayanan publik yang berkualitas, yang

merupakan fungsi dan tugas pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 29.255.800,00 terealisasi Rp. 29.180.000,00 atau 100 %.

Pada tahun 2019 ini penyusunan Indek Pengaduan Masyarakat (IPM) dilaksanakan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis bagi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pajangan.

b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.241.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.356.300,00 atau 94 %.

Kegiatan penyusunan SKM dilaksanakan dengan melakukan koordinasi penyusunan SKM bagi seluruh SKPD se-Kabupaten Bantul.

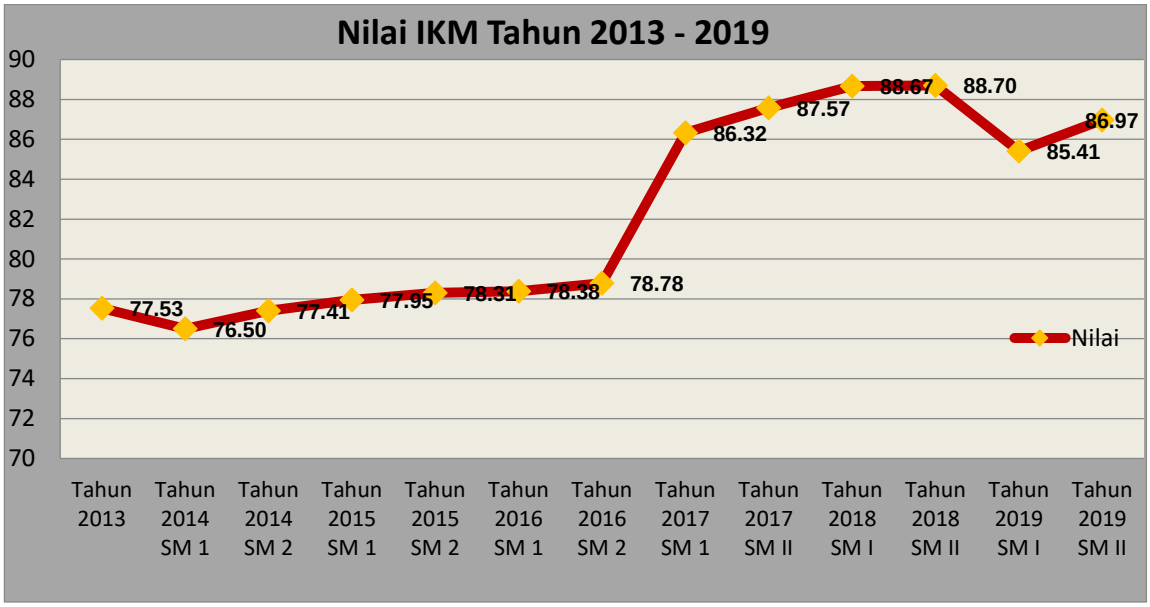

Grafik 3. 16 Perkembangan Nilai SKM

c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kulaitas mutu pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan monitoring penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bantul serta keikutsertaan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 130.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.898.000,00 atau 76 %. Sisa anggaran ini cukup besar dikarenakan dibatalkannya rencana pameran inovasi di tingkat nasional.

Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 sebagai berikut :

(1) Mobil Keliling Pajak Bantul : Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah, Lebih Murah

(2) SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan

Gambar 3. 56 Penghargaan TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 sebagai berikut :

(1) SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan

Gambar 3. 57 Penyerahan Piagam TOP 45 KIPP Nasional Tahun 2019

Hasil dari kompetisi inovasi pelayanan publik di internal Pemerintah Kabupaten Bantul, proposal yang masuk sebanyak 169 proposal. Dari seluruh jumlah proposal tersebut dilakukan evaluasi oleh Tim Inovasi Kabupaten, sehingga didapat 30 inovasi pelayanan terbaik se Kabupaten Bantul. Dari 30 inovasi terbaik ini diundang untuk memaparkan lebih detail terkait inovasi yang sudah dilakukan di depan penilai independent yang berasal dari institusi pendidikan, media masa dan lembaga ombusdman daerah.

d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah perubahan mind set dan culture set birokrasi pemerintah daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan memfasilitasi terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang tercantum

dalam road map reformasi birokrasi Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilakukan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi dikarenakan periode road map yang ada sudah habis pada tahun ini.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 39.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.505.000,00 atau 93 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.850.000,00.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen realisasi pelaksanaan program/roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta draft dokumen road map reformasi birokrasi periode 2019 – 2022.

e) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Ketataksanaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,00 atau 92 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul .

10) Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Maksud dari program ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaporan kinerja dan pelaksanaanya harus didukung data serta kualitas hasil/ output yang baik.

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 292.251.000,- realisasi Rp. 287.730.360 atau 98,45 %.

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD

Maksud dan tujuan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD ini adalah:

Menyusun Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD, serta agenda peresmian hasil kegiatan fisik di kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul. Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD merupakan dokumen administrasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Bantul, yang berisikan target dan realisasi kegiatannya dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 49.080.000,- terealisasi sebesar Rp 48.530.000,- atau 98,88%.

b) Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi ini adalah Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Jasa Konstruksi guna memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baru khususnya tentang Jasa Konstruksi. Memberikan pembinaan yang menyangkut masalah jasa kontruksi khususnya dengan sudah berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga terwujudnya peningkatan sumber daya manusia penguna dan penyedia jasa kontruksi, terwujudnya kesepahaman antara pengguna jasa dan penyedia jasa kontruksi di Kabupaten Bantul khususnya dalam proses administrasi serah terima pekerjaan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 30.800.000,- terealisasi sebesar Rp 29.750.000,- atau 96,59 %.

c) Analisis Kebijakan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan Analisis Kebijakan Pembangunan ini adalahnMenganalisis kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang ada, dan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 145.881.000,- terealisasi sebesar Rp 143.430.400,- atau 98,32 %.

d) Pelaporan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan Pelaporan Pembangunan ini adalah Menyusun dokumen

perencanaan program/ kegiatan tahun berikutnya sampai kepada pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

e) Peningkatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Dan Keprotokolan

Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan dengan rencana anggaran Rp. 569.613.000,00,- dengan realisasi Rp.549.120.200,00. Program ini melaksanakan kegiatan lima kegiatan berupa :

f) Hari-hari besar Nasional dan Hari jadi.

Kegiatan Hari-hari besar dan Hari jadi dengan rencana anggaran Rp. 236.073.000,00 dan teralisir Rp. 549.120.200,00 kegiatan ini menghasilkan output/keluaran terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten sebanyak 9 kali, yaitu Hari otonomi Daerah, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Jadi Bantul, Hari Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Disamping kegiatan tersebut yang didukung oleh program ini adalah pelaksanaan open house Bupati dan Syawalan Gubernur di Kabupaten Bantul menghasilkan outcome berupa pelaksanaan upacara hari-hari besar dan hari jadi sebanyak dapat terlaksana dengan baik.

g) Penerimaan Kunjungan Kerja

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja didukung anggaran sebesar Rp. 59.350.000,00 terealisasi Rp. 59.350.000,00 kegiatan ini menghasilkan output/keluaran tersedianya buku selayang pandang sebanyak 100 buah, cinderamata 100 buah dan tas cinderamata sebanyak 100 buah dan

outcome adalah terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja sehingga diharapkan hasil yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul adalah citra atau nama baik Kabupaten Bantul yang semakin tersohor di Provinsi atau Kabupaten / kota lain karena beberapa prestasi Kabupaten Bantul bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten Bantul / Kota lainnya.

h) Pendampingan Ketugasan Bupati dan Wakil Bupati.

Kegiatan Pendampingan ketugasan Bupati dan Wakil Bupati ini di dukung dengana dana sebesar Rp. 84.240.000,00 dengan realisasi Rp. 73.375.000,00 kegiatan menghasilkan output / keluaran berupa tersedianya tenga kontrak 4 personil dan Alat Tulis Kantor, Cetak serta penggandaan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mendukung kelancaran ketugasan Bupati dan Wakil Bupati.

i) Pengelolaan Informasi Media Massa.

Kegiatan Informasi Media Massa didukung dengan anggaran Rp. 165.200.000,00 dengan realisasi Rp. 162.745.500,00 dan kegiatan ini menghasilkan output / keluaran ATK, Transportasi wartawan untuk peliputan dan jumpa pers, Cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makan dan minum, pakaian kaos / training untuk workshop wartawan dan narasumber untuk workshop. Untuk Publikasi terdiri memuat artikel kegiatan program pemkab. Bantul. Untuk tahun 2018 Bagian Humas dan protokolmelaksanakan jumpa pers dua kali yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya natal dan Tahun baru 2019.

j) Peningkatan Kemampuan keprotokolan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Keprotokolan didukung dana sebesar Rp. 24.750.000,00 dengan realisasi Rp. 24.177.500,00. Kegiatan ini menghasilka output/keluaran terlaksananaya sosialisasi peningkatan kapasitas keprotokolan dan di implementasikan dengan satu kegiatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang handal dalam bidang keprotokolan melalui sosialisasi peningkatan kapasitas keprotokolan. Sedangkan outcome kegiatan meningkatnya kemampuan personil mengenai keprotokolan.

11) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Maksud dan tujuan Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada program ini disediakan anggaran sebesar Rp1.158.910.000,- Adapun realisasi serapan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.008.926.750,- atau sebesar 87.05%.

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan kegatan antar lain:

a) Identifikasi dan pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa,

Maksud dan Tujuan kegiatan ini merupakan langkah pertama dalam rangkaian prosedur perencanaan umum pengadaan barang dan jasa sebelum diumumkannya Rencana Umum

Pengadaan (RUP) seluruh OPD Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa menggunakan anggaran sebesar Rp22.950.000,- terealisasi sebesar Rp22.945.000,,- atau sebesar 99.97%.

b) Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp72.820.000,- terealisasi sebesar Rp57.750.000,- atau 79,30%.

c) Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Maksud dan tujuan kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kelancaran proses pengadaan Barang dan Jasa secara *e-tendering*.

Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.063.140,000,- realisasi sebesar Rp928.231.75,- atau 87,31 %.

12) Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Dan Keprotokolan

Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan dengan rencana anggaran Rp. 569.613.000,00,- dengan realisasi Rp.549.120.200,00. Program ini melaksanakan kegiatan lima kegiatan berupa :

a) Hari-hari besar Nasional dan Hari jadi.

Kegiatan Hari-hari besar dan Hari jadi dengan rencana anggaran Rp. 236.073.000,00 dan teralisir Rp. 549.120.200,00 kegiatan ini menghasilkan output/keluaran terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten sebanyak 9 kali, yaitu Hari otonomi Daerah, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Jadi Bantul, Hari Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Disamping kegiatan tersebut yang didukung oleh program ini adalah pelaksanaan open house Bupati dan Syawalan Gubernur di Kabupaten Bantul menghasilkan outcome berupa pelaksanaan upacara hari-hari besar dan hari jadi sebanyak dapat terlaksana dengan baik.

b) Penerimaan Kunjungan Kerja

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja didukung anggaran sebesar Rp. 59.350.000,00 terealisasi Rp. 59.350.000,00 kegiatan ini menghasilkan output/keluaran tersedianya buku selayang pandang sebanyak 100 buah, cinderamata 100 buah dan tas cinderamata sebanyak 100 buah dan outcome adalah terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja sehingga diharapkan hasil yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul adalah citra atau nama baik Kabupaten Bantul yang semakin tersohor di Provinsi atau Kabupaten / kota lain karena beberapa prestasi Kabupaten Bantul bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten Bantul / Kota lainnya.

c) Pendampingan Ketugasan Bupati dan Wakil Bupati.

Kegiatan Pendampingan ketugasan Bupati dan Wakil Bupati ini di dukung dengana dana sebesar Rp. 84.240.000,00 dengan realisasi Rp. 73.375.000,00 kegiatan menghasilkan output / keluaran berupa tersedianya tenga kontrak 4 personil dan Alat Tulis Kantor, Cetak serta penggandaan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mendukung kelancaran ketugasan Bupati dan Wakil Bupati.

d) Pengelolaan Informasi Media Massa.

Kegiatan Informasi Media Massa didukung dengan anggaran Rp. 165.200.000,00 dengan realisasi Rp. 162.745.500,00 dan kegiatan ini menghasilkan output / keluaran ATK, Transportasi wartawan untuk peliputan dan jumpa pers, Cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makan dan minum, pakaian kaos / training untuk workshop wartawan dan narasumber untuk workshop. Untuk Publikasi terdiri memuat artikel kegiatan program pemkab. Bantul. Untuk tahun 2018 Bagian Humas dan protokolmelaksanakan jumpa pers dua kali yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya natal dan Tahun baru 2019.

e) Peningkatan Kemampuan keprotokolan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Keprotokolan didukung dana sebesar Rp. 24.750.000,00 dengan realisasi Rp. 24.177.500,00. Kegiatan ini menghasilka output/keluaran terlaksananaya sosialisasi peningkatan kapasitas

keprotokolan dan di implementasikan dengan satu kegiatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang handal dalam bidang keprotokolan melalui sosialisasi peningkatan kapasitas keprotokolan. Sedangkan outcome kegiatan meningkatnya kemampuan personil mengenai keprotokolan.

13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan pengadaan barang bercorak kesenian;

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana berupa barang-barang bercorak kesenian seperti lukisan atau foto atau hiasan dinding penghias/penambah hiasan ruangan pimpinan dan ruang pertemuan di lingkup Bagian Umum. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.975.000. atau 98,75.%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Pengadaan pigura-pigura gambar pahlawan, pigura penghargaan, dan pigura gambar presiden dan wakil presiden.

b) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas /rumah jabatan serta kantor perwakilan di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 12

(dua belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 603.615.000,00 terealisasi sebesar Rp 580.214.900,00 atau 96,12%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pembelian bendera berupa bendera logo, bendera merah putih,bendera kipas, bendera lisplang, tali bendera, dan umbul-umbul;
(2) Belanja bahan/bibit tanaman, berupa bibit tanaman untuk halaman kompleks Parasamya;
(3) Belanja modal pengadaan elektric generating set berupa exhaust knalpot dan soundattenuator;
(4) Belanja modal pengadaan pompa air;
(5) Belanja modal pengadaan alat kantor berupa pembelian tenda deklit, dan plafon tenda;
(6) Belanja modal pengadaan meubelair berupa 1 set sofa untuk kantor Perwakilan di Jakarta, kursi tumpuk, kursi lipat, meja rapat pimpinan,dan meja rapat staf;
(7) Belanja modal pengadaan alat pendingin berupa AC;
(8) Belanja modal pengadaan alat dapur berupa kitchen set sekpri bupati, cangkir, toples, dispenser, penanak nasi, dan blender;
(9) Belanja modal pengadaan alat rumah tangga *(home use)* berupa penyedot debu, kipas angin, jam dinding, televisi (kantor perwakilan, dan ruang Pol PP RD bupati), kasur, sprei dan Bedcover untuk RD Bupati, karpet mushola, taplak batik, gordyn Kantor Perwakilan di Jakarta;

(10) Belanja personal komputer berupa LCD dan perlengkapannya, Notebook, printer dan layar;

(11) Belanja pengadaan alat komunikasi sosial berupa 1 set perangkat sound system dan wireless;

(12) Pengadaan rambu tidak bersuar berupa papan nama petunjuk kantor, papan nama rambu, serta papan rambu Kompleks parasamya.

c) Kegiatan Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi keperluan bupati dan wakil bupati atas pakaian dinas dan perlengkapannya serta pakaian batik dan pakaian tradisional bagi Bupati dan wakil Bupati. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 158.163.500,00 terealisasi sebesar Rp 150.275.000,00 atau 95,01%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH yaitu pakaian dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati berupa pakaian sipil lengkap, pakaian harian sipil, pakaian harian lepas, PDH lengkap, dan pakaian kemeja biru; Belanja pakaian batik tradisional yaitu pakaian batik untuk Bupati dan Wakil Bupati.

d) Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah.untuk terpeliharanya rumah dinas dan gedung kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub

kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.410.401.400,00. terealisasi sebesar Rp 1.266.323.209,00 atau 89,78 %.

e) **Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah.terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional bagi kelancaran kegiatan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 993.083.995,00 terealisasi sebesar Rp 819.089.296,00 atau 82,48 %.

g) **Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah.untuk terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 311.375.000,00. terealisasi sebesar Rp 261.660.300,00 atau 84,03 %.

14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) **Kegiatan peningkatan kemampuan SDM pelayanan administrasi umum ;**

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan

kemampuan sumberdaya pengelola keuangan, barang dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 74.789.500,00 terealisasi sebesar Rp 74.789.500,00. atau 100.%.

b) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tercapainya penyusunan pelaporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan di Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 14.534.500,00 terealisasi sebesar Rp 12.779.550,00 atau 87,93%

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan :

Tabel 3. 119 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Fungsi Penunjang

No	Permasalahan	Solusi
1	Cakupan wilayah yang telah terdata dan terbakukan nama unsur rupabumi masih sedikit dkarenakan keterbatasan jumlah personil dan anggaran	Dilaksanakan bimtek dengan menyasar desa dan kecamatan agar kedepan kegiatan pendataan dan pembakuan rupabumi dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif desa maupun

No	Permasalahan	Solusi
		kecamatan dalam hal penganggaran kegiatan dan pelaksanaan teknis.
2	Masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi terkait dengan aplikasi SAKTI	Koordinasi dengan admin aplikasi SAKTI BIG
3	Sulitnya menyamakan jadwal kegiatan pimpinan daerah sehingga terkadang ada tidak dapat menghadiri koordinasi pimpinan secara langsung	1. Dibentuk tim sekretariat yang akan mempersiapkan rencana materi kegiatan dan penyusunan jadwal 2. Dibuat SOP pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan daerah
4	Belum semua pilar perapatan batas yang telah terpasang sudah diukur secara geodetik dikarenakan keterbatasan anggaran	1. Koordinasi atau kerjasama dengan OPD terkait seperti Dispertaru yang juga membutuhkan adanya batas administratif Kabupaten Bantul 2. Mengakses sumber anggaran lainnya yang memungkinkan seperti Dana Keistimewaan
5	Belum adanya inovasi dalam rangka percepatan penyaluran KUR khususnya bidang pertanian	Semua perbankan diharapkan memberi fasilitas pembayaran pasca panen
6	Masih lambatnya proses pengenolan kredit pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Diharapkan semua bank memberikan kemudahan penerbitan surat keterangan lunas kredit
7	Penyusunan Laporan Berkala kondisi Ketahanan Pangan Daerah masih sulit untuk menentukan format baku yang dapat mengakomodir data OPD terkait.	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
8	Laporan Triwulan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) belum bisa disampaikan ke OJK	Proses pembuatan sistem laporan TPAKD secara online oleh pemerintah pusat
9	Turunya Regulasi tentang tatacara izin pemberian TPP bagi Pemda pada bulan Oktober sehingga rencana Penyusunan	Menyusun regulasi dan sistem pemberian TPP sesuai dengan Kepmendagri yang keluar dan tetap

No	Permasalahan	Solusi
	Regulasi Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah (TPP) menjadi terlambat karena drat regulasi dengan sistem yang lama telah tersusun sejak September.	menyusun regulasi dengan sistem pemberian yang sudah berjalan sembari menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri.
10	Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2019 dalam penyusunannya kurang maksimal.	Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB.
11	Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus Segera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nonor 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Sekretariat Daerah. Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan.	Tetap menyusun regulasi tentang kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi.
12	Regulasi dari pusat belum ditindak lanjuti dengan turunan regulasi daerah (pergub), sehingga analisa kebijakan terkendala dalam pelaksanaannya terutama untuk bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Perencanaan	Menggunakan regulasi yang ada dengan tetap berkomunikasi dengan provinsi. Tetapi terlebih dahulu dilakukan FGD untuk menjaring materi dan pertimbangan lainnya dari Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Bantul.
13	Target waktu realisasi kegiatan yang tidak tepat sesuai target anggaran kas	Perencanaan dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan

No	Permasalahan	Solusi
		kemungkinan yang ada, SDM yang dimiliki, dan waktu yang dibutuhkan
14	Kemampuan dan pengetahuan keprotokolan belum sepenuhnya dikuasai personil.	Peningkatan kemampuan keprotokolan
15	Publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum terlaksana dengan optimal.	Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan dinas kominfo untuk publikasi yang komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang capaian pembangunan di Kabupaten Bantul melalui media – media yang sudah ada melalui kegiatan pengelolaan informasi media masa
16	Rasio jumlah paket pekerjaan dengan personel pokja pengadaan	Pembuatan jadwal periodesasi bulanan pengadan B/J
17	Proses pengadaan langsung belum menggunakan aplikasi e-pengadaan langsung	Asistensi dan bimteks e-pengadaan langsung ke OPD
18	Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan	Konsultasi dengan LKPP Jakarta
19	Kompleksitas regulasi pengadaan B/J belum sepenuhnya dipahami	Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan jasa dan konsultasi, kajian bersama dan
20	Kemampuan dan pengetahuan keprotokolan belum sepenuhnya dikuasai personil.	Peningkatan kemampuan keprotokolan
21	Publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum terlaksana dengan optimal.	Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan dinas kominfo untuk publikasi yang komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang capaian pembangunan di Kabupaten Bantul melalui media – media yang sudah ada

No	Permasalahan	Solusi
		melalui kegiatan pengelolaan informasi media masa

D. TINDAK LANJUT CATATAN STRATEGIS DPRD TAHUN 2018

Tabel 3.120 Tindak Lanjut Catatan Strategis DPRD Tahun 2018

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
1	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu	Program perencanaan pembangunan daerah	1. Perencanaan penganggaran, 2. Perencanaan pembangunan sektoral,Perencanaan pembangunan kewilayahan 3. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1.Perencanaan penganggaran, **2.** Perencanaan pembangunan sektoral,Perencanaan pembangunan kewilayahan **3.** Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah	
		Bappeda	Konsep **Makaryo Mbangun Deso** perlu diaplikasi dalam program dan kegiatan sehingga arah kegiatan akan lebih jelas terkait konsep tersebut	Program perencanaan pembangunan daerah	1. Perencanaan penganggaran, 2. Perencanaan pembangunan kewilayahan	1. Perencanaan penganggaran, 2. Perencanaan pembangunan kewilayahan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
		DPTR	Perlunya Penataan Wajah Kota Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya JJLS dan rencana pembangunan Bandara NYIA	Program Perencanaan Tata Ruang	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL (RDTR Pansela)	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL (RDTR Perkotaan, perdesaan dan Pansela)	
		DPTR	Pengendalian dan pengawasan tentang penggunaan lahan (Tata Ruang) yang dipergunakan untuk perumahan dsb	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	
					Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
2	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	DISDIKPORA	Perlu peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan agar lebih representatif khususnya bagi sekolah dasar yang saat ini kondisinya memprihatinkan akibat dari bencana alam. Seperti yang terjadi di SD	Program Wajar 9 Tahun	Kegiatan pembangunan rehab sarana dan prasarana bagunan pendidikan SD		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			Sukorame dan SD Banjarharjo Seropan.				
			Perlunya pendataan secara rinci kondisi dan potensi sarana dan prasarana khusus gedung untuk memperjelas perencanaan pembangunan ke depan.	Program Wajar 9 Tahun	Kegiatan pembangunan rehab sarana dan prasarana bagunan pendidikan SD/SMP		
			Pendidik dan tenaga kependidikan (GTT / PTT) agar memperoleh perhatian dan kesejahteraan yang lebih layak secara periodik ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependididkan	Kegiatan peningkatan kapasitas PTK	Kegiatan peningkatan kapasitas PTK	
			Mengingat beban kerja kepala sekolah dasar diperlukan tenaga				

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			administrasi dalam pengelolaan dana BOSDA.				
			Kurangnya tenaga pendidik khususnya untuk guru sekolah dasar agar ada solusi, yakni pengangkatan guru honorer.				
			Perlunya pembinaan moral dan etika generasi muda untuk mencegah kenakalan remaja, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.	Peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan peran serta pemuda	
		DISDIKPORA, DPPKBPMD	Pemerintah daerah harus memberikan ruang terhadap peran generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di segala bidang,	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (edukasi/ penyuluhan kepada tokoh masyarakat/	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (edukasi/ penyuluhan kepada tokoh masyarakat/	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			berupa bimbingan konseling untuk remaja.		pejabat tingkat desa tentang kesehatan reproduksi)	pejabat tingkat desa tentang kesehatan reproduksi)	
3	Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	DPPKBPMD	Tingginya angka pernikahan dini, kematian ibu dan anak, perceraian, dan kasus bunuh diri serta sejumlah tindak amoral lainnya, maka perlu meningkatkan program bina keluarga sejahtera dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pembinaan keluarga, moral, dan agama dengan meningkatkan ketrampilan kader kesehatan di kampung-kampung.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja (penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi)	KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja (penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi)	
					Lomba Forum PIK Remaja (lomba evaluasi kelompok PIK-R (Pusat informasi konseling remaja) dalam bentuk presentasi kelompok)		
				Program Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (orientasi program Kependudukan		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk tokoh masyarakat / agama/ pemangku kepantingan & evaluasi kinerja PPKB (Petugas pelayanan KB))		
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (pelatihan kepada kader BKB BKL BKR)		
					Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA (lomba kelompok BKB, BKL, BKR, UPPKS (Usaha Peningkatan		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Pendapatan Keluarga Sejahtera), orang tua hebat dalam bentuk presentasi)		
					Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) (pelatihan kepada BKB tentang ADITUKA(Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak))		
					Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya (monitoring dan sharing dengan forum pos daya)		
		DPPKBPMD	Perlunya regulasi tentang Ketahanan Keluarga sebagai upaya untuk	Program Penyiapan Tenaga Pendamping	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir bagi Kelompok		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			pemberdayaan masyarakat.	Kelompok Bina Keluarga	Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I (monitoring kelompok penerima pinjaman dan bergulir & orientasi / pelatihan untuk kelompok PEKM (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin) dan KUPK (Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan))		
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS (pelatihan untuk kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan	Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS (pelatihan untuk kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Pendapatan Keluarga Sejahtera))	Pendapatan Keluarga Sejahtera))	
4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPUPKP	Perlunya program Percepatan Penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana dan merupakan catatan pada tahun 2017.	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
					Kegiatan Peningkatan Jalan	Kegiatan Peningkatan Jalan	
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
				Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
				Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan	
				Program pengendalian banjir	Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	
		DPUPKP	Perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap sektor kegiatan pembangunan perlu menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasinya.	Semua kegiatan fisik sudah dilakukan beserta dengan perencanaan dan pengawasan teknis untuk menjaga kualitas	Masuk dalam kegiatan Bidang		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
				sesuai dengan spesifikasinya			
		DPUPKP	Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif disertai dengan anggaran yang memadai dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaaan jalan dan jembatan	
5	Kebijakan Umum dan Pengelol	BKAD	Perlunya optimalisasi potensi dan menggali sumber potensi pendapatan sebagai upaya	Program Peningkatan dan Pengembangan	Optimalisasi pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	
					Pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
	aan Kaeuangan an Daerah		untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Pendataan dan penetapan wajib pajak	
					Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	
					Regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah		
					Pemeliharaan basis data PBB P2	Pemeliharaan basis data PBB P2	
					Oprasional pajak daerah	Oprasional pajak daerah	
					Intensifikasi PPH OP (PPH Pasal 21)	Intensifikasi PPH OP (PPH Pasal 21)	
					Pengendalian PAD	Pengendalian PAD	
					Verifikasi piutang pajak daerah	Verifikasi piutang pajak daerah	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Intensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah	Intensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah	
					Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	
		BKAD	Menindaklanjuti hasil sensus aset/barang yang tercatat sebagai kekayaan daerah. Pengelolaan aset tersebut agar tertata dikelola secara sistematik.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
6	Kesehatan	DINKES, RSUD	Perlunya meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit maupun puskesmas. Dan berharap untuk dilakukan pengkajian untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul dalam bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan				Proses Raperda Pendampingan Pembiayaan Kesehatan

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			gratis di puskesmas bagi penduduk Kabupaten Bantul.				
			Memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Bantul, baik melalui sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun sarana pelayanan kesehatan yang dikelola masyarakat	Jamkes Penduduk miskin, rentan miskin dan kegawatdaruratan	Penjaminan melalui PBI APBD Kab. Bantul (Premi BPJS) dan Pembayaran Klaim	Penjaminan melalui PBI APBD Kab. Bantul (Premi BPJS) dan Pembayaran Klaim	
			Untuk mencegah berkembangnya penyakit, perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat	Promosi kesehatan	penyebarluasan media promosi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi misalnya lewat siaran radio, leaflet, poster, pameran Bantul ekspo, Baliho, Iklan layanan	penyebarluasan media promosi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi misalnya lewat siaran radio, leaflet, poster, pameran Bantul ekspo, Baliho, Iklan layanan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					masyarakat, video informasi kesehatan	masyarakat, video informasi kesehatan	
				Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui : kegiatan pendampingan dan evaluasi (akselerasi sekolah)	kegiatan pendampingan dan evaluasi (akselerasi sekolah sehat	
					Evaluasi kader kesehatan remaja dan pondok pesantren	Evaluasi kader kesehatan remaja dan pondok pesantren	
					pelatihan Saka Bhakti Husada	Pelatihan Saka Bhakti Husada	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Pelatihan Batra dan toga	pelatihan Batra dan toga	
					Evaluasi dusun bebas 4 masalah kesehatan	untuk evaluasi dusun bebas 4 masalah kesehatan di tahun 2020 tidak diusulkan sehubungan adanya rasionalisasi anggaran dan anggaran supaya di usulkan melalui dana desa,	
						Tambahan kegiatan yang di usulkan di tahun 2020 yaitu KAP (Komunikasi antar pribadi) untuk petugas puskesmas dan Kader	
		DINKES, DLH	Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit, Puskesmas	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembangunan IPAL Puskesmas 3 Unit	Pembangunan IPAL Puskesmas 8 Unit	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			dan klinik kesehatan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan		Pembangunan IPAL Rumah Sakit 1 Unit		
					Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas		
					Monitoring dan Evaluasi Tempat-tempat Umum	Monitoring dan Evaluasi Tempat-tempat Umum	
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melakukan penyuluhan/sosialisasi/pendampingan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan dalam pengelolaan limbah medis serta pengadaan unit percontohan pengelolaan limbah B3 puskesmas	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah sakit, puskesmas serta klinik kesehatan	
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melakukan pendampingan penyusunan dokumen lingkungan	
						Melakukan kerjasama dengan seluruh steakholder dalam pengelolaan lingkungan	
		DINKES	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau, maka perlu segera dan tidak menunda-	Penyiapan operasional RS kelas D Bambanglipuro	Belanja Modal alat kesehatan sebesar 1.641.000.000 pada anggaran perubahan 2019	Pembelian lahan pengembangan RS sebesar Rp.2.500.000.000,- dan Operasional sebesar Rp.3.750.000.000,-	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			nunda mewujudkan rumah sakit tipe D				
7	Lingkungan Hidup	DLH, DPTR	Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian yang serius.	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (review RTRW)	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (lanjutan)	
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Melakukan penanaman bibit tanaman untuk lahan bekas pertambangan	
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Melakukan Penanaman Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	
						Melakukan Penanaman Bibit Lahan Kritis	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Melakukan Penanaman Bibit Tanaman Sepadan Sungai	
						Melakukan Penanaman Bibit Tanaman Sepadan Mata Sungai/Mata Air	
						Melakukan Penanaman Bbit Mangrove	
					Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Melakukan penanaman bibit tanaman konservasi	
						Melakukan pembangunan RTH/Taman	
						Melakukan kerjasama dengan seluruh steakholder dalam pengelolaan lingkungan	
		DLH					

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Memberikan peralatan pengelolaan persampahan untuk masyarakat	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan sosiaisasi/pendampingan kelompok pengelola sampah, sekolah Adwiyata, pondok pesantren, saka kalpataru, kampung iklim	
						Melakukan bimbingan teknis tata cara pembuatan pupuk limbah rumah tangga, daur ulang sampah	
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melakukan sosialisasi/pendampingan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
				Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Melakukan monitoring kegiatan/usaha dalam pengelolaan lingkungan	
						Melakukan sosialisasi tata cara penyelesaian aduan terkait permasalahan lingkungan	
					Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Melakukan monitoring kegiatan/usaha dalam pengelolaan limbah usaha	
						Melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan hidup	
						Melakukan kerjasama dengan seluruh steakholder dalam pengelolaan lingkungan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
		DLH	Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan sosiaisasi/pendampingan kelompok pengelola sampah, sekolah Adwiyata, pondok pesantren, saka kalpataru, kampung iklim	
						Melakukan sosialisasi komitmen mewujudkan lingkungan Bantul yang bersih menuju Bantul Bersih Sampah	
						Melakukan bersih sungai/merti kali melibatkan komunitas sungai, saka kalpataru serta seluruh masyarakat	
					Evaluasi Adipura	Melakukan lomba kebersihan lingkungan	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
						tingkat kecamatan dan desa	
						Melakukan kerjasama dengan seluruh steakholder dalam pengelolaan lingkungan	
8	Perekonomian, Penanaman Modal, Perizinan, Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan	Bag. Perekonomian	Untuk efisiensi dan efektifitas anggaran perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap sejumlah BUMD.	Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kebijkan Lembaga Ekonomi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kebijkan Lembaga Ekonomi Daerah	
		DPMPT	Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul diharapkan dapat terpantau secara on line.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Peningkatan pelayanan perijinan secara online dan mewujudkan “center public	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan system informasi terhadap layanan publik	Penyusunan system informasi terhadap layanan publik	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			mall" bagi kepentingan pelayanan publik.	Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Pengelolaan Perijinan *Online*	Pengelolaan Perijinan Online	
		DISDAG	Keunggulan dan pemberdayaan pasar-pasar tradisional dan pasar desa perlu dipertahankan sebagai upaya melindungi keberadaan pedagang kecil dan perekonomian masyarakat.	Penataan Pasar Rakyat	Rehabilitasi pasar rakyat sebanyak 18 pasar dari anggaran APBD	Rehabilitasi pasar untuk 5 pasar	
					Revitalisasi pasar sebanyak 2 unit dari anggaran DAK	Reviltalisasi pasar Turi	
					Mempertahankan sertifikat SNI Pasar Rakyat dengan lokus Pasar Imogiri	Masih untuk mempertahankan SNI Pasar Rakyat	
				Pemberdayaan Pedagang	Pendampingan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), pelatihan bagi pedagang, promosi pasar berupa	Pendampingan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), pelatihan bagi pedagang, promosi pasar berupa Wisata	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					grebeg pasar yang bertujuan untuk meningkatkan pengunjung pasar, kerja bakti pasar secara rutin untuk menjaga kebersihan pasar	Edukasi Pasar dengan mengundang anak2 SD untuk berbelanja ke pasar	
9	Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL	Perlunya percepatan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam administrasi kependudukan baik dengan mobil keliling maupun ***MPP (mall pelayanan publik***).	Keserasian Kebijakan Kependudukan	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Bekerja sama dengan Petugas Register Desa se-Kabupaten Bantul	
					Sinkronisasi Kebijakan	Bekerja sama dengan Petugas KUA	
				Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Melakukan Jemput Bola bekerjasama dengan sekolah	
					Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			Peningkatan pelayanan dan penyelesaian permohonan administrasi kependudukan agar memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keakuratan.	Pengolahan Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyelesian Pengaduan Masyarakat	Penanganan pengaduan melalui media sosial dan secara langsung	
				Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	
					Pelayanan Mutasi Penduduk	Pelayanan Mutasi Penduduk	
			Untuk melakukan sosialiasi agar dilakukan koordinasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil.	Pengolahan Data Kependudukan	Publikasi Kebijakan Kependudukan	Publikasi Kebijakan Kependudukan	
10	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	DISNAKERTRANS	Perlunya pemerintah daerah untuk ikut serta menyiapkan masyarakat yang siap kerja pada perusahaan yang ada diutamakan bagi masyarakat Bantul.	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Menjahit	Pelatihan Menjahit	
					Pelatihan Mekanik	Pelatihan Mekanik	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
					Pelatihan Teknisi	Pelatihan Teknisi	
					Pelaltihan Meubelair	Pelaltihan Meubelair	
					Pelatihan Juru Las	Pelatihan Juru Las	
					Pelatihan Software	Pelatihan Software	
					Pelatihan Tata Boga	Pelatihan Tata Boga	
					Pelatihan Batik Tulis	Pelatihan Batik Tulis	
					Pelatihan Bahasa Inggris	Pelatihan Bahasa Inggris	
			Perlunya meningkatkan skill tenaga kerja sehingga akan memberikan nilai lebih bagi tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Bantul.	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	
					Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan	
			Perlunya pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan program-program teknologi tepat guna,	Program Perluasan Kerja	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	
					Pemanduan dan Pembinaan usaha	Pemanduan dan Pembinaan usaha	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			tenaga kerja mandiri, dan wira usaha baru.		tenaga kerja terdidik dan mandiri	tenaga kerja terdidik dan mandiri	
				Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	
			Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari.	Transmigrasi Umum	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	
11	Pertanian dan Ketahan	DPPKP	Adanya pembatasan alih fungsi lahan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.	Peningkatan sarana dan prasarana Pertanian		Peningkatan Prasarana Pertanian	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
	an Pangan	DPTR	Sebagai upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan perlu adanya regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (review RTRW)	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (lanjutan)	
		DPPKP, DPUPKP	Normalisasi dan pemeliharaan saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian agar mendapatkan perhatian khususnya daerah-daerah yang kesulitan air.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
		DPPKP	Turunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Perlu solusi untuk mengatasi persoalan ini.	Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	
		DPPKP	Meningkatkan diversifikasi pangan dan pangan lokal	Peningkatan ketahanan	Peningkatan penganekaragaman	Peningkatan penganekaragaman	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			dalam mewujudkan kedaulatan pangan.	pangan, pertanian/ perkebunan	konsumsi dan keanekaragaman pangan	konsumsi dan keanekaragaman pangan	
12	Perhubungan	DISHUB	Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan mengoptimalkan sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Tindak Lanjut
					Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Tindak Lanjut
			Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran	Program pengendaliaan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Tindak Lanjut

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			yang memadai untuk pemeliharaannya.				
			Kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bantul yang berdampak kemacetan perlu dilakukan pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait.	Pengembangan Kelalu - lintasan	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Tindak Lanjut
			Pelaksanaan pengelolaan parkir khususnya perlu dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan warga masyarakat sehingga dapat berjalan tertib, lancar, dan tidak		Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Tindak Lanjut

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			mengganggu kepentingan pengguna jalan.				
13	Pemerintahan dan Kepegawaian	Bag.Organisasi	Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan jauh dari intervensi berbagai pihak yang tidak berkepentingan.	Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah	Penyusunan dan evaluasi analisis jabatan organisasi perangkat daerah	Penyusunan dan evaluasi analisis jabatan organisasi perangkat daerah	
			Formasi dan ketersediaan ASN belum dapat terselesaikan, berkenaan dengan data pensiun, maka perlu adanya solusi yang tepat dan efisien.	Program Peningkata Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN.	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN.	
					Pendidikan dan pelatihan PNS.	Pendidikan dan pelatihan PNS.	
				Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.	
					Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional.	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional.	
					Pengelolaan Mutasoi Jabatan Administrasi dan JPT.	Pengelolaan Mutasoi Jabatan Administrasi dan JPT.	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			Perlunya penguatan kelembagaan DPRD melalui dukungan untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.	
					Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional.	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional.	
					Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT.	Pengelolaan Mutasoi Jabatan Administrasi dan JPT.	
14	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Perlunya Program berkelanjutan dalam penertiban danpenegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan Peran Serta Masyarakat	Program Penegakan Perda	Operasi Penegakan Perda	Operasi Penegakan Perda	
					Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	
					Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan	Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
				Pencegahan Tindak Kriminal			
				Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
					Pemberdayaan Linmas	Pemberdayaan Linmas	
15	Sosial dan Budaya	KESBANGPOLINMAS	Pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat Kabupaten Bantul agar terus mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai.	Kemitraan pengembangan wawsan kebangsaan	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Diusulkan tahun 2020	
		DISPAR	Dalam rangka untuk peningkatan PAD Kabupaten Bantul, maka perlu program pengembangan budaya	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Peningkatan Daya Tarik Wisata	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			dalam rangka menarik perhatian wisatawan diperlukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Pariwisata.				
		DISBUD	Untuk pembinaan, harmonisasi dan regenerasi pelaku budaya perlu dilakukan untuk meningkatkan dan melestarikan budaya daerah.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Lembaga Penggiat Seni : Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film	Diusulkan	
				Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Seminar dalam rangka Reaktualisasi Budaya Lokal (Pawiyatan Pranatacara Bahasa Jawa di Kec Pandak dan Pajangan)		

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Program Pengelolaan Wariasan Budaya Tak Benda: Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Kompetisi Kesejarahan bagi siswa)	
						Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda Pembinaan, pengembangan Bahasa dan sastra (Kompetisi Kebahasaan bagi siswa, Pelatihan Bahasa & Sastra Jawa, dan Sastrawan Masuk Sekolah)	
						Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda : Pengembangan dan Implementasi Nilai-	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Nilai Luhur dalam Masyarakat (Festival dan Pengiriman Dalang Anak dan Remaja)	
						Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda : Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman (LCC Museum bagi Siswa dan Wajib Kunjung Museum)	
16	Pariwisata	DISPAR	Sektor Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengembangan dan penataan sarana prasarana pada obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Antara	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan Daerah tujuan wisata	Untuk 2020 terdapat perbedaan lokasi	

NO	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2019		Diusulkan Tahun 2020	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			lain obyek wisata kawasan pantai selatan dengan dibukanya JJLS yang berpengaruh terhadap keberadaan obyek wisata pantai selatan.				
		BAPPEDA, DISPAR, DPUPKP	Untuk menyambut dibukanya NYIA (*New Yogyakarta International Airport*) sebagai bandar udara yang baru perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana wisata sebagai pendukung pariwisata di kawasan Pantai Selatan dan pengembangan destinasi wisata.	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan Daerah tujuan wisata		

E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2017, isu-isu strategis pembangunan 2019, prioritas pembangunan Nasional dan DIY serta Tema Pembangunan Kabupaten Bantul 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan
3. Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin
4. Pemantapan Reformasi Birokrasi
5. Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah melalui pengembangan pariwisata dan industri kreatif
6. Pemantapan Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Percepatan Pembangunan InfrastrukturStrategis
9. Penanggulangan Bencana
10. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
11. Pengembangan Budaya Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Untuk mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul 2019 dirumuskan dalam ***Quick Win*** sebagai berikut:

1. Peningkatan prestasi akademik dan SDM yang berkarakter dan berbudaya

   Target pembangunan Kabupaten Bantul pada sektor pendidikan adalah cerdas. Salah satu ukuran kecerdasan dalam pendidikan adalah capaian prestasi akademik. Posisi Kabupaten Bantul dalam peringkat SD dan SMP dalam lingkup DIY belum optimal yakni pada posisi IV pada tingkat SD dan SMP pada posisi III. Pada tahun 2019 ditargetkan posisi prestasi akademik pada level SD di peringkat II dan SMP pada peringkat III melalui program

peningkatan prestasi akademik. Selain aspek kecerdasan, peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada pengembangan karakter dan budaya siswa melalui peningkatan bahan ajar berbasis muatan lokal.

2. Pelayanan kesehatan berbasis digital

Kesehatan menjadi salah satu target sasaran pembangunan daerah, yaitu sehat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 salah satunya dilakukan melalui pengembangan dan penguatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan (pelayanan berbasis digital) dengan sasaran pada pelayanan tingkat puskesmas dan RSUD, sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat.

3. Bantul *Universal* Akses 2019

Bantul *Universal* Akses 2019 dimaksudkan pada akses air minum, permukiman, dan sanitasi. Konsep ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu, ada segitiga kunci dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya irisan dari pemenuhannya kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Sustainable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai dengan berbagai program. Salah satu program yang digagas pemerintah khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal sebagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Dalam rangka percepatan pencapaian target tersebut perlu dilakukan berbagai inovasi program/kegiatan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Bantul Universal Akses 2019 menunjukkan target pemerintah daerah untuk mencapai terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan PAS dan optimalisasi zakat

Guna lebih mendorong penurunan pada angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 difokuskan program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui PAS dan optimalisasi zakat. Produk Andalan Setempat (PAS) merupakan salah satu program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan potensi produk-produk andalan yang dimiliki masyarakat khususnya masyarakat misikin agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi sehingga diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pengoptimalan zakat merupakan salah satu kebijakan dilakukan untuk menempatkan masyarakat miskin dan penganggur menjadi sasran utama dari implementasi dan pemanfaatan zakat.

5. Bantul Smart City (Bantul *Command Center* dan Kampung Digital)

Bantul Smart City merupakan salah satu program dalam rangka mendukung implementasi E-Government di Kabupaten Bantul. Konsep Bantul Smart City menempatkan keutamaan pelayanan publik yang berbasis elektronik untuk memperkuat transparansi, kemudahan dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan Bantul *Command Centre* dan peningkatan jumlah Kampung Digital.

6. Reformasi pelayanan publik (*one stop service*, Akuntabilitas Desa, dan SIM SEPAKAT).

   Peningkatan reformasi birokrasi pada semua lini perangkat daerah dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, penguatan akuntabilitas desa dan penerapan aplikasi terintegrasi dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja pada penyelenggaraan pemerintah.

7. Pengembangan obyek wisata dan penguatan industri kreatif

   Sektor industri dan pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian daerah. Pada sektor pariwisata diarahkan pada diversifikasi obyek wisata dan penambahan obyek wisata baru untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sedangkan pada sektor industri diarahkan pada menciptakan wirausahawan baru dengan fokus pada pengembangan industri kreatif.

8. Keragaman pangan, optimalisasi lahan pekarangan, dan pemantapan LP2B

   Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi atau beras dalam pola konsumsi masyarakat. Selain itu dengan ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang perlu dilakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lahan pekarangan dalam pengembangan pertanian khususnya hortikultura,

9. Kawasan Pariwisata, Heritage, dan Kawasan Industri Piyungan

   Kawasan strategis pada sektor pariwisata, industri dan kebudayaan perlu dikembangkan. kawasan pariwisata yang didorong untuk lebih berkembang adalah Kawasan Pansela dan Kawasan Songgo Langit. Sedangkan pengembangan heritage sebagai salah satu warisan budaya lebih dioptimalkan melalui

Pengembangan Kawasan Heritage yang mengacu pada Perdais DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Pantai Samas-Parangtritis dan Kawasan Kerto-Pleret. Pengembangan kawasan industri dilaksanakan melalui pengembangan investasi daerah. Optimalisasi Kawasan Industri Piyungan diarahkan pada pengembangan dan pemenuhan infrastruktur kawasan sehingga dapat meningkatkan potensi investasi di Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD tersebut merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program merupakan rencana program yang diselenggarakan oleh PD, yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak satu DIPA pada tahun 2019 sebagaimana disampaikan di bawah ini.

A. TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA YANG DITERIMA

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi tiga program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura dengan total anggaran sebesar Rp. 1.006.700.000,00; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**,** dengan total anggaran sebesar Rp.77.984.000,00; dan

Program Program Bina Pembangunan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura meliputi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan Kegiatan pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. AnggaranTugas pembantuan ini berasal dari Kementrian Pertanian pada Ditjen Holtikultura dan Ditjen Tanaman Pangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 bahwa untuk tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah disajikan dengan format yang meliputi: (1) dasar hukum, (2) instansi pemberi tugas pembantuan, (3) satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan, (4) program dan kegiatan yang diterima, (5) sumber dan jumlah anggaran, dan (6) permasalahan dan solusi. Mulai tahun 2019, Satuan Kerja Tugas Pembantuan berada di tingkat provinsi, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan.

Tabel 4. 1 Program Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Satker	Kementerian/ Lembaga Pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta	Kementrian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	77.984.000	77.984,000	100
					Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 2. [Base Line] 3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 4. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat 5. [Base Line]			
2	Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta	Kementrian Pertanian Ditjen Hortikultura	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah 2. Kawasan Aneka Cabai 3. Fasilitasi alsintan dan sarana prasarana pascapanen cabai dan bawang merah	1.006.700.000,00	984.735.400	97,8
3	Dinas Pertanian Pangan Kelautan	Kementrian Dalam Negeri	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan	Program Bina Pembangunan Daerah	Layanan Penerapan Model Pengelolaan	1. Implementasi Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat	1.000.000.000	628.800.800	62

No.	Satker	Kementerian/ Lembaga Pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	dan Perikanan Kabupaten Bantul		Perikanan Kabupaten Bantul		Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah (Base Line)				

Sumber: DPPKP, 2019

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan dan urusan bersama yang diterima Kabupaten Bantul dalam tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.121 Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pada aspek perencanaan, belum semua kementerian/ lembaga menyampaikan informasi awal pagu indikatif Tugas Pembantuan.	- Proaktif dengan melakukan konsultasi ke Eselon I Kementerian/Lembaga - Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya.

Sumber: DPPKP, 2019

B. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

1. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebesar. Rp 4.441.000.000,-. (BKK) dan Rp 260.000.000,-(Bankeudes) dengan penjelasan pelaksanaan sebagai berikut:

2. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten (BKK)

Bantuan Keuangan padat karya infrastruktur di Kabupaten Bantul sebesar Rp 3.354.000.000 digunakan untuk pembangunan talud dan cor blok jalan yang meliputi 26 lokasi dengan 17 desa yaitu desa Bangunjiwo, Gilangharjo, Caturharjo, Jatimulyo, Temuwuh, Selopamioro, Wukirsari, Pleret, Mulyodadi, Sumber Mulyo, Sido Mulyo, Kretek, Donotirto, Seloharjo, Srihardono, Srimulyo, dan desa Sabdodadi.

Target per lokasi 52 orang dengan melibatkan warga miskin yang berasal dari basis data terpadu(BDT 390 orang dari 1035 orang), realisasi hingga saat ini sudah 100% baik fisik dan keuangan.

3. **Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Fakir Miskin (Dinas Sosial P3A)**

   Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Fakir Miskin dan = PKH Graduasi dengan pagu sebesar Rp 495.000.000,- (165 KPM x Rp 3.000.000,-) yang meliputi Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pajangan dan Srandakan (tiga kecamatan awal arahan dari Propinsi). Adapun dari 165 KPM :

   - 165 KPM sudah terverifikasi masuk BDT, PKH Graduasi, sudah disesuaikan dengan juklak juknis yang tahun 2018
   - Progress 165 sudah diusulkan ke propinsi melalui SK Kepala Dinas, rekruitmen pendamping Graduasi dari pendamping PKH sudah (1 pendamping 15 KPM), bimtek pendamping, tgl 15, 16, 18 April 2019 bimtek untuk calon penerima dan penunjukan pendampingan.
   - Dicairkan 7 Oktober 2019 secara simbolis oleh Bupati Bantul dan diikuti oleh pemcairan semua penerima. Dari 165 PKM sesuai SK cair sebanyak 163 PKM dikarenakan yang 2 mengundurkan diri atas permintaan ya g bersangkutan.

4. **Jambanisasi (Dinas Kesehatan)**

   Pembangunan Jamban dengan pagu sebesar Rp 189.000.000,- dengan nilai kontrak 183,600,000,- sudah terlealisasi sebesar 100% dari nilai kontrak. Untuk capaian fisik 100% dari 27 penerima bantuan.

   Dari 35 peserta yang tidak tercover di 2018 (Kecamatan Dlingo) belum bisa tercover di 2019 karena beda wilayah (saat ini jatahnya di Kecamatan Imogiri). Rencananya yang 35 itu akan di usulkan semua di tahun 2020 (jatah lokasI 2020 di Kecamatan Dlingo, Sedayu, dan Pandak).

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan sebuah wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Bantul menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 serta sebagai acuan strategi pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas capaian yang diperoleh di Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan indikator kinerja pada setiap urusan pemerintahan yang direncanakan. Indikator kinerja tersebut ditetapkan di dalam RPJMD untuk setiap tahun selama lima tahun. Disebabkan LKPJ juga merupakan evaluasi terhadap RPJMD yang ada, maka capaian indikator kinerja bisa dikatakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah. Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 tidak lepas dari dukungan DPRD, Jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk Pemerintah Desa, seluruh Stakeholder pembangunan, dan seluruh rakyat Kabupaten Bantul yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan jalannya Pemerintahan hingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Akhir Tahun Anggaran 2019 tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu

kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran, kritik dan rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Bantul, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Aamiin YRA.